



RPJMD

KOTA SUBULUSSALAM

Tahun 2025 2029



M. RASYID

WALIKOTA SUBULUSSALAM
PERIODE 2025-2030

NASIR, SE

WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
PERIODE 2025-2030

QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Empat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 151);
24. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10)
25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);

26. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
27. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALI KOTA SUBULUSSALAM,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan,

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

8. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
18. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

19. Isu Strategis adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program Pembangunan Daerah adalah program strategi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. Visi, misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Subulussalam, RTRW, RPJMN, dan RPJMA serta mempertikan RPJMD Kabupaten tetangga.
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK, Renstra-PD dan Renja-PD.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
 - c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - e. BAB V PENUTUP
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD;
 - c. Hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat RPJMD Tahun 2030-2034 belum ditetapkan, Qanun ini dapat dijadikan sebagai RPJMD transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2030.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 04 Desember 2025M
13 Jumadil Akhir 1447H


M. RASYID

Diundang di Subulussalam
pada tanggal 04 Desember 2025M
13 Jumadil Akhir 1447H


SAIRUN

LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (7/149/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 9)

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kota Subulussalam, serta memuat prioritas pembangunan Kota Subulussalam, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Subulussalam memiliki kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

RKPK Tahun 2025
RKPK Tahun 2026
RKPK Tahun 2027
RKPK Tahun 2028
RKPK Tahun 2029; dan
RKPK Tahun 2030

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 135

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-7
1.3.1 RPJMD Kota Subulussalam dengan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029	I-7
1.3.2 RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJM Aceh Tahun 2025-2029.....	I-9
1.3.3 RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJPD Kota Subulussalam	I-10
1.3.4 RPJMD Kota Subulussalam dengan Renstra-PD Kota Subulussalam	I-11
1.3.5 RPJMD Kota Subulussalam dengan RKPK Subulussalam	I-12
1.3.6 RPJMD Kota Subulussalam dengan Perencanaan Lainnya	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-2
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-2
2.1.1.2 Kondisi Topografi.....	II-4
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi.....	II-8
2.1.1.4 Kondisi Geologi.....	II-9
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi	II-11
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	II-19
2.1.2.1 Potensi Pemanfaatan Lahan.....	II-19
2.1.2.2 Potensi Pertambangan dan Mineral.....	II-25
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-26
2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam	II-26
2.1.3.2 Daya Dukung Lahan untuk Permukiman.....	II-31
2.1.3.3 Daya Dukung Lahan untuk Menghasilkan Bahan Pangan Utama Beras.....	II-31
2.1.3.4 Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup.....	II-34
2.1.3.5 Jasa Lingkungan Tinggi.....	II-34
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-60

2.1.4.1	Air Baku	II-60
2.1.4.2	Ketahanan Pangan.....	II-60
2.1.4.3	Konsumsi Listrik per Kapita.....	II-61
2.1.4.4	Air Minum layak	II-62
2.1.5	Lingkungan Hidup Berkualitas	II-64
2.1.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ...	II-64
2.1.5.2	Sanitasi Layak	II-64
2.1.5.3	Pengelolaan Sampah.....	II-66
2.1.6	Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim...	II-67
2.1.6.1	Indeks Risiko bencana (IRB)	II-70
2.1.6.2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD).....	II-70
2.1.7	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-71
2.1.8	Demografi.....	II-73
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-75
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-73
2.2.2	Kesehatan untuk Semua	II-89
2.2.3	Pendidikan Berkualitas dan Merata	II-95
2.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-99
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-100
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	II-100
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-103
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-103
2.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-107
2.3.3	Transformasi Digital	II-109
2.3.4	Integral Ekonomi Domestik dan Global	II-110
2.3.5	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-110
2.3.6	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-113
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-113
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II-113
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-114
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan Indeks Daya Saing Daerah	II-119
2.4.4	Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-120
2.4.4.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	II-120
2.4.4.2	Bidang Urusan Kesehatan	II-127
2.4.4.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-140
2.4.4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-139
2.4.4.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-145
2.4.4.6	Bidang Urusan Sosial	II-147
2.4.4.7	Bidang Urusan Tenaga Kerja	II-150
2.4.4.8	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan	

dan Perlindungan Anak	II-151
2.4.4.9 Bidang Urusan Pangan.....	II-153
2.4.4.10 Bidang Urusan Pertanahan	II-153
2.4.4.11 Bidang Urusan Lingkungan Hidup	II-155
2.4.4.12 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-157
2.4.4.13 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-159
2.4.4.14 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-160
2.4.4.15 Bidang Urusan Perhubungan	II-161
2.4.4.16 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	II-162
2.4.4.17 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-165
2.4.4.18 Bidang Urusan Penanaman Modal.....	II-167
2.4.4.19 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-170
2.4.4.20 Bidang Urusan Statistik	II-172
2.4.4.21 Bidang Urusan Kebudayaan	II-172
2.4.4.22 Bidang Urusan Perpustakaan.....	II-173
2.4.4.23 Bidang Urusan Kearsipan.....	II-176
2.4.4.24 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan....	II-176
2.4.4.25 Bidang Urusan Pariwisata	II-177
2.4.4.26 Bidang Urusan Pertanian	II-179
2.4.4.27 Bidang Urusan Kehutanan	II-182
2.4.4.28 Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Listrik.....	II-184
2.4.4.29 Bidang Urusan Perdagangan	II-185
2.4.4.30 Bidang Urusan Perindustrian	II-186
2.4.4.31 Bidang Urusan Transmigrasi.....	II-187
2.4.4.32 Fokus Layanan Urusan Pemerintah.....	II-187
2.4.4.33 Bidang Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	II-188
2.4.4.34 Bidang Urusan Perencanaan	II-188
2.4.4.35 Bidang Urusan Keuangan.....	II-192
2.4.4.36 Bidang Urusan Kepegawaian	II-193
2.4.4.37 Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan..	II-195
2.4.4.38 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-195
2.4.4.39 Fokus Layanan Urusan Pengawasan	II-196
2.4.4.40 Fokus Layanan Urusan Kewilayahan.....	II-197
2.4.4.41 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-198
2.4.4.42 Fokus Layanan Urusan Kekhususan	II-210
2.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-213
2.6 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-216
2.6.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode Tahun 2020- 2024	II-217

2.6.1.1	Analisis Realisasi Pendapatan Daerah	II-218
2.6.1.2	Analisis Realisasi Belanja Daerah	II-222
2.6.1.3	Pembiayaan Daerah.....	II-225
2.6.2	Neraca Daerah.....	II-227
2.6.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-233
2.6.3.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	II-233
2.6.3.2	Analisis Pembiayaan.....	II-234
2.6.4	Kerangka Pendanaan.....	II-243
2.6.5	Penghitungan Kerangka Pendanaan	II-251
2.6.6	Kapasitas Fiskal Daerah	II-251
2.7	Permasalahan dan Isu Strategis	II-253
2.7.1	Permasalahan Pembangunan	II-253
2.7.1.1	Tingginya Angka Defisit dan Hutang Daerah	II-254
2.7.1.2	Rendahnya Capaian Pelayanan Dasar	II-255
2.7.1.3	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal.....	II-257
2.7.1.4	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Baik Tingkat Lokal, Regional, Maupun Nasional	II-259
2.7.1.5	Tingginya Angka Kemiskinan.....	II-260
2.7.1.6	Kerentanan Ketahanan Pangan	II-261
2.7.1.7	Investasi dalam Negeri dan Luar Negeri yang Lesu	II-261
2.7.1.8	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang belum Optimal	II-263
2.7.1.9	Penerapan Syariat Islam Belum Optimal....	II-264
2.7.2	Isu-Isu Strategis	II-265
2.8	Kerjasama Daerah	II-273
2.9	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kab/Kota.....	II-276
2.9.1	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Kota Subulussalam	II-276
2.9.2	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBA di Kota Subulussalam	II-276

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	III-1
3.1 Visi	III-1
3.2 Misi	III-2
3.2.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan	III-2
3.2.2 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam	III-4
3.2.3 Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan	III-5
3.2.4 Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih	III-7

3.2.5	Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata	III-8
3.3	Tujuan dan Sasaran	III-9
3.4	Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam	III-14
3.5	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam	III-16
3.6	Keterkaitan RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJM Nasional dan RPJM Aceh	III-16
3.7	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	III-20
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Rencana Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-30
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Pelaksanaan	V-1
5.2	Pembiayaan	V-2
5.3	Proses Pelaksanaan Manajemen Resiko	V-3
5.4	Kerangka Pengendalian	V-3
5.5	Mekanisme Perubahan	V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2.2	Kualifikasi Topografi Berdasarkan Ketinggian Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam.....	II-6
Tabel 2.3	Klasifikasi Kelerengan Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-7
Tabel 2.4	Karakteristik Geologi Kota Subulussalam	II-9
Tabel 2.5	Panjang dan Nama Sungai di Kota Subulussalam	II-14
Tabel 2.6	Luasan DAS di Kota Subulussalam	II-16
Tabel 2.7	Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam	II-24
Tabel 2.8	Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Subulussalam	II-25
Tabel 2.9	Potensi Bukan Logam dan Batuan di Kota Subulussalam	II-26
Tabel 2.10	Potensi Energi di Kota Subulussalam	II-26
Tabel 2.11	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam	II-28
Tabel 2.12	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-39
Tabel 2.13	Tingkat Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam	II-47
Tabel 2.14	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kecamatan di Kota Subulussalam	II-50
Tabel 2.15	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Setiap Kota Subulussalam	II-55
Tabel 2.16	Luasan dan Kelas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-59
Tabel 2.17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.18	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-73
Tabel 2.19	Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025-2030 (dalam ribu)	II-74
Tabel 2.20	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah).....	II-78
Tabel 2.21	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah).....	II-79
Tabel 2.22	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam	II-80
Tabel 2.23	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam	II-81
Tabel 2.24	Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 di Kota Subulussalam	II-83

Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.26	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-88
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam	II-98
Tabel 2.28	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.29	Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.30	Status Pekerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.31	Indeks Inovasi Daerah	II-109
Tabel 2.32	PDRB Menurut Pengeluaran (ADHB) Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.33	PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.34	Rasio Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.35	Tingkat Inflasi Kota di Aceh Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.36	Beberapa Capaian Kinerja pada Sekretariat Daerah.....	II-114
Tabel 2.37	Jumlah Demo di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.38	Angka Kriminalitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ...	II-116
Tabel 2.39	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel 2.40	IDSD Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-119
Tabel 2.41	Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024...	II-123
Tabel 2.42	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.43	Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kota Subulussalam	II-126
Tabel 2.44	Fasilitas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024....	II-127
Tabel 2.45	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-128
Tabel 2.46	Kondisi Posyandu di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ..	II-140
Tabel 2.47	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2.48	Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-145
Tabel 2.49	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.50	Program Balai Tenaga Kerja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.51	Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023	II-154
Tabel 2.52	Luar Ruang Terbuka Hijau Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.53	Persentase Penduduk Ber-KTP di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-157

Tabel 2.54	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel 2.55	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel 2.56	Cakupan Kantor Pemerintah Desa di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-159
Tabel 2.57	Rasio Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel 2.58	Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.59	Jumlah Kampong Menurut Keberadaan BTS, Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kota Subulussalam	II-163
Tabel 2.60	Jumlah Kampong menurut Keberadaan Fasilitas Komunikasi di Kota Subulussalam.....	II-164
Tabel 2.61	Jumlah Usaha Agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023.....	II-166
Tabel 2.62	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-167
Tabel 2.63	Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota Se-Aceh Tahun 2022-2023.....	II-169
Tabel 2.64	Keaktifan Organisasi Olahraga di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2.65	Cagar Budaya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.66	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-173
Tabel 2.67	Produksi Perikanan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2.68	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-177
Tabel 2.69	Nama dan Lokasi Objek Wisata yang ada di Kota Subulussalam	II-178
Tabel 2.70	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2.71	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel 2.72	Luas Panen, Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel 2.73	Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Pekebunan Unggulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-181
Tabel 2.74	Populasi Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2.75	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel 2.76	Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	II-185

Tabel 2.77	Konsistensi RPJMD dengan Renstra, RKPK, Perubahan RKPK Tahun 2021-2024.....	II-190
Tabel 2.78	Konsistensi RKPD/Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS Tahun 2021-2024.....	II-191
Tabel 2.79	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-192
Tabel 2.80	Penetapan APBK Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-193
Tabel 2.81	Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	II-195
Tabel 2.82	Indeks Desa Membangun Kota Subulussalam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024.....	II-197
Tabel 2.83	Daftar Organisasi Masyarakat di Kota Subulussalam	II-199
Tabel 2.84	Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-211
Tabel 2.85	Jumlah Masjid dan Meunasah Dalam Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-212
Tabel 2.86	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Subulussalam Berdasarkan Bidang Urusan Pelayanan	II-214
Tabel 2.87	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-220
Tabel 2.88	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-224
Tabel 2.89	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-226
Tabel 2.90	Neraca Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-228
Tabel 2.91	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-232
Tabel 2.92	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam	II-234
Tabel 2.93	Defisit Rill Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ..	II-236
Tabel 2.94	Struktur Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-230
Tabel 2.95	<i>Roadmap</i> Penanganan Defisit dan Hutang Daerah	II-240
Tabel 2.96	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-242
Tabel 2.97	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026-2030.....	II-249
Tabel 2.98	Kapasitas Fiskal Kota Subulussalam 2023-2025	II-252
Tabel 2.99	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.....	II-269
Tabel 2.100	Kerjasama Daerah Kota Subulussalam	II-274
Tabel 3.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2025-2030.....	III-10
Tabel 3.2	Program Unggulan Kota Subulussalam Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.3	Misi Pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi Pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.....	III-18
Tabel 3.4	Misi pada RPJMA Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029.....	III-19

Tabel 3.5	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-25
Tabel 3.6	Program Prioritas RPJMD	III-26
Tabel 3.7	Arah Kebijakan RPJMD	III-80
Tabel 3.8	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan	III-87
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-31
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Subulussalam	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Subulussalam	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kota Subulussalam	II-7
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kota Subulussalam	II-8
Gambar 2.5	Peta Geologi di Kota Subulussalam	II-10
Gambar 2.6	Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam	II-10
Gambar 2.7	Sebaran Sungai Besar dan Kecil yang Melintasi Kota Subulussalam	II-13
Gambar 2.8	Peta WS Alas Singkil dan Baru-Kluet untuk Kota Subulussalam	II-15
Gambar 2.9	Luas DAS Kota Subulussalam	II-16
Gambar 2.10	Peta CAT di Kota Subulussalam	II-17
Gambar 2.11	Peta Hidrologi di Kota Subulussalam	II-18
Gambar 2.12	Peta Penggunaan Lahan di Kota Subulussalam	II-20
Gambar 2.13	Peta Hak Guna Usaha (HGU) di Kota Subulussalam	II-21
Gambar 2.14	Peta Potensi Sumber Daya Alam Subulussalam	II-25
Gambar 2.15	Ketersediaan Air di Kota Subulussalam	II-27
Gambar 2.16	Kebutuhan Air secara Spasial di Kota Subulussalam	II-28
Gambar 2.17	Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang Sudah dan Belum Terlampaui di Kota Subulussalam	II-30
Gambar 2.18	Grafik Perhitungan dan Proyeksi Konsumsi Pangan Utama Beras dan Kemampuan Produksi Lahan Sawah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2045	II-33
Gambar 2.19	Persentase Ketersediaan Air di Kota Subulussalam	II-36
Gambar 2.20	Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	II-38
Gambar 2.21	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Subulussalam	II-38
Gambar 2.22	Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam	II-42
Gambar 2.23	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	II-42
Gambar 2.24	Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam	II-45
Gambar 2.25	Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam	II-46
Gambar 2.26	Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam	II-49
Gambar 2.27	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam	II-50
Gambar 2.28	Luas Jasa Pengaturan Iklim Kota Subulussalam	II-53
Gambar 2.29	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Subulussalam	II-54
Gambar 2.30	Luas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-57

Gambar 2.31	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam	II-58
Gambar 2.32	Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (meter kubik per detik)	II-60
Gambar 2.33	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-61
Gambar 2.34	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-61
Gambar 2.35	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.36	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.37	Peta Jaringan Air Bersih Perpipaian di Kota Subulussalam	II-63
Gambar 2.38	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-65
Gambar 2.39	Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-66
Gambar 2.40	Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam	II-69
Gambar 2.41	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.42	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-71
Gambar 2.43	Distribusi Persentase Penduduk (Persen), Kepadatan Penduduk (jiwa/Km persegi), Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024.....	II-74
Gambar 2.44	Proyeksi Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025 dan 2030.....	II-75
Gambar 2.45	Perbandingan Laju PDRB Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-76
Gambar 2.46	PDRB per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024..	II-82
Gambar 2.47	Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Tahun (Juta Rp)	II-84
Gambar 2.48	Indeks Gini Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-85
Gambar 2.49	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (dalam Ribuan/Orang/Tahun) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar 2.50	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar 2.51	TPT Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.52	TPAK Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.53	Persentase Penduduk Miskin di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.54	Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-90

Gambar 2.55	Angka Prevalensi <i>Stunting</i> Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-90
Gambar 2.56	Indeks Penanganan Khusus <i>Stunting</i> (IPKS) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023.....	II-91
Gambar 2.57	Persentase Masyarakat yang Mengeluhkan Kesehatan dan Angka Kesakitan (dalam persen) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-92
Gambar 2.58	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-92
Gambar 2.59	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-93
Gambar 2.60	Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-94
Gambar 2.61	Persentase Kondisi Gizi Balita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-95
Gambar 2.62	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Subulussalam (dalam tahun), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-96
Gambar 2.63	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam (dalam tahun) Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2.64	Indikator Masyarakat Digital Indonesia Kota Subulussalam Tahun 2022-2024.....	II-97
Gambar 2.65	Angka Melek Huruf Kota Subulussalam (dalam persen), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.66	Angka Literasi dan Numerasi Kota Subulussalam Tahun 2022-2024	II-98
Gambar 2.67	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2022-2024.....	II-99
Gambar 2.68	Indeks Pembangunan Syariat (IPS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-100
Gambar 2.69	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-101
Gambar 2.70	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023.....	II-101
Gambar 2.71	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2023.....	II-102
Gambar 2.72	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-102
Gambar 2.73	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-103
Gambar 2.74	Rasio Penduduk dengan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 (Per 10.000 penduduk)	II-104
Gambar 2.75	Persentase Wirausaha di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-107
Gambar 2.76	Indeks SPBE Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-109
Gambar 2.77	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-111

Gambar 2.78	Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-112
Gambar 2.79	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-120
Gambar 2.80	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-121
Gambar 2.81	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-121
Gambar 2.82	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Subulussalam	II-124
Gambar 2.83	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-129
Gambar 2.84	Kasus Tuberkulosis di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-130
Gambar 2.85	Kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-131
Gambar 2.86	Angka Kesakitan Diare di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-132
Gambar 2.87	Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-132
Gambar 2.88	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-133
Gambar 2.89	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-135
Gambar 2.90	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-135
Gambar 2.91	Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-136
Gambar 2.92	Angka kematian murni/ Nett Death Rate (NDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-137
Gambar 2.93	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-138
Gambar 2.94	<i>Bed Turn Over</i> (BTO) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-138
Gambar 2.95	<i>Turn of Interval</i> (TOI) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-139
Gambar 2.96	<i>Average Length of Stay</i> (ALOS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-140
Gambar 2.97	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas (meter persegi).....	II-143
Gambar 2.98	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum.....	II-143
Gambar 2.99	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-144
Gambar 2.100	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	II-144
Gambar 2.101	Jumlah Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam	II-146

Gambar 2.102	Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam	II-146
Gambar 2.103	Rekapitulasi Penduduk yang tergolong DTKS di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-148
Gambar 2.104	Rekapitulasi Keluarga yang tergolong DTKS di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-148
Gambar 2.105	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Tahun 2024	II-150
Gambar 2.106	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-151
Gambar 2.107	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-152
Gambar 2.108	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023.....	II-152
Gambar 2.109	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-153
Gambar 2.110	Luas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-155
Gambar 2.111	Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-161
Gambar 2.112	Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-164
Gambar 2.113	Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-165
Gambar 2.114	Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024	II-165
Gambar 2.115	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Subulussalam Tahun 2023-2024.....	II-172
Gambar 2.116	Perpustakaan di Kota Subulussalam	II-174
Gambar 2.117	Kunjungan Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024	II-175
Gambar 2.118	Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024....	II-175
Gambar 2.119	Peta Kawasan TAHURA Lae Kombih	II-183
Gambar 2.120	Peta Blok Kawasan TAHURA Lae Kombih	II-183
Gambar 2.121	Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-186
Gambar 2.122	Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024.....	II-187
Gambar 2.123	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-188
Gambar 2.124	Persentase Qanun Kota Subulussalam yang Disahkan Tahun 2020-2024.....	II-188
Gambar 2.125	Capaian Kinerja Program RKPK dan RPJMD 2020-2024 ..	II-192
Gambar 2.126	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2024.....	II-194
Gambar 2.127	Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-195

Gambar 2.128	Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Penanganan Pengaduan Oleh Masyarakat di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-196
Gambar 2.129	Jumlah Temuan BPK di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-197
Gambar 2.130	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.....	II-198
Gambar 2.131	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024.....	II-211
Gambar 2.132	Proporsi PAD, Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah (Persen)	II-219

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Astacita, 17 Program Nasional
Lampiran 2	Sandingan Kegiatan Prioritas Utama Dengan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029
Lampiran 3	Sandingan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 Dengan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
Lampiran 4	Dokumentasi Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan pada suatu wilayah yang menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) memerlukan perencanaan bertingkat dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Teknis lebih rinci terkait perencanaan pembangunan daerah dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Kota. Dasar hukum tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Pemilihan serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2025-2030 sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hasil Pilkada, maka ditetapkan pasangan H. M. Rasyid Bancin dan Nasir Kombih, S.E. sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Periode 2025-2030. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Subulussalam yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kota Subulussalam juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024, dan mengacu pada RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJM Aceh 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Subulussalam menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat kota (SKPK) di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), kemudian keduanya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam didasarkan pada aspirasi dan keinginan masyarakat daerah yang dijangking melalui beberapa kali lokakarya di daerah dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif, ilmuwan serta tokoh agama, dunia usaha dan pemuka masyarakat. Proses penyusunan RPJMD Kota Subulussalam dilakukan melalui 4 tahapan yaitu : (a) Penjaringan aspirasi masyarakat terkait visi dan misi daerah, (b) Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Subulussalam, (c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan (d) Penetapan RPJMD Kota Subulussalam 2025-2029 oleh DPR Kota Subulussalam.

Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu *input* bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRK Subulussalam. Rancangan RPJMD Kota Subulussalam disusun dengan memedomani Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan penyesuaian-penyesuaian.

Beberapa tahapan penyusunan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan di antaranya:

- 1) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 pada Agustus 2024;
- 2) Pembentukan Tim Penyusunan RPJMD pada tanggal 17 Februari 2025;
- 3) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD pada Maret 2025;
- 4) *Desk* Rancangan Awal RPJMD pada tanggal 21, 24, 25 Maret 2025;
- 5) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama DPRK Subulussalam pada tanggal 24 Maret 2025;
- 6) Pengajuan Permohonan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Provinsi Aceh pada tanggal 27 Maret 2025;
- 7) Forum Konsultasi Publik RPJMD pada tanggal 9 April 2025;
- 8) *Focuss Group Discussion* (FGD) RPJMD dengan berbagai kelompok masyarakat pada tanggal 19-23 Mei 2025;
- 9) Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Provinsi Aceh pada tanggal 28 Mei 2025;
- 10) *Desk* Rancangan RPJMD pada tanggal 24, 25, 26 Juni 2025;
- 11) Penyusunan Rancangan RPJMD pada tanggal 9 Juli 2025;
- 12) Musrenbang RPJMD pada tanggal 15 Juli 2025;
- 13) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD pada tanggal 17 Juli 2025;
- 14) Penyerahan Rancangan Akhir RPJMD ke Inspektorat untuk direviu pada tanggal 17 Juli 2025;
- 15) Reviu Inspektorat Rancangan Akhir RPJMD pada tanggal 28 Juli 2025;
- 16) Penyampaian Rancangan Qanun tentang RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 kepada DPRK Subulussalam pada tanggal 11 Agustus 2025;
- 17) Evaluasi Rancangan Qanun tentang RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 di Bappeda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2025;
- 18) Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/1349/2025 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 tanggal 17 November 2025;
- 19) *Desk* Penyempurnaan Ragan RPJMD tanggal 21 Oktober 2025, 30 Oktober 2025, 20 November 2025;
- 20) Penetapan Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 tanggal 4 Desember 2025.

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025–2029 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD tahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Subulussalam.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Subulussalam tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
- 20) Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- 21) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
- 22) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025–2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
- 23) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025–2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
- 24) Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);

- 25) Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
- 26) Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra-PD. Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPK menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Dalam pelaksanaannya, RPJMD melalui RKPK menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen RPJMD Kota Subulussalam dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Gambaran keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

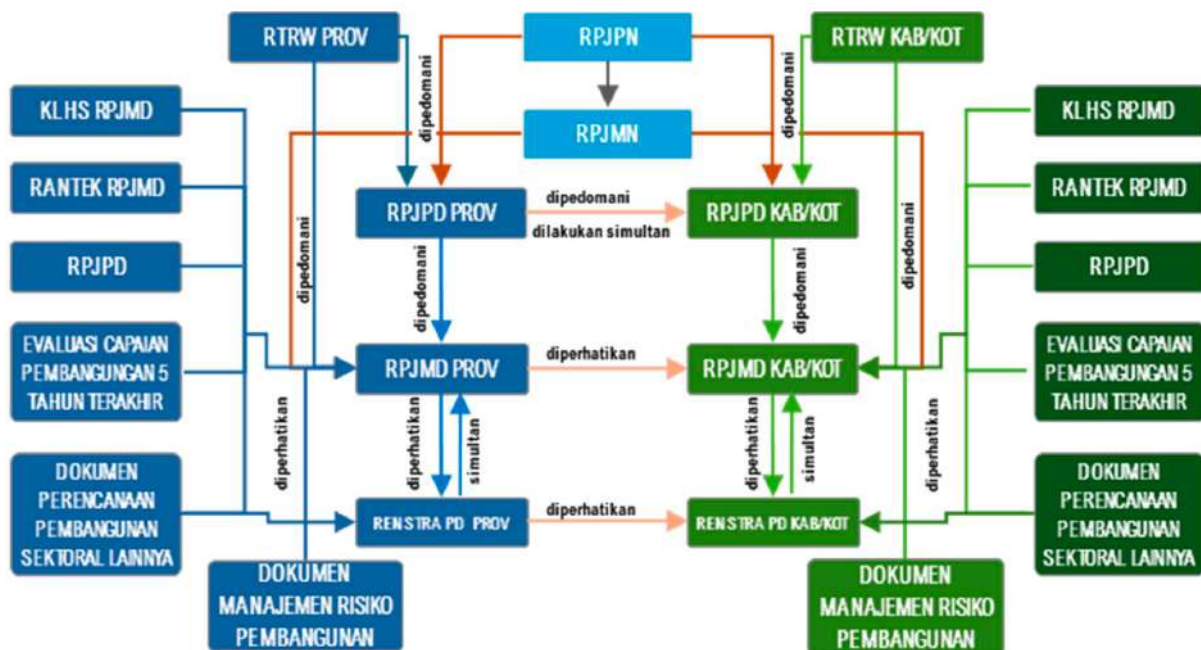
Hubungan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan dan dokumen lainnya, yaitu:

1.3.1. RPJMD Kota Subulussalam dengan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2024-2029, visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dilakukan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu :

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;

- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains , teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milinial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan lima arah kebijakan dengan tema “Penguatan Fondasi Transformasi”, yaitu :

- a. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
- b. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam dan penguatan riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- c. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berbudaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dasar modal pembangunan

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025-2029, yang meliputi antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0 persen;
- b. Indeks Gini sebesar 0,372-0,375;
- c. Tingkat kemiskinan sebesar 4,5-5,0 persen;

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional untuk wilayah Sumatera di tahun 2025-2029, yang meliputi antara lain:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,1-7,0 persen
- b. Kontribusi PDRB 21,8-22,2 persen;
- c. PDRB Per Kapita 118,7-124,9 juta rupiah;
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 3,81-4,41 persen;

1.3.2. RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJM Aceh Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Subulussalam tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPJM Aceh Tahun 2025-2029. Acuan terhadap RPJM Aceh dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten diruang lingkup pemerintahan Provinsi Aceh. Adapun Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu MUZAKIR MANAF DAN FADHLULLAH, S.E. mengusung visi **“ACEH ISLAMI, MAJU, BERMATABAT, DAN BERKELANJUTAN”** dengan mengusung 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah;
- 2) Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA;
- 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas;
- 4) Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas;
- 6) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum;
- 7) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya;

Pembangunan Aceh jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan Aceh tahun 2025-2029, yang meliputi antara lain:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6,70 persen
- b. PDRB Per Kapita 69,96 juta rupiah
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,85 – 4,00 persen
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 5,39 – 6,39 persen
- e. Indeks Modal Manusia 0,603
- f. Indeks Gini 0,275 – 0,283

1.3.3. RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJPD Kota Subulussalam

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan pembangunan Tahap I dari RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045. Visi dan Misi Calon Wali Kota harus selaras dengan visi dan misi RPJPD sehingga saat penyusunan RPJMD, harus memedomani sasaran pokok dan arah kebijakan pada RPJPD.

Visi RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 adalah Subulussalam Maju, Islami dan Berkelanjutan dengan Misi :a) Mewujudkan Transformasi sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal, b) Mewujudkan transformasi ekonomi yang maju, mandiri dan berdaya saing, c) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif, d) Mewujudkan Syariat Islam secara Kaffah, Rasa Aman bagi masyarakat, Stabilitas Daerah dan Demokrasi secara Menyeluruh,e) Mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial budaya dan ekologis berbasis Kearifan Lokal, f) Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Kewilayahan dan g) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Menuju Lingkungan yang Ramah dan Berkelanjutan.

Visi RPJM Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 adalah Subulussalam Islami, Maju dan Berkelanjutan dengan Misi: a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan; b) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam; c) Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan; d) Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih; dan e) Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.4. RPJMD Kota Subulussalam dengan Renstra-PD Kota Subulussalam

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra-PD disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.

Penyusunan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah perangkat daerah atau renstra-PD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada RPJMD. Begitu juga halnya dengan penyusunan program dan kegiatan. Program pembangunan pada Renstra-PD harus sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD dan dijabarkan dalam kegiatan untuk mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD.

1.3.5. RPJMD Kota Subulussalam dengan RKPK Subulussalam

Pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPK, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Subulussalam yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPK merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Subulussalam yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPK harus berpedoman pada RPJMD Kota Subulussalam dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan RKP Aceh dan RKP Nasional. Program pembangunan pada RKPK harus selaras dengan RPJMD dan Renstra-PD serta dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan bahkan rincian belanja. RKPK ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS.

1.3.6. RPJMD Kota Subulussalam dengan Perencanaan Lainnya

- 1) Hubungan RPJMD Kota Subulussalam dengan RTRW Kota Subulussalam (Qanun Nomor 3 Tahun 2014); Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014–2024;
- 2) Hubungan RPJMD Kota Subulussalam dengan Rencana Pembangunan Sektoral; Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRK untuk RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 serta Rekomendasi Musrenbang RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024;

- 3) Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) di RPJMD Kota Subulussalam “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, diperlukan KLHS. Dalam hal ini, KLHS juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam pada periode tahun 2025-2029, yang memuat visi misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Kemudian menjadi pedoman jangka menengah bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam RKPK setiap tahunnya.

2) Tujuan

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan dan pedoman pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029;
- b. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
- c. Mendukung koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat yang islami dan tangguh;
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, RKPK Subulussalam, dan perencanaan lainnya serta penganggaran; dan
- e. Menyediakan instrumen sinkronisasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar-Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah Kota Subulussalam, permasalahan dan isu strategis daerah. Selain itu, bab ini juga menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang program dan *outcome* perangkat daerah serta penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan serta masa transisi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan serta masa transisi.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Nama Subulussalam diberikan oleh Gubernur Aceh Prof. Ali Hasyimi pada tanggal 14 September 1962. Pada saat itu, wilayah Kota Subulussalam belum menjadi wilayah otonom dan masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Simpang Kiri. Subulussalam juga menjadi ibukota Kecamatan Simpang Kiri. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan dan wilayah Kota Subulussalam berada di bawahnya.

Pembentukan kecamatan-kecamatan pecahan Simpang Kiri dimulai pada tahun 2000 dimana Kecamatan Simpang Kiri dimekarkan dengan Pembentukan Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian pada Tahun 2001 terjadi lagi pemekaran dari kecamatan Simpang Kiri sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Penanggalan, Kota Baharu dan Kecamatan Sultan Daulat sehingga wilayah Simpang Kiri terpecah menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Sultan Daulat. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2002 terjadi lagi pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu pembentukan Kecamatan Singkohor sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Baharu sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Singkohor. Dan terakhir pada awal tahun 2005 terjadi pemekaran Kecamatan yang berasal dari wilayah Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu dengan pembentukan Kecamatan Longkib sebagai pemekaran dari Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Longkib.

Kota Subulussalam resmi menjadi wilayah otonom dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Subulussalam telah menjadi 1 (satu) dari 5 (lima) kota di wilayah Provinsi Aceh dan menjadi kabupaten/kota termuda. Kota Subulussalam saat ini memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Longkib, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Kota Subulussalam terletak di antara 2°27'30" - 3°00'00" LU dan 97°45'00' - 98°10'00" BT dengan luas wilayah 1.391 Km persegi (Kota Subulussalam Dalam Angka Tahun 2024) atau 1.184,04 Km persegi (Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014). Sedangkan secara geografis Kota Subulussalam berada di bagian Paling selatan Provinsi Aceh. Secara administratif, wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

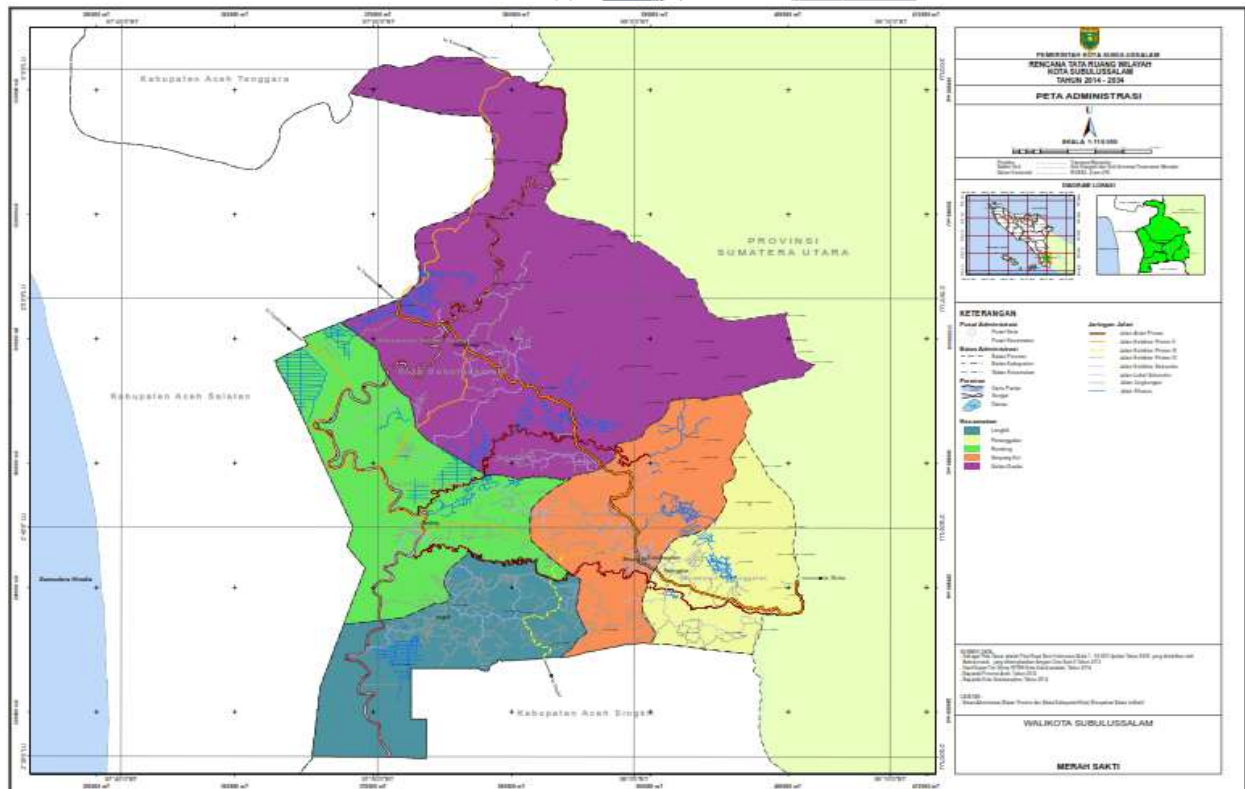
- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Secara administrasi hingga tahun 2024 Kampung (Desa) di Kota Subulussalam seluruhnya berjumlah 82 kampung, yang terdiri dari 17 kampung di Kecamatan Simpang Kiri, 13 kampung di Kecamatan Penanggalan, 23 kampung di Kecamatan Rundeng, 19 kampung di Kecamatan Sultan daulat, 10 kampung di Kecamatan Longkib. Berikut disajikan peta administrasi Kota Subulussalam dan rincian luas wilayah kecamatan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km²)	Luas (Ha)	Jumlah Kampung
1	Simpang Kiri	220,11	22.011,25	17
2	Penanggalan	116,12	11.612,20	13
3	Rundeng	158,15	15.815,29	23
4	Sultan Daulat	523,70	52.369,74	19
5	Longkib	165,96	16.596,00	10
Total		1.184,04	118.404,48	82

Sumber : Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Subulussalam

Keuntungan letak geografis dan batas wilayah Kota Subulussalam antara lain:

- 1) Akses ke Jalur Perdagangan
 - Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara, yang memungkinkan akses perdagangan antara wilayah pesisir dan pedalaman.
 - Dekat dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sehingga berpotensi sebagai daerah transit atau penyangga logistik.
- 2) Sumber Daya Alam yang Melimpah
 - Memiliki hutan tropis yang kaya dengan hasil kayu dan non-kayu (seperti karet, kelapa sawit, dan hasil hutan lainnya).
 - Memiliki sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, transportasi, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
- 3) Potensi Pariwisata Alam

Memiliki keindahan alam seperti air terjun, hutan, dan sungai yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata.
- 4) Kontribusi Kota Subulussalam terhadap Wilayah Sekitarnya
 - Kontribusi Ekonomi Menghasilkan komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang didistribusikan ke wilayah sekitar dan ekspor.

- Menjadi pusat perdagangan hasil hutan dan pertanian bagi kabupaten tetangga seperti Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
- Kontribusi Infrastruktur Sebagai penghubung transportasi darat antara Aceh Tenggara dan wilayah pesisir barat Aceh.
- Memiliki potensi pengembangan jalan tol atau jalan nasional untuk meningkatkan konektivitas regional.
- Kontribusi Lingkungan Hidup Hutan di Subulussalam berperan sebagai paru-paru hijau dan penyangga ekosistem bagi wilayah sekitarnya.
- Melindungi daerah aliran sungai (DAS) yang penting bagi pasokan air bersih di Aceh Singkil dan sekitarnya.
- Kontribusi Sosial dan Budaya Memiliki keberagaman etnis (Aceh, Batak, Singkil) yang memperkaya budaya regional.
- Menjadi pusat pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil sekitarnya.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian, yaitu:

- 1) Dataran Rendah yang menjadi dominasi karakteristik bentang alam Kota Subulussalam, dengan kemiringan 00 – 20 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 45,00 persen;
- 2) Daerah/dataran Landai dengan kemiringan 20 – 50 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 10,80 persen; dan
- 3) Dataran tinggi dengan kemiringan 50 – 150 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 26,45 persen.
- 4) Dataran perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 150 – 1000, yaitu:
 - a. Daerah perbukitan dengan kemiringan 150 – 400 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 17,00 persen; dan
 - b. Daerah pegunungan terjal dengan kemiringan melebihi 400 dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 1,12 persen.

Adapun Kondisi topografi dan jarak kampong/desa pada masing-masing kecamatan dapat dijelaskan berikut:

- 1) Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri; Keadaan topografi di kecamatan Simpang Kiri pada umumnya datar, hanya dua desa saja yang sebagian besar

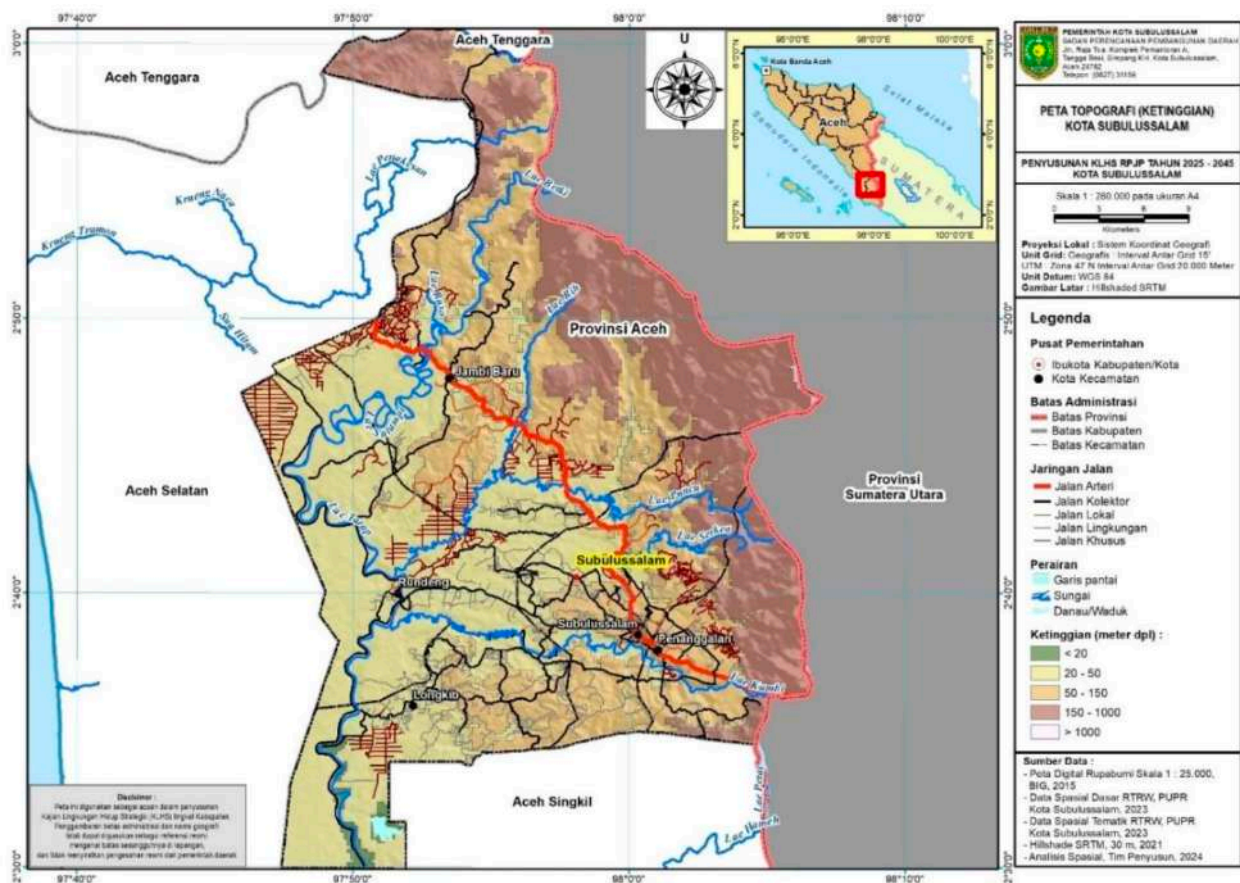
keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sikelondang dan Desa Subulussalam Barat. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri (Desa Subulussalam) adalah Desa Makmur Jaya sejauh 11,40 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Subulussalam Timur sejauh 0,17 Km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk dijangkau dengan semua jenis kendaraan.

- 2) Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan; Pada umumnya berbukit-bukit, hanya lima desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Lae Motong, Desa Cepu, Desa Penanggalan, Desa Dasan Raja dan Desa Penanggalan Timur. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan Penanggalan (Desa Penanggalan) adalah Desa Lae Ikan sejauh 8,06 Km. Desa Lae Ikan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak-Pak Barat (Provinsi Sumatera Utara). Desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan adalah Desa Dasan Raja dan Penanggalan Barat sejauh 0,5 Km. Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Aceh wilayah barat.
- 3) Keadaan topografi Kecamatan Rundeng; Pada umumnya datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 mdpl dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggiran sungai. Geruguh merupakan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan (Desa Pasar Rundeng) yang berjarak 29,04 Km. Transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap desa di Kecamatan Rundeng umumnya menggunakan transportasi air berupa sampan, kapal *boat* atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum baik atau sebahagian besar badan jalan belum beraspal (jalan tanah).
- 4) Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat; Pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 23,10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Gunung Bakti yaitu sejauh 1,16 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak di pinggiran sungai.
- 5) Keadaan topografi Kecamatan Longkib; Pada umumnya berbukit, hanya tiga desa yang topografinya datar yaitu Desa Longkib, Panji dan Sepang. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 16,97 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Lae Saga sejauh 5,30 Km dari Darul Aman (Ibukota Kecamatan).

Tabel 2.2.
Klasifikasi Topografi Berdasarkan Ketinggian Tiap Kecamatan
di Kota Subulussalam

Kecamatan	Topografi / Ketinggian (mdpl)					Luas (Ha)
	<20	20-50	50-150	150-1000	>1000	
Longkib	989,56	10.963,16	3.862,58			15.815,30
Penanggalan		337,19	4.806,99	6.468,04		11.612,22
Rundeng		21.931,70	79,55			22.011,25
Simpang Kiri		4.695,46	9.060,91	2.839,63		16.596,00
Sultan Daulat		12.715,24	19.719,70	19.789,98		52.369,74
Kota Subulussalam	989,56	50.642,75	37.529,73	29.097,65	144,82	118.404,48

Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

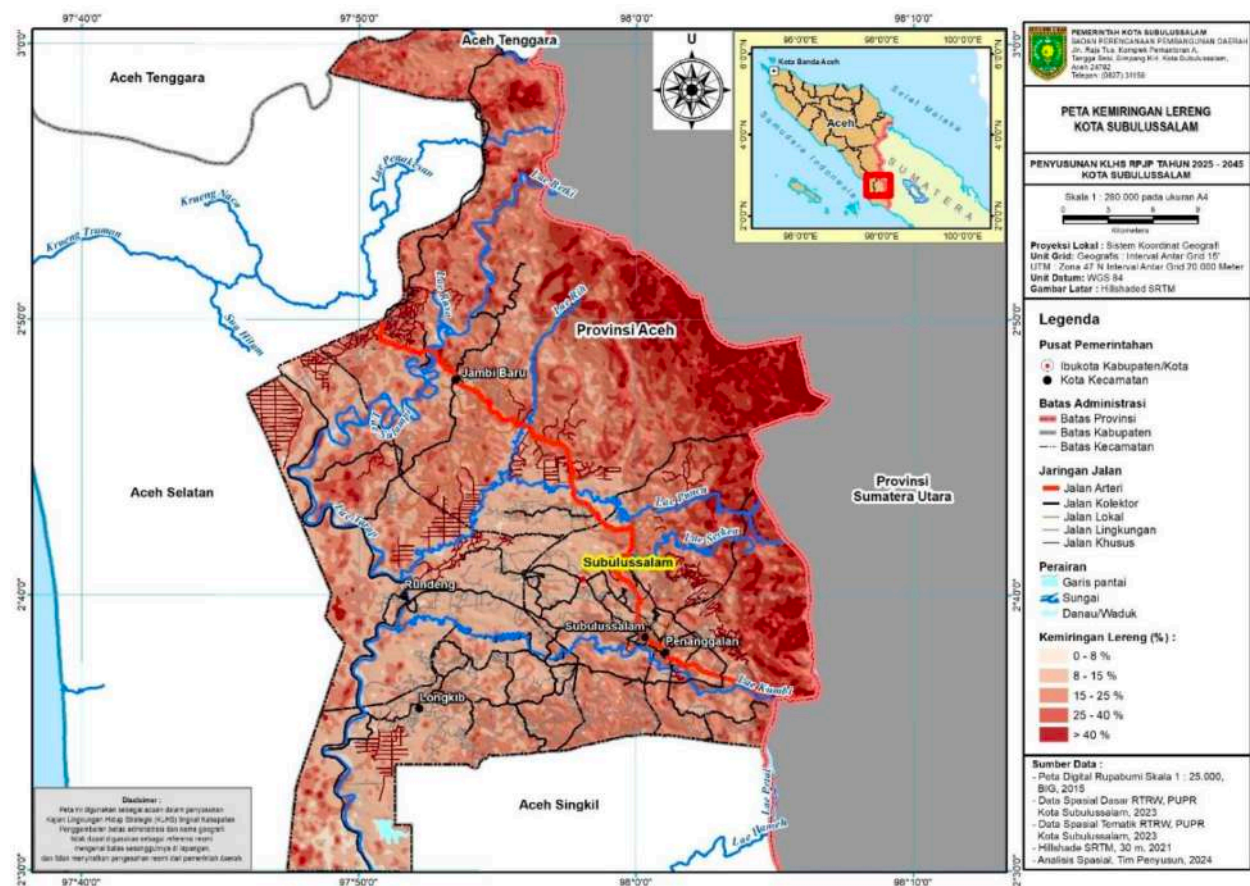
Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Subulussalam

Tabel 2.3.

Klasifikasi Kelerengan Tiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Kemiringan Lereng					Luas (Ha)
	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
Longkib	990,16	9.457,61	4.866,94	403,56	97,01	15.815,28
Penanggalan		1.381,77	4.757,19	3.907,53	1.565,71	11.612,20
Rundeng	702,97	12.828,26	6.828,37	1.337,86	313,79	22.011,25
Simpang Kiri	52,57	4.836,29	8.461,31	2.623,65	622,20	16.596,02
Sultan Daulat	181,87	8.120,12	24.130,70	13.425,93	6.511,13	52.369,75
Kota Subulussalam	1.927,57	36.624,05	49.044,51	21.698,51	9.109,84	118404,48

Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

Gambar 2.3.

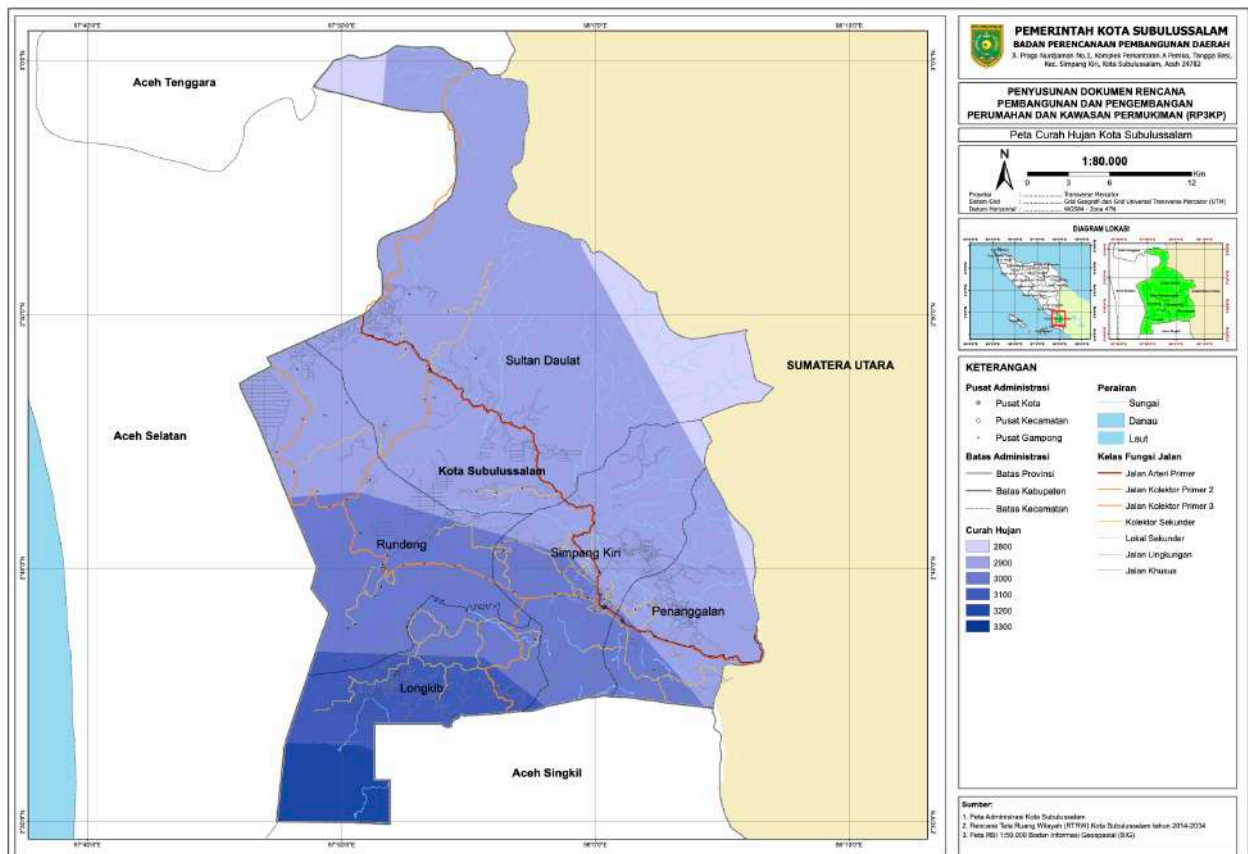
Peta Kemiringan Lereng Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki klasifikasi kelerengan 0-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen, dan lebih dari 40 persen. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut kemiringan lereng 15-25 persen adalah yang paling dominan dengan luas mencapai 49.044,51 Ha (41,42 persen) dari luas Kota Subulussalam. Disusul dengan kemiringan lereng 8-15 persen dengan luas mencapai 36.624,05 Ha (30,93 persen). Kondisi ketinggian secara keseluruhan berada di bawah kurang dari 1.500 meter dpl. Berikut pada tabel di bawah ini penjelasan dari masing-masing

kemiringan lereng di Kota Subulussalam berdasarkan klasifikasinya di tiap kecamatan serta gambar yang menunjukkan agihan kemiringan lereng Kota Subulussalam yang disajikan dalam peta kemiringan lereng.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Kota Subulussalam terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh dua jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.



Sumber : RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.4.
Peta Curah Hujan Kota Subulussalam

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kota Subulussalam juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2022, Kota Subulussalam tercatat memiliki:

- a) rata-rata suhu udara minimum 28,17°C dan maksimum 33,67°C;
 - b) rata-rata curah hujan perbulan maksimum 240,33 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan maksimum 19 kali;
 - c) kelembaban udara minimum 48 persen dan maksimum 97 persen;
 - d) tekanan udara antara 991,6 mb – 1018,5 mb;
- arah angin terbanyak adalah Angin Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 0,1 – 5,4 m/s (Sumber: <https://www.bmkg.go.id>).

2.1.1.4. Kondisi Geologi

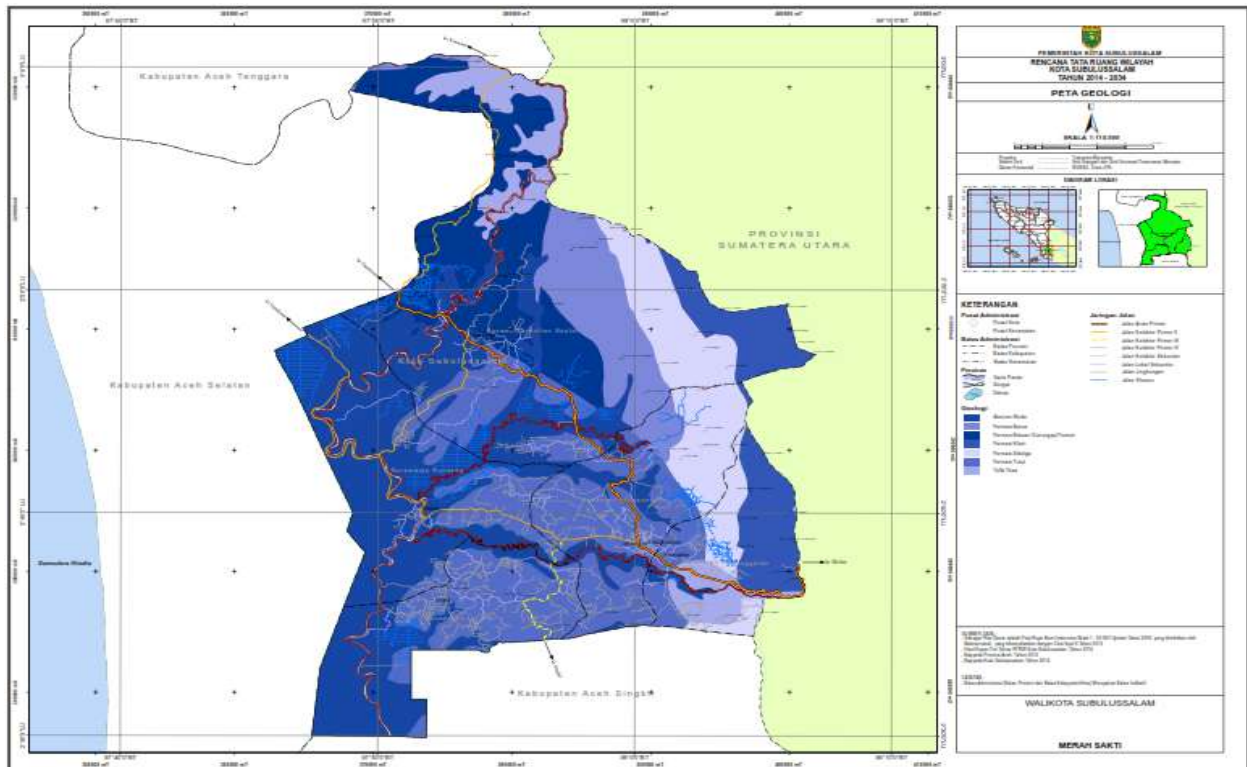
Ditinjau dari struktur geologis, Kota Subulussalam memiliki struktur geologi yang terdiri atas *arrenite sandstone*, *boulder-sandstone*, *conglomerate*, *sandstone*, *tuff*, *volcanic rock*. Dari beragamnya struktur geologis tersebut, Kota Subulussalam didominasi oleh struktur geologi *conglomerate*. Sedangkan struktur geologi yang memiliki komposisi terkecil adalah *tuff*.

Struktur *arrenite sandstone* mendominasi di wilayah perbukitan di bagian timur Kota Subulussalam beserta dengan struktur *sandstone*, yaitu di Kecamatan Penanggalan. Struktur *conglomerate* yang mendominasi struktur geologi Kota Subulussalam tersebar di seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi *tuff* dan *volcanic rock* mendominasi di bagian utara pada areal hutan yakni di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi *boulder-sandstone* mendominasi areal di samping sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu-batu. Selanjutnya peta geologi Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.5. dan Karakteristik Geologi Kota Subulussalam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Karakteristik Geologi Kota Subulussalam

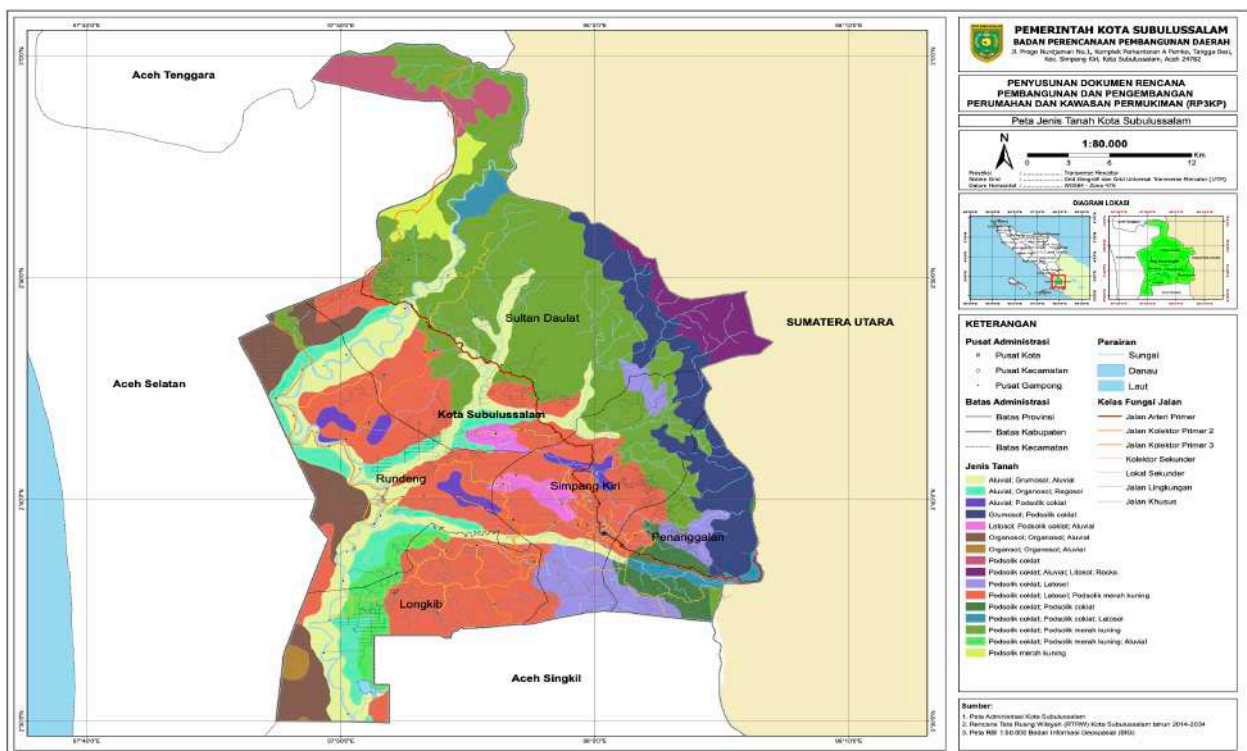
Jenis Geologi	Luas (Ha)
Aluvium Muda (Qh)	38.962,66
Formasi Barus (Tmbar)	9.195,55
Formasi Batuan Gunung Api Trumon (Tmvt)	14.978,85
Formasi Kluet (Puk)	8.418,60
Formasi Sibolga (Tlsb)	12.305,92
Formasi Tutut (QTt)	27.781,92
Tuffa Toba (Qvt)	7.030,92
Total	118.404,48

Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.5.
Peta Geologi di Kota Subulussalam



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki berbagai jenis tanah yang didominasi oleh kompleks *podsolik* coklat dan *podsolik* Merah Kuning (PMK) seluas 31.572,39 Ha (26,66 persen) dari luas total wilayah Kota Subulussalam. Selanjutnya wilayah ini didominasi oleh kompleks *podsolik* coklat, latosol dan PMK seluas 28.390,72 Ha (23,97 persen) dan kompleks *aluvial*, *grumosol* dan *aluvial* seluas 13.462,84 Ha (11,37 persen). Distribusi jenis tanah di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Jenis tanah PMK mendominasi pada wilayah utara dan timur Kota Subulussalam, sementara jenis tanah Organosol dan Glei Humus mendominasi jenis tanah di wilayah selatan dan barat Kota Subulussalam. Adapun karakteristik khas jenis tanah di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- a) *Podsolik* Merah Kuning (PMK) memiliki karakteristik tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut. Kandungan bahan organik dan unsur hara pada jenis tanah ini umumnya rendah. Permeabilitas tanah sedang hingga agak lambat, serta memiliki daya menahan air yang kurang baik serta peka terhadap erosi.
- b) *Organosol* tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dengan bahan organik. Ketebalan minimum 40 cm dan paling sedikit mengandung 30 persen bahan organik atau lebih 20 persen bila berpasir. Warna tanah gelap, pH rendah, drainase terhambat sampai sangat terhambat. Bila hendak digunakan untuk pertanian memerlukan drainase/irigasi.
- c) *Latosol* merupakan tanah yang miskin akan zat hara terutama zat Pospat, Kalium dan Nitrogen dan rendah kadar humusnya, struktur tanah teguh dan mantap, tidak plastis (lembut) serta tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

1) Air Permukaan

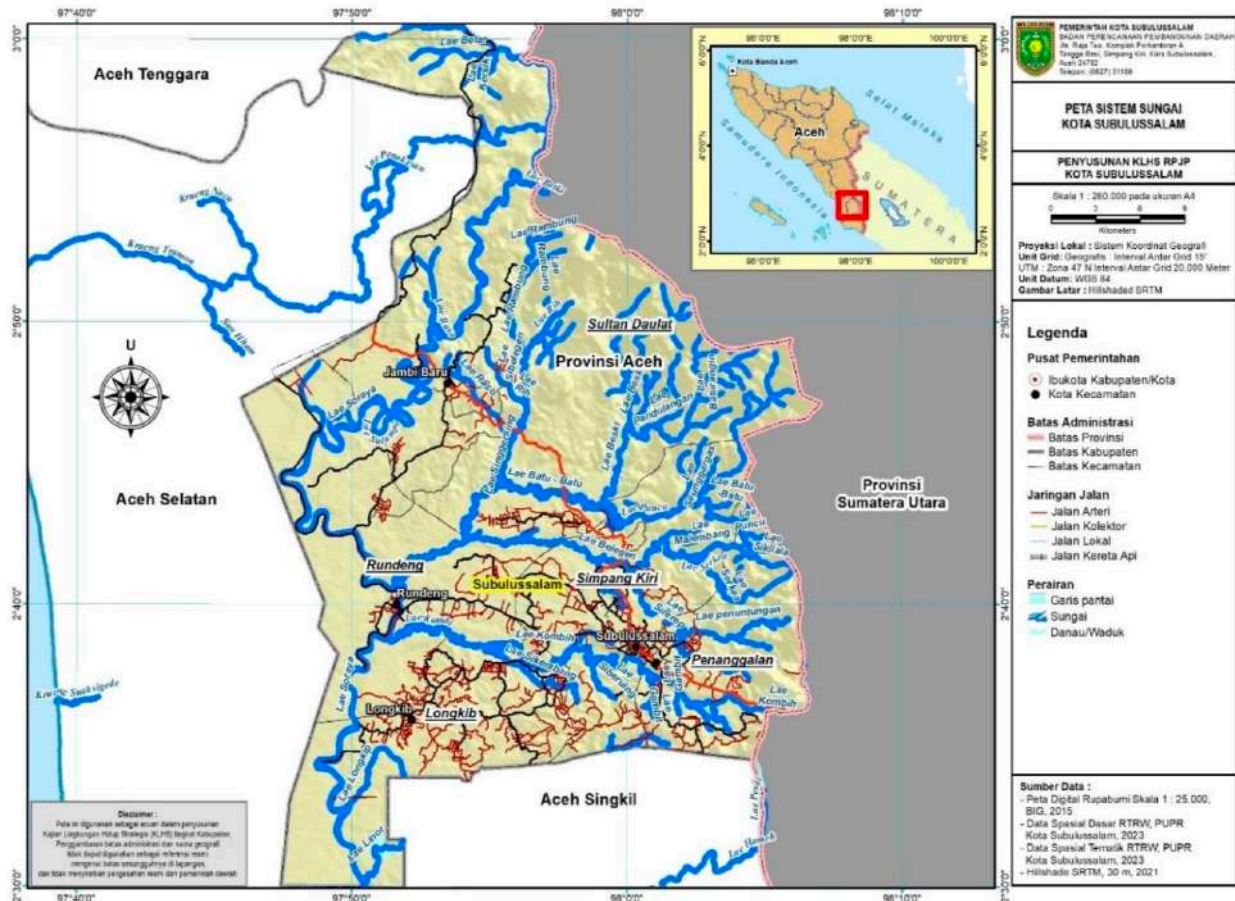
Kota Subulussalam dianugerahi dengan kekayaan sumber daya air yang melimpah, yang mencakup baik air permukaan seperti sungai dan rawa, maupun air bawah tanah yang berasal dari berbagai mata air. Di antara berbagai sumber daya air tersebut, Sungai Besar Lae Soraya menonjol sebagai salah satu potensi utama. Sungai ini, bersama dengan beberapa sungai lain yang berukuran lebih kecil dan beragam anak sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kota Subulussalam, membentuk jaringan hidrologi yang kaya. Secara umum, sungai-sungai di Subulussalam memiliki karakteristik berkelok dan pendek, yang cenderung menyebabkan berbagai bencana seperti genangan atau luapan air sungai. Namun,

dengan lebar yang cukup dari beberapa sungai, seperti Lae Soraya, terdapat potensi yang signifikan untuk mengembangkan sistem transportasi berbasis sungai. Sungai-sungai ini, meskipun secara keseluruhan berkontribusi pada risiko bencana genangan akibat luapan, juga menawarkan peluang untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Subulussalam adalah:

- a. Sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Kabupaten Aceh Singkil. Hulu sungai Lae Soraya di Kabupaten Aceh Tenggara dan bermuara di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng.
- c. Sungai Lae Batu-batu mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, memiliki hulu di Kecamatan Sultan Daulat dan bermuara di Lae Belegen menuju Lae Soraya.
- d. Sungai Lae Biski yang merupakan hulu dari sungai Lae Batu - batu di Kecamatan Sultan Daulat.
- e. Sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di Sungai Lae Soraya.
- f. Sungai Lae Sarkea yang merupakan daerah hulu, mengalir dari Kecamatan Penanggalan menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
- g. Sungai Lae Sireprep yang merupakan daerah hulu di Kecamatan Penanggalan, mengalir menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
- h. Sungai Lae Penuntungan di Kecamatan Penanggalan, bermuara di Sungai Lae Sireprep.

Melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana, potensi hidrologi di Kota Subulussalam ini dapat menjadi aset berharga dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dasar tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sungai-sungai yang ada di Kota Subulussalam merupakan sumber daya air yang sangat potensial dan belum secara optimal dimanfaatkan. Tabel berikut memperlihatkan nama sungai dan panjangnya. Sungai besar adalah Lae Soraya, Lae Batu – Batu, dan Lae Kombih. Sungai

terpanjang adalah Lae Soraya mencapai 1033,23 Km yang membelah Kecamatan Longkib, Rundeng, dan Sultan Daulat.



Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034

Gambar 2.7.
Sebaran Sungai Besar dan Kecil yang Melintasi Kota Subulussalam

Dilihat dari jumlah sungai yang ada di Kota Subulussalam dan curah hujan yang cukup tinggi, belum lagi keberadaan cekungan air tanah (CAT) dapat disebutkan ketersediaan air sebenarnya sangat berlimpah di Kota ini. Sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam dan panjangnya diperlihatkan dalam Tabel dan Tabel berikut.

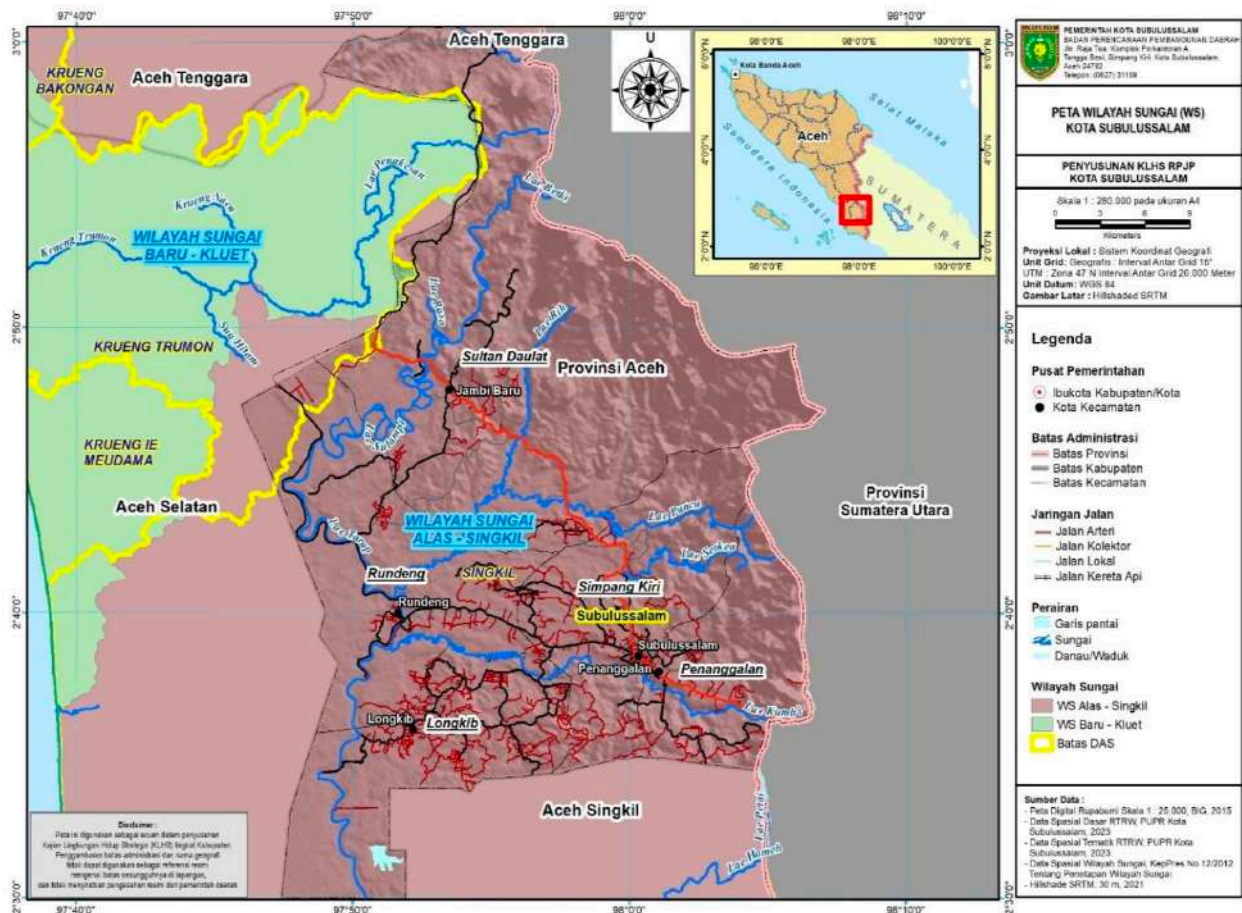
Tabel 2.5.
Panjang dan Nama Sungai di Kota Subulussalam

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)						Keterangan
	Longkib	Penanggalan	Rundeng	Simpang Kiri	Sultan Daulat	Total	
Lae Soraya	16,37		41,65		45,21	103,23	Sungai Besar
Lae Batu-batu		3,98	10,19	15,81	24,67	54,65	Sungai Besar
Lae Kombih	14,48	12,21	8,98	10,74		46,41	Sungai Besar
Lae Belegen		1,83	4,03	17,63	6,07	29,56	Sungai Kecil
Lae Sirerep		10,18		7,48		17,66	Sungai Kecil
Lae Beski					17,19	17,19	Sungai Kecil
Lae Rambung					16,81	16,81	Sungai Kecil
Lae Sibelegen					12,73	12,73	Sungai Kecil
Lae Sikerabang	8,34			2,00		10,34	Sungai Kecil
Lae Penuntungan		9,77				9,77	Sungai Kecil
Lae Betar					8,57	8,57	Sungai Kecil
Lae Longkib	8,06					8,06	Sungai Kecil
Lae Raso					7,62	7,62	Sungai Kecil
Lae Pandulangan					7,51	7,51	Sungai Kecil
Lae Linor	6,46					6,46	Sungai Kecil
Lae Baturangin					6,21	6,21	Sungai Kecil
Lae Rih					5,08	5,08	Sungai Kecil
Lae Singgersing					4,76	4,76	Sungai Kecil
Lae Malembang		0,94		3,73		4,67	Sungai Kecil
Lae Sikilala		4,50				4,50	Sungai Kecil
Lae Kersik					4,29	4,29	Sungai Kecil
Lae Siberuing				4,26		4,26	Sungai Kecil
Lae Gambit		4,25				4,25	Sungai Kecil
Lae Seunggargas				2,43		2,43	Sungai Kecil
Lae Bereng					2,41	2,41	Sungai Kecil
Lae Serkea				1,97		1,97	Sungai Kecil
Lae Puncu		1,94				1,94	Sungai Kecil
Total Panjang (Km)	53,71	49,6	64,85	66,06	169,13	403,34	

Sumber : KLHS RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

2) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 menjelaskan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km² atau 200.000 ha. Sesuai dengan Lampiran V.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Kota Subulussalam berada dalam WS Baro-Kluet (01.07.B) dan WS Alas-Singkil (0.1.09.A2). WS Alas-Singkil merupakan wilayah sungai lintas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sementara WS Baro-Kluet menjadi wilayah sungai lintas kabupaten, yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Kota Subulussalam, berada dalam dua WS, yaitu Alas-Singkil dan Baro-Kluet. Peta WS dimaksud diperlihatkan dalam Gambar berikut.



Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034

Gambar 2.8.
Peta WS Alas-Singkil dan Baru-Kluet untuk Kota Subulussalam

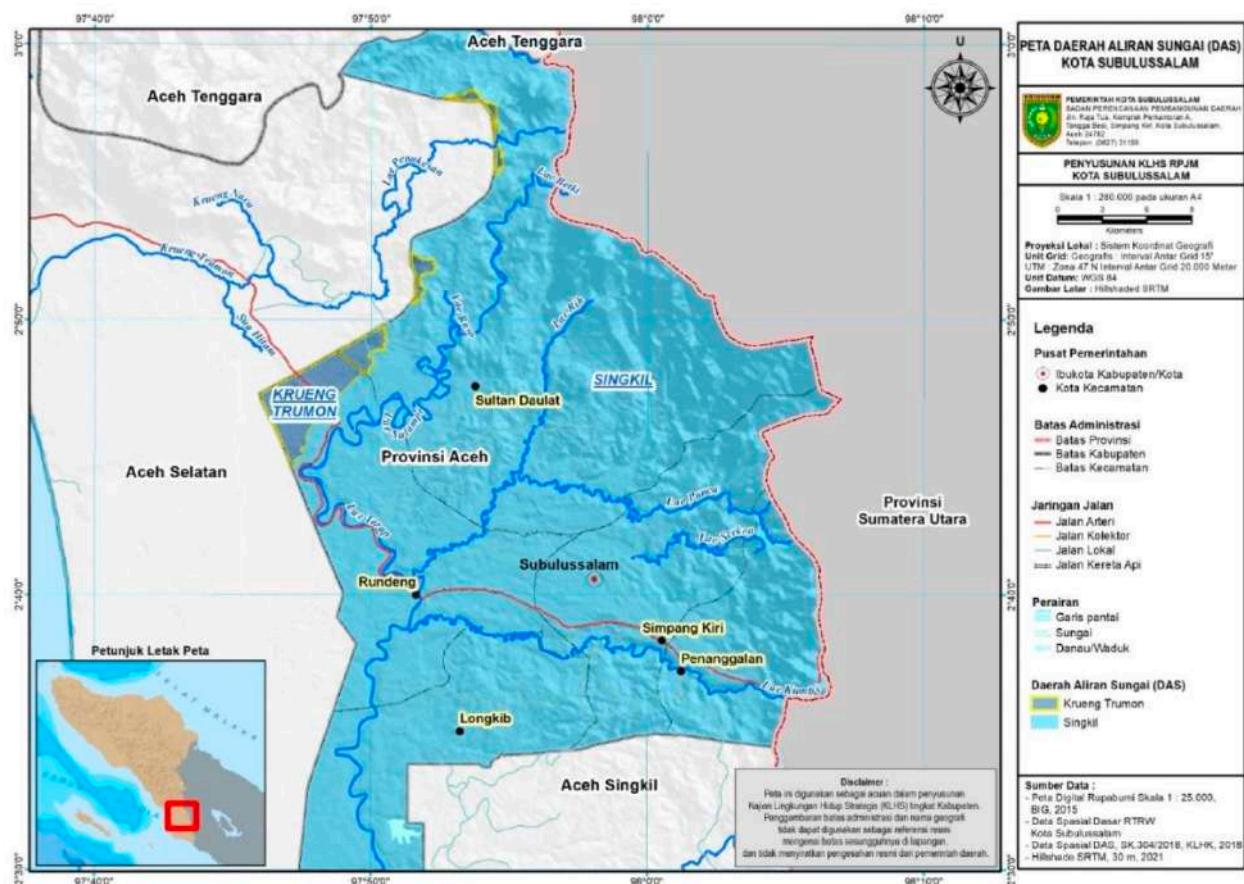
Dalam hal pengelolaan Wilayah Sungai (WS), Kota Subulussalam termasuk ke dalam WS Alas-Singkil sebagai WS lintas provinsi karena menjadi sumber air bagi

Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, pengelolaan WS yang melintasi Kota Subulussalam ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006.

Tabel 2.6.
Luasan DAS di Kota Subulussalam

Nama DAS	Wilayah Sungai		Luas (Ha)
	Alas-Singkil	Baru-Kluet	
Krueng Trumon	2.652,39	465,43	3.117,81
Singkil	115.075,6	34,61	115.110,21
Kota Subulussalam	117.727,99	500,04	118.110,21

Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034



Sumber: Data Spasial RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014-2034

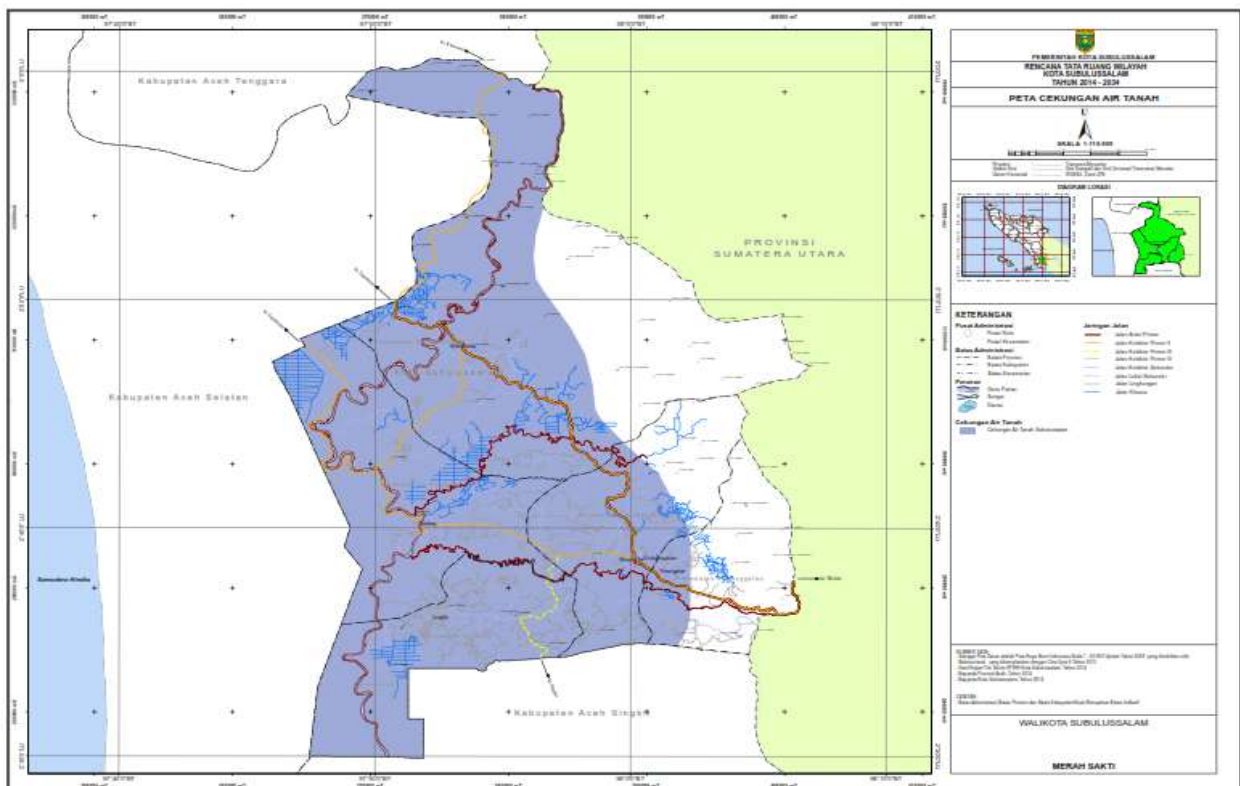
Gambar 2.9.
Luas DAS Kota Subulussalam

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan

(Permen PUPR No. 10/PRT/M/2015). Menurut Bambang (2008) DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung/pergunungan dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik/stasiun yang ditinjau. Berdasarkan SK MenLHK No.304/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai, hanya ada dua (2) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkait dengan Kota Subulussalam, yaitu DAS Trumon dan Singkil. Dokumen RTRWK Subulussalam menyebutkan DAS di Kota Subulussalam adalah DAS Trumon, Hitan, dan Singkil. Pembagian luas DAS dan Peta DAS dimaksud masing-masing disajikan dalam Tabel 2.6. dan Gambar 2.9.

3) Cekungan Air Tanah (CAT)

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Selanjutnya peta CAT dapat dilihat pada Gambar 2.10.

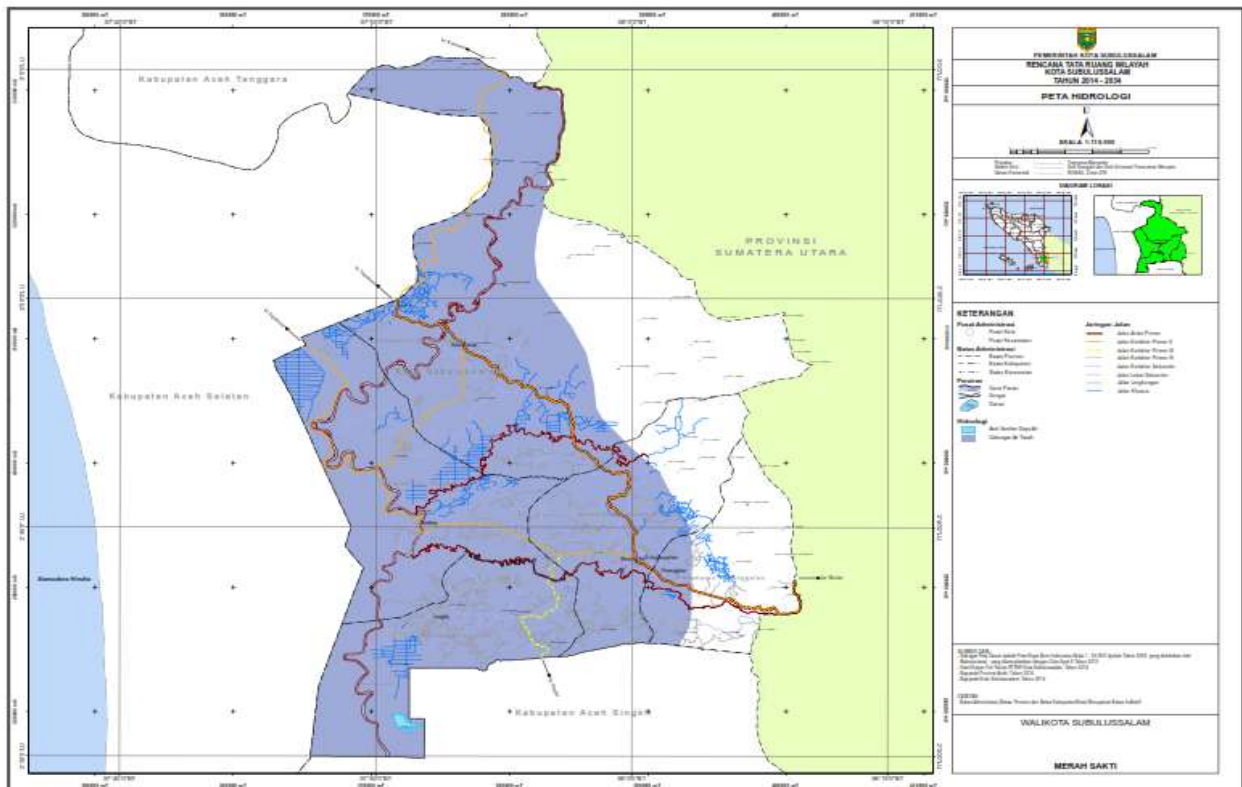


Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.10.
Peta CAT di Kota Subulussalam

RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 memberikan informasi CAT di Kota Subulussalam seluas 86.079,88 Ha meliputi Kecamatan Rundeng seluas 22.011,25

Ha, Kecamatan Penanggalan seluas 2.473,83 Ha, Kecamatan Longkib seluas 12.815,29 Ha, Kecamatan Sultan Daulat seluas 34.629,66 Ha, Kecamatan Simpang Kiri seluas 11.149, 85 Ha. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sultan Daulat memiliki kontribusi terbesar terhadap luas CAT di Kota Subulussalam, diikuti oleh Kecamatan Rundeng dan Longkib. Informasi ini sangat penting untuk berbagai kepentingan, termasuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana.



Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.11.
Peta Hidrologi di Kota Subulussalam

Gambar 2.11. merupakan Peta Hidrologi Kota Subulussalam yang secara umum karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal ini mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggung juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di sisi lain, keberadaan sungai-sungai di Kota

Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air minum dan perhubungan (transportasi sungai).

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Subulussalam memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar. Beberapa potensi SDA di antaranya:

2.1.2.1. Potensi pemanfaatan lahan

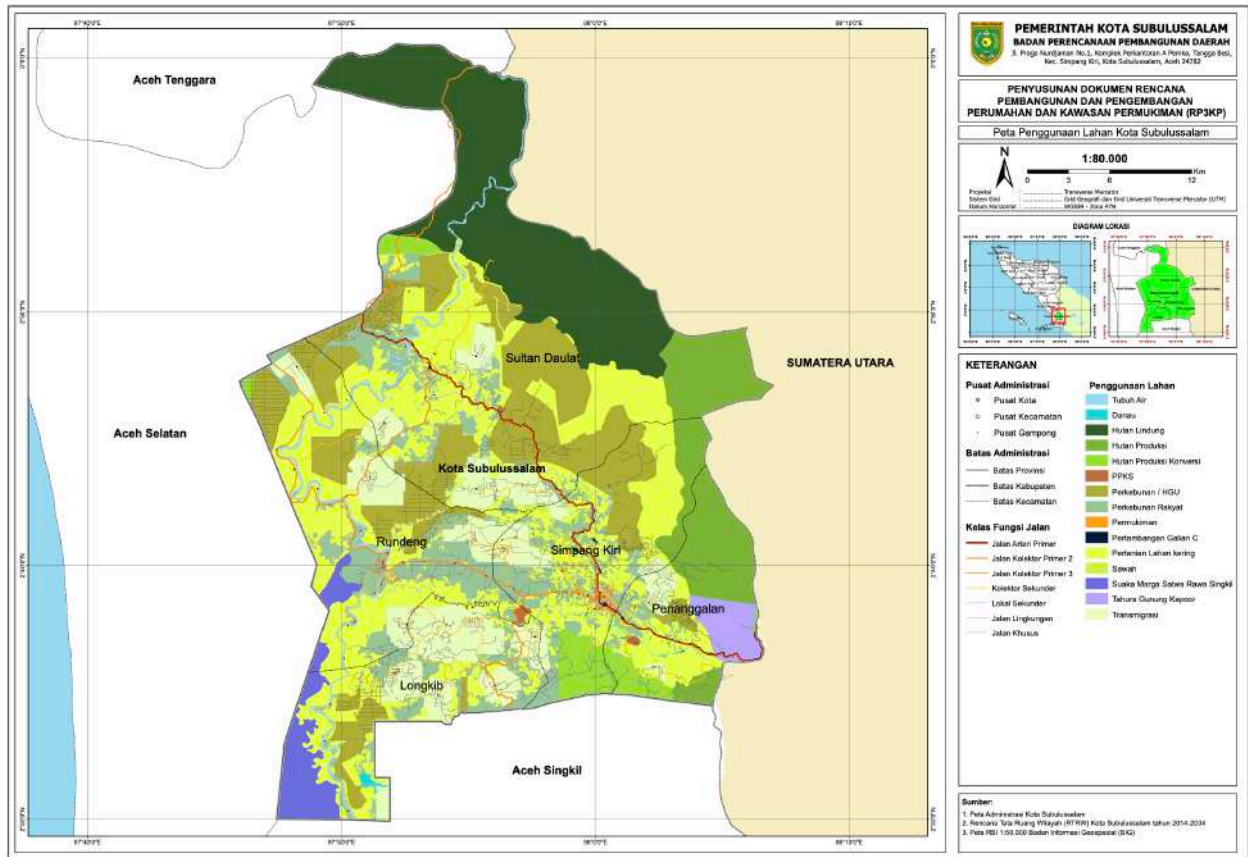
Berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034, luas kawasan lindung ditetapkan seluas 25.926,93 Ha (21,90 persen) dan Kawasan Budidaya seluas 92.477,50 Ha (78,10 persen). Dari data jenis penggunaan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam untuk hutan lindung seluas 19.275 Ha berada di kecamatan Sultan Daulat dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.713,21 Ha. Tahura Plasma Nutfah Kapur ini direncanakan menjadi pusat penelitian plasma nutfah pohon kapur di provinsi Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 32.252,47 Ha, perkebunan besar (HGU) seluas 19.690,45 Ha dan perkebunan rakyat seluas 13.539,76 Ha. Secara lebih rinci penggunaan lahan di Kota Subulussalam disajikan dalam Tabel 2.7.

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan Kota Subulussalam sesuai dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 secara umum terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- 1) Hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air;

- 4) Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
- 5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- 6) Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan banjir; dan
- 7) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

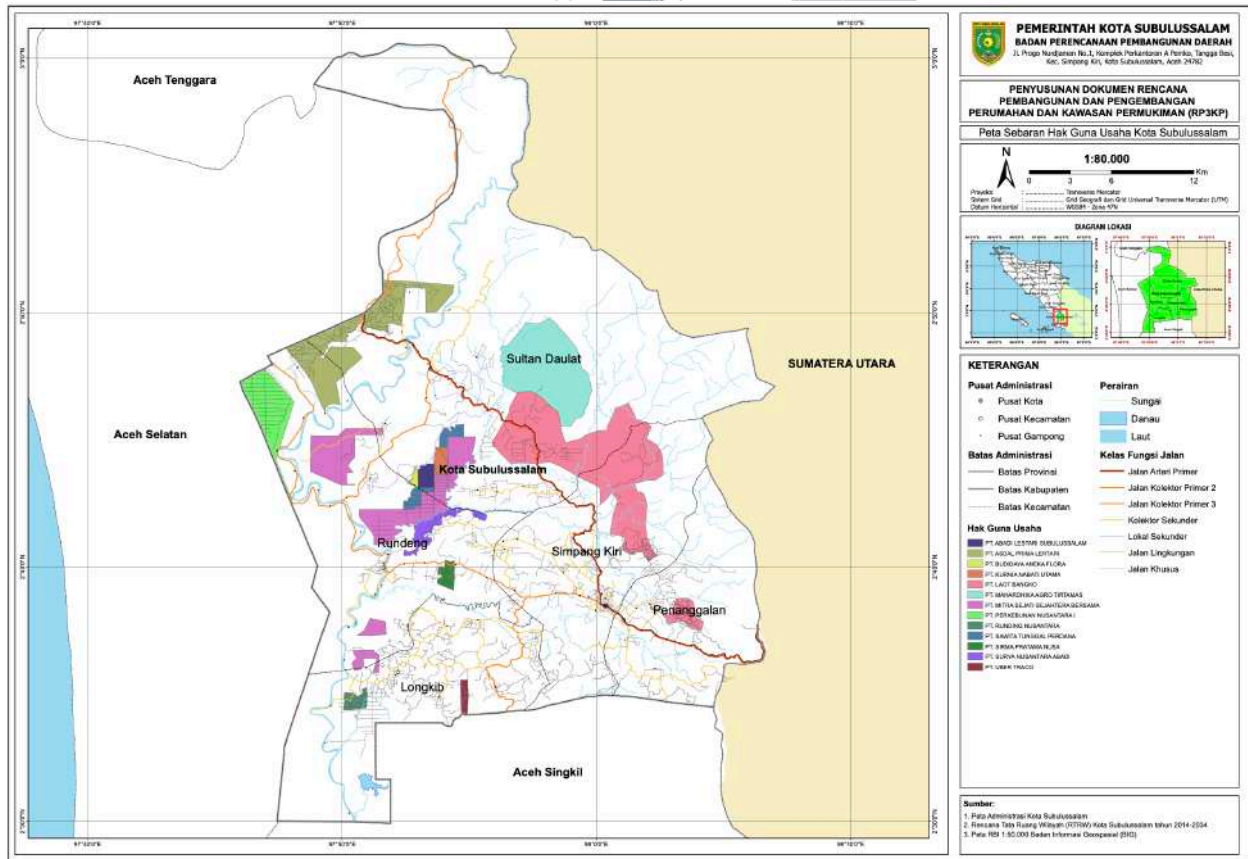


Sumber: Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014

Gambar 2.12.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Subulussalam

Terkait dengan penggolongan tersebut, maka di Kota Subulussalam terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

- 1) Hutan Lindung;
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat;
- 3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam;
- 5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.13.
Peta Hak Guna Usaha (HGU) di Kota Subulussalam

Kawasan peruntukan perumahan merupakan fungsi ruang kota yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Dalam kaitannya dengan pendistribusian penduduk serta pengembangan karakter ruang kota serta pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang, maka kawasan peruntukan perumahan di Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dan kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah.

- 1) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi; Fungsi ini ditetapkan di wilayah pusat pelayanan kota, yakni di Simpang Kiri dan Penanggalan. Kawasan ini merupakan kawasan yang diperkirakan dan diarahkan untuk terus berkembang menjadi satu kawasan perkotaan dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Oleh karena itu arahan kepadatan penduduk cenderung tinggi. Terkait dengan pembentukan kepadatan kawasan tersebut maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB

hingga 60-70 persen. Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas 1.651,67 Ha, meliputi :

- a. Kampung Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Lae Oram, dan Pegayo di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Penanggalan, Cepu, Kuta Tengah, Penuntungan, dan Lae Mbersih di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Sikerabang, Bukit Alim, dan Darul Aman di Kecamatan Longkib;
 - d. Kampung Pasar Rundeng, Teladan Baru, Lae Pamualan, dan Harapan Baru di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Namo Buaya, Singgersing, Jambi Baru, dan Gunung Bakti di Kecamatan Sultan Daulat.
- 2) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang; Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan peruntukan perumahan yang berada di sekitar sub pusat pelayanan kota, yakni di Jambi Baru-Kutagara, Pasar Rundeng-Teladan Baru dan KTM Longkib. Terkait dengan pembentukan kawasan kepadatan sedang maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 50 persen. Kawasan perumahan kepadatan sedang seluas 1,992,17 Ha, meliputi:
- a. Kampung Sikelondang, Tangga Besi, Kuta Cepu, dan Suka Makmur di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Baru, Sikelang, dan Jontor di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Lae Saga, Bangun Sari, dan Darussalam di Kecamatan Longkib;
 - d. Kampung Badar, Blukur Makmur, Binanga, Oboh, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, dan Mandilam di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Bunga Tanjung, Pulo Kedep, Pulo Belen, Suka Maju, Jabi-jabi, dan Lae Langge di Kecamatan Sultan Daulat.
- 3) Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar pusat pelayanan lingkungan, yakni di Kawasan Suka Makmur-Pasar Panjang (Kecamatan Simpang Kiri), Kawasan Kampung Baru-Jontor (Kecamatan Penanggalan), Kawasan Namo Buaya (Kecamatan Sultan Daulat), Kawasan Cipare-Pare (Kecamatan Sultan Daulat) Kawasan Sepadan-Bunga Tanjung (Kecamatan Rundeng dan Sultan Daulat), Kawasan Kuala Kepeng-Tanah Tumbuh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Singgersing (Kecamatan Sultan Daulat),

Kawasan Harapan Baru-Teladan Baru (Kecamatan Rundeng), Kawasan Kuta Beringin-Obloh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Sikerabang (Kecamatan Longkib), Kawasan Darussalam-Bukit Alim (Kecamatan Longkib), Kawasan Desa Longkib (Kecamatan Longkib). Untuk menjaga kepadatan kawasan maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dibatasi dengan penetapan KDB maksimal sebesar 30 persen. Kawasan perumahan kepadatan rendah seluas 1.383,26 Ha, meliputi:

- a. Kampung Mukti Makmur, Makmur Jaya, Pasar Panjang dan Buluh Dori di Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. Kampung Lae Ikan, dan Lae Motong di Kecamatan Penanggalan;
 - c. Kampung Panji, Longkib, dan Sepang di Kecamatan longkib;
 - d. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Tualang, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Kuala Kepeng, Geruguh, dan Suak Jampak di Kecamatan Rundeng;
 - e. Kampung Darul Makmur, Sigrun, Pasir Belo, dan Bawan di Kecamatan Sultan Daulat.
- 4) Pengembangan kawasan permukiman; Di samping pengembangan kawasan untuk perumahan, juga direncanakan pengembangan kawasan permukiman yang menempati lokasi di seluruh wilayah Kota Subulussalam di luar kawasan peruntukan perumahan. Secara keseluruhan pengembangan kawasan permukiman seluas 3.875,95 Ha, meliputi :
- a. Kecamatan Rundeng dengan luas 733,13 Ha, meliputi Kampung Harapan Baru, Kampung Teladan Baru dan Kampung Sepadan;
 - b. Kecamatan Penanggalan dengan luas 485,42 Ha, meliputi Kampung Penuntungan, Kampung Cepu, Kampung Kuta Tengah, Kampung penanggalan dan Kampung Kampung Baru;
 - c. Kecamatan Longkib dengan luas 560,5 Ha, meliputi Kampung Sikerabang, Kampung Bangun Sari, Kampung Bukit Alim dan Kampung Darul Aman;
 - d. Kecamatan Sultan Daulat dengan luas 1.638,76 Ha, meliputi Kampung Gunung Bakti, Kampung Jambi Baru, Kampung Pulo Belen, Kampung Pulo Belen, Kampung Cipar-pare Timur dan Kampung Namo Buaya; dan
 - e. Kecamatan Simpang Kiri dengan luas 458,14 Ha, meliputi Kampung Suka Makmur, Kampung Sikelondang, Kampung Tangga Besi dan Kampung Lae Oram.

Sementara itu, di Kota Subulussalam juga terdapat kawasan transmigrasi seluas 9.908,11 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2.7.
Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam

No.	Uraian	Luas Lahan (Ha)					Total
		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	
1	Formasi Hutan	5.514	6.677	4.434	34.732	6.197	57.554
2	Non Vegetasi Lainnya	42	10	14	12	5	83
3	Pertanian Lainnya	1.133	732	3.559	2.114	1.979	9.518
4	Sawah	59	41	64	72	35	270
5	Sawit	8.278	4.574	9.227	14.847	7.128	44.055
6	Sungai, Danau, Laut	1	2	608	478	192	1.281
7	Tumbuhan Non Hutan	572	1.074	1.171	1.414	1.354	5.584
Total		15.598	13.109	19.078	53.668	16.890	118.344

Sumber : HaKA, 2023

2.1.2.2. Potensi Pertambangan dan Mineral

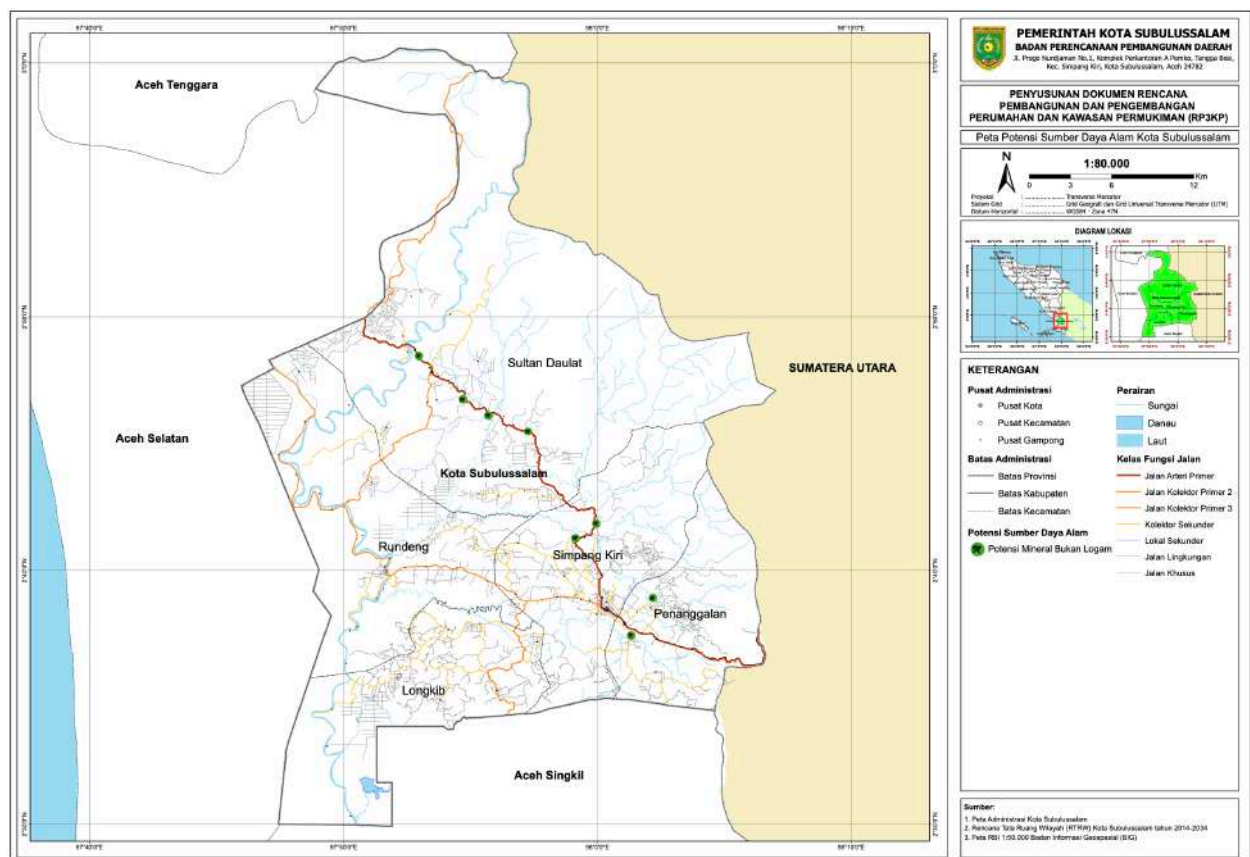
1) Pertambangan

Menurut ESDM Aceh, terdapat 2 potensi komoditas tambang di Kota Subulussalam, yaitu biji besi magnetit dan galena atau timah hitam. Potensi biji besi magnetit mencapai 20 juta ton. Adapun potensi sumber daya mineral di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Subulussalam

No.	Komoditas	Potensi Sumber Daya	Keterangan
1.	Biji Besi Magnetit	20.000.000 ton	Primer, Belum ditambang
2.	Galena, Timah Hitam	4.000.000 ton	Primer, Belum ditambang

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020



Sumber : RPK3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.14.
Peta Potensi Sumber Daya Alam Kota Subulussalam

2) Bukan Logam dan Batuan

Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan di Kota Subulussalam sebagian besar berasal dari komoditas pasir dan batu. Adapun potensi Bukan Logam dan Batuan di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9.

Potensi Bukan Logam dan Batuan di Kota Subulussalam

No.	Komoditas	Lokasi	Luas	Keterangan
1.	Pasir dan Batu	Kecamatan Simpang Kiri	5,5 Ha	Operasi Produksi
2.	Pasir dan Batu	Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Penanggalan	7,07 Ha	Eksplorasi
3.	Kerikil Galian dari Bukit	Kecamatan Simpang Kiri	4 Ha	Operasi Produksi
4.	Batu Gunung	Kecamatan Penanggalan	0,5 Ha	Operasi Produksi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020

3) Potensi Energi Air

Terdapat 3 potensi utama sumber daya air di Kota Subulussalam, namun pada tahun 2024, potensi pembangunan PLTA Lae Kombih menjadi isu utama. Potensi tertinggi pada PLTA Lae Soraya dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 240 MW. Adapun potensi Energi Air di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10.

Potensi Energi Air di Kota Subulussalam

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Kapasitas (MW)	Keterangan
1.	PLTA Lae Soraya	Pasir Belo	240	Calon IPP, Potensi
2.	PLTM Subulussalam	Subulussalam	7,4	Potensi
3.	PLTA Lawe Alas	Lawe Alas	124	Calon IPP

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh, 2020

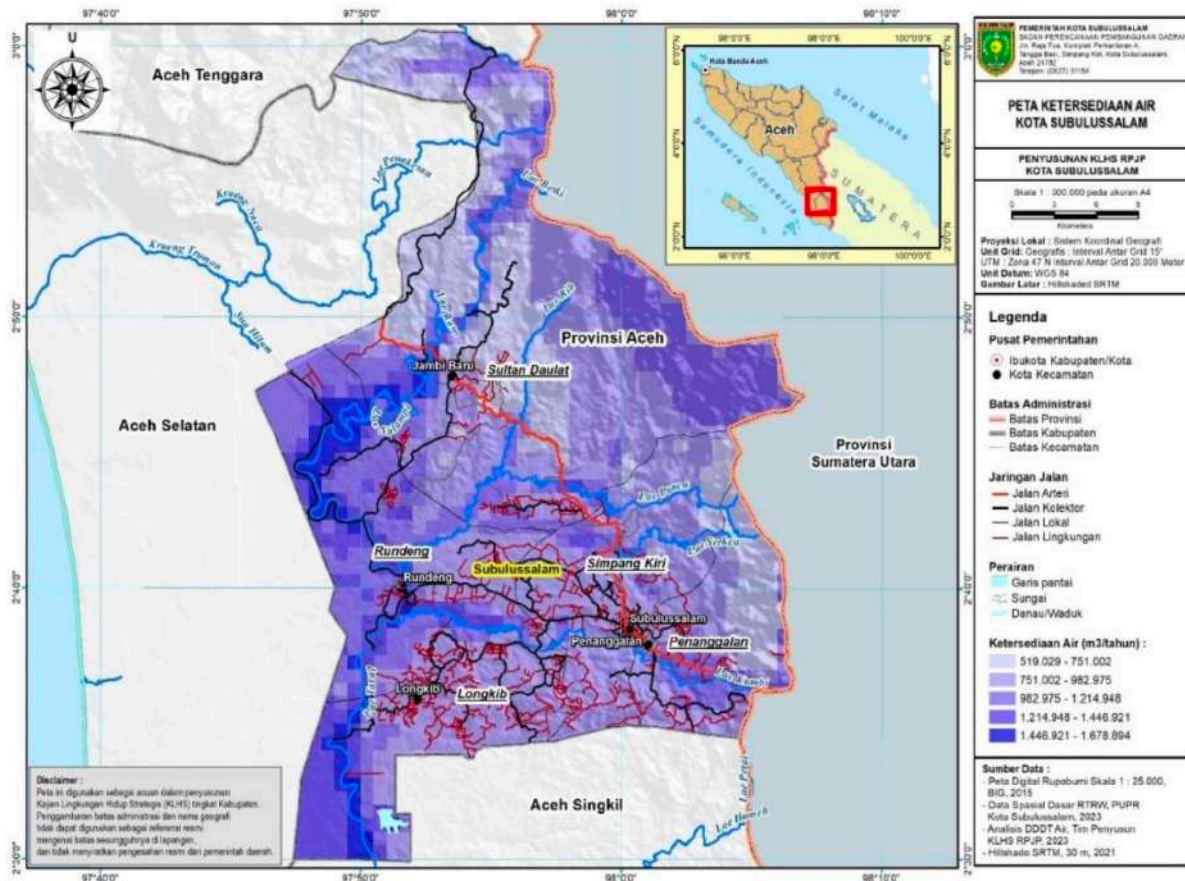
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan air di lima kecamatan di Kota Subulussalam, seperti yang diperlihatkan pada Gambar berikut, kita dapat melakukan analisis untuk menentukan wilayah dengan ketersediaan dan kebutuhan air.

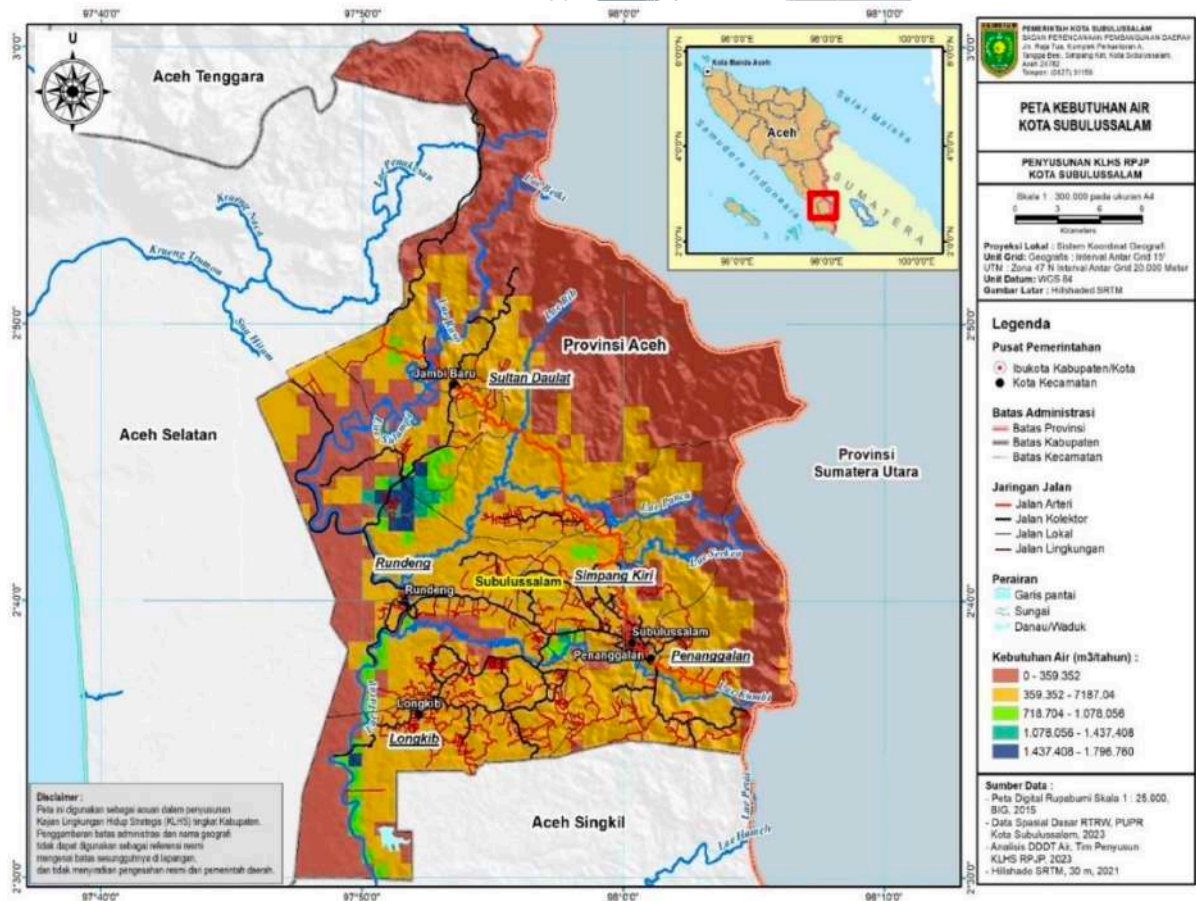
Untuk Kecamatan Longkib, luas wilayahnya adalah 15,815.30 Ha, dengan 15,729.93 Ha belum terlampaui batas DDDT air dan hanya 85.36 Ha yang terlampaui. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Longkib masih berada di bawah batas DDDT air yang ditetapkan. Di Kecamatan Penanggalan, seluruh wilayahnya yang berluas 11,587.30 Ha belum terlampaui batas DDDT air. Ini menandakan bahwa kecamatan ini berhasil mengelola sumber daya airnya dengan baik tanpa melebihi kapasitas. Sementara itu, Kecamatan Rundeng memiliki total luas 22,011.26 Ha, dengan 21,002.97 Ha belum terlampaui dan 1,008.29 Ha yang

terlampau. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil wilayah Rundeng yang telah melebihi batas DDDT air. Kecamatan Simpang Kiri memiliki total luas 16,591.71 Ha, dengan sebagian besar wilayahnya, yaitu 16,506.36 Ha, belum terlampaui batas DDDT air, dan hanya 85.35 Ha yang terlampaui. Sultan Daulat adalah kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu 52,286.08 Ha. Dari total luas ini, 49,552.73 Ha belum terlampaui dan 2,733.34 Ha terlampaui. Ini menunjukkan bahwa Sultan Daulat memiliki area terbesar yang melebihi batas DDDT air dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



Gambar 2.15.
Ketersediaan Air di Kota Subulussalam

Secara total, dari keseluruhan luas Kota Subulussalam, 114,379.29 Ha belum terlampaui batas DDDT air dan hanya 3,912.35 Ha terlampaui. Ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam batas DDDT air yang dapat diterima, namun masih ada area yang perlu diperhatikan karena telah melebihi kapasitas. Dengan demikian, meskipun secara umum kondisi DDDT air di berbagai kecamatan masih dalam batas yang aman, tetapi ada beberapa area, khususnya di Kecamatan Sultan Daulat, yang memerlukan tindakan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif untuk mengembalikan kondisi ke dalam batas DDDT air yang aman. Rincinya dapat merujuk Gambar berikut.



Gambar 2.16.
Kebutuhan Air secara Spasial di Kota Subulussalam

Tabel 2.11.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Subulussalam

Kecamatan	Status DDDT Air		Luas (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Longkib	15.729,93	85,36	15.815,30
Penanggalan	11.587,30	-	11.587,30
Rundeng	21.002,97	1.008,29	22.011,26
Simpang Kiri	16.506,36	85,35	16.591,71
Sultan Daulat	49.552,73	2.733,34	52.286,08
Total Luas (Ha)	114.379,29	3.912,35	118.291,64

Status daya dukung dan daya tampung air di Kota Subulussalam yang belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Namun, penting untuk menganalisis kondisi ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

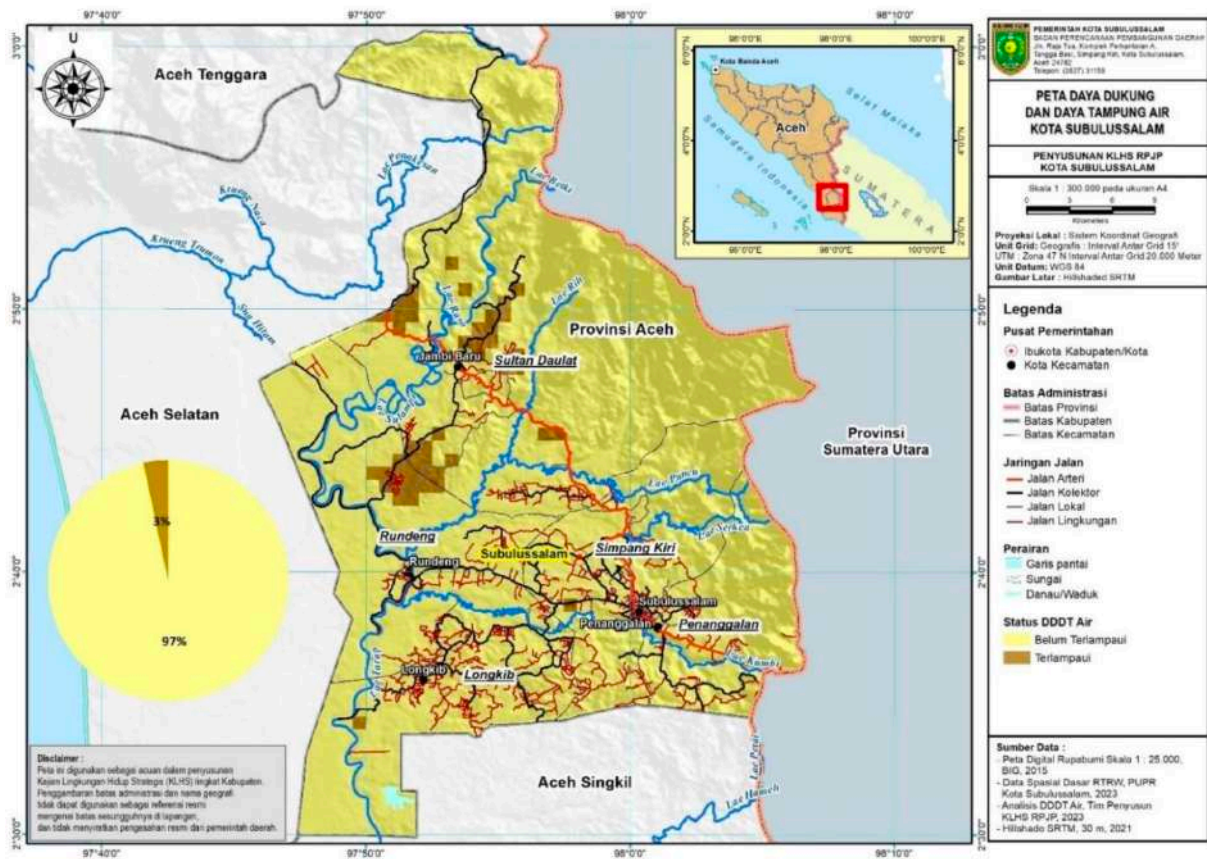
Dari segi lingkungan, belum terlampauinya daya dukung dan daya tampung air mengindikasikan bahwa ekosistem yang terkait dengan sumber daya air, seperti

hutan, sungai, dan lahan gambut, masih relatif terjaga. Kondisi ini penting untuk menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah erosi, dan menjaga kualitas air. Namun, tekanan terhadap lingkungan tetap perlu diwaspadai. Alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur dapat mengancam kelestarian sumber daya air jika tidak dikelola dengan baik. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Subulussalam telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai akibat sedimentasi dan pencemaran dari limbah perkebunan. Hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi tentunya.

Dari segi sosial, belum terlampauinya daya dukung dan daya tampung air berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti akses yang lebih baik terhadap air bersih dan peluang untuk mengembangkan kegiatan berbasis sumber daya air, seperti pertanian, perikanan, atau ekowisata. Namun, distribusi manfaat ini perlu dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat adat. Masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi ekonomi, ketersediaan sumber daya air yang memadai merupakan modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Subulussalam. Air adalah input yang vital bagi sektor-sektor produktif, seperti pertanian, industri, atau pariwisata. Menurut data dari Bappeda Kota Subulussalam, sektor pertanian menyumbang PDRB kota cukup signifikan, sehingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi juga harus dilakukan secara seimbang dengan pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Pengembangan industri atau pariwisata yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air dan menimbulkan konflik dengan kebutuhan masyarakat lokal. Diperlukan perencanaan yang matang dan partisipatif untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan adil.



Gambar 2.17.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang Sudah dan Belum Terlampaui di Kota Subulussalam

Berdasarkan data status air di Kota Subulussalam, beberapa kecamatan mengalami status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) air yang terlampaui. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Longkib, Rundeng, Simpang Kiri, dan Sultan Daulat. Kecamatan Sultan Daulat memiliki luas area terluas yang status DDDT airnya terlampaui, yaitu seluas 2.733,34 hektar dari total luas 52.286,08 hektar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, perubahan tata guna lahan, dan aktivitas ekonomi yang intensif di kecamatan tersebut. Kecamatan Sultan Daulat merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Subulussalam, sehingga tekanan terhadap sumber daya air lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Rundeng juga memiliki luas area yang cukup signifikan dengan status DDDT air terlampaui, yaitu 1.008,29 hektar dari total luas 22.011,26 hektar. Rundeng merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki topografi berbukit-bukit. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi dan sedimentasi yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air di kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Longkib dan Simpang Kiri memiliki luas area dengan status DDDT air terlampaui yang relatif kecil, masing-masing 85,36 hektar dan 85,35 hektar.

Meskipun luasnya kecil, tetap perlu diwaspadai karena dapat menunjukkan adanya tekanan terhadap sumber daya air di lokasi-lokasi tertentu dalam kecamatan tersebut.

Secara umum, status DDDT air yang terlampaui di beberapa kecamatan Kota Subulussalam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, aktivitas ekonomi yang intensif, serta kondisi topografi yang memengaruhi kualitas dan kuantitas air. Diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di Kota Subulussalam.

2.1.3.2. Daya Dukung Lahan untuk Permukiman

Berdasarkan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan saat ini, kajian ini dapat menggambarkan bahwa untuk menampung penduduk saat ini di Kota Subulussalam, lahan yang tersedia masih cukup dengan kelas sedang. Kemampuan lahan untuk tempat tinggal atau permukiman penduduk di Kota Subulussalam adalah dengan ambang batas (Ap) 6.477.272 penduduk, dan Dengan penduduk saat ini (95.199 belum terlampaui. Namun demikian akan lebih dalam nantinya dilihat dari sisi jasa ekosistem budaya (C1) untuk menyediakan tempat tinggal dengan kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah akan dibahas pada bagian DDDT lingkungan berbasis Jasa Ekosistem (JE). Namun demikian dari kajian DDDT lahan untuk permukiman ini dinyatakan bahwa luas lahan di Kota Subulussalam yang layak untuk wilayah permukiman adalah seluas 52.580 hektar.

2.1.3.3. Daya Dukung Lahan untuk Menghasilkan Bahan Pangan Utama Beras

Konsumsi pangan menjadi salah satu objek yang dihitung oleh BPS dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran ini menyangkut dengan pengeluaran (*expenditure*) penduduk. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Subulussalam untuk makanan sebesar Rp484.105 dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk non makanan sebesar Rp433.839. Untuk itu penduduk di Kota Subulussalam memerlukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi pengeluaran tersebut. Hasil Kajian dari Swiss Contact juga mencoba menjelaskan mengenai pendapatan untuk hidup layak di Kota Subulussalam dimana menurut pola makan untuk rumah tangga dengan empat orang anggota keluarga per bulan saja adalah sebesar Rp. 2,690,327. Telah termasuk di dalamnya konsumsi protein, karbohidrat dan lemak sebagaimana

dianjurkan. Dan itu menjadi bagian dari total biaya penghidupan yang layak di Kota Subulussalam saat ini, yaitu sebesar Rp. 6.883.578 per bulan.

Untuk beras adalah salah satu komoditi yang dimana di saat masyarakat tidak dapat memproduksinya sendiri maka mereka harus membeli. Dan menurut BPS pengeluaran terbesar makanan masyarakat saat ini digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi (12,60 persen) diikuti rokok (9,70 persen) dan padi-padian (8,49 persen). Maka untuk itu pembangunan ke depan dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi sejumlah pengeluaran tersebut.

Kebutuhan Konsumsi

Tingkat konsumsi masyarakat Kota Subulussalam terhadap beras dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada saat ini, ditambah dengan rata-rata konsumsi penduduk terhadap beras dalam satu tahun. Jumlah penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2023 adalah sebesar 95.962 jiwa, sementara konsumsi beras per kapita per tahun adalah sebesar 114 kilogram. Dengan demikian maka kebutuhan beras per tahun di Kota Subulussalam adalah sebesar 10.940 ton.

Produksi Pangan Utama Beras

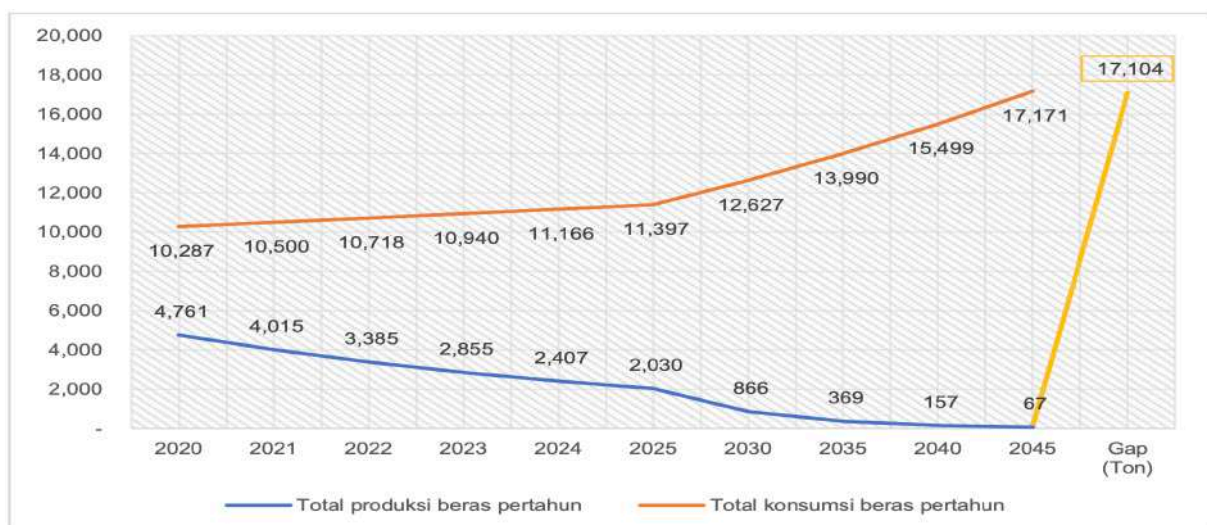
Produksi padi di Kota Subulussalam saat ini sangat tergantung pada luasan lahan sawah yang tersedia dan kesuburannya. Pada tahun 2023 Kota Subulussalam memiliki lahan sawah seluas 1.113 hektar. Setiap hektar sawah diperkirakan mampu memproduksi padi sebanyak 4,5ton sekali panen, sementara diperkirakan jumlah panen per tahun adalah sebanyak 1 kali. Dengan demikian kemampuan lahan di Kota Subulussalam memproduksi padi dalam setahun adalah sebesar 5.008 ton per tahun, sehingga dapat dihitung ketersediaan beras per tahun di Kota Subulussalam secara swasembada adalah sebesar 2.855 ton.

Gap antara Produksi dan Konsumsi

Salah satu isu di Kota Subulussalam adalah tentang penyusutan lahan baku sawah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat bahwa pada tahun 2010 di Kota Subulussalam masih terdapat lahan sawah seluas 10.206 hektar, namun pada tahun 2020 hanya tinggal 1.856 hektar. Artinya, telah terjadi kehilangan lahan sawah sebesar -15,67 persen setiap tahun. Untuk itu kemampuan Kota Subulussalam menghasilkan beras semakin menurun. Untuk kebutuhan mendatang, semisal untuk periode 5 tahun pembangunan sesuai rancangan RPJMD Kota Subulussalam 2025-2049, hal ini dapat menjadi salah satu isu utama. Semakin kecil kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan utama, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk menambah pengeluaran untuk memenuhi

konsumsi pangan. Kajian yang dilakukan oleh Bappeda Aceh menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir telah banyak masyarakat yang mengkonversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit, di samping menjadi lahan perumahan dan lokasi-lokasi usaha. Untuk itu agenda untuk menciptakan lahan pertanian sawah yang baru ke depan dapat dinilai strategis. Berikut adalah gambaran kebutuhan beras dan kemampuan lahan di Kota Subulussalam untuk menghasilkan pangan utama beras, dimana jika tidak dilakukan upaya, maka gap antara kebutuhan dan pemenuhan tersebut akan semakin lebar. Pada tahun 2045 dapat dihitung bahwa Kota Subulussalam membutuhkan pasokan beras dari luar daerah sebesar 17.104 ton per tahun.

Kota Subulussalam diperkirakan akan mengalami surplus atau kecukupan beras dalam jangka pendek, namun diikuti oleh ancaman defisit yang kritis dalam jangka panjang. Pada periode 2020-2024, total produksi beras masih berada di atas tingkat konsumsi, menciptakan kondisi surplus. Namun, mulai tahun 2025, garis konsumsi diproyeksikan melampaui produksi, sehingga menciptakan "Gap" atau kesenjangan defisit yang terus melebar secara signifikan hingga tahun 2045. Defisit ini menunjukkan bahwa permintaan beras tumbuh jauh lebih cepat daripada kapasitas produksi lokal. Jika tidak diintervensi dengan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengelola konsumsi, kota ini akan menjadi sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduknya dalam beberapa dekade mendatang, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.



Gambar 2.18.

Grafik Perhitungan dan Proyeksi Konsumsi Pangan Utama Beras dan Kemampuan Produksi Lahan Sawah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2045

2.1.3.4. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Penilaian Ekosistem Milenium oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, berangkat dari premis bahwa nilai jasa ekosistem yang lebih tinggi mengindikasikan kapasitas yang lebih besar dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem, yang merupakan manfaat esensial yang diakses manusia dari lingkungan alam, dikondisikan oleh interaksi antara faktor endogen dan dinamika faktor eksogen. Hal ini diwujudkan melalui tiga aspek utama: Vegetasi Alam (KVA), Tata Guna Lahan, dan Karakteristik Bentang Alam (KBA).

Jasa ekosistem dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama manfaat, yaitu: penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*). Premis mendasar dalam evaluasi jasa ekosistem menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat jasa ekosistem yang tersedia dalam suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung dan menampung kebutuhan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemahaman terhadap kapasitas jasa ekosistem menjadi krusial dalam penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Subulussalam, menandakan pentingnya integrasi antara kelestarian ekosistem dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kajian KLHS ini hanya 6 jasa ekosistem saja yang diuraikan yang dianggap paling terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Subulussalam.

2.1.3.5. Jasa Lingkungan Tinggi

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (P2)

Ketersediaan air bersih di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis batuan tiap ekoregion akan menggambarkan potensi akuifer atau *impermeable layer*. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah.

Ekosistem dataran aluvial, dataran fluvomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan memiliki potensi tinggi. Luasan lahan berpotensi tinggi di Ekosistem berpotensi sedang dan rendah untuk penyediaan air adalah pegunungan/perbukitan struktural patahan atau lipatan. Perbedaan karakteristik tanah dan batuan antar Ekosistem menyebabkan variasi kemampuan dalam menyerap dan mengalirkan air. Hal tersebut akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dan permukaan suatu wilayah. Karakteristik tanah di dataran aluvial dataran fluvomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan didominasi oleh pasir.

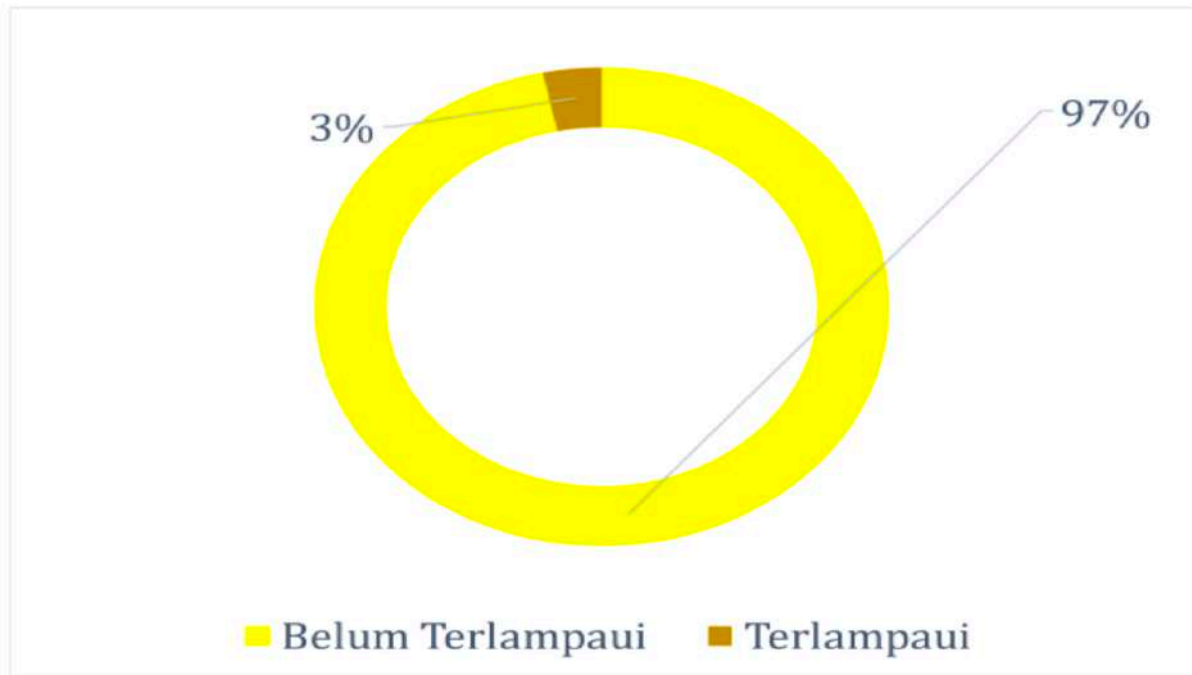
Rongga antar pori-pori tanah di tanah bertekstur pasir relatif besar sehingga dapat menampung air tanah. Jarak pori antar tanah yang besar juga memudahkan air hujan masuk dan mengalir.

Ekosistem ini memiliki banyak akuifer karena tingginya kemampuan dalam meluluskan dan meneruskan air. Ekosistem lembah mempunyai potensi tinggi untuk ketersediaan air karena lokasinya lebih rendah. Hal ini sesuai dengan konsep gravitasi bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke lebih rendah. Air hujan yang jatuh di pegunungan akan mengalir ke lembah sehingga potensi ketersediaannya tinggi. Sebagian Wilayah Kota Subulussalam berada pada ekosistem dataran aluvial, fluviomarin dan lembah antar pegunungan/perbukitan. Ekosistem pegunungan dan perbukitan struktural mempunyai potensi rendah untuk penyediaan air bersih. Karakteristik batuan di bentuk lahan struktural berupa batuan keras. Kondisi ini membuat banyak impermeable layer (lapisan yang terdiri dari batuan yang kedap air) di wilayah ini. Air hujan tidak akan bisa masuk ke dalam tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini membuat air tanah sulit ditemukan di pegunungan atau perbukitan struktural. Sumber air permukaan, yang berupa sungai, hanya mengalir saat musim penghujan saja. Sumber air hanya berasal dari rembesan yang muncul di rekahan batuan. Kondisi tersebut membuat penyediaan air bersih di ekosistem ini relatif lebih rendah dibandingkan dataran aluvial. Masyarakat di pegunungan atau perbukitan sering mengalami kesulitan air bersih, terutama musim kemarau. Namun keberadaan sungai-sungai besar yang melintas Kota Subulussalam serta perannya sebagai daerah perlintasan sungai, merupakan potensi air baku alamiah yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Ketersediaan sumber air baku yang belum terlampaui di Kota Subulussalam merupakan nilai positif bagi daerah. Untuk itu perlindungan terhadap kuantitas dan kualitas harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Grafik 3.21 memperlihatkan bahwa hasil analisis ketersediaan air (neraca air di Kota Subulussalam) masih sangat berlimpah atau belum terlampaui. Hanya sebagian kecil dari Kecamatan Sultan Daud saja yang sudah dilampaui yaitu mencapai 3 persen. Pada prinsipnya ketersediaan air di kedua DAS (DAS Singkil dan Trumon masih sangat berlebihan).

Kebutuhan air baku di Subulussalam semakin tinggi menyusul meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perluasan permukiman dalam lima tahun terakhir. Cakupan pelayanan air bersih Subulussalam juga terus meluas sehingga membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selama ini, PDAM Subulussalam saat ini masih mengandalkan dua sumber air bersih yakni dari Sungai Lae Soraya dan

Sungai Lae Sirep-rep. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah sistem jaringan air bersih ke sambungan rumah dan kapasitas produksi PDAM daerah.



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

Gambar 2.19.
Persentase Ketersediaan Air di Kota Subulussalam

Selain itu Kota Subulussalam memiliki sumber air baku yang melimpah yang berasal dari CAT seluas 86.079,88 Ha maupun air permukaan yang belum optimal dimanfaatkan. Dengan adanya sungai-sungai tersebut, maka Kota Subulussalam memiliki potensi pemanfaatan sungai untuk kebutuhan irigasi, perhubungan (transportasi sungai), serta sanitasi lingkungan. Terkait dengan prasarana irigasi kota, Kota Subulussalam memiliki total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota seluas 4.310 Ha.

Kegiatan pemanfaatan air tanah yang berlebihan terutama di kawasan permukiman dan perkebunan kelapa sawit yang berlebihan sebaiknya perlu di hindari karena akan mengganggu stabilitas cadangan air tanah. Komoditas kelapa sawit dikenal banyak membutuhkan air untuk perkembangannya. Sementara ketersediaan air permukaan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Mungkin hal ini lah yang menyebabkan mengapa jasa ekosistem penyediaan air bersih berada pada kategori rendah. Sepertinya hal ini juga diindikasikan adanya penurunan tutupan hutan, peningkatan luasan lahan kritis dan penurunan kualitas air sungai (daerah aliran sungai).

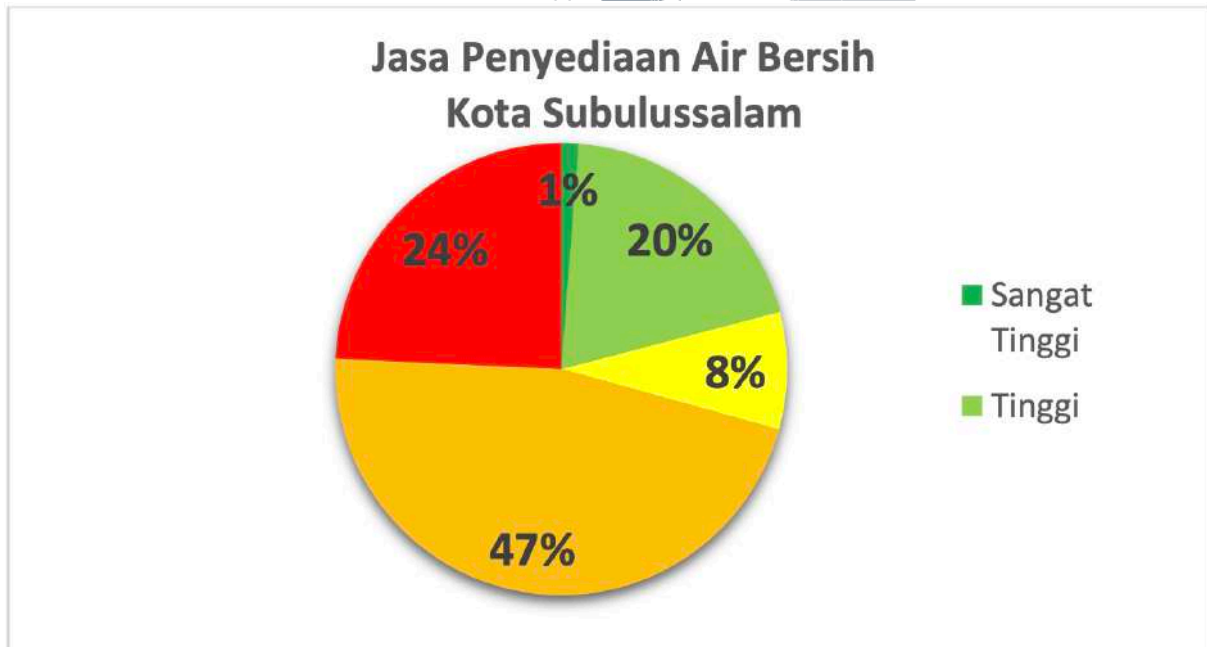
Berdasarkan Tabel yang disajikan, dapat dianalisis bahwa Kota Subulussalam memiliki total luas wilayah 118.245,03 hektar yang terbagi ke dalam lima kecamatan

dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih yang bervariasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi.

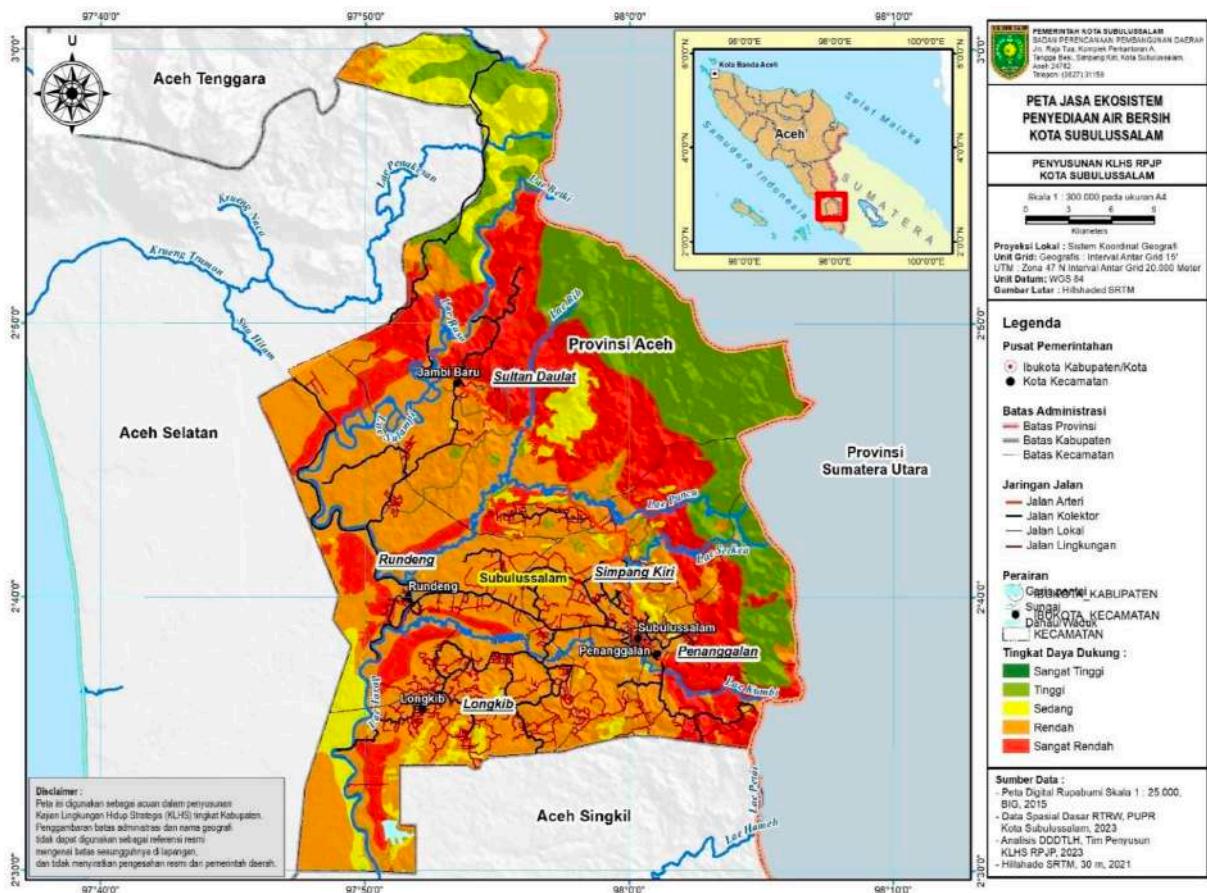
Kecamatan Sultan Daulat merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar atau sekitar 44,22 persen dari total luas Kota Subulussalam. Di kecamatan ini, area dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi mendominasi, mencakup 17.545,24 hektar (33,56 persen dari luas kecamatan). Hal ini mengindikasikan bahwa Sultan Daulat memiliki potensi yang baik dalam penyediaan air bersih. Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya (75,15 persen) termasuk dalam kategori jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah. Ini menunjukkan bahwa Rundeng mungkin menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih dan memerlukan perhatian khusus. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki luas yang hampir sama, masing-masing 16.589,70 hektar dan 15.779,15 hektar. Di Simpang Kiri, 64,09 persen wilayahnya tergolong jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah, sementara di Longkib, 78,80 persen wilayahnya juga masuk kategori rendah. Kedua kecamatan ini juga mungkin memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan penyediaan air bersih. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil dengan luas 11.580,26 hektar, memiliki distribusi tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih yang lebih beragam. 45,19 persen wilayahnya tergolong sangat rendah, namun 32,11 persen tergolong tinggi. Ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam potensi penyediaan air bersih di kecamatan ini.

Secara keseluruhan, Kota Subulussalam didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem penyediaan air bersih rendah (46,44 persen) dan sangat rendah (24,25 persen). Namun, terdapat 19,69 persen wilayah yang tergolong tingkat tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat dan Penanggalan. Ini menunjukkan adanya potensi sumber daya air yang baik di beberapa area, namun sebagian besar wilayah kota mungkin menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih.

Analisis ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Subulussalam untuk merencanakan strategi pengelolaan sumber daya air dan peningkatan layanan penyediaan air bersih. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dapat dijadikan prioritas untuk konservasi, sementara area dengan tingkat rendah mungkin memerlukan intervensi dan pengembangan infrastruktur air bersih. Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam diperlihatkan dalam Gambar berikut. Sementara sebaran secara spasial disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 2.20.
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih



Gambar 2.21.
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Subulussalam

Tabel 2.12.
Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	255,69	1,62	0,15	0,00	2.010,42	12,74	12.434,01	78,80	1.078,88	6,84	15.779,15
Penanggalan	12,00	0,10	3.717,90	32,11	169,39	1,46	2.447,45	21,13	5.233,52	45,19	11.580,26
Rundeng	698,59	3,17	2,24	0,01	744,32	3,38	16.541,87	75,15	4.024,23	18,28	22.011,25
Simpang Kiri	75,72	0,46	2.022,12	12,19	788,09	4,75	10.631,88	64,09	3.071,89	18,52	16.589,70
Sultan Daulat	564,79	1,08	17.545,24	33,56	6.208,63	11,87	12.860,44	24,60	15.265,02	29,20	52.284,67
Kota Subulussalam	1.606,79	1,36	23.287,65	19,69	9.920,86	8,39	54.915,64	46,44	28.673,54	24,25	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

b. Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan dari Bencana (R3)

Sebenarnya lahan di Kota Subulussalam mempunyai potensi tinggi sampai dengan sangat tinggi untuk mengatur dan mencegah terjadinya bencana. 13,80 persen luas wilayahnya mempunyai potensi sangat tinggi dan 3,87 persen termasuk dalam klasifikasi tinggi. Luasan yang berpotensi sangat rendah 16,38 persen atau 19.310,52 Ha. Selebihnya termasuk sedang dan rendah. Penggunaan lahan di masing-masing Ekosistem akan mencerminkan perlindungan dan pencegahan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam didominasi oleh perkebunan Kelapa sawit. Walaupun semakin banyak vegetasi maka perlindungan terhadap bencana akan semakin besar tetapi bukan untuk hanya satu jenis tanaman saja. Wilayah yang sudah berupa permukiman akan meningkatkan risiko jatuh korban dan kerugian akibat bencana.

Sebagian besar wilayah Kota Subulussalam yang berupa pegunungan dan perbukitan membuat adanya potensi bahaya erosi dan tanah longsor. Kemiringan lereng curam dan jenis tanah yang mudah tererosi menjadi penyebab terjadinya bencana. Hampir seluruh pegunungan di Kota Subulussalam ini sudah bukan berupa hutan primer sehingga bencana sering terjadi di daerah ini. Sebagian air hujan yang jatuh akan langsung menuju ke tanah menjadi aliran permukaan yang mengalir begitu cepat ke daerah hilirnya. Hal ini akan meningkatkan beban tanah dan menciptakan bidang gelincir yang memicu tanah longsor. Sebenarnya keberadaan pegunungan juga berperan penting untuk mengurangi potensi bahaya banjir di bagian hilir. Air hujan yang terserap akan mengurangi jumlah yang langsung menuju ke sistem sungai dan sedimentasi. Aliran permukaan dan volume sungai akan stabil sehingga bahaya banjir dapat berkurang. Kerusakan wilayah hulu dapat berakibat terjadinya banjir di bagian hulu dan berimbas ke wilayah hilir.

Sungai Lae Soraya sendiri merupakan sungai besar yang berhulu di wilayah Kota Subulussalam dan melintas di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Aceh Singkil. Sementara Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng. Kerusakan lahan sudah cukup parah di bagian hulunya dan berdampak ke Kota Subulussalam dan wilayah hilirnya yaitu Aceh Singkil.

Berdasarkan Tabel yang disajikan, Kecamatan Sultan Daulat merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar atau sekitar 44,22 persen dari total luas Kota Subulussalam. Di kecamatan ini, distribusi tingkat jasa ekosistem cukup beragam. Area dengan tingkat sedang mendominasi, mencakup 15.716,33 hektar

(30,06 persen dari luas kecamatan), diikuti oleh area dengan tingkat rendah sebesar 19.990,07 hektar (38,23 persen). Yang menarik, Sultan Daulat memiliki area terluas dengan tingkat jasa ekosistem sangat tinggi, yaitu 10.315,79 hektar (19,73 persen), menunjukkan potensi yang baik dalam pencegahan dan perlindungan bencana di sebagian wilayahnya.

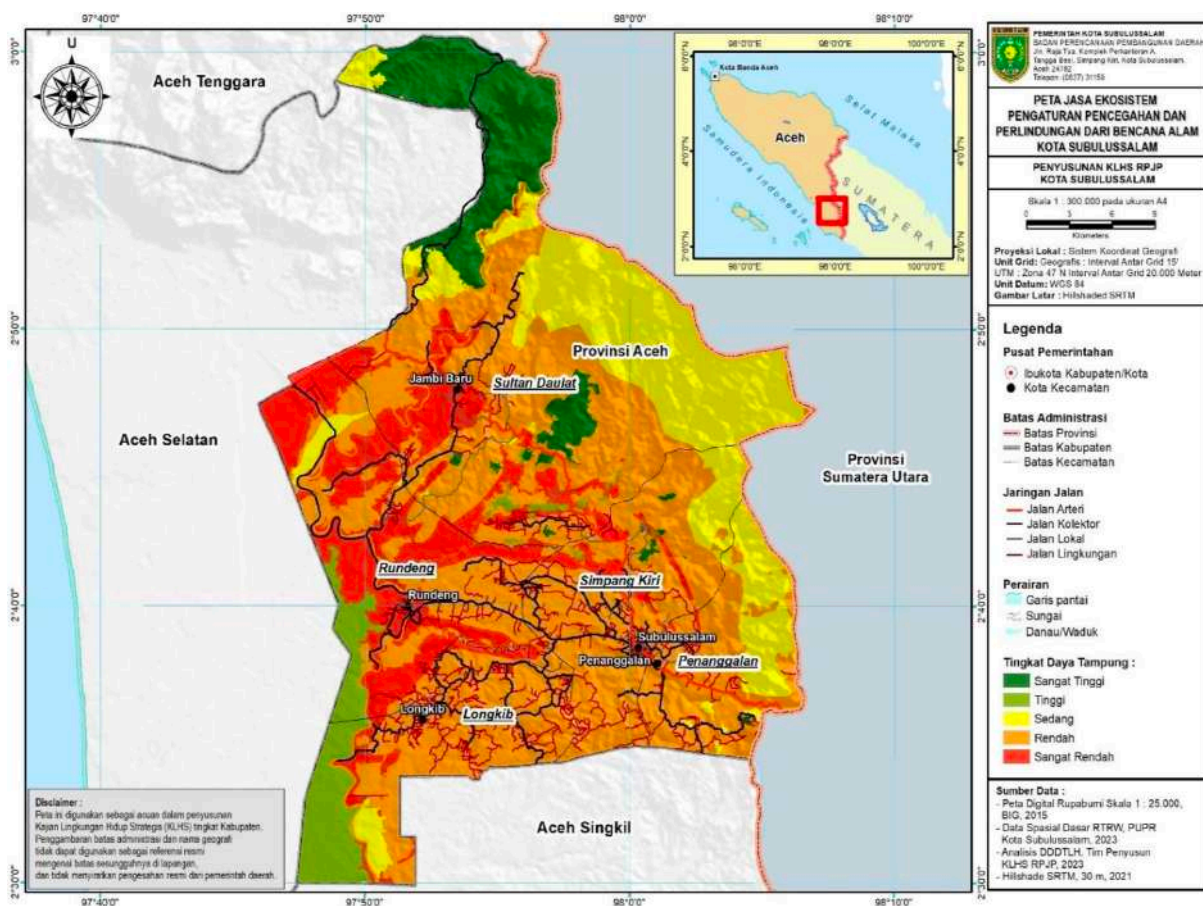
Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya termasuk dalam kategori jasa ekosistem sangat rendah (51,16 persen) dan rendah (38,36 persen). Ini mengindikasikan bahwa Rundeng mungkin lebih rentan terhadap bencana dan memerlukan perhatian khusus dalam hal mitigasi bencana. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki luas yang hampir sama, masing-masing 16.589,70 hektar dan 15.779,15 hektar. Di Simpang Kiri, 79,55 persen wilayahnya tergolong jasa ekosistem rendah, sementara di Longkib, 66,48 persen wilayahnya juga masuk kategori rendah. Namun, Longkib memiliki area yang cukup signifikan (21,50 persen) dengan tingkat jasa ekosistem tinggi, yang bisa menjadi fokus untuk upaya konservasi dan perlindungan. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil dengan luas 11.580,26 hektar, memiliki distribusi yang menarik. Mayoritas wilayahnya (65,07 persen) tergolong tingkat jasa ekosistem rendah, namun terdapat 33,98 persen wilayah dengan tingkat sedang, menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan fungsi ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan bencana.

Secara keseluruhan, Kota Subulussalam didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana rendah (50,45 persen) dan sedang (19,34 persen). Namun, terdapat 8,90 persen wilayah yang tergolong tingkat sangat tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat, yang bisa menjadi area prioritas untuk konservasi dan model pengelolaan ekosistem yang baik. Rinciannya diperlihatkan dalam Gambar 2.23.

Analisis ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Subulussalam untuk merencanakan strategi mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan fungsinya, sementara area dengan tingkat rendah dan sangat rendah memerlukan intervensi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Adapun sebaran secara spasial dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Gambar 2.22.
Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam



Gambar 2.23.
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Penggunaan lahan di Kota Subulussalam yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dapat mempengaruhi efektivitas jasa ekosistem dalam pencegahan bencana. Meskipun vegetasi yang lebih banyak dapat meningkatkan perlindungan terhadap bencana, dominasi satu jenis tanaman saja dapat mengurangi keragaman ekosistem dan fungsi pencegahan bencananya.

Kondisi geografis Kota Subulussalam yang sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan juga meningkatkan potensi bahaya erosi dan tanah longsor. Hilangnya hutan primer di pegunungan ini menyebabkan air hujan langsung mengalir ke permukaan tanah, meningkatkan risiko tanah longsor. Sebaliknya, keberadaan pegunungan yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi potensi banjir di bagian hilir dengan menyerap air hujan dan menstabilkan aliran permukaan.

Untuk meningkatkan upaya pencegahan kebencanaan di Kota Subulussalam, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Konservasi dan restorasi ekosistem: Memprioritaskan konservasi di area dengan tingkat jasa ekosistem sangat tinggi, seperti di Kecamatan Sultan Daulat, dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi di area dengan tingkat rendah dan sangat rendah.
- 2) Diversifikasi penggunaan lahan: Mendorong keragaman tanaman dan sistem agroforestri untuk meningkatkan ketahanan ekosistem dan fungsi pencegahan bencana, daripada hanya mengandalkan satu jenis tanaman seperti kelapa sawit.
- 3) Pengelolaan DAS terpadu: Menerapkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, termasuk konservasi hutan di bagian hulu, untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi di bagian hilir.
- 4) Perencanaan tata ruang berbasis risiko: Mengintegrasikan penilaian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang kota, dengan mempertimbangkan tingkat jasa ekosistem dan kerentanan wilayah terhadap bencana.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan tentang peran ekosistem dalam pencegahan bencana.

Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berbasis ekosistem dalam upaya pencegahan kebencanaan, Kota Subulussalam dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap bencana dan melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

Merujuk pada dokumen kajian risiko bencana (KRB) Kota Subulussalam, beberapa hal dalam mitigasi bencana di antaranya:

- 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
- 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
- 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
- 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- 5) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- 6) Pengembangan sistem pemulihan bencana

c. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1)

Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup (sense of living) yang didefinisikan sebagai ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental yang disediakan oleh ekosistem (P3S, 2016). Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Secara umum, jenis lahan yang memiliki potensi tinggi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup terletak pada ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunung api, dan dataran fluviomarin. Ketiga ekoregion tersebut merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang datar dengan ketersediaan air bersih yang relatif banyak, sehingga cocok untuk pengembangan permukiman.

Jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam didominasi oleh kelas sangat rendah, yaitu seluas 90.856,16 hektar. Sementara itu kawasan yang memiliki kelas sangat tinggi hanya seluas 710,31 dan kawasan dengan kelas tinggi hanya seluas 335,56 hektar. Kecamatan yang memiliki kawasan dengan kelas sangat tinggi adalah Kecamatan Simpang Kiri, yaitu seluas 445,63 hektar, sementara dengan kelas tinggi terluas hanya di Kecamatan Rundeng, yaitu seluas 155,58 hektar. Kecamatan yang memiliki kelas sangat rendah terluas adalah Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 50.114,75 hektar, kemudian di Kecamatan Rundeng seluas 17.886,70 hektar.

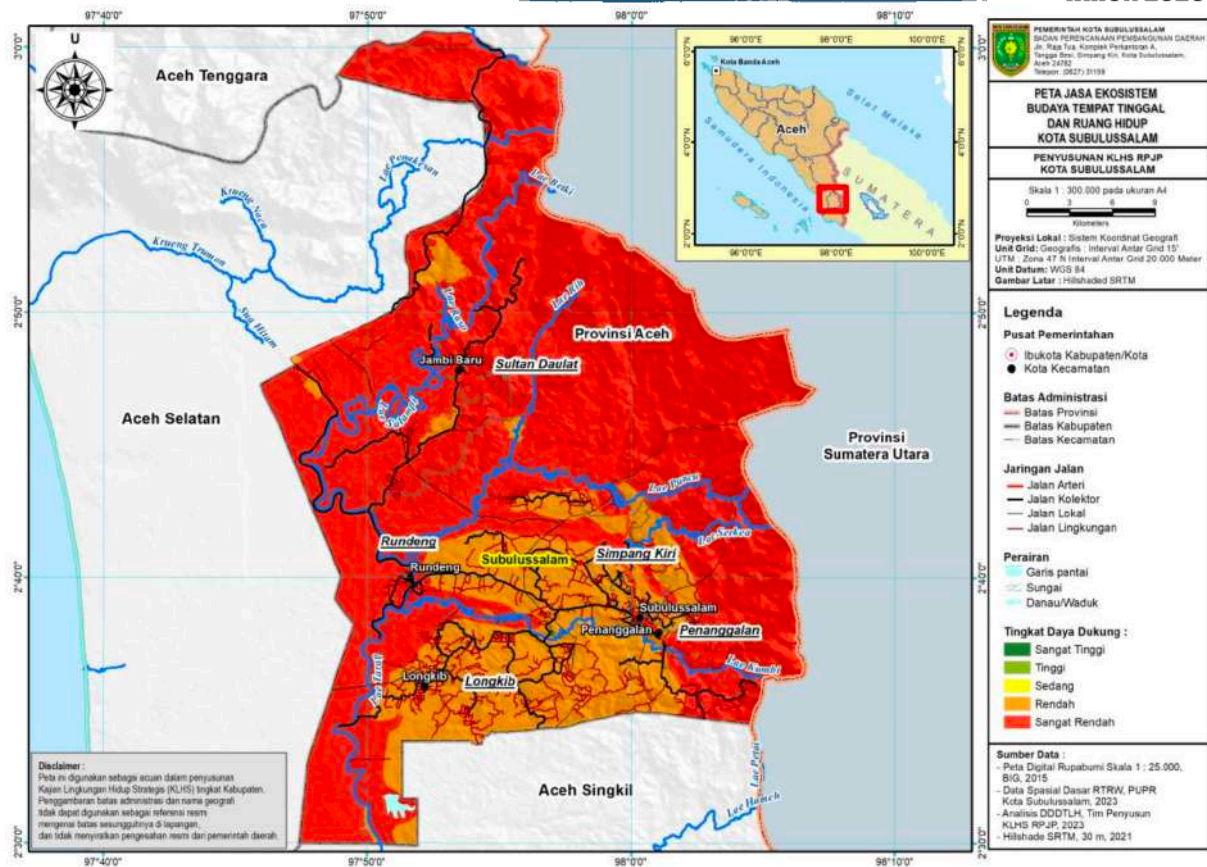
Kelas jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam didominasi oleh kelas sangat rendah sebesar 77 persen dan kelas rendah sebesar 22 persen. Dengan demikian maka potensi wilayah di Kota Subulussalam untuk mendukung permukiman yang baik didominasi oleh 99 persen

rendah. Sisanya, hanya 1 persen yang mendukung dengan kelas sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Peta di bawah memperlihatkan lokasi-lokasi dimana kelas jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Subulussalam dengan kelas sangat rendah sangat dominan. Demikian juga wilayah dengan kelas rendah juga terlihat mendominasi. Hanya sebagian kecil, seperti di Kecamatan Simpang Kiri terdapat wilayah yang berwarna hijau yang menunjukkan terdapat wilayah dengan kelas tinggi dan sangat tinggi.



Gambar 2.24.
**Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
di Kota Subulussalam**



Gambar 2.25.
Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Subulussalam

Tabel 2.13.

Tingkat Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Setiap Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	73,36	0,46	12,45	0,08	0,22	0,00	9.364,10	59,34	6.329,01	40,11	15.779,15
Penanggalan	61,06	0,53	54,30	0,47	1,64	0,01	1.811,28	15,64	9.651,97	83,35	11.580,26
Rundeng	94,58	0,43	155,58	0,71	19,64	0,09	3.854,75	17,51	17.886,70	81,26	22.011,25
Simpang Kiri	445,63	2,69	20,10	0,12	33,82	0,20	9.216,42	55,56	6.873,72	41,43	16.589,70
Sultan Daulat	35,67	0,07	93,12	0,18	61,05	0,12	1.980,06	3,79	50.114,75	95,85	52.284,67
Kota Subulussalam	710,31	0,60	335,56	0,18	116,38	0,10	26.226,61	22,18	90.856,16	76,84	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

d. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JPE1)

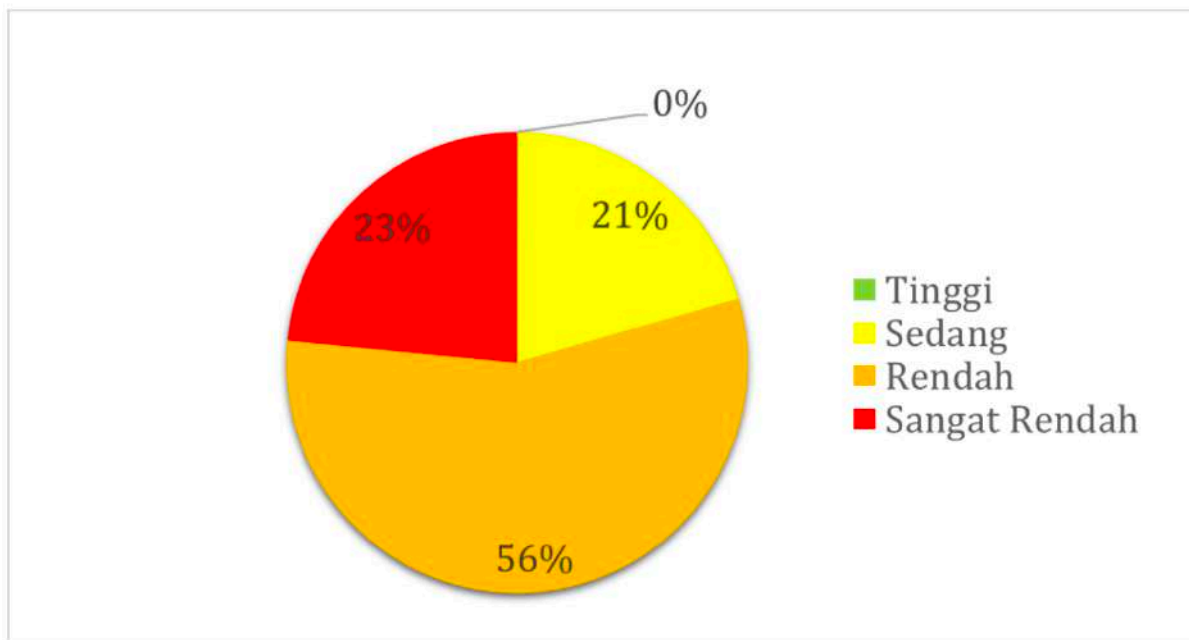
Dari klasifikasi jasa ekosistemnya, Kota Subulussalam memperlihatkan 52.639,7 Ha luas lahannya berupa pegunungan dan perbukitan lipatan dan patahan, yang kurang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai jasa lingkungan untuk budidaya pertanian lahan basah. Kondisi tanah di pegunungan dan perbukitan struktural memiliki ketebalan yang tipis dan minim unsur hara. Ketersediaan air di ekosistem ini juga terbatas karena terdapat impermeable layer sehingga minim air tanah. Ekoregion yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan adalah dataran aluvial dan fluviomarin. Kota Subulussalam berada di ekosistem tersebut dengan luasan mencapai 54.323,24 Ha. Tanah alluvium memiliki tanah dengan lapisan tebal dan kandungan unsur haranya tinggi. Ketersediaan air di dataran aluvial melimpah karena tekstur tanah yang mempunyai kemampuan mengalirkan air dengan baik. Karakteristik tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah. Kegiatan pertanian lahan basah membutuhkan lahan yang subur serta ketersediaan air yang cukup (Sumber: Analisis Tim Ahli terkait, Daya dukung daya tampung Kota Subulussalam, 2024).

Terlihat dari Tabel di bawah bahwa hanya 68,8 Ha atau 0,058% dari luasan wilayah Kota Subulussalam yang berpotensi tinggi dan 27.259,38Ha atau 23,12% dari luas wilayahnya yang berpotensi tinggi sebagai jasa penyedia pangan. Selebihnya termasuk kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Kecamatan Sultan Daulat wilayahnya paling luas yaitu 20.306,47 Ha atau 17,22% dengan potensi sangat rendah sebagai penyedia jasa pangan. Sementara Simpang Kiri dan Longkib memiliki indeks tinggi, masing-masing seluas 9.192,02 Ha dan 8.917,49Ha atau 7,8% dan 7,56% dari luas wilayahnya. Maknanya adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi tinggi dan sangat tinggi sebagai jasa penyedia pangan haruslah dioptimalkan kemampuannya untuk dimanfaatkan, sebab dari karakteristik bentang lahan, tata guna lahan, dan vegetasi mendukung untuk menjadi penyedia jasa penyediaan pangan. Sebagai gambaran umum dapat dilihat Tabel berikut, persentasenya, dan sebaran spasialnya disajikan dalam Gambar di bawah.

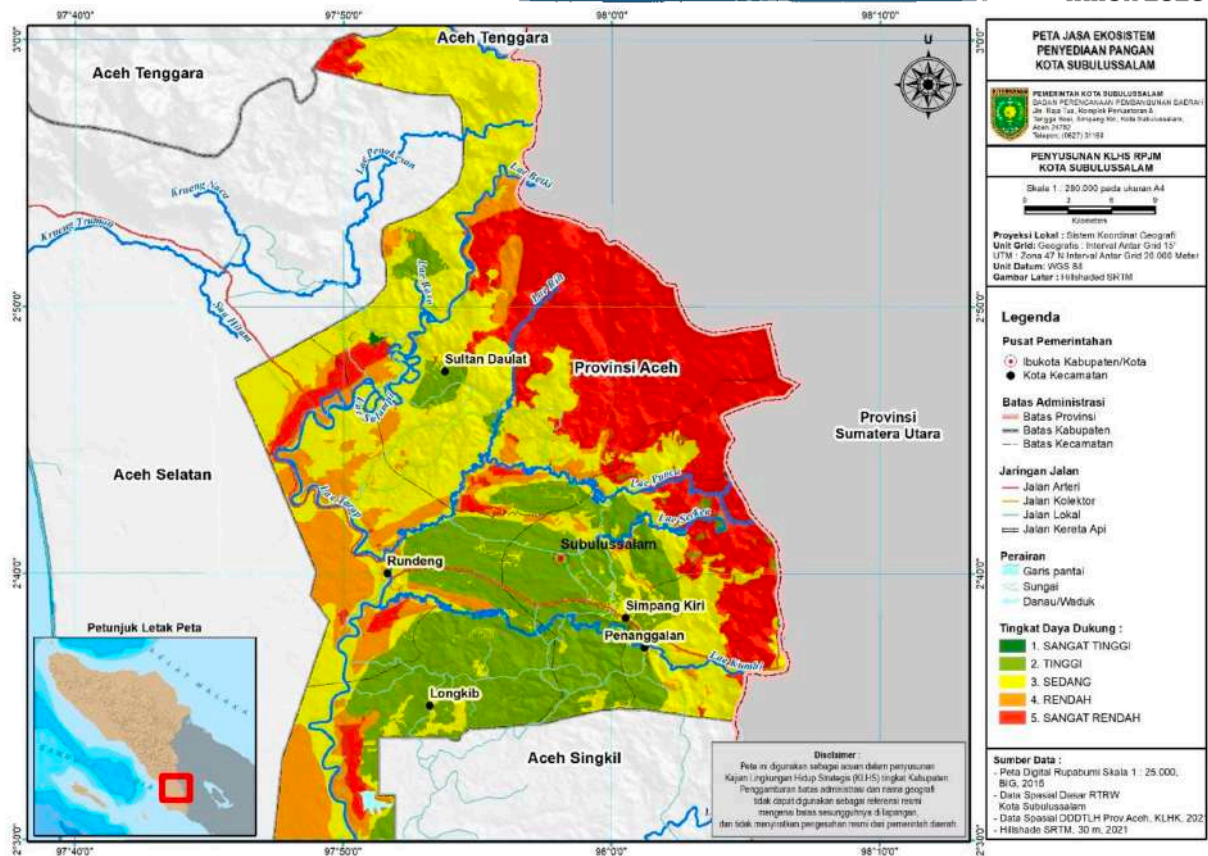
Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Subulussalam memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari aspek sosial, jasa ekosistem ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan masyarakat lokal, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui akses terhadap pangan yang beragam, segar, dan bergizi. Dalam aspek ekonomi, jasa ekosistem penyediaan pangan memberikan peluang mata pencaharian bagi masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, mendorong pengembangan ekonomi lokal, serta menghemat biaya terkait transportasi dan

distribusi pangan. Sementara dari aspek lingkungan, menjaga dan memanfaatkan sumber pangan dari ekosistem secara berkelanjutan dapat melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas lahan dan sumber daya air, serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 28,37% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota pada tahun 2020. Angka ini menekankan peran penting jasa ekosistem penyediaan pangan terhadap perekonomian lokal. Untuk memastikan kelestarian jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Subulussalam, diperlukan upaya-upaya sinergis dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menjaga dan memanfaatkan jasa ekosistem ini secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi kota tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, Kota Subulussalam dapat mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.



Gambar 2.26.
Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam



Gambar 2.27.
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Subulussalam

Tabel 2.14.

Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	2,23	0,01	8.509,96	53,93	3.096,76	19,63	4.170,20	26,43	15.779,15
Penanggalan	0,00	0,00	1,51	0,01	1.697,85	14,66	8.745,09	75,52	1.135,81	9,81	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	0,64	0,00	3.714,01	16,87	10.351,14	47,03	7.945,46	36,10	22.011,25
Simpang Kiri	0,00	0,00	1,70	0,01	8.554,18	51,56	6.179,03	37,25	1.854,78	11,18	16.589,70
Sultan Daulat	0,00	0,00	62,71	0,12	1.727,04	3,30	37.860,56	72,41	12.634,34	24,16	52.284,67
Kota Subulussalam	0,00	0,00	0,06	0,06	24.203,05	20,47	66.232,58	56,01	27.740,60	23,46	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

e. Jasa Ekosistem Pengaturan Lingkungan (JER1)

Jasa pengatur iklim yaitu ekosistem yaitu berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Tiap ekosistem memiliki ketinggian tempat yang berbeda-beda. Perbedaan ketinggian tersebut akan mempengaruhi kondisi suhu, kelembaban, potensi curah hujan, dan angin. Curah hujan di Kota Subulussalam akan tergantung kondisi pegunungan yang mempunyai curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Ada indikasi kemampuan pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon sudah menyusut karena berkurangnya hutan primer di Kota Subulussalam.

Ekosistem yang mempunyai luasan sempit seperti lembah antar pegunungan/perbukitan, atau dataran fluvio marin, berpotensi rendah untuk pengaturan iklim. Dampak yang dihasilkan terhadap iklim dari Ekosistem tersebut relatif minim karena luasnya sempit. Jumlah vegetasi di wilayah ini sudah berkurang karena pemanfaatannya berubah. Potensi untuk mengendalikan gas rumah kaca dan penyerapan karbon relatif rendah. Wilayah permukiman justru menjadi penyumbang gas kaca dan emisi karbon sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Hanya saja, luasan permukiman masih relatif sempit dibandingkan hutan sehingga masih dapat diserap oleh hutan. Minimnya vegetasi juga akan membuat suhu udara menjadi lebih panas karena minim pasokan oksigen murni.

Kota Subulussalam secara keseluruhan didominasi oleh area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim rendah, mencakup 60,61% (71.665,70 hektar) dari total luas wilayah, seperti yang disajikan dalam Tabel berikut. Ini diikuti oleh area dengan tingkat sangat rendah sebesar 15,04% (17.789,82 hektar). Namun, terdapat juga area dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim yang lebih baik, yaitu 8,71% (10.301,13 hektar) tergolong sangat tinggi, 4,96% (5.869,50 hektar) tinggi, dan 10,67% (12.618,88 hektar) sedang.

Kecamatan Sultan Daulat, yang merupakan kecamatan terluas dengan 52.284,67 hektar, memiliki distribusi yang unik. Meskipun 57,81% wilayahnya tergolong rendah, kecamatan ini memiliki area terluas dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi, yaitu 10.180,32 hektar (19,47%). Ini menunjukkan bahwa Sultan Daulat memiliki potensi signifikan dalam pengaturan iklim di sebagian wilayahnya. Kecamatan Rundeng, dengan luas 22.011,25 hektar, mayoritas wilayahnya termasuk dalam kategori jasa ekosistem pengaturan iklim rendah (53,22%) dan sangat rendah (39,06%). Ini mengindikasikan bahwa Rundeng mungkin kurang berkontribusi dalam pengaturan iklim dan mungkin memerlukan upaya peningkatan fungsi ekosistem. Kecamatan Simpang Kiri dan Longkib memiliki pola yang serupa, dengan dominasi area tingkat rendah (70,64% dan 60,44%

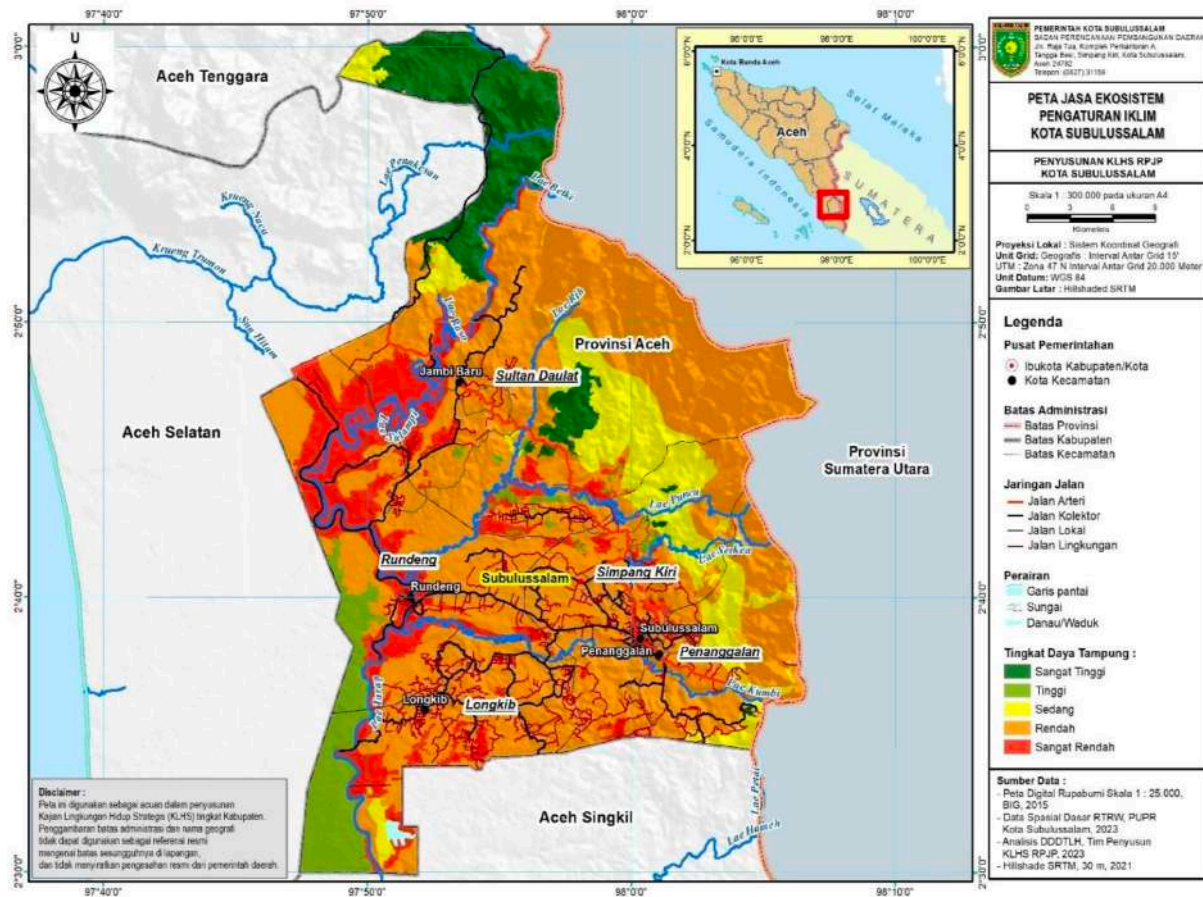
masing-masing). Namun, Longkib memiliki area yang cukup signifikan (21,50%) dengan tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi, yang bisa menjadi fokus untuk upaya konservasi dan peningkatan. Kecamatan Penanggalan, meskipun merupakan kecamatan terkecil, memiliki 73,15% wilayahnya tergolong tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim rendah. Namun, terdapat 24,87% wilayah dengan tingkat sedang, menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan fungsi ekosistem dalam pengaturan iklim. Untuk luasannya secara rinci diperlihatkan dalam Gambar berikut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Subulussalam memiliki tingkat jasa ekosistem pengaturan iklim yang relatif rendah. Namun, keberadaan area dengan tingkat sangat tinggi dan tinggi, terutama di Kecamatan Sultan Daulat dan Longkib, menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi ekosistem dalam pengaturan iklim.



Gambar 2.28.
Luas Jasa Pengaturan Iklim Kota Subulussalam

Pemerintah Kota Subulussalam dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Area dengan tingkat jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi perlu dijaga dan ditingkatkan fungsinya, sementara area dengan tingkat rendah dan sangat rendah memerlukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan ekosistem dalam pengaturan iklim. Untuk peta sebarannya disajikan dalam Gambar Peta berikut.



Gambar 2.29.
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Subulussalam

Tabel 2.15.
Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan iklim di Setiap Kota Subulussalam

Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	3.391,96	21,50	520,30	3,30	9.537,15	60,44	2.329,75	14,76	15.779,15
Penanggalan	38,69	0,33	0,00	0,00	2.879,52	24,87	8.471,20	73,15	190,84	1,65	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	1.700,01	7,72	0,00	0,00	11.713,45	53,22	8.597,79	39,06	22.011,25
Simpang Kiri	82,12	0,49	153,60	0,93	3.168,37	19,10	11.718,68	70,64	1.466,93	8,84	16.589,70
Sultan Daulat	10.180,32	19,47	623,93	1,19	6.050,69	11,57	30.225,21	57,81	5.204,51	9,95	52.284,67
Kota Subulussalam	10.301,13	8,71	5.869,50	4,96	12.618,88	10,67	71.665,70	60,61	17.789,82	15,04	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

f. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED4)

Keekaragaman hayati (bidoversitas) adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk kehidupan di bumi, interaksi diantara berbagai makhluk hidup dengan lingkungan dan habitatnya. Ada tiga jenis tingkat keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman tingkat genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Semakin beragam keanekaragaman genetik suatu populasi maka menunjukkan semakin besar kemampuan populasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies juga semakin tinggi. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem memiliki kaitan dengan kekayaan tipe habitat. Keanekaragaman ekosistem tidak hanya terjadi dari satu pulau ke pulau lainnya, tetapi juga dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu pulau. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari.

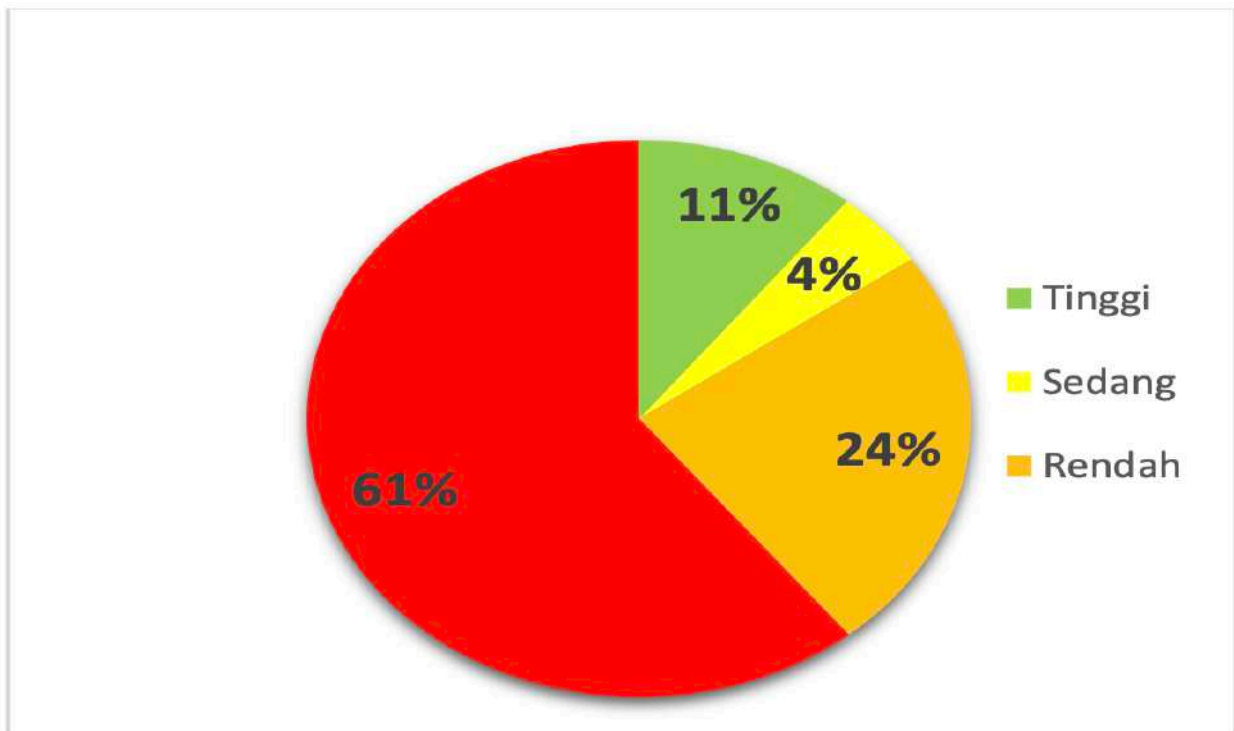
Jasa lingkungan di Kota Subulussalam saat ini untuk mendukung keanekaragaman hayati didominasi oleh kelas sangat rendah, yaitu 71.984,66 hektar. Tidak terdapat wilayah dengan kelas sangat tinggi, hanya kelas tinggi seluas 12.712,13 hektar. Kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas sangat rendah terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 24.837,75 hektar, kemudian Kecamatan Rundeng seluas 16.838,46 hektar. Kecamatan Sultan Daulat juga memiliki wilayah dengan kelas rendah terluas, yaitu sebesar 16.225,84 hektar. Sementara itu wilayah dengan kelas tinggi untuk pendukung biodiversitas ini hanya seluas 12.712,13 hektar, dan yang terluas juga di Kecamatan Sultan Daulat, yaitu seluas 10.597,85 hektar.

61 persen dari luasan wilayah Kota Subulussalam saat ini memiliki jasa lingkungan dengan kelas sangat rendah untuk pendukung biodiversitas, kemudian diikuti oleh 24 (Duapuluh empat) persen dengan kelas rendah. Wilayah yang memiliki kelas tinggi hanya terdiri dari 11 (Sebelas) persen, sementara untuk saat ini tidak terdapat lagi wilayah dengan kelas sangat tinggi.

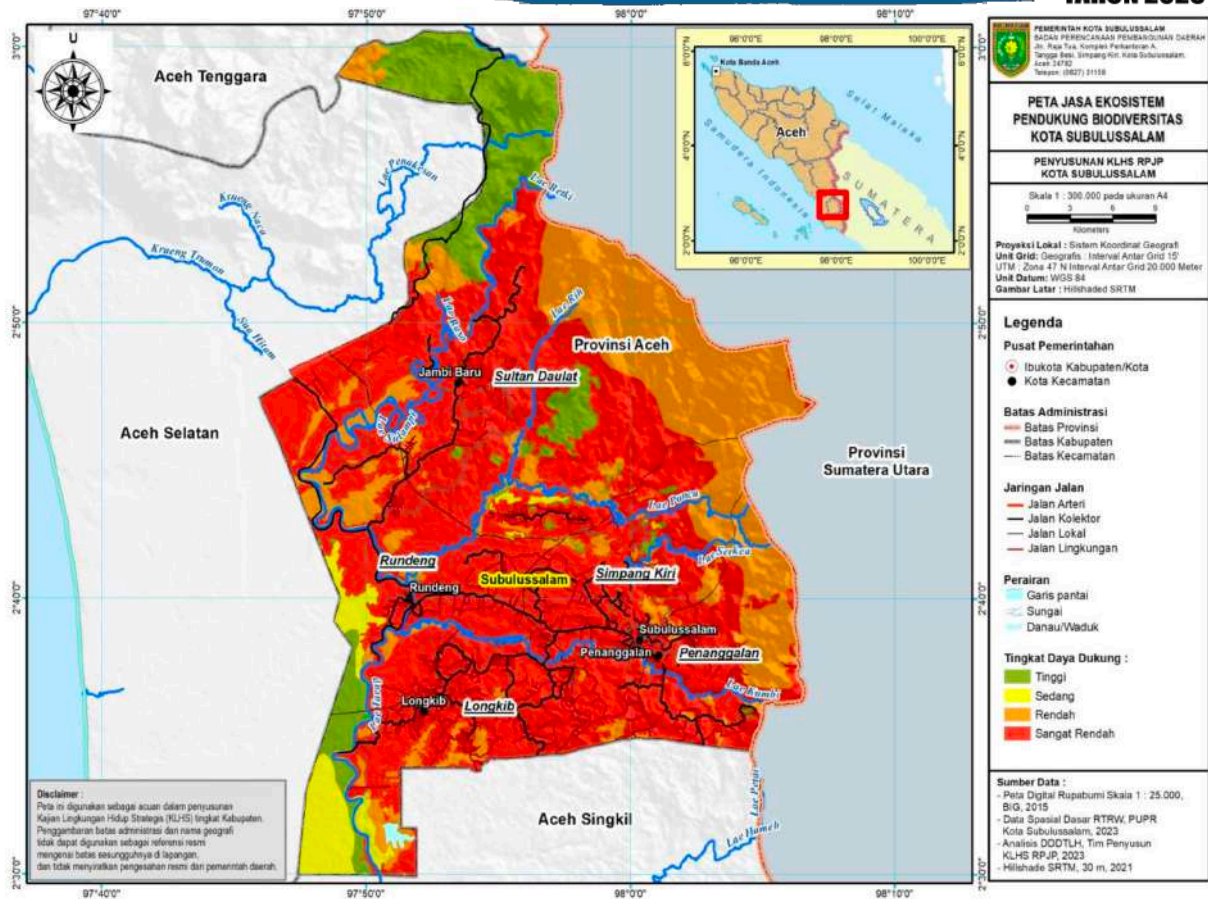
Kajian ini dilengkapi dengan peta yang menggambarkan wilayah-wilayah di Kota Subulussalam dengan kelas jasa lingkungannya masing-masing sebagai pendukung biodiversitas. Pada peta ini dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki kemampuan mendukung biodiversitas tersebut hanya terdapat di sebagian kecil

kecamatan. Sementara itu yang memiliki kemampuan yang sudah rendah dan bahkan sangat rendah terlihat sangat luas dengan warna merah dan orange. Hal yang cukup ganjil dari peta ini adalah menunjukkan semakin ke wilayah hutan, kemampuan pendukung biodiversitas terlihat rendah. Seharusnya wilayah yang berbatasan dengan hutan dan hutan lindung kemampuan pendukung biodiversitasnya tinggi.

Namun demikian penting disampaikan bahwa data dan peta ini bukanlah dari hasil pengukuran yang harus dilakukan untuk Kota Subulussalam. Data dan peta ini diambil dari hasil pengukuran jasa lingkungan di tingkat Provinsi Aceh guna menggambarkan kondisi jasa lingkungan di Kota Subulussalam, sehingga terdapat hasil pengukuran yang tidak mendetail, seperti dalam melihat wilayah dengan setiap kelas jasa ekosistemnya.



Gambar 2.30.
Luas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam



Gambar 2.31.
Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam

Tabel 2.16.

Luasan dan Kelas Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Subulussalam

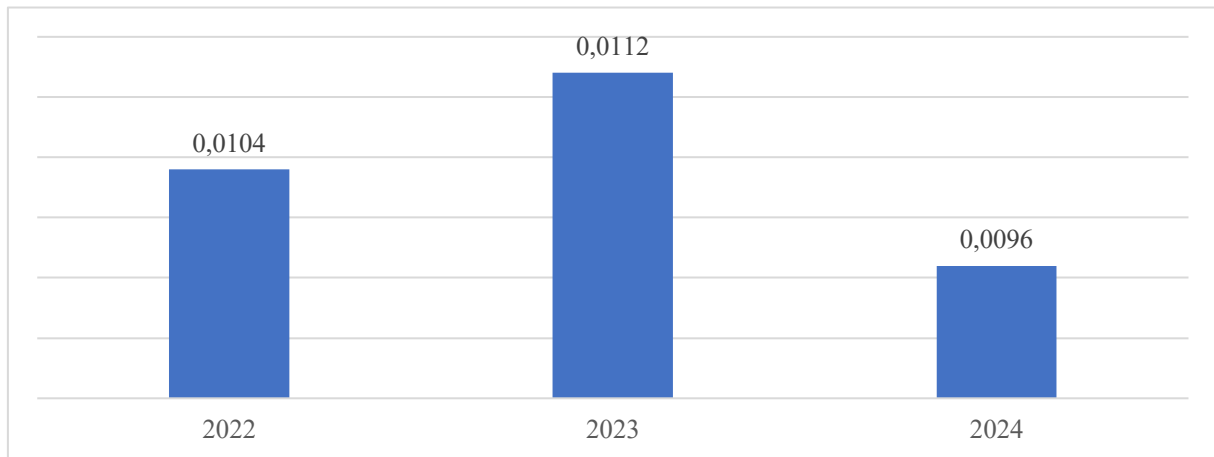
Kecamatan	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		Total
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
Longkib	0,00	0,00	1.154,03	7,31	2.968,04	18,81	1.533,33	9,72	10.123,76	64,16	15.779,15
Penanggalan	0,00	0,00	38,69	0,33	12,00	0,10	4.455,60	38,48	7.073,97	61,09	11.580,26
Rundeng	0,00	0,00	712,07	3,24	1.686,53	7,66	2.774,19	12,60	16.838,46	76,50	22.011,25
Simpang Kiri	0,00	0,00	209,49	1,26	101,71	0,61	3.167,76	19,09	13.110,73	79,03	16.589,70
Sultan Daulat	0,00	0,00	10.597,85	20,27	623,23	1,19	16.225,84	31,03	24.837,75	47,50	52.284,67
Kota Subulussalam	0,00	0,00	12.712,13	10,75	5.391,51	4,56	28.156,72	23,81	71.984,66	60,88	118.245,03

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Penyusunan KLHS revisi RPJMK Subulussalam 2019-2024

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Air Baku

Ketersediaan air baku domestik dan industri di Kota Subulussalam tergolong sangat kecil. Pada tahun 2024, hanya tersedia 0,0096 meter kubik per detik, jauh dari target nasional pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu 131,36 meter kubik per detik.



Gambar 2.32.
Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (meter kubik per detik)

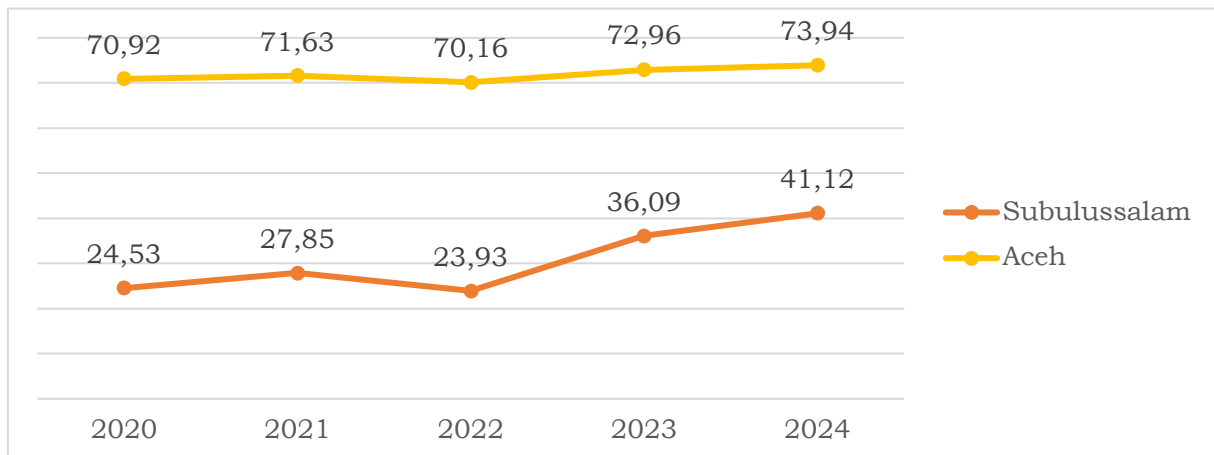
2.1.4.2. Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, IKP Kota Subulussalam hanya 24,53 atau berkategori Sangat Rawan Pangan. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 36,09 atau berkategori Rawan Pangan atau kategori II. Meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 41,12. Angka ini menunjukkan perbaikan ketahanan pangan di Kota Subulussalam setiap tahunnya. Selain itu, IKP Kota Subulussalam jauh di bawah Provinsi Aceh.

Produksi pertanian yang menurun, degradasi tanah dan sumber air, jaringan logistik buruk, kehilangan pangan yang tinggi, daya beli masyarakat rendah, ketimpangan akses pangan, tinggi ketergantungan pangan dari luar daerah menjadi beberapa faktor penyebab kerawanan pangan di Kota Subulussalam. Sedangkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 0,00 persen di Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2024.

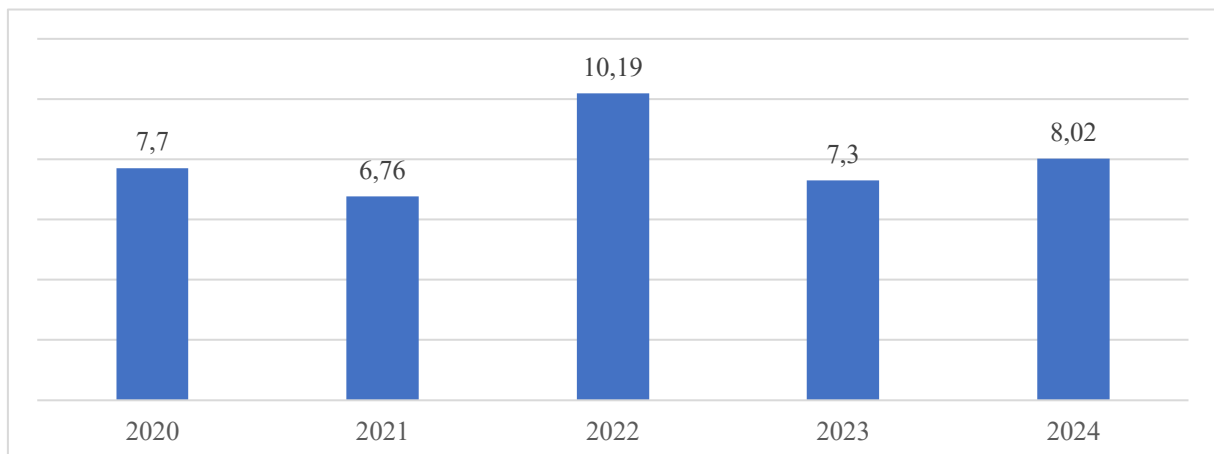
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebesar 7,7 persen, meningkat menjadi 8,02 persen pada tahun 2024. Beberapa permasalahan penyebab di antaranya Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, kemiskinan dan daya beli rendah, produktivitas pertanian yang rendah, kurangnya edukasi gizi dan pola

konsumsi tidak seimbang, serta kebijakan dan program yang kurang efektif. Dampaknya akan menjurus ke gizi buruk dan *stunting*, penurunan produktivitas kerja dan ketahanan pangan melemah.



Sumber : Badan Pangan Indonesia, 2024

Gambar 2.33.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

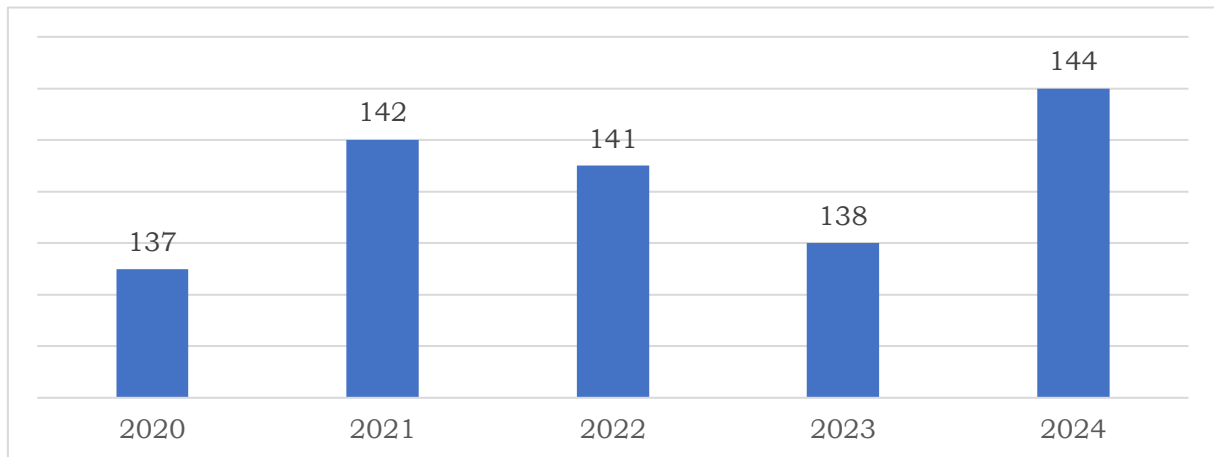
Gambar 2.34.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.4.3. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator penting yang tidak hanya mengukur seberapa besar energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, tetapi juga menjadi cerminan tingkat kemajuan ekonomi, kualitas hidup, dan efektivitas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Di daerah perkotaan yang maju, konsumsi listrik per kapita cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dinamis, kualitas hidup masyarakat baik, infrastruktur energi memadai.

Sebaliknya, di daerah pedesaan atau wilayah tertinggal, konsumsi listrik per kapita yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan akses listrik, aktivitas ekonomi terbatas, kendala infrastruktur.

Konsumsi listrik per kapita Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2024, yaitu dengan rata-rata sekitar 140 KWh. Angka ini tentunya masih jauh dari target TPB nasional yaitu 1.400 KWh.



Sumber : UP3 PLN Subulussalam, 2025

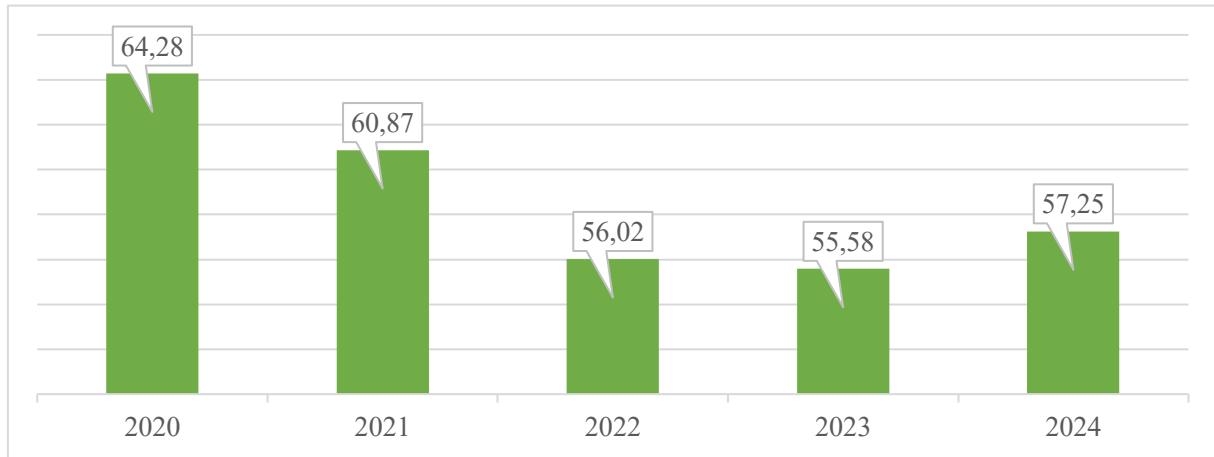
Gambar 2.35.
Konsumsi Listrik per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.4.4. Air Minum Layak

Capaian rumah tangga menggunakan air minum layak Kota Subulussalam Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, Persentase Rumah Tangga menggunakan air minum layak sebesar 64,28 persen dan 57,25 persen pada tahun 2024. Adapun Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

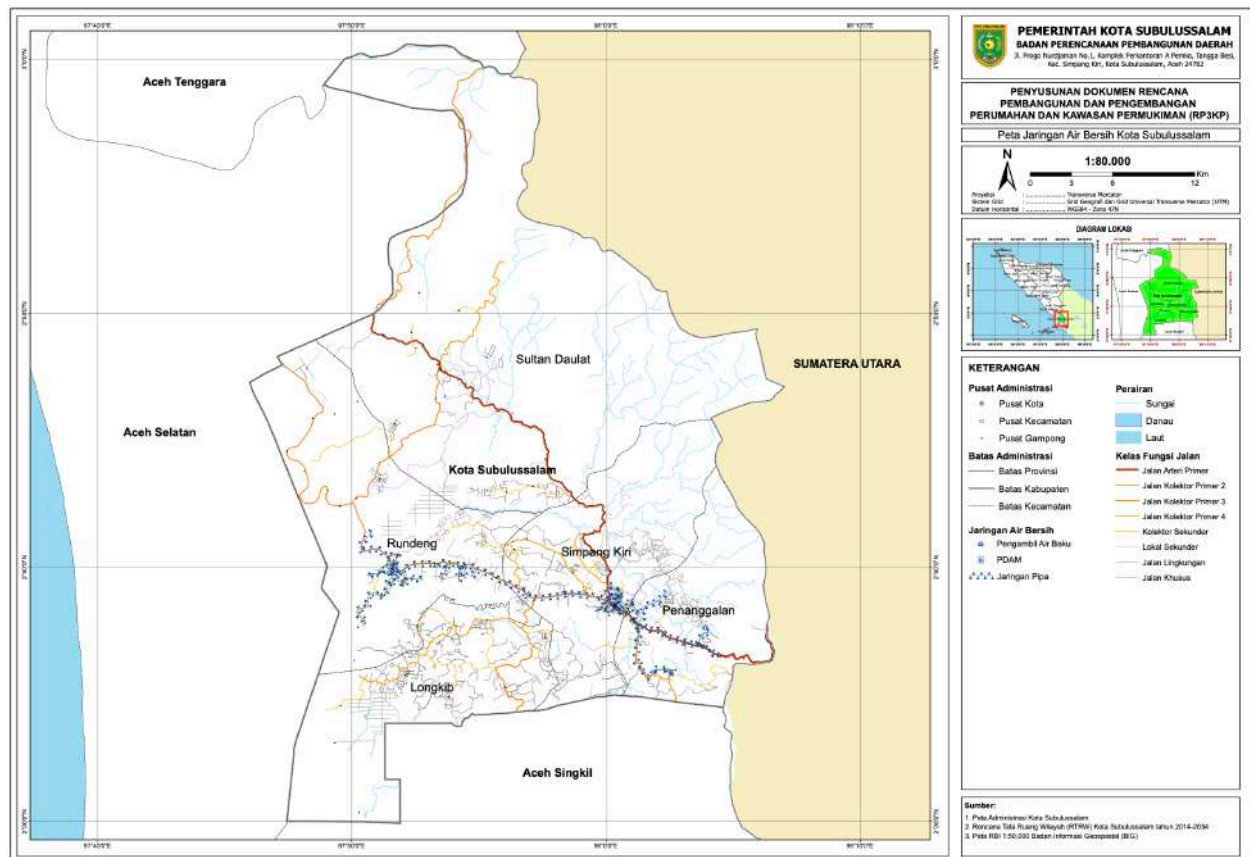
Belum tercapainya seluruh rumah tangga yang berakses air minum layak disebabkan antara lain:

- sistem Pelayanan air Minum yang belum memadai;
- belum lengkap dan terbaharukan perangkat regulasi yang mendukung penyediaan air minum;
- menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum;
- masih terbatasnya penyedia air minum oleh perusahaan daerah air minum yang sehat (kredibel dan profesional);
- belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum; dan
- terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Gambar 2.36.
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Sumber: RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.37.
Peta Jaringan Air Bersih Perpipaan di Kota Subulussalam

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada:

- penyediaan perangkat peraturan di daerah untuk mendukung pelayanan air minum;
- memastikan ketersediaan air baku air minum;
- meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana air minum;
- meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum;
- meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan
- pengembangan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2020-2024, pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sudah mulai dihitung. Nilai IKLH Kota Subulussalam Tahun 2020 sebesar 64,77 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,28. Nilai indeks tutupan lahan/hutan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 adalah 51,78 atau berada dalam kondisi sedang. Adapun indeks kualitas tutupan lahan di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	64,77	71,54	73,88	72,54	74,28
IKU	68,30	88,98	70,00	88,67	95,07
IKA	86,72	65,00	90,24	54,59	65,00
IKTL	45,66	50,53	50,27	61,70	51,78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, 2024

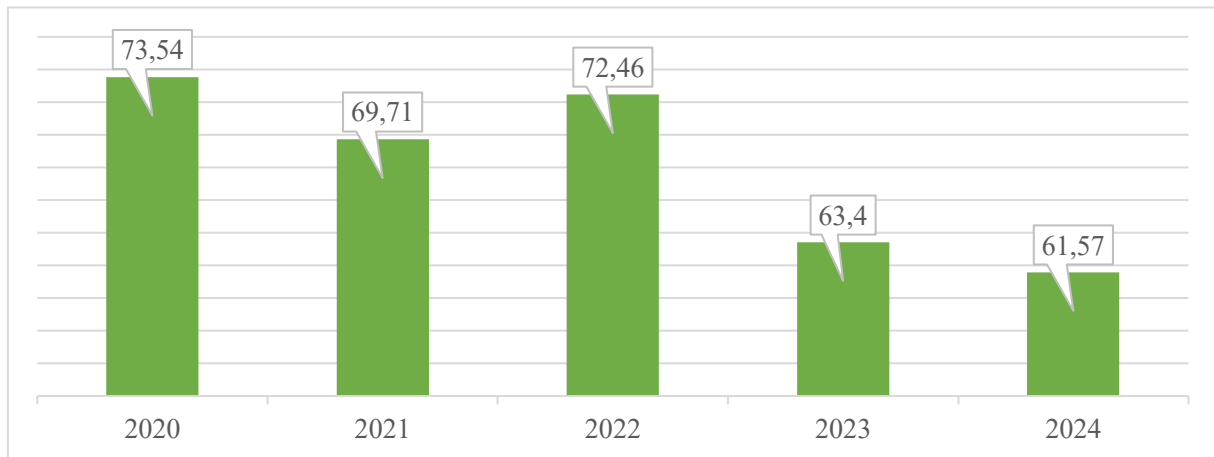
2.1.5.2. Sanitasi Layak

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor- faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Adapun Ruang lingkup sanitasi ini antara lain yaitu Air Limbah, Persampahan, Drainase lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi *Higiene*. Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- Fasilitas air bersih,
- Pembuangan air besar/tinja,
- Pembuangan air limbah (air bekas) dan

d. pembuangan sampah.

Kota Subulussalam pada tahun 2020 memiliki rumah tinggal bersanitasi sebanyak 73,54 persen dari jumlah seluruh rumah tinggal. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 61,57 persen. Hal ini menggambarkan capaian rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam masih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Gambar 2.38.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

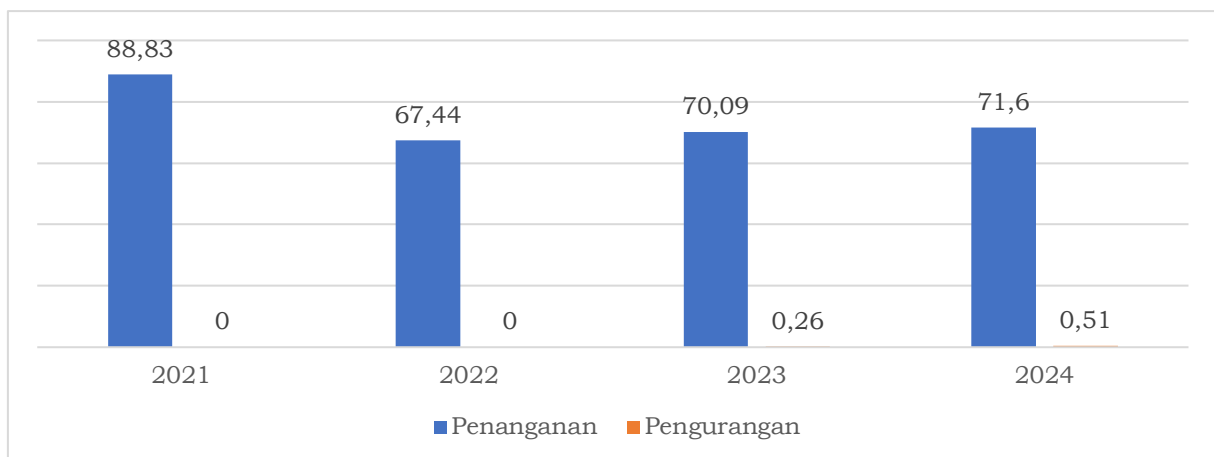
Masih terdapatnya rumah tinggal yang belum bersanitasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki jamban sendiri;
- masyarakat pada umumnya masih menggunakan jamban cubluk;
- perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai/ pekarangan/ selokan masih menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya rumah tinggal bersanitasi, menyediakan MCK/MCK++, membangun IPAL Komunal dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) peduli sanitasi, penyuluhan dan Kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) serta mengawal dan melaksanakan Program Kotaku yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat di daerah.

2.1.5.3. Pengelolaan Sampah

Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 71,60 persen untuk penanganan dan 0,51 persen untuk pengurangan. Artinya masih banyak sampah di Kota Subulussalam belum terjadi pengurangan. Bahkan, dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sarkea Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Subulussalam, Di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, perlu dilakukan perubahan sistem TPA yang ada di Subulussalam sehingga dapat dilakukan pengurangan sampah. Secara kuantitas, sampah yang terkelola di Kota Subulussalam mencapai 12.866,25 ton.



Sumber : DLHK Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.39.
Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Grafik di atas merepresentasikan capaian dua pilar utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Subulussalam, yaitu aspek Penanganan dan aspek Pengurangan, selama periode 2022 hingga 2024. Terdapat data pembandingan dari tahun 2021 yang menunjukkan capaian sebesar 88,83 persen, sementara pilar Pengurangan berada pada 67,44 persen. Pada tahun 2022, terjadi perkembangan yang sangat signifikan di mana capaian Penanganan (70,09 persen) telah melampaui target yang ditetapkan (71,6 persen), meskipun masih terdapat kesenjangan sebesar 0,51 persen. Di sisi lain, upaya Pengurangan justru mengalami penurunan yang drastis, hanya mencapai 0,26 persen dari target. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana upaya Pengurangan konsisten berada

pada level yang sangat rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa strategi dan sumber daya lebih banyak difokuskan pada aspek responsif (penanganan kasus setelah terjadi) dibandingkan pada aspek preventif (pengurangan angka kejadian). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi untuk memperkuat upaya pencegahan guna memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kebencanaan di Kota Subulussalam tidak dapat terlepas dari sistem kebencanaan Indonesia bahkan dunia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman di Indonesia juga banyak terdapat patahan aktif seperti Patahan Semangko di Sumatera, Cimandiri di Jawa dan banyak patahan dan sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kejadian gempa beserta dampak yang ditimbulkannya yang dapat terjadi secara tiba-tiba harus dapat diantisipasi secara dini kejadiannya, misalkan melalui *hazard warning system* dan optimalisasi upaya mitigasi bencana.

Sebagian besar wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan gempa karena dilalui patahan aktif sesar Semangko yang memanjang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Kota Banda Aceh, Padang, termasuk regional Kota Subulussalam merupakan daerah yang dilalui sesar Semangko. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), wilayah-wilayah tersebut tengah terjadi penumpukan energi yang siap dilepaskan kapan saja. Berdasarkan catatan yang ada selama ini, besar gempa bervariasi antara 5 hingga di atas 7 skala Richter (SR).

Bencana kegempaan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Barat dan sekitarnya pada hakikatnya dipicu pula oleh adanya patahan-patahan benua yang berdasarkan tinjauan geologi memberikan dorongan kuat di dasar bumi yang menyebabkan gerakan tanah bahkan gempa. Gempa besar punya kecenderungan berulang di jalur patahan Sumatera sebagai hasil pelepasan energi yang menumpuk di patahan.

Kota Subulussalam yang terletak di wilayah barat Sumatera tentunya memiliki risiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi kerentanan

terhadap bencana gempa bumi, secara regional Kota Subulussalam berada pada risiko gempa bumi skala I-V MMI atau setara dengan < 5 skala *richter*. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam kawasan rawan bencana alam terdiri dari:

1) Rawan longsor dan gerakan tanah;

Kawasan rawan longsor dan atau gerakan tanah meliputi seluas 107.150,53 ha yang terdiri dari intensitas menengah dan rendah. Kawasan Intensitas menengah terdapat di Kampung Sikelang, Kampung Baru, Kuta Tengah dan Cepu seluas 4.615,60 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kampung Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Pegayo, Suka Makmur, Pasar Panjang dan Mukti Makmur seluas 4.934,09 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kampung Darul Aman seluas 13,45 Ha yang berada di Kecamatan Longkib, Kampung Badar, Harapan Baru dan Teladan Baru seluas 906,37 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng, Kampung Namo Buaya, Singgersing, Darul Makmur Pulo Belen dan Pulo Kedep, Jabi-Jabi, Suka Maju dan Pasir Belo seluas 5.877,48 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawasan dengan intensitas rendah terdapat di Kampung Penanggalan, Lae Mbersih, Penuntungan dan Lae Motong seluas 3.057,81 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan. Kampung Subulussalam Utara, Lae Oram, Tangga Besi, Kuta Cepu, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Sikelondang seluas 11.585,32 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri. Kampung Rantau Panjang, Bukit Alim, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Saga, Darussalam, Panji, Longkib dan Sepang seluas 15.588,33 Ha yang berada di Kecamatan Longkib. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, Dah, Lae Mate, Mandilam Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 20.513,46 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng. Kampung cipar-pari Timur, Cipar-pari, Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jambi Baru, Gunung Bakti, Lae Langge dan Bawan seluas 40.058,92 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

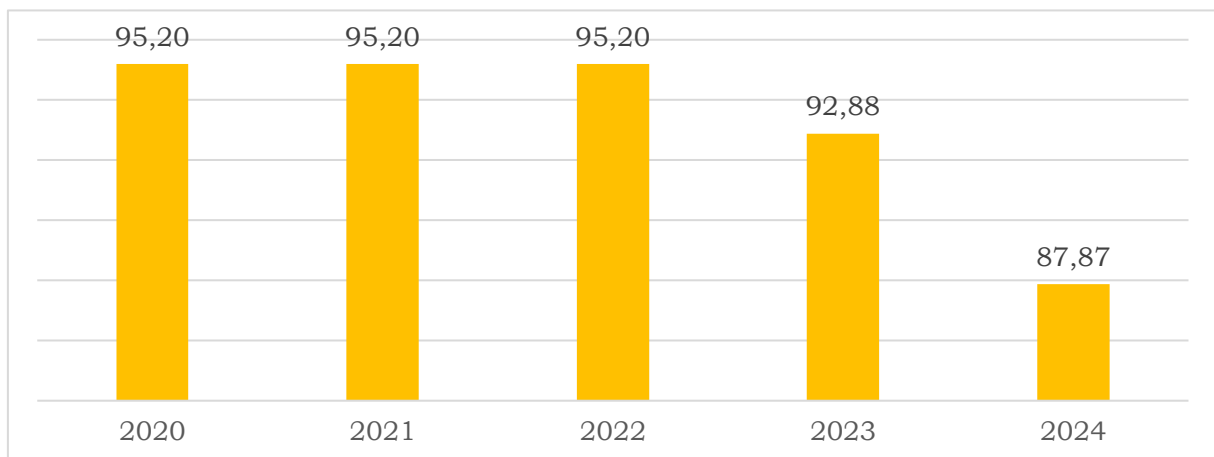
2) Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran meliputi:

- a. Kecamatan Longkib di Kampung Darul Aman, Kecamatan Penanggalan di Kampung Penanggalan, Penuntungan, Lae Mbersih, Cepu, kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor;
- b. Kecamatan Rundeng di Kampung Pasar Rundeng, Belukur Makmur;

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2022, IRB Kota Subulussalam pada angka 95,20 atau berkategori sedang. Angka ini turun pada tahun 2024 menjadi 87,87 atau berkategori sedang. Penurunan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan dan ancaman bencana di Kota Subulussalam semakin berkurang. Capaian ini kemungkinan besar merupakan hasil dari implementasi berbagai kebijakan dan program penanggulangan bencana yang efektif, seperti perbaikan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta upaya-upaya mitigasi struktural dan non-struktural yang berkelanjutan. Dengan demikian, kesiapsiagaan dan ketahanan kota dalam menghadapi potensi bencana semakin kuat dari tahun ke tahun.

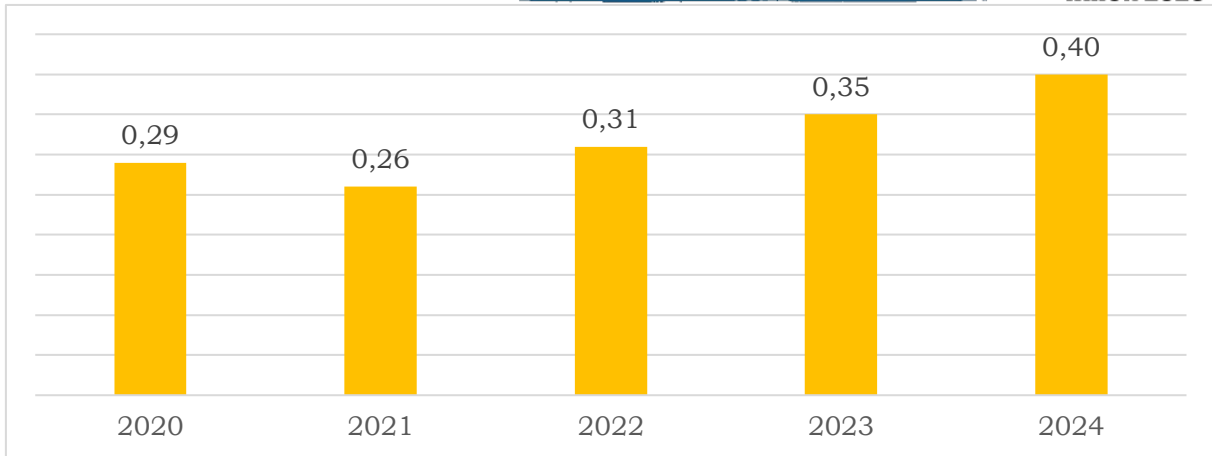


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2024

Gambar 2.41.
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IKD Kota Subulussalam pada angka 0,29 lalu meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketahanan Kota Subulussalam setiap tahunnya meningkat. Tren yang fluktuatif namun cenderung menurun ini merefleksikan bahwa kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai guncangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, masih lemah dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif serta strategis untuk membangun fondasi ketahanan daerah yang lebih kokoh.



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2024

Gambar 2.42.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kota Subulussalam harus mengadopsi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi demikian juga dengan rencana tata ruang Subulussalam. Karena kota Subulussalam terletak pada lokasi yang sangat strategis dengan berbatasan langsung provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Infrastruktur- infrastruktur yang direncanakan oleh nasional seperti jalan kereta api, pelabuhan laut, terminal barang dan penumpang, merupakan potensi yang harus perhatian pemerintah dalam waktu pendek maupun jangka panjang.

- 1) Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:
 - a. Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat. Morfologi lahan pegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.
 - b. Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
 - c. Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.

- d. Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkib, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri CPO serta daerah yang masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
- 2) Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan. Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.
- 3) Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- a. Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam yang terletak pada perbatasan langsung antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.
- b. Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkib terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

2.1.8. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran masalah suatu wilayah, karena penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

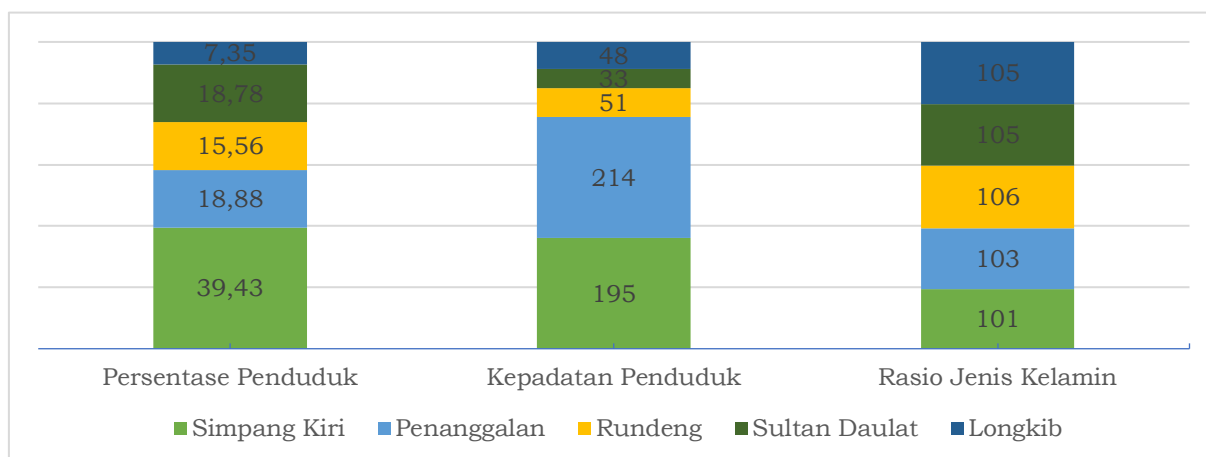
Tabel 2.18.
Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam
Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2020	90.751	2,91
2021	92.671	2,12
2022	95.199	0,95
2023	97.770	2,73
2024	99.062	2,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Menurut proyeksi BPS, jumlah penduduk Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Subulussalam yaitu sebanyak 90.751 jiwa dan meningkat menjadi 99.062 jiwa pada tahun 2024. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel di atas.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2024, Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 99.062 jiwa yang terdiri dari 50.275 jiwa (50,75 persen) laki-laki dan 48.787 jiwa (49,25 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 39.060 jiwa (39,43 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Longkib yaitu 7.281 jiwa (7,35 persen) (Gambar 2.43).



Gambar 2.43.
Distribusi Persentase Penduduk (Persen), Kepadatan Penduduk (jiwa/Km persegi), Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2024

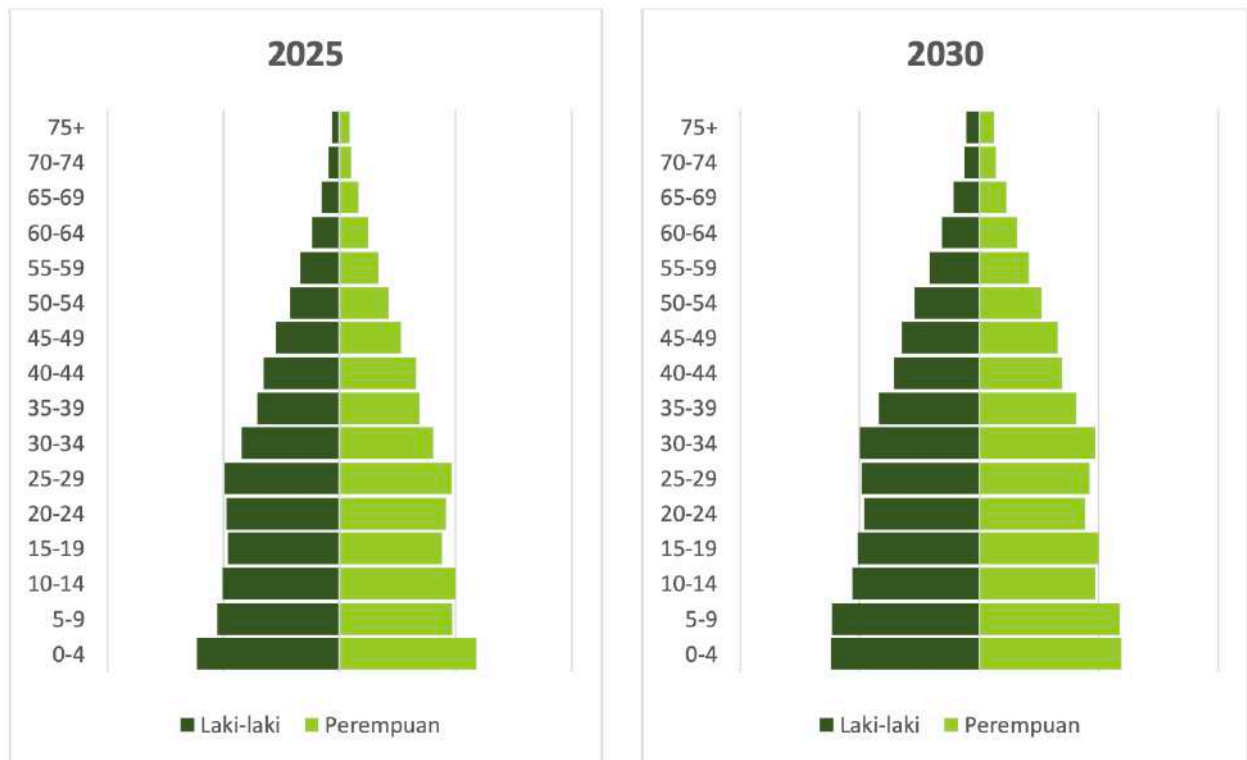
Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kota Subulussalam lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Tabel 2.19.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025-2030 (dalam ribu)

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	12,05	12,10	12,15	12,17	12,17	12,16
5-9	10,11	10,43	10,70	11,03	11,44	12,07
10-14	10,04	10,18	10,33	10,42	10,42	10,17
15-19	9,21	9,32	9,50	9,69	9,88	10,06
20-24	9,45	9,35	9,26	9,20	9,18	9,23
25-29	9,81	9,90	9,87	9,76	9,65	9,52
30-34	8,26	8,62	9,01	9,38	9,69	9,88
35-39	7,01	7,18	7,39	7,65	7,95	8,28
40-44	6,57	6,69	6,77	6,81	6,90	7,01
45-49	5,39	5,64	5,89	6,14	6,36	6,53
50-54	4,28	4,46	4,66	4,87	5,09	5,32
55-59	3,37	3,51	3,66	3,81	3,97	4,13
60-64	2,43	2,58	2,72	2,87	3,01	3,16
65-69	1,57	1,68	1,80	1,93	2,06	2,19
70-74	0,97	1,04	1,10	1,17	1,24	1,33
75+	0,77	0,83	0,91	0,99	1,07	1,16
Total	101,28	103,50	105,70	107,89	110,06	112,20

Proyeksi penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2030 berjumlah 112.197 jiwa dengan rasio penduduk perempuan dan laki-laki 1,03 (laki-laki = 56.902 jiwa dan perempuan = 55.295 jiwa). Rasio ketergantungan tahun 2030 sebesar 53,68.

Adapun proyeksi penduduk Kota Subulussalam untuk tahun 2030 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44.
Proyeksi Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2025 dan 2030

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

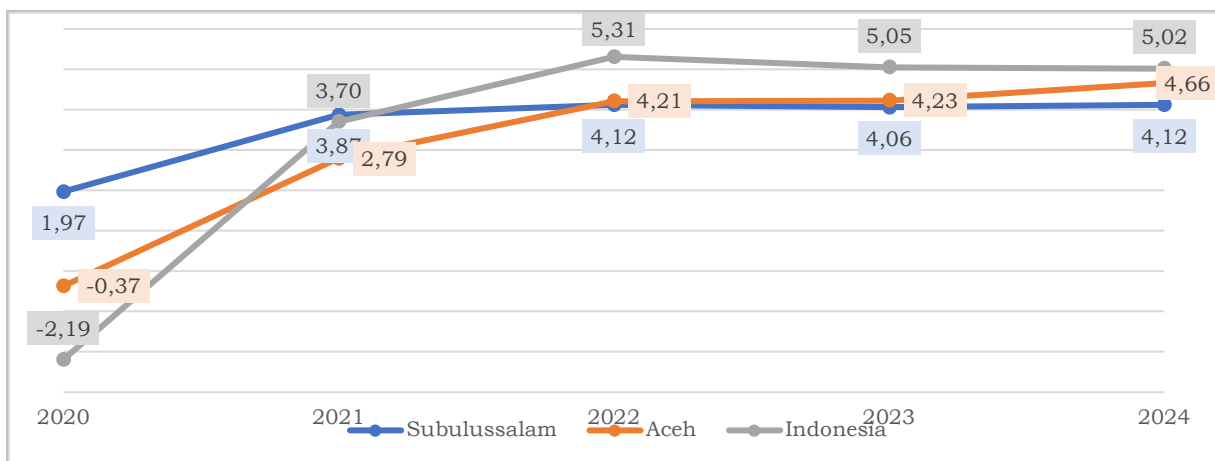
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Jika melihat data dari tahun 2020-2024 PDRB Kota Subulussalam mengalami peningkatan, pada tahun 2020 laju PDRB sebesar 1,97 persen dimana terjadi akibat dari pandemi Covid-19. Angka ini tergolong rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas angka 4 persen. Lalu mengalami kenaikan secara perlahan kembali pada tahun 2021 dan 2022 dimana kembali ke angka 4,12 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 4,06 persen. Begitu juga halnya pada tahun 2024, dimana kembali mengalami peningkatan pada angka 4,12 persen.

Pada tahun 2024, laju PDRB Kota Subulussalam lebih rendah dari pada laju PDRB Provinsi Aceh dan Nasional. Laju PDRB Provinsi Aceh dan Nasional masing-masing 4,66 persen dan 5,02 persen. Sedangkan untuk mengetahui PDRB Kota Subulussalam Atas Dasar Harga Konstan disajikan per sektor usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Secara Umum, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Jika PDRB atas dasar harga Konstan pada tahun 2020 sebesar Rp1385,41 miliar maka pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp1.623,25 miliar, atau terjadi peningkatan sebesar Rp237,84 miliar (17,17 persen). Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp1.803,68 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.761,85 miliar, atau ada peningkatan sebesar Rp958,17 miliar (53,12 persen). Pertumbuhan kontribusi sektor tertinggi PDRB ADHB 2020-2024 disumbangkan oleh sektor Industri Pengolahan (105,69 persen), diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan di atas 50 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.45.

Perbandingan Laju PDRB Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Kontribusi sektor lapangan usaha tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 26,05 persen pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh sektor Industri Pengolahan (19,37 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,64 persen) dan sektor Konstruksi (14,31 persen). Hal ini juga terlihat bahwa sektor primer terutama bidang pertanian dan perkebunan menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Kota Subulussalam dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih 45 ribu hektar. Kondisi pemerintahan yang berbentuk kota, menjadikan Kota Subulussalam berpotensi memiliki pertumbuhan ekonomi bidang jasa, namun dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kontribusi sektor jasa.

Potensi lainnya pada sektor Transportasi dan Pergudangan dimana mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat kondisi geografis Kota Subulussalam yang berada pada wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

dan merupakan pintu masuk perekonomian wilayah barat selatan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, menjadikan sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Tabel 2.20.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	319,59	23,07	326,50	22,69	335,21	22,37	359,37	23,05	371,52	22,89
B	Pertambangan dan Penggalian	33,33	2,41	32,38	2,25	29,94	2	29,66	1,9	28,80	1,77
C	Industri Pengolahan	187,96	13,57	199,86	13,89	213,69	14,26	225,53	14,47	235,33	14,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,51	0,11	1,53	0,11	1,58	0,11	1,65	0,11	1,72	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,02	0,25	0,02	0,25	0,02	0,25	0,02	0,26	0,02
F	Konstruksi	225,55	16,28	227,82	15,83	234,60	15,66	239,99	15,39	248,71	15,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	250,44	18,08	261,54	18,18	277,55	18,52	294,38	18,88	302,30	18,62
H	Transportasi dan Pergudangan	55,79	4,82	77,11	5,36	80,51	5,37	82,69	5,3	93,75	5,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,26	0,81	11,34	0,79	14,13	0,94	14,91	0,96	15,41	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	45,64	3,29	49,05	3,41	53,05	3,54	54,30	3,48	55,49	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,72	2	26,60	1,85	25,32	1,69	22,56	1,45	27,60	1,70
L	Real Estate	45,97	3,32	47,40	3,29	48,79	3,26	49,99	3,21	51,32	3,16
M,N	Jasa Perusahaan	4,63	0,33	4,67	0,32	5,14	0,34	5,07	0,33	5,26	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95,85	6,92	100,50	6,98	101,21	6,75	100,86	6,47	105,48	6,50
P	Jasa Pendidikan	33,34	2,41	34,17	2,37	35,21	2,35	35,72	2,29	37,20	2,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,77	1,93	29,29	2,04	32,09	2,14	31,72	2,03	32,23	1,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,84	0,64	9,00	0,63	10,02	0,67	10,43	0,67	10,86	0,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1385,41	100,00	1439,00	100,00	1498,30	100,00	1559,06	100,00	1623,25	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Tabel 2.21.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kota Subulussalam (dalam miliar rupiah)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	387,45	21,48	469,55	22,24	543,97	23	611,92	23,91	691,71	26,05
B	Pertambangan dan Penggalian	29,42	1,63	29,82	1,41	30,27	1,28	30,82	1,2	31,04	1,12
C	Industri Pengolahan	260,10	14,42	394,51	18,69	463,65	19,61	500,12	19,54	534,99	19,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	0,09	1,66	0,08	1,75	0,07	1,84	0,07	1,92	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,02	0,33	0,02	0,33	0,01	0,34	0,01	0,38	0,01
F	Konstruksi	310,33	17,21	329,43	15,61	360,32	15,24	379,70	14,83	395,27	14,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	330,23	18,31	357,32	16,93	393,91	16,66	438,08	17,12	459,64	16,64
H	Transportasi dan Pergudangan	79,22	4,39	96,59	4,58	110,27	4,66	124,22	4,85	143,95	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,66	0,92	16,97	0,8	22,04	0,93	23,99	0,94	25,54	0,92
J	Informasi dan Komunikasi	52,26	2,9	56,80	2,69	62,21	2,63	64,39	2,52	65,00	2,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,73	2,2	38,77	1,84	40,20	1,7	36,36	1,42	44,97	1,63
L	Real Estate	64,11	3,55	67,05	3,18	71,37	3,02	74,43	2,91	75,44	2,73
M,N	Jasa Perusahaan	5,50	0,3	5,65	0,27	6,79	0,29	6,89	0,27	7,14	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	133,22	7,39	145,27	6,88	147,35	6,23	152,31	5,95	164,75	5,97
P	Jasa Pendidikan	47,20	2,62	50,12	2,37	52,11	2,2	53,65	2,1	56,79	2,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,66	1,92	38,93	1,84	44,64	1,89	45,59	1,78	48,49	1,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,65	0,65	12,18	0,58	13,70	0,58	14,94	0,58	14,83	0,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1803,68	100,00	2110,95	100,00	2364,90	100,00	2559,59	100,00	2761,85	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Tabel 2.22.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	-0,23	0,76	-0,38	0,76	-0,32	0,91	0,68	2,14	-0,16
B	Pertambangan dan Penggalan	0,02	0,07	-0,22	-0,16	-0,13	-0,25	-0,08	-0,1	-0,08	-0,13
C	Industri Pengolahan	-0,43	-0,16	4,27	0,32	0,92	0,37	-0,07	0,2	-0,17	0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	-0,01	0	-0,01	0	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0,00	0,00
F	Konstruksi	-1,21	-1,22	-1,6	-0,45	-0,37	-0,17	-0,41	-0,26	-0,52	-0,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,7	-1,38	0,1	-0,27	0,35	0,46	0,36	-0,48	-0,26
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04	1,02	0,19	0,54	0,08	0,02	0,19	-0,07	0,36	0,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,07	-0,12	-0,02	0,13	0,16	0,01	0,01	-0,02	-0,01
J	Informasi dan Komunikasi	-0,21	-0,24	-0,21	0,11	-0,06	0,13	-0,11	-0,06	-0,17	-0,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,03	-0,01	-0,36	-0,15	-0,14	-0,16	-0,28	-0,24	0,21	0,25
L	Real Estate	0,18	0,2	-0,37	-0,02	-0,16	-0,04	-0,11	-0,05	-0,18	-0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	-0,03	-0,01	0,02	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,33	-0,11	-0,51	0,06	-0,65	-0,23	-0,28	-0,29	0,02	0,03
P	Jasa Pendidikan	-0,08	-0,04	-0,25	-0,03	-0,17	-0,02	-0,1	-0,06	-0,04	0,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,12	-0,08	-0,08	0,1	0,05	0,11	-0,11	-0,11	-0,02	-0,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,01	0	-0,07	-0,01	0	0,04	0	0	-0,04	0,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,97		3,87		4,12		4,06		4,12	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

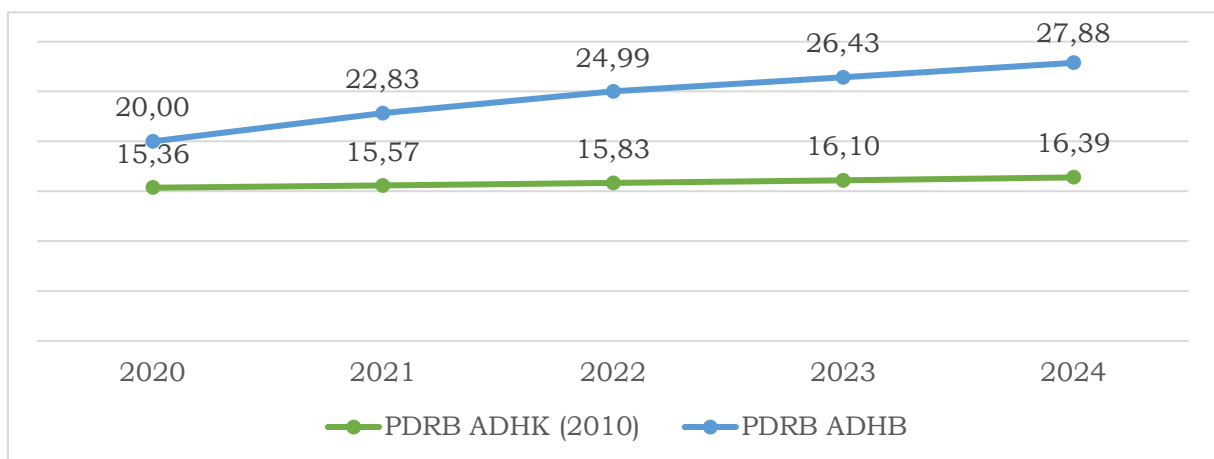
Tabel 2.23.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Subulussalam

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB	ADHK
		%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,53	16,25
B	Pertambangan dan Penggalian	5,51	-13,59
C	Industri Pengolahan	105,69	25,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,07	13,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,58	8,33
F	Konstruksi	27,37	10,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39,19	20,71
H	Transportasi dan Pergudangan	81,71	68,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,30	36,86
J	Informasi dan Komunikasi	24,38	21,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,19	-0,43
L	Real Estate	17,67	11,64
M,N	Jasa Perusahaan	29,82	13,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,67	10,05
P	Jasa Pendidikan	20,32	11,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,90	20,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	27,30	22,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		53,12	17,17

2) Pendapatan per Kapita

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kota Subulussalam mencapai 27,88 juta rupiah, naik dari tahun 2020 sebesar 20,00 juta rupiah. Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 terus meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2024 mencapai 1.111.170 rupiah dan meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya pada angka 917.945 rupiah.

Pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan pangan (>50 persen). Lebih dari 10 persen pengeluaran rumah tangga didominasi oleh pembelian rokok. Sedangkan sebagian besar pengeluaran non pangan dihabiskan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal ini karena masih banyak penduduk Kota Subulussalam belum memiliki rumah pribadi kepemilikan sendiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.46.
PDRB per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Tabel 2.24.
Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam

Kelompok	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	77.913	76.730	78.946	95.623	108.853
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3.610	4.922	5.696	5.537	5.220
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/ shrimp/ common squid/ shells</i>	59.969	58.999	76.532	75.054	71.527
Daging/ <i>Meat</i>	9.327	12.720	18.844	15.139	13.588
Telur dan Susu / <i>Egg and milk</i>	19.689	20.045	24.986	26.391	20.368
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	37.284	44.282	55.586	56.091	58.436
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	6.871	8.834	10.359	9.417	8.383
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	22.026	21.832	34.109	33.371	26.684
Minyak dan kelapa (<i>Oil and coconut</i>)	15.522	19.770	25.353	21.967	23.196
Bahan minuman / <i>beverage stuffs</i>	14.915	17.560	17.330	22.070	16.947
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	9.761	11.836	13.608	12.985	12.902
Konsumsi lainnya / <i>Miscellaneous food items</i>	5.493	6.599	7.731	7.995	6.726
Makanan dan minuman jadi / <i>prepared food dan beverages</i>	115.673	118.027	151.466	160.588	131.017
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	89.053	82.999	99.365	114.856	113.846
Jumlah makanan / <i>Total food</i>	484.105	505.157	619.912	657.084	617.693
Perumahan dan fasilitas rumah tangga / <i>housing and household facilities</i>	184.350	164.607	199.024	228.448	206.827
Aneka komoditas dan jasa / <i>Goods and serveices</i>	90.091	73.244	108.799	151.930	107.678
Pakaian, alas, kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	58.059	44.121	49.492	62.748	45.557
Komoditas tahan lama / <i>Durable goods</i>	35.886	30.307	62.358	49.351	NA
Pajak, pungutan, dan asuransi / <i>Taxes and insurance</i>	49.127	43.742	59.682	61.312	60.743
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>parties and ceremonies</i>	16.325	10.271	8.664	24.716	6.354
Jumlah bukan makanan / <i>Total non-food</i>	433.839	366.293	487.919	578.505	493.477
Jumlah/ <i>Total</i>	917.945	871.450	1.107.831	1.235.589	1.111.170

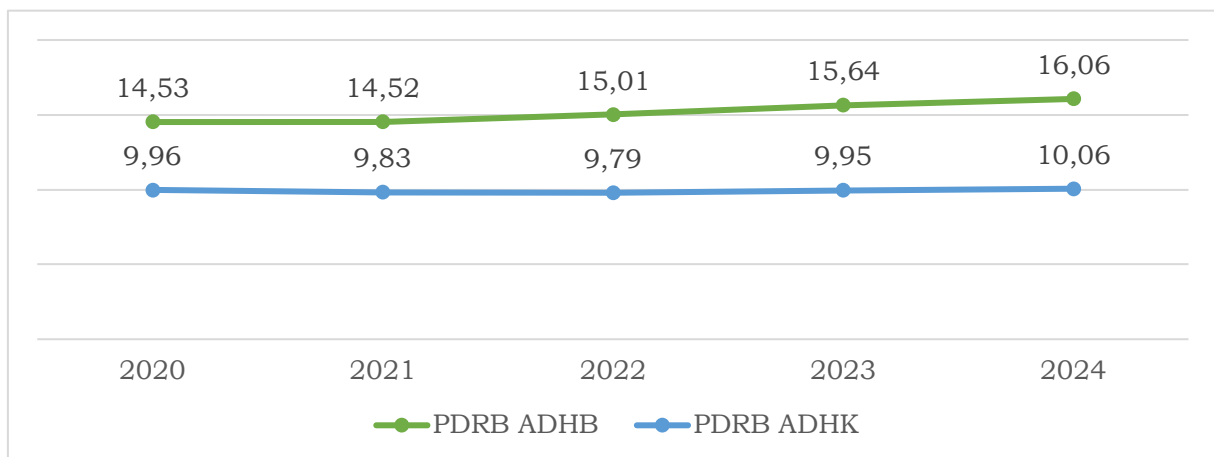
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

3) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Kegunaan dari konsumsi rumah tangga per kapita adalah untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, sehingga dinilai perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga per kapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku kota Subulussalam mencapai 16,06 juta rupiah, sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 14,53 juta rupiah. Sementara untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga konstan mencapai 10,06 juta rupiah di tahun 2024.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat.



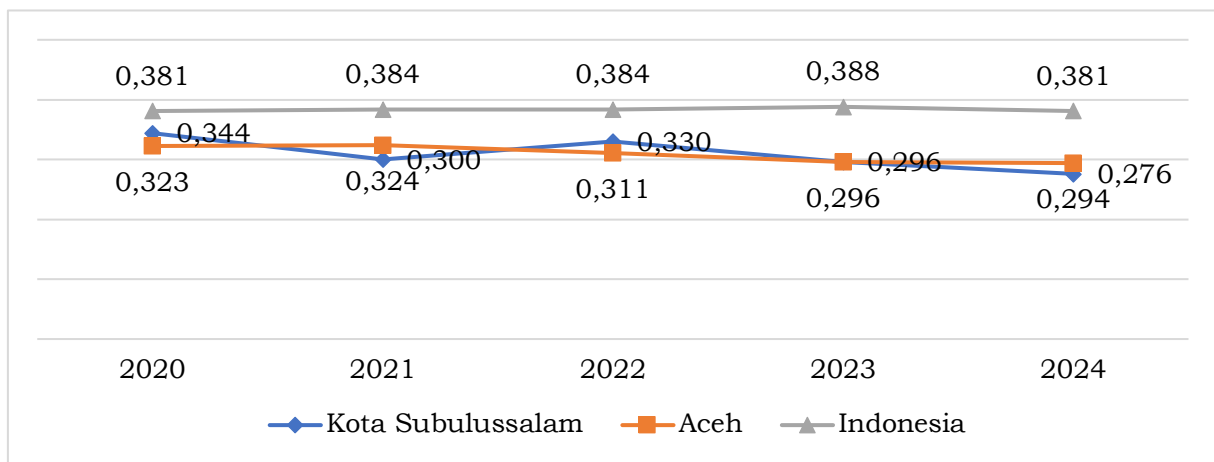
Gambar 2.47.
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita per Tahun (Juta Rp)

4) Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini Kota Subulussalam tahun 2020 sebesar 0,344. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan juga berarti bahwa pendapatan per kapita penduduk Kota Subulussalam relatif merata. Pada tahun 2021, indeks gini Kota

Subulussalam mengalami penurunan ke angka 0,276. Artinya ketimpangan pendapatan antar-penduduk semakin rapat/sempit. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,276.

Pada tahun 2020, indeks gini Kota Subulussalam berada di atas Nasional dan Provinsi. Namun pada tahun 2024, Indeks Gini Kota Subulussalam mengalami penurunan sehingga berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya indeks gini yaitu pertumbuhan ekonomi tidak inklusif (masih berpusat pada beberapa sektor), konsentrasi kepemilikan aset serta variasi lapangan pekerjaan.

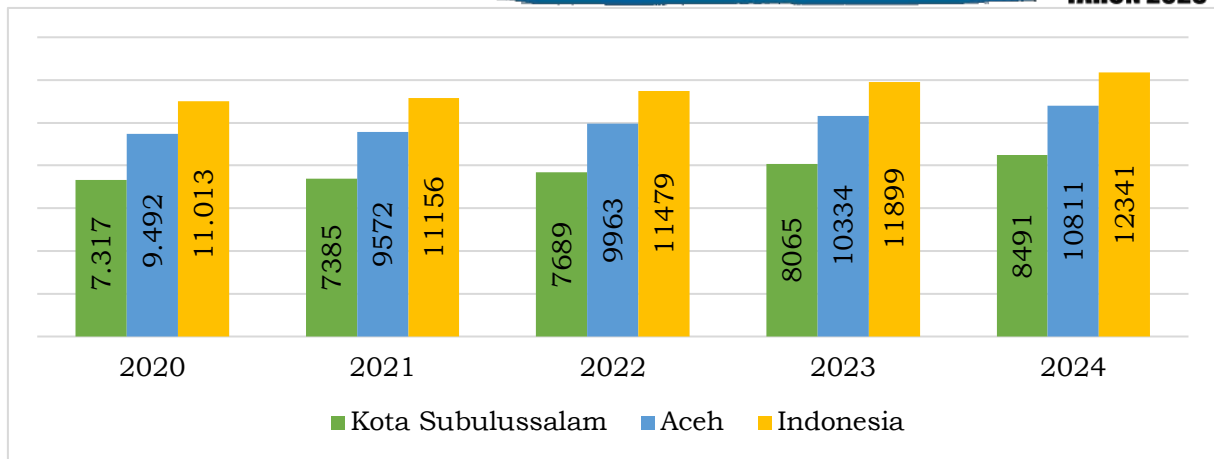


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.48.
Indeks Gini Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2020-2024

5) Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Subulussalam masih tergolong sangat rendah yaitu pada angka 8,49 juta per kapita per tahun, jauh di bawah Aceh dan Nasional dengan masing-masing sebesar 10,81 juta rupiah per orang per tahun dan 12,34 juta per orang per tahun. Namun pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020, yaitu 7,32 juta rupiah per orang per tahun menjadi 9,49 juta rupiah per orang per tahun.



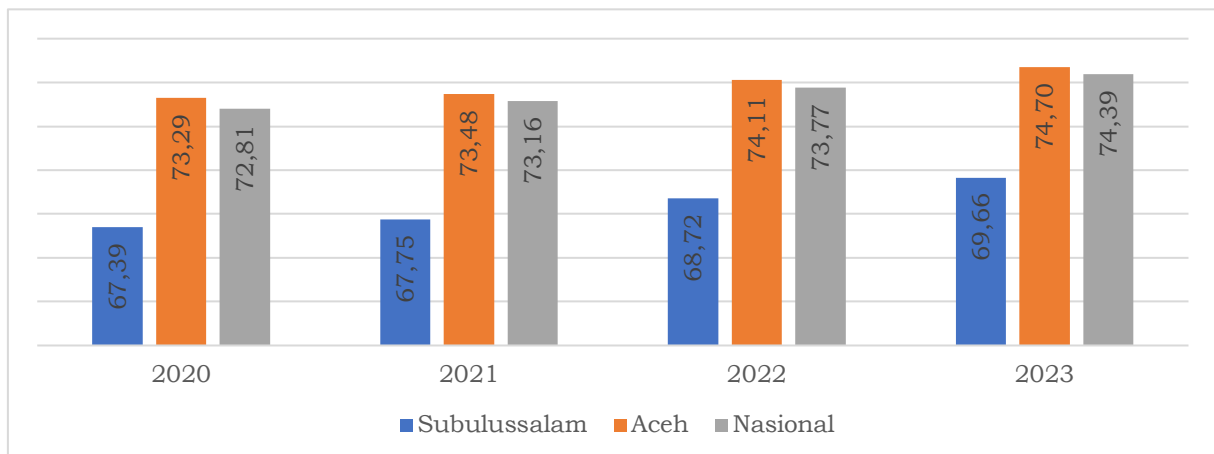
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.49.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (dalam Ribuan/Orang/Tahun) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam lima tahun terakhir yaitu 2020-2024, pembangunan manusia di Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian IPM Kota Subulussalam adalah sebesar 67,39 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,64 pada tahun 2024. Namun Angka IPM Kota Subulussalam secara umum lebih rendah dari IPM Provinsi Aceh yang sebesar 75,36 dan IPM Nasional sebesar 75,02 di tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.50.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Perlu perhatian khusus terhadap rendahnya capaian IPM Kota Subulussalam, berdasarkan data statistik, IPM Kota Subulussalam merupakan yang terendah dari 23 Kabupaten Kota yang ada di Aceh. Penyebab utama IPM Kota Subulussalam

adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh.

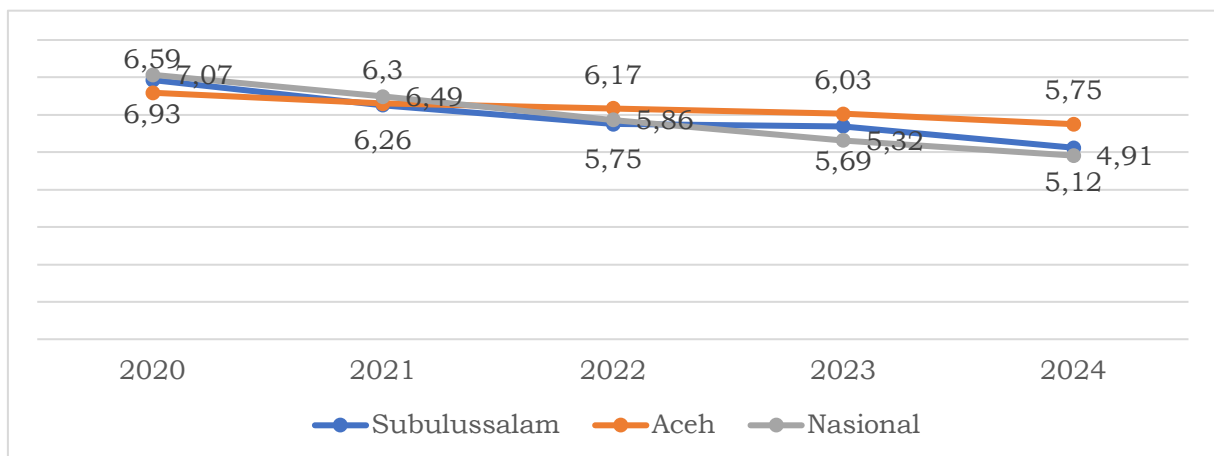
7) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Subulussalam, TPT dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 6,93 persen menjadi 5,12 persen. TPT Kota Subulussalam berada di bawah Aceh dan di atas Nasional.

Tabel 2.25.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	33.165	33.348	35.538	44.762	46.434
- Bekerja	30.867	31.261	33.496	42.214	44.058
- Pengangguran	2.298	2.087	2.042	2.548	2.376
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus rumah tangga, Lainnya)	18.508	18.937	18.937	21.308	21.256
Penduduk Usia Kerja	51.673	52.285	52.285	66.070	67.690
TPAK (Persen)	64,18	63,78	67,04	67,75	68,60
TPT (Persen)	6,93	6,26	5,75	5,69	5,12

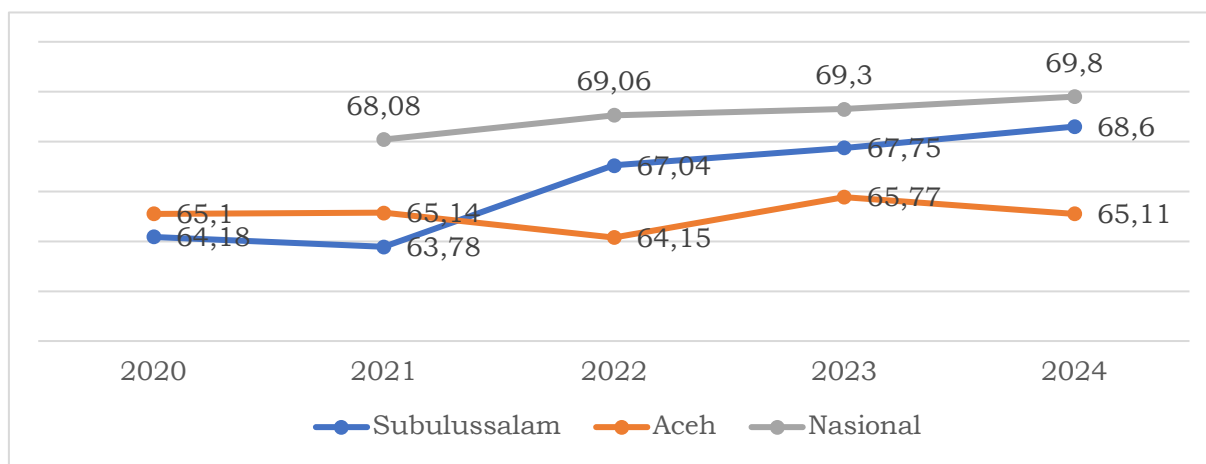
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025



Gambar 2.51.
TPT Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan

kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Subulussalam, TPAK mengalami kenaikan pada tahun 2024 yaitu dari 64,18 persen pada tahun 2020 menjadi 68,60 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat 68-69 penduduk yang tersedia untuk memproduksi pada waktu tertentu. TPAK Kota Subulussalam masih di bawah Nasional tetapi di atas Aceh. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.



Gambar 2.52.
TPAK Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

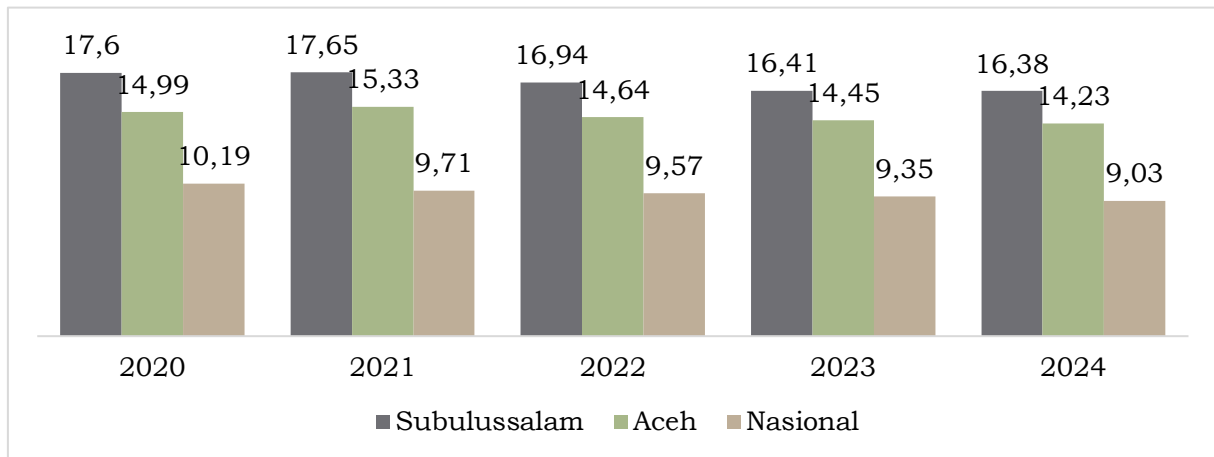
8) Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024, mulai dari 17,60 persen menurun menjadi 16,38 persen pada tahun 2024 (penurunan sebesar 1,22 persen). Meskipun angka kemiskinan Kota Subulussalam pada tahun 2024 di atas Provinsi Aceh (14,23 persen) dan nasional (9,03 persen).

Tabel 2.26.
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kota Subulussalam

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Penduduk Miskin	
				Jumlah (000)	Persentase
2020	400.517	2,27	0,44	14,46	17,60
2021	418.643	2,29	0,48	14,46	17,65
2022	444.418	2,45	0,50	14,06	16,94
2023	487.777	2,19	0,50	13,80	16,41
2024	504.372	2,11	0,41	13,95	16,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.53.
Persentase Penduduk Miskin di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Dari segi jumlah penduduk miskin, terjadi pengurangan sejak tahun 2020-2024, yaitu dari 14,46 ribu jiwa menjadi 13,95 ribu jiwa. Artinya terjadi penurunan sekitar 510 jiwa penduduk miskin di Kota Subulussalam selama 5 tahun terakhir. Hal ini juga sejalan persentase pengangguran terbuka di Kota Subulussalam. Tingkat rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tergolong terjadi penurunan, dari 2,27 pada tahun 2020 menjadi 2,11 pada tahun 2024. Artinya gap antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan tergolong rendah karena berada di bawah Provinsi (2,62).

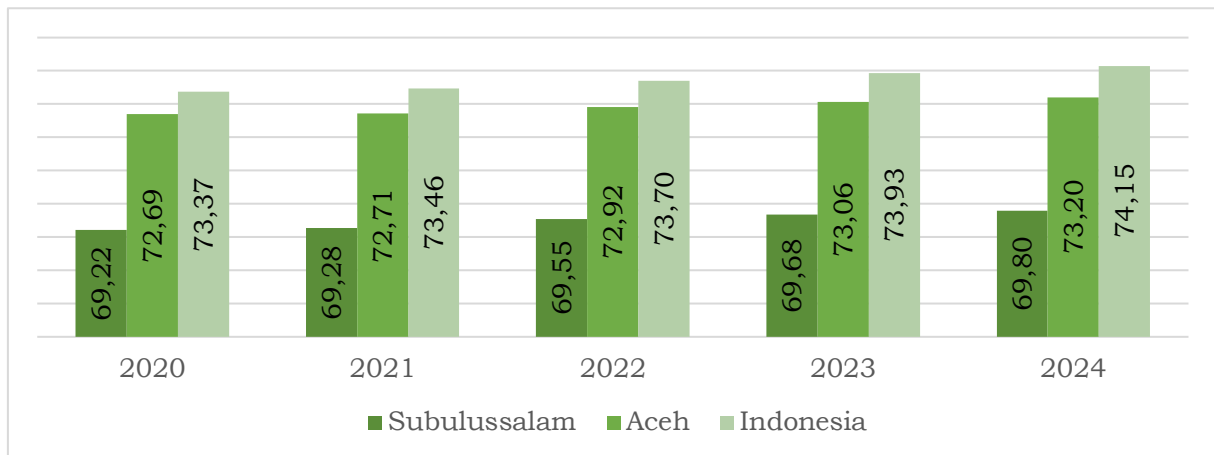
Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2024 memberikan informasi persentase kemiskinan Kota Subulussalam dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase penduduk di Kota Subulussalam masih jauh lebih tinggi. Ini perlu perhatian serius sehingga persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam dapat diturunkan. Beberapa penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di Kota Subulussalam adalah ketimpangan akses sumber daya, pengangguran yang masih tinggi, inflasi harga kebutuhan pokok, rendahnya rata-rata lama sekolah, dan bencana alam tahunan.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Subulussalam masih tergolong rendah dibandingkan UHH Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2024, UHH Kota Subulussalam hanya berada pada angka 69,80 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Aceh dan Nasional yaitu masing-masing 73,20 tahun dan 74,15

tahun.

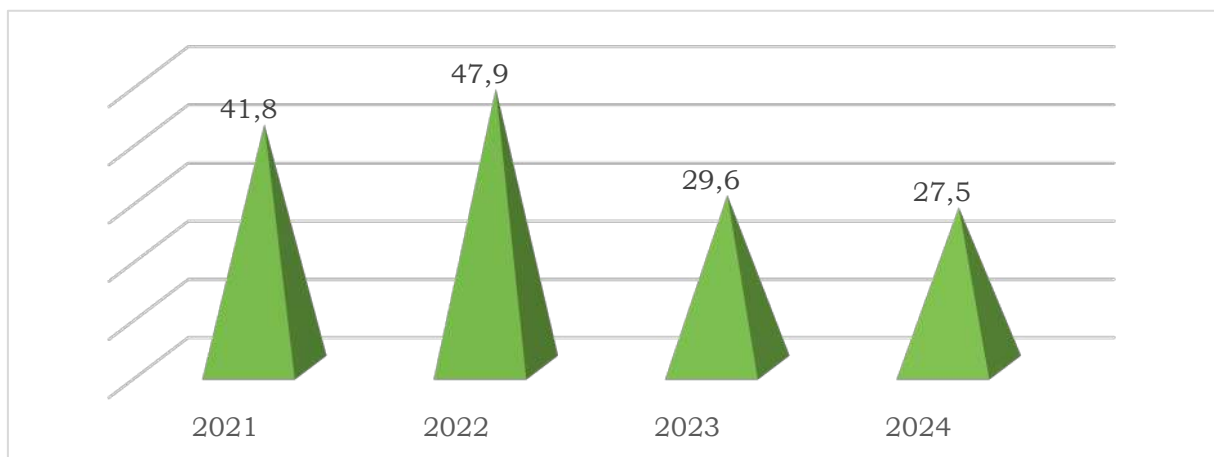


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.54.
Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Beberapa faktor penyebab masih rendahnya AHH Kota Subulussalam adalah masih tingginya angka kesakitan, akses terbatas ke layanan kesehatan dasar, gizi buruk, angka kemiskinan, rendahnya rata-rata lama sekolah, akses terhadap air dan sanitasi layak dan aman, serta perilaku dan gaya hidup tidak sehat.

2) Angka Stunting

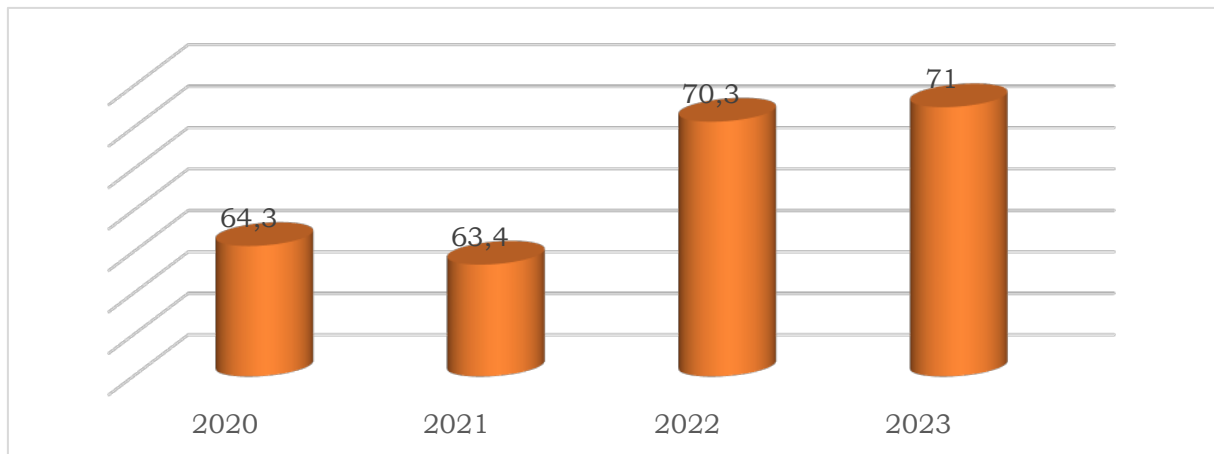


Sumber : Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.55.
Angka Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Angka *stunting* di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi sejak tahun 2021-2024. Angka *stunting* tahun 2021 berada pada angka 41,8 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 47,9 persen. Angka ini tergolong sangat tinggi

dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan ke angka 27,5 persen.



Sumber : Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.56.
Indeks Penanganan Khusus Stunting (IPKS)
Kota Subulussalam Tahun 2021-2023

Indeks yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik penanganan *stunting* di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menyusun analisis kinerja penurunan *stunting* melalui IKPS. IKPS Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, dari 64,3 pada tahun 2020 menjadi 71,00 pada tahun 2023. Angka pada tahun 2023 merujuk pada IKPS Provinsi Aceh dikarenakan tidak adanya perhitungan untuk Kota Subulussalam pada tahun tersebut yang disebabkan oleh RSE yang tinggi (>25 persen). Tingginya IKPS menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penurunan dan penanganan angka *stunting*.

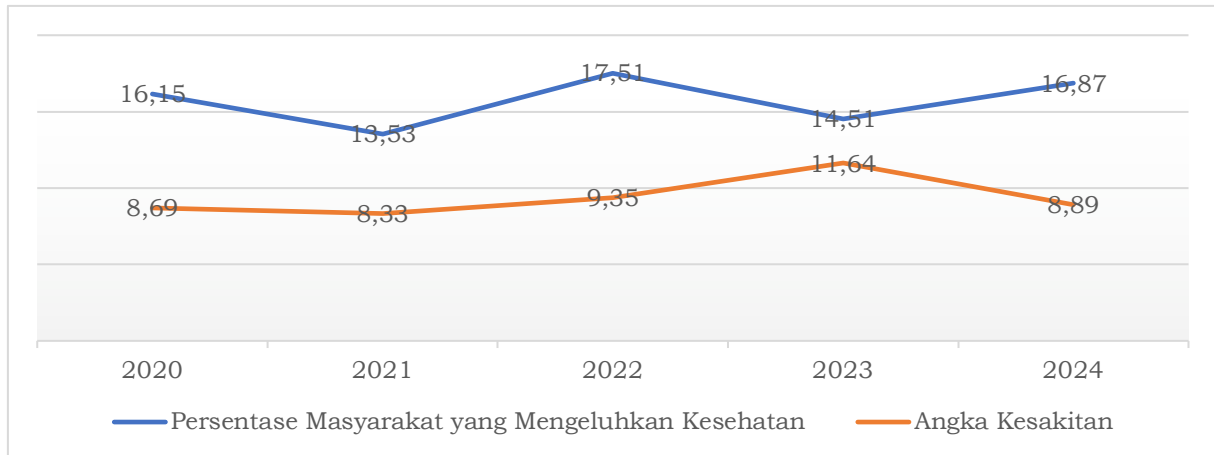
2) Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan

Persentase Masyarakat yang Mengeluhan Kesehatan di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, terjadi peningkatan pada tahun 2020, yaitu sebesar 16,15 persen. Lalu mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 13,53 persen. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 16,87 persen.

3) Angka Kesakitan

Angka Kesakitan di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, angka kesakitan pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,69 persen. Lalu mengalami penurunan pada Tahun 2021

menjadi 8,33 persen. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 8,89 persen.



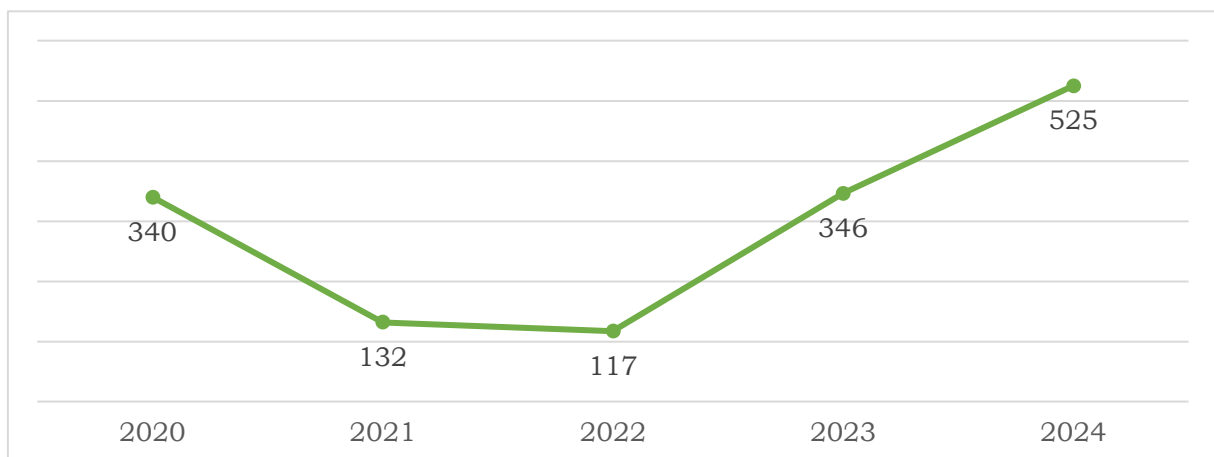
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.57.

Persentase Masyarakat yang Mengeluhkan Kesehatan dan Angka Kesakitan (dalam persen) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AKI Kota Subulussalam mencapai 340 kasus per 100.000 lahir hidup (LH). Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 mencapai angka 117 kasus per 100.000 LH. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 346 kasus per 100.000 LH. Lalu pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 525 kasus per 100.000 LH.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

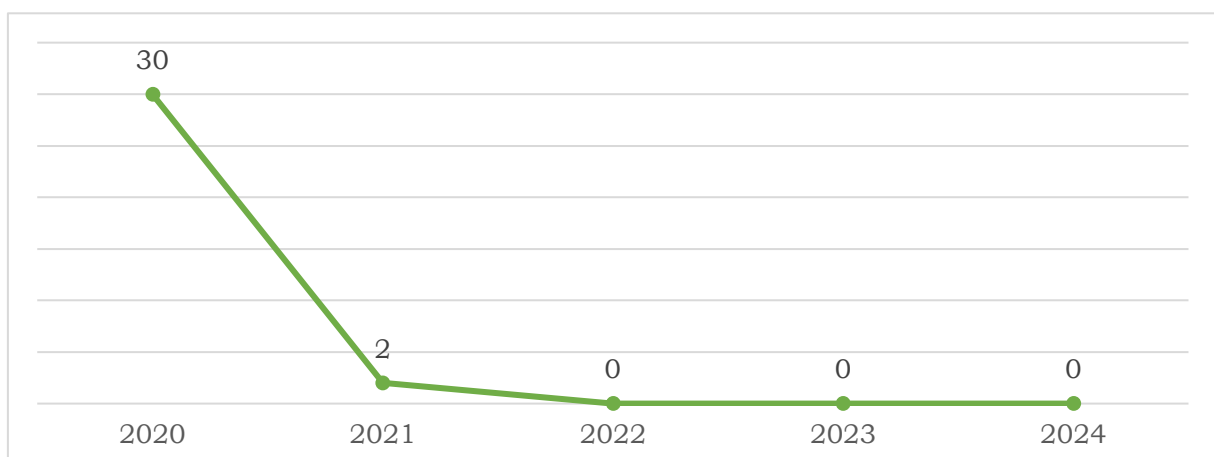
Gambar 2.58.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Beberapa jenis penyebab kematian pada ibu bersalin, pasca persalinan dan hamil adalah seperti pendarahan, hipertensi, infeksi gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolik dan lainnya. Upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Kesehatan terutama garda terdepan yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapat cuti hamil dan melahirkan dan pelayanan keluarga berencana. Di samping itu, pentingnya melakukan intervensi lebih ke hulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

5) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 30 kasus AKB per 1.000 LH dan menurun pada tahun 2021 menjadi 2 kasus per 1.000 LH. Pada tahun 2022-2024, tidak terjadi kasus kematian bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan kematian ibu yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan perlunya penanganan serius untuk ibu hamil agar dapat melahirkan selamat beserta bayinya.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.59.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

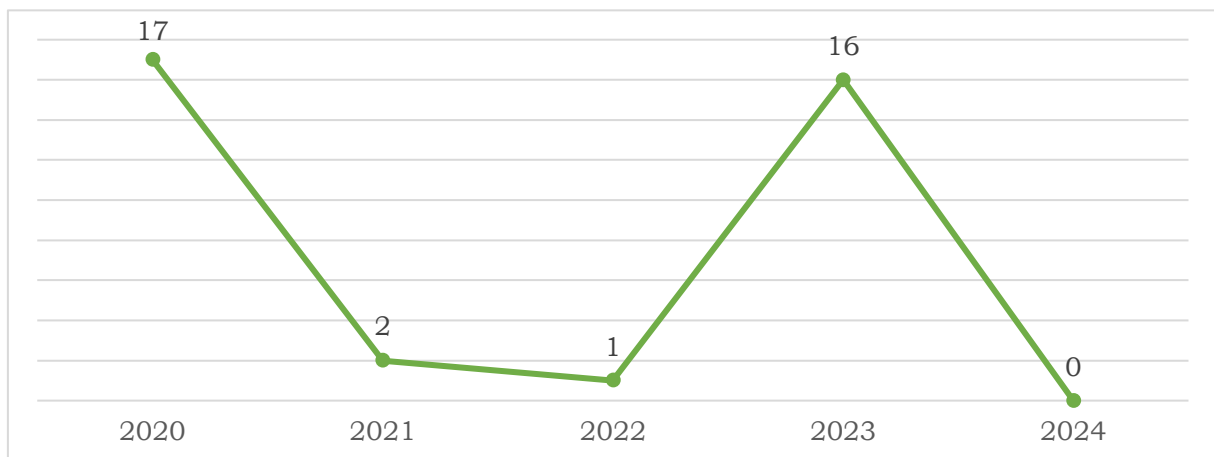
Pemerintah Kota Subulussalam telah berhasil menjalankan program pemerintah dalam penanganan AKB yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dimana satu dari 4 area prioritasnya adalah penurunan AKB.

6) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AKABA mencapai 17 kasus per 1.000 LH. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan mencapai 1 kasus per 1.000 LH. Namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 ke angka 16 kasus per 1.000 LH. Lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 0 kasus per 1.000 LH.

Perlu diupayakan penerapan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga dan adanya penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Terobosan yang telah dilakukan berupa pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan secara berkesinambungan dan terus menerus di Kota Subulussalam. Selain itu beberapa Program yang dilaksanakan yaitu balita 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A, balita Gizi Kurang mendapatkan makanan tambahan, Kasus balita Gizi buruk mendapat perawatan, balita yang di timbang berat badannya, balita ditimbang yang naik berat badannya, persentase balita di bawah garis merah dan balita mempunyai buku KIA dan MKS.



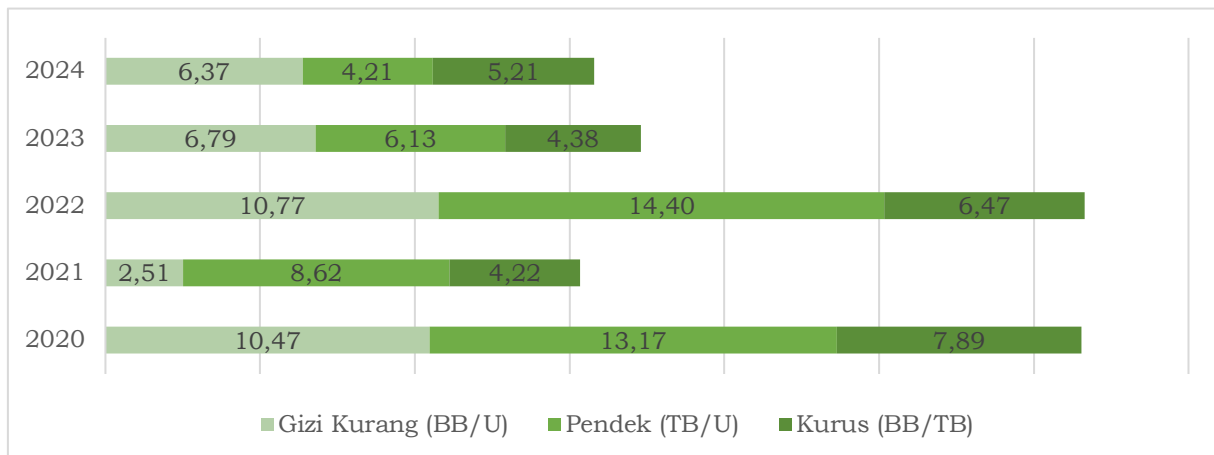
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.60.
Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

7) Status Gizi Balita

Persentase balita gizi kurang (BB/U) mengalami fluktuasi setiap tahunnya, begitu juga untuk balita pendek (TB/U), dan balita kurus (BB/TB) pada tahun 2020-2024. Kondisi gizi balita yang terjadi paling banyak adalah gizi kurang dan pendek. Balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh kondisi ibu, masa janin dan masa bayi/balita termasuk penyakit yang diderita

selama masa balita, seperti masalah gizi lainnya tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun kondisi lain yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

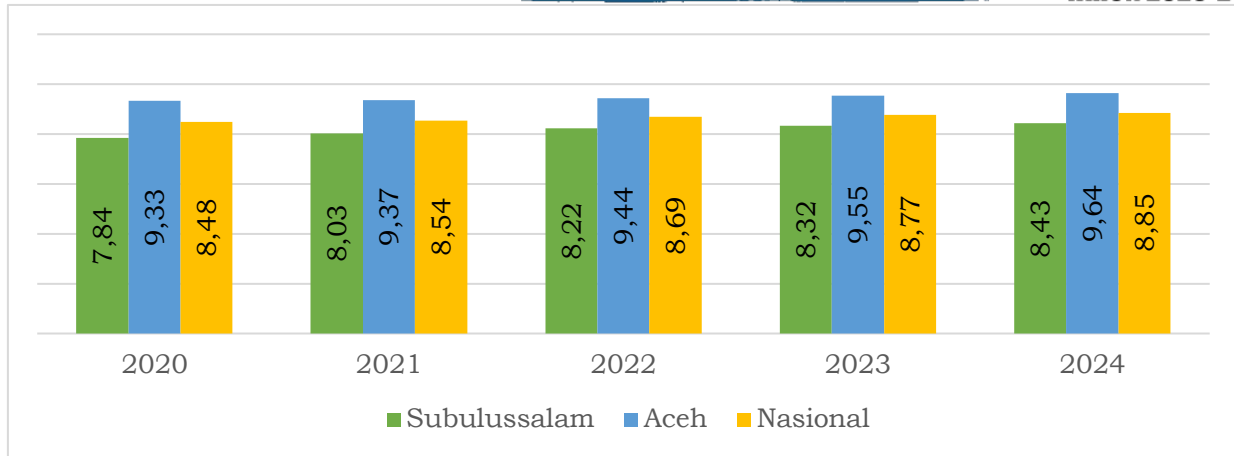
Gambar 2.61.
Persentase Kondisi Gizi Balita Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Penanggulangan kasus balita gizi buruk dapat dilakukan dengan pemberian PMT yang pendanaannya melalui dana APBD Kota Subulussalam dan APBD Provinsi Aceh. PMT yang diberikan berupa pemberian susu, biskuit MP—ASI dan bubur susu. Dari jumlah kasus yang dibantu hampir semuanya mengalami kenaikan berat badan yang cukup menggembirakan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka RLS Kota Subulussalam memang mengalami peningkatan sejak dari tahun 2020 dari 7,84 tahun menjadi 8,43 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Subulussalam tahun 2023 hanya sampai jenjang kelas VIII SMP/ sederajat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Subulussalam belum sepenuhnya terlaksana program wajib belajar 9 tahun yang menjadi kewenangan kab/kota. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Angka RLS Kota Subulussalam masih sangat rendah.



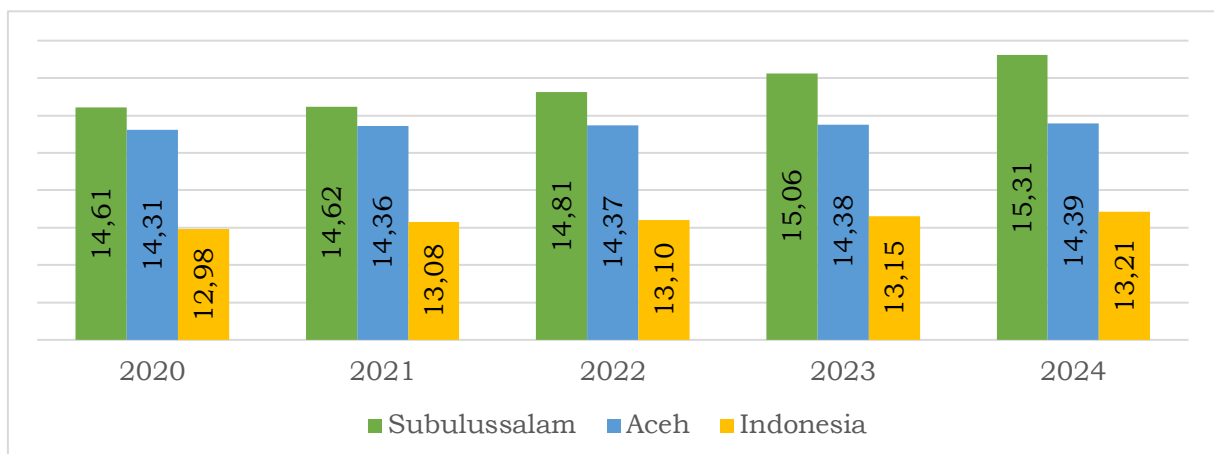
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.62.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Subulussalam (dalam tahun),
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam yang masih di bawah 9 tahun merupakan permasalahan Kota Subulussalam yang harus ditingkatkan dan mendapat perhatian serius. APM Kota Subulussalam usia 13-15 tahun yang tidak mencapai 100 persen menunjukkan terdapat penduduk yang usia 13-15 tahun tidak mengenyam pendidikan.

Beberapa penyebab masih rendahnya rata-rata lama sekolah adalah masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka keputusan sekolah dan aksesibilitas pendidikan.

2) Harapan Lama Sekolah



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.63.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam (dalam tahun),
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah di Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak

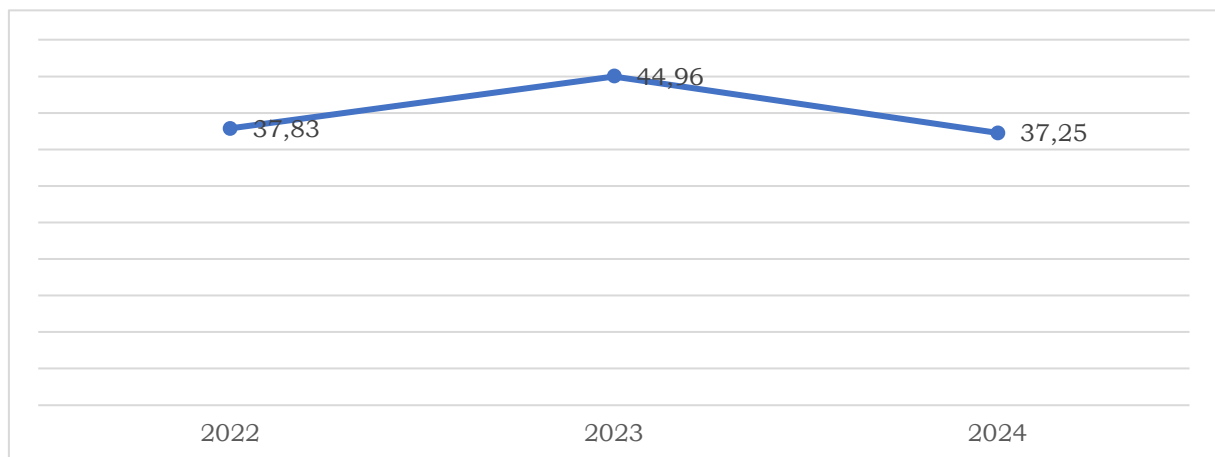
tahun 2020, dari 14,61 menjadi 15,31 tahun (tahun 2024). Artinya, lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang selama 15,31 tahun atau paling rendah menamatkan diploma III. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Aceh. Untuk itu perlu adanya upaya agar Angka Harapan Lama Sekolah semakin meningkat.

3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Kota Subulussalam mulai berpartisipasi dalam pengukuran IPLM sejak tahun 2022. Terjadi peningkatan sejak IPLM dari 53,76 pada tahun 2022 menjadi 71,93 pada tahun 2024. Beberapa penyebab masih rendahnya IPLM di antaranya terbatasnya akses ke fasilitas penyedia literasi seperti taman bacaan, kemiskinan, kurikulum pendidikan, budaya dan lingkungan yang tidak mendukung, dan aksesibilitas terhadap layanan internet.

4) Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Terjadi penurunan IMDI Kota Subulussalam sejak tahun 2022-2024, yaitu dari 37,83 menjadi 37,25 dengan kategori “Cukup”. Indikator pendukung terendah adalah pemberdayaan (19,53), tertinggi adalah Infrastruktur dan Ekosistem (49,24).

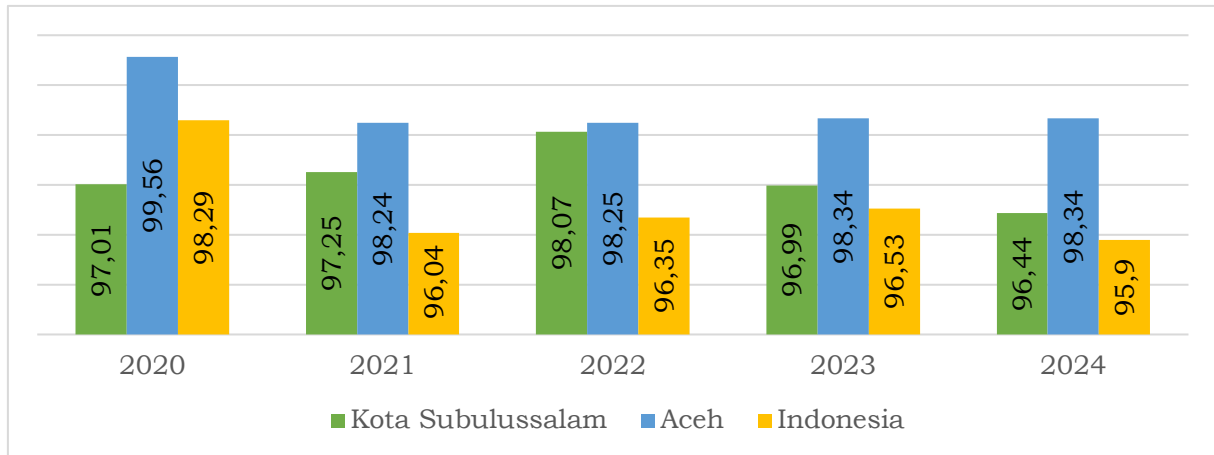


Gambar 2.64.
Indikator Masyarakat Digital Indonesia Kota Subulussalam Tahun 2022-2024

5) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Kota Subulussalam mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu 96,99 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu 97,25 persen. Artinya, sejak tahun 2020-2024, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis meningkat ke angka 96,44 persen. Namun, AMH Kota Subulussalam masih di bawah Provinsi Aceh, namun di atas rata-rata nasional.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Subulussalam dalam memberantas buta huruf.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.65.

Angka Melek Huruf Kota Subulussalam (dalam persen), Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

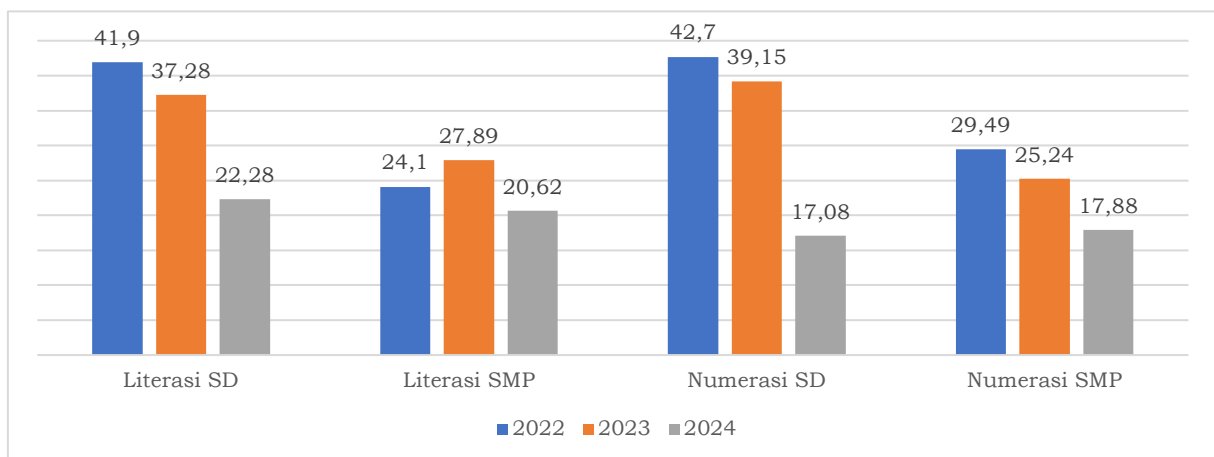
Tabel 2.27.

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2020 s.d. 2024 Kota Subulussalam

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	96,33	95,63	94,94	95,99	96,44
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	61.315	62.901	64.904	66.928	67.423
3	Angka Melek Huruf	97,01	97,25	98,07	96,99	96,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

6) Angka Literasi dan Numerasi



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.66.

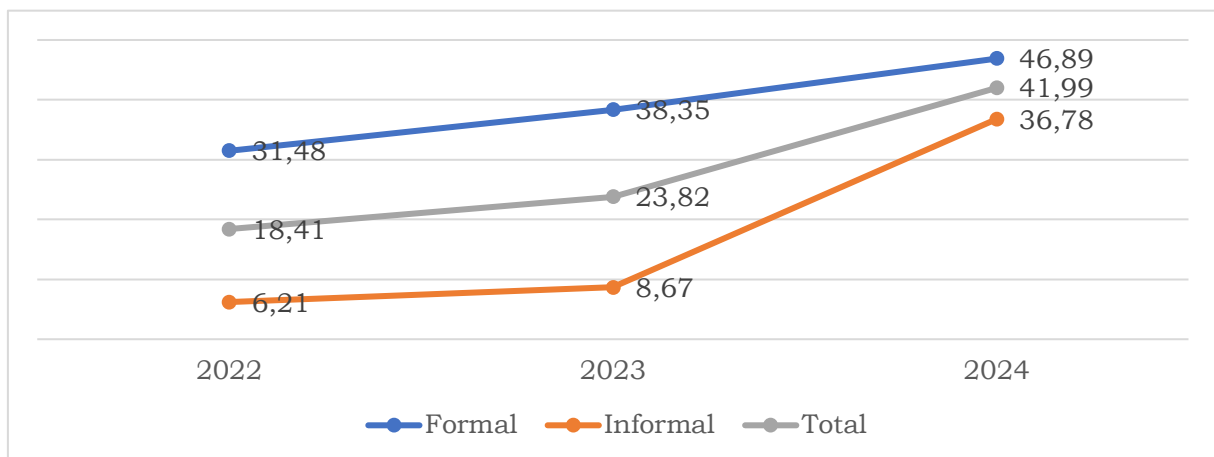
Angka Literasi dan Numerasi Kota Subulussalam Tahun 2022-2024

Angka literasi dan numerasi Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2023-2024. Beberapa hal yang menyebabkan angka literasi dan numerasi rendah, di antaranya kualitas pembelajaran yang rendah seperti kualitas guru, kurikulum dan penilaian formatif; infrastruktur dan akses pendidikan seperti fasilitas belajar dan sarana prasarana; sosial ekonomi seperti kemiskinan dan budaya literasi; kebijakan dan tata kelola pendidikan serta faktor lingkungan dan geografis.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dengan adanya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), penduduk yang memiliki KTP Aceh mendapatkan pelayanan BPJS golongan III secara gratis. Dengan demikian, seluruh penduduk Kota Subulussalam telah terdaftar dan mendapatkan pelayanan BPJS.

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Subulussalam meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan masih banyak yang harus ditingkatkan, karena terdapat setidaknya 58 persen pekerja belum terdaftar sebagai peserta. Bahkan, untuk pekerja sektor informal, terdapat setidaknya 63 persen pekerja yang belum menjadi peserta jaminan sosial.

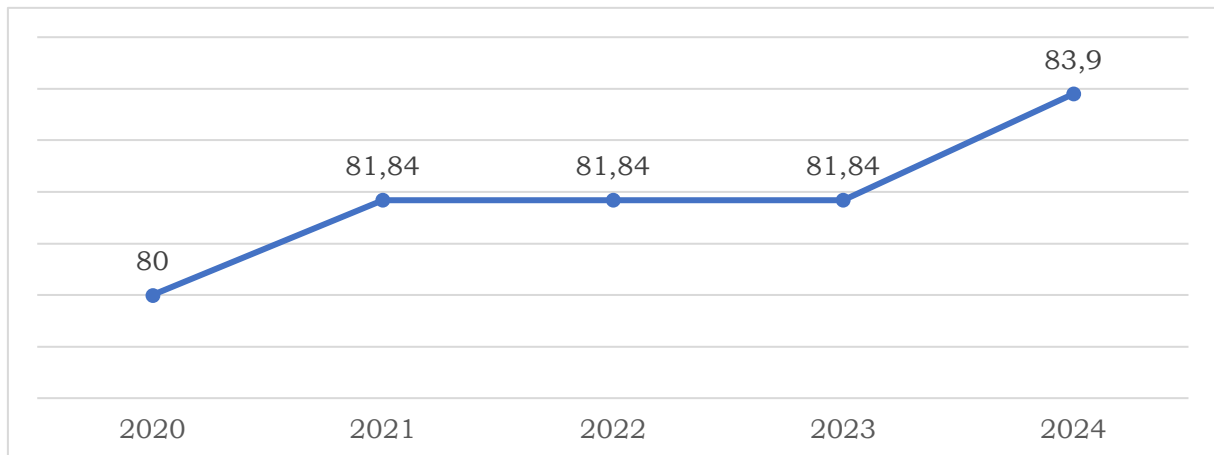


Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan , 2025

Gambar 2.67.
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Subulussalam
Tahun 2022-2024

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks pembangunan syariat (IPS) Kota Subulussalam merujuk pada perolehan capaian IPS Provinsi Aceh. IPS Kota Subulussalam mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2020-2024. IPS mengalami kenaikan dari 80,00 pada tahun 2020 menjadi 83,9 pada tahun 2024.



Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2024

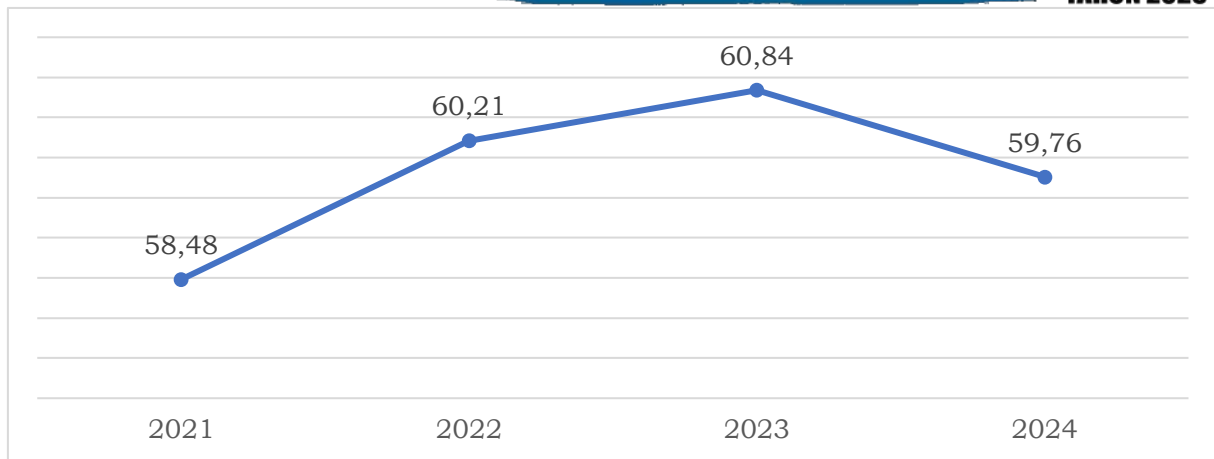
Gambar 2.68.
Indeks Pembangunan Syariat (IPS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Beberapa faktor penyebab rendahnya IPS adalah lemahnya integrasi keuangan syariah dengan sektor riil, regulasi parsial dan tidak konsisten, kurikulum pendidikan kurang menekankan literasi syariah, minimnya ahli ekonomi syariah, resistensi terhadap perubahan sistem, dan pemanfaatan ZISWAF belum optimal. Kota Subulussalam merupakan salah satu kabupaten/kota yang capaian Indeks Melek Al-Quran sangat rendah di Aceh.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami kenaikan sejak 2021-2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, IPA Kota Subulussalam sebesar 58,48, meningkat pada tahun 2023 menjadi 60,84. Namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 59,76.

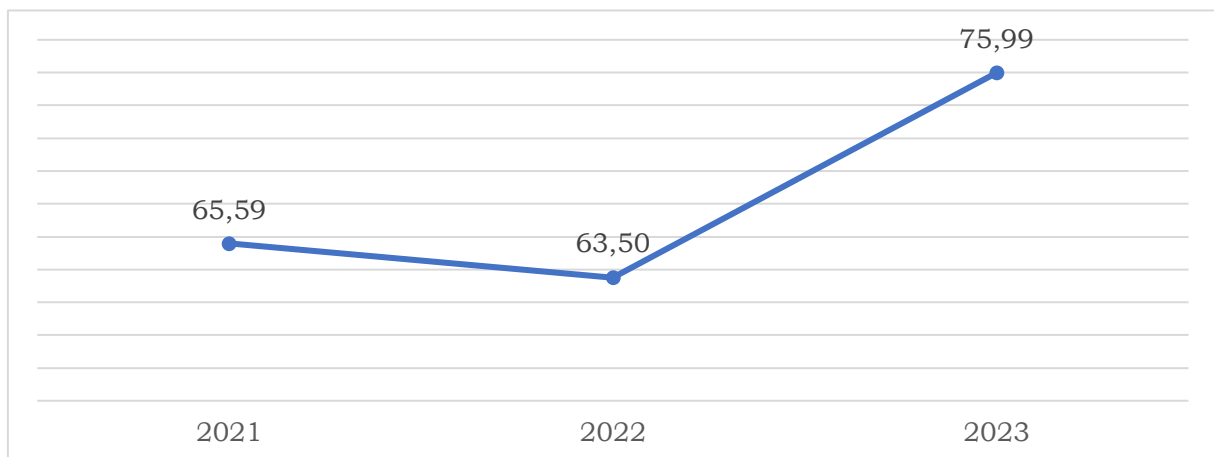


Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Gambar 2.69.
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

2) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, IPKA Kota Subulussalam sebesar 65,59 dan meningkat menjadi 75,99 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kota Subulussalam setiap tahun memerhatikan perlindungan anak dalam situasi dan kondisi tertentu.



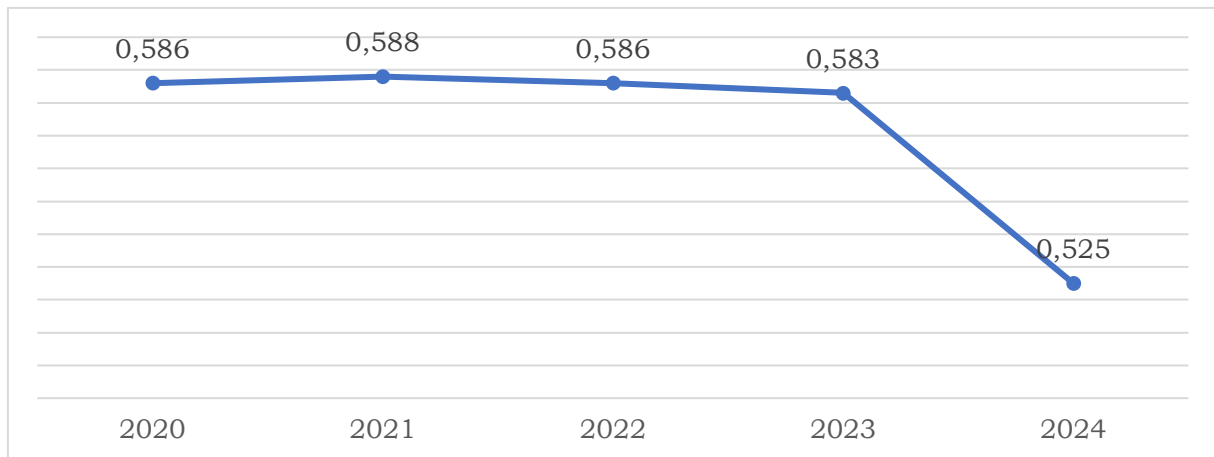
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Gambar 2.70.
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023

3) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya, terutama tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IKG Kota Subulussalam mencapai 0,586, namun mengalami penurunan ke angka 0,525.

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Kota Subulussalam.

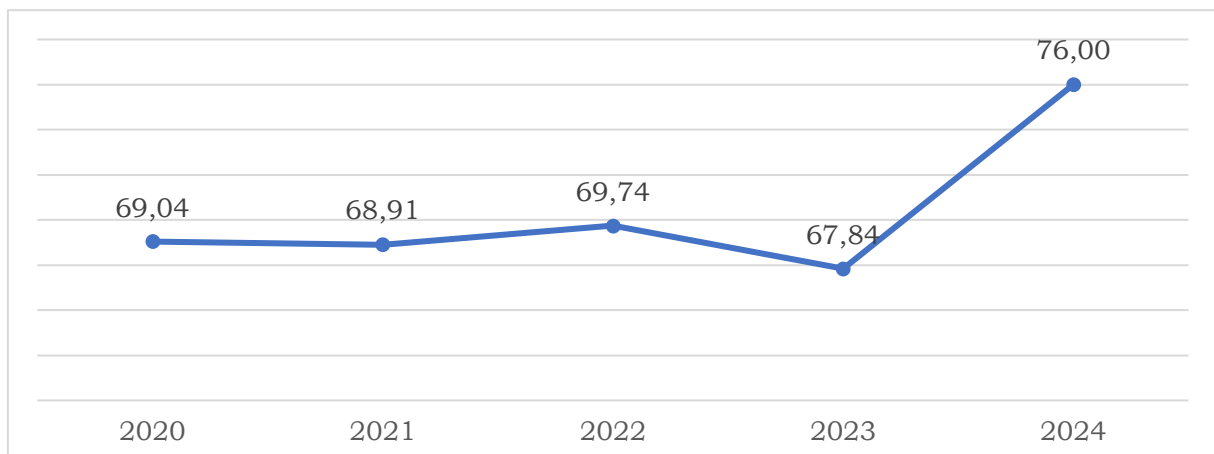


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.71.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2023

4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IDG Kota Subulussalam sebesar 69,04, mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 68,91. Angka ini meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 69,74 dan turun kembali menjadi 67,84 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan pada angka 76,00 dan tertinggi se-Aceh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran perempuan dapat dalam kehidupan ekonomi dan politik mengalami peningkatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

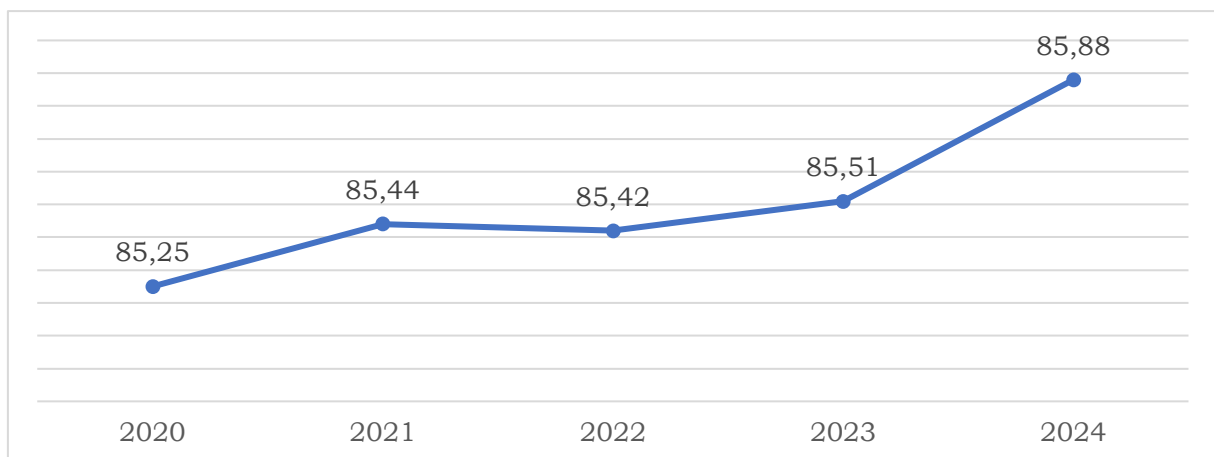
Gambar 2.72.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Beberapa penyebab IDG tinggi di antaranya semakin tingginya kesempatan perempuan menduduki kursi dewan perwakilan rakyat kota, kesempatan perempuan bekerja, dan akses pendidikan untuk perempuan yang meningkat.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, IPG Kota Subulussalam sebesar 85,25 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,88. Angka ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam pembangunan manusia dengan mempertimbangkan gender.

Beberapa faktor penyebab rendahnya IPG adalah ketimpangan aksesibilitas pendidikan, keterbatasan kesehatan reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

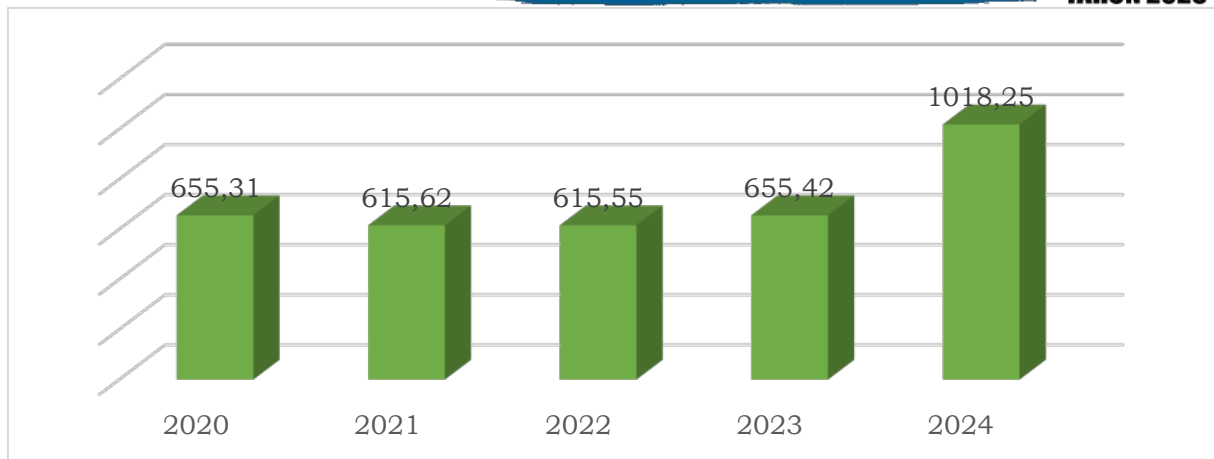
Gambar 2.73.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir minimal perguruan tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir minimal perguruan tinggi sebesar 655-656 jiwa per 10.000 penduduk, lalu naik pada tahun 2024 menjadi 1.018-1.019 jiwa per 10.000 penduduk.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.74.
Rasio Penduduk dengan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 (Per 10.000 penduduk)

Tabel 2.28.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2020	2021	2022	2023	2024
<= Sekolah Dasar	18.265	20.188	19.221	16.590	23.169
Sekolah Menengah Pertama	10.431	9.385	9.592	10.550	11.291
Sekolah Menengah Atas	17.030	17.007	18.337	16.930	23.143
Perguruan Tinggi	5.947	5.705	5.860	6.408	10.087
Total	51.673	51.673	53.010	50.478	67.690

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Rasio ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kota Subulussalam 2020-2024 pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.29.
Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif Di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	29.436	29.770	30.295	30.842	31.639
Jumlah Penduduk Usia > 64	2.434	2.586	2.771	2.959	3.093
Jumlah Usia Tidak Produktif <15 tahun + > 64 tahun	31.870	32.356	33.066	33.801	34.732
Jumlah Penduduk 15 – 64	58.881	60.315	62.133	63.969	64.330
Rasio Ketergantungan Total *100 penduduk	54,13	53,65	53,22	52,83	53,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak Produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

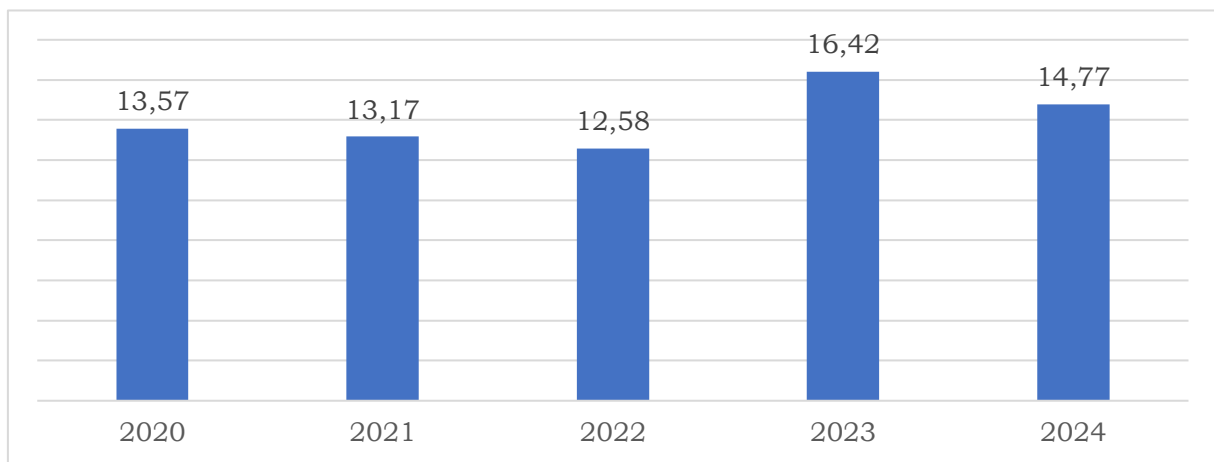
Pada tahun 2020 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2024 penduduk usia kerja di Kota Subulussalam masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap

penduduk tua. Rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 53,99 per 100 penduduk artinya setiap 2 orang menanggung 1 orang.

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1) Wirausaha

Persentase wirausaha di Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase wirausaha di Kota Subulussalam sebanyak 13,57 persen, lalu meningkat menjadi 14,77 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.75.
Persentase Wirausaha di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Tabel 2.30.

Status Pekerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	8.351	7.846	5.732	8.508	7.793
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap / Buruh Tidak Dibayar	2.989	3.273	4.077	4.888	4.847
Berusaha Dibantu Buruh Tetap / Buruh Dibayar	976	1.082	2.164	2.660	1.996
Buruh / Karyawan / pegawai	13.601	14.321	12.498	14.353	16.111
Pekerja Bebas	1.663	1.807	3.741	5.497	8.813
Pekerja Keluarga / Tak Dibayar	3.287	3.022	5.284	6.308	4.498
Total	30.867	31.261	33.498	42.214	44.058

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

2) Indeks Inovasi Daerah

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2021-2024. Meskipun pada tahun 2020 kategori IID Kota Subulussalam *disclaimer* atau tidak dapat dinilai, namun IID Kota Subulussalam tahun 2021-2024 berada pada kategori Kota Inovatif.

Dibandingkan rata-rata kabupaten/kota inovatif, Kota Subulussalam tergolong salah satu terendah. Lemahnya komitmen pemerintah daerah, keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur riset dan pengembangan, kolaborasi dan jejaring multi pihak, serta akses pendanaan terbatas menjadi beberapa permasalahan dalam pengembangan inovasi daerah.

Tabel 2.31.
Indeks Inovasi Daerah

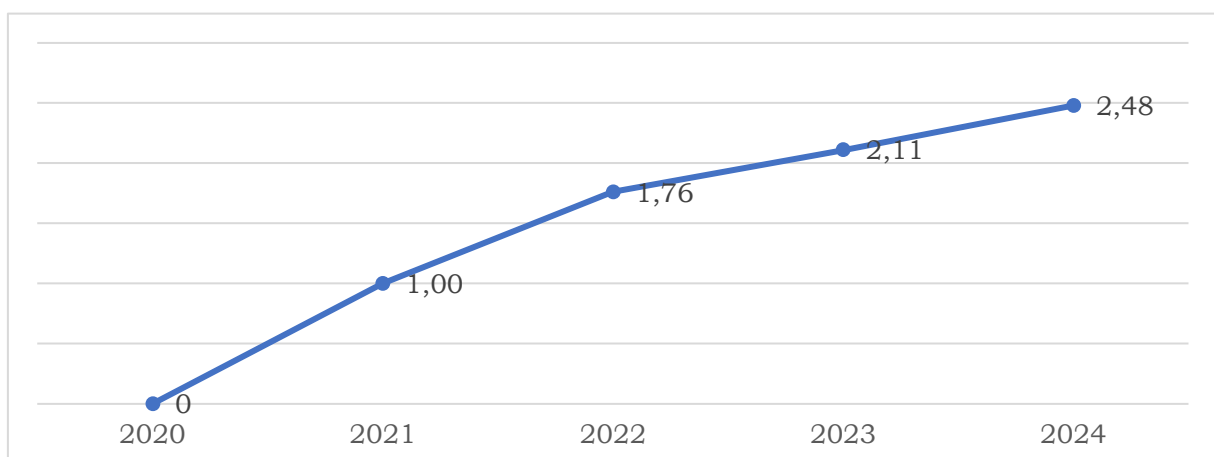
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Inovasi Daerah	0,00	31,44	35,60	44,51	43,88
Predikat Indeks Inovasi Daerah	Disclaimer	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2025

2.3.3. Transformasi Digital

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE Kota Subulussalam tahun 2020 masih belum mendapatkan kategori atau NA. Lalu pada tahun 2021, memperoleh nilai 1,00. Angka ini meningkat menjadi 2,48 pada tahun 2024 atau berkategori “Cukup”.



Sumber : Kementerian PAN&RB, 2024

Gambar 2.76.
Indeks SPBE Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Tabel 2.30. terlihat bahwa pertumbuhan PDRB dengan harga berlaku mulai tahun 2021 yang sebesar 2.110.949,42 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 2.761.850,00 atau terjadi kenaikan sebesar 650.900,86 dari nilai tahun 2021 sebesar 2.110.949,14.

Tabel 2.32.
PDRB menurut Pengeluaran (ADHB) tahun 2020-2024

No	Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		Harga Berlaku				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.310.238,88	1.346.392,96	1.429.635,00	1.514.857,77	1.591.090,00
2	Konsumsi LNPRT	56.026,16	55.298,47	58.894,11	64.889,21	76.310,00
3	Konsumsi Pemerintah	580.477,71	622.367,57	645.008,85	651.758,68	706.880,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.054.990,63	1.102.650,14	1.153.756,80	1.239.051,12	1.318.070,00
5	Perubahan Inventori	(29.818,60)	(7.485,27)	(8.115,06)	10.664,00	4.030,00
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.168.236,36)	(1.008.274,73)	(914.275,72)	(921.632,50)	(934.530,00)
Produk Domestik Regional Bruto		1.803.678,42	2.110.949,14	2.364.903,98	2.559.588,28	2.761.850,00

Tabel 2.33.
PDRB menurut Pengeluaran (ADHK) tahun 2020-2024

No	Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		Harga Konstan 2010				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Konsumsi Rumah Tangga	898.211,71	911.740,72	932.950,99	963.601,51	996.150,00
2	Konsumsi LNPRT	38.259,31	37.486,76	38.944,99	42.086,80	48.140,00
3	Konsumsi Pemerintah	370.182,44	384.869,56	375.569,06	371.644,81	397.550,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	646.480,99	656.401,71	663.708,76	690.096,55	710.330,00
5	Perubahan Inventori	(5.393,31)	(5.149,11)	(5.003,85)	6.349,00	2.110,00
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(562.334,42)	(546.352,98)	(507.869,01)	(514.721,17)	(531.030,00)
Produk Domestik Regional Bruto		1.358.687,66	1.385.406,72	1.438.996,66	1.559.057,50	1.623.250,00

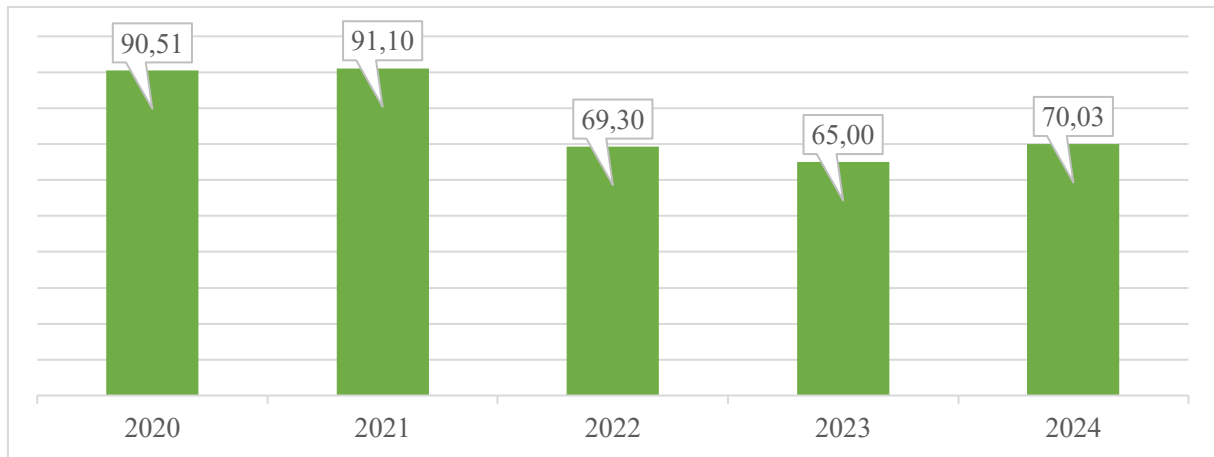
Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada pengeluaran rumah tangga dengan angka 61,37 persen yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pencapaian suatu lingkungan perumahan yang baik adalah suatu rumah tersebut

memiliki jaringan air bersih, listrik dan sanitasi, dan juga seberapa besar proporsi lingkungan kumuh perkotaan. Berikut akan dijelaskan kondisi perumahan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan di bidang perumahan dalam RPJMD Kota Subulussalam 2020-2024.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.77.

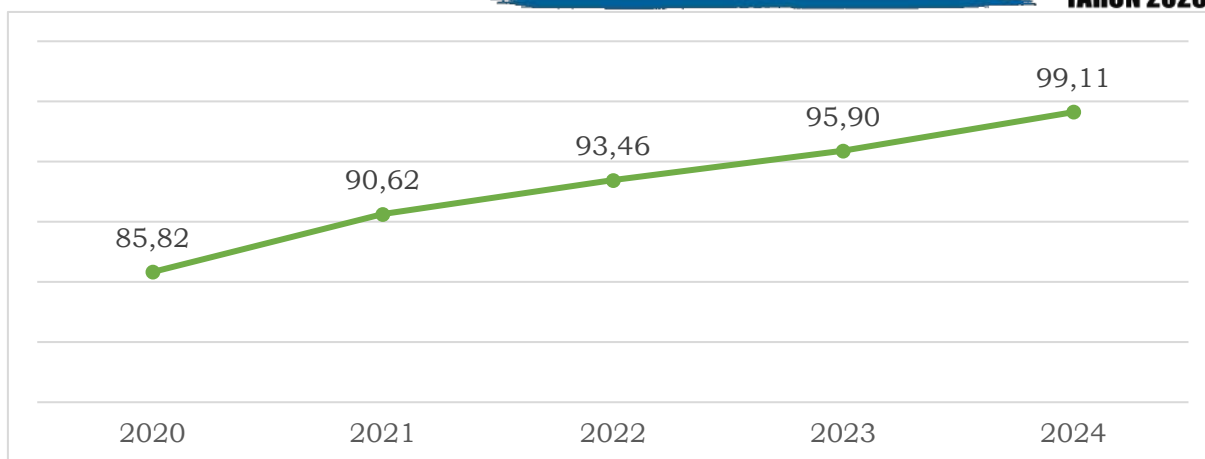
Persentase Rumah Tinggal Layak Huni Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa sampai pada tahun 2020, persentase rumah layak huni Kota Subulussalam sebesar 90,61 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 70,03 persen.. Sesuai dengan program prioritas nasional dan Gubernur Aceh, pembangunan rumah layak huni ini akan terus ditingkatkan terutama yang diperuntukkan bagi keluarga miskin melalui data rumah tangga miskin (basis data terpadu) yang bisa didanai dari dana otsus dan dana-dana lain yang mendukung pencapaian rumah layak huni semaksimal mungkin.

2) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Subulussalam Tahun 2023 masih di bawah angka 100,00. Artinya Kemahalan Konstruksi di Kota Subulussalam Tahun 2022 tidak lebih mahal dibandingkan Kota Makassar. Adapun perkembangan IKK Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar berikut.

Biaya material yang tergolong tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, perizinan konstruksi panjang dan tumpang tindih, infrastruktur logistik buruk, minimnya adopsi teknologi konstruksi modern, inflasi dan gejolak ekonomi makro merupakan beberapa penyebab IKK di Kota Subulussalam masih rendah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.78.
Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.34.
Rasio Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	20.745	25.291	25.972	27.721	32.778
Panjang jalan (Km)	640,49	640,49	640,49	640,49	640,49
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	0,031	0,025	0,025	0,023	0,020

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 mencapai 0,020 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 Km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 50 kendaraan bermotor. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya, dimana rasio ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan terus meningkat.

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

1) Inflasi

Pengukuran tingkat inflasi Kota Subulussalam masih mengacu pada Kota Meulaboh, dikarenakan Meulaboh memiliki jarak yang paling dekat dengan Kota Subulussalam dan memiliki Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Acuan penilaian ini berdasarkan kepada data yang di keluarkan oleh BPS Aceh, bahwasanya penilaian inflasi di Aceh terdapat pada 3 (tiga) daerah yakni Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh.

Hasil penilaian inflasi yang terjadi di Kota Meulaboh menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih dalam kondisi inflasi sedang (3,29 persen). Angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yaitu 1,42 persen. Berikut disajikan secara rinci inflasi yang terjadi di 3 Kota Provinsi Aceh sejak tahun 2020-2024.

Tabel 2.35.
Tingkat Inflasi Kota di Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Meulaboh	Banda Aceh	Lhokseumawe	Aceh	Indonesia
2020	4,24	3,46	3,55	3,59	1,68
2021	2,07	2,41	1,97	2,24	1,87
2022	6,56	6,00	5,37	5,89	5,51
2023	1,42	1,53	1,56	1,53	3,08
2024	3,29	2,16	2,79	2,17	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Terdapat 2 Bank yang beroperasi di Kota Subulussalam dengan status cabang, yaitu Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedikitnya jumlah bank di Kota Subulussalam disebabkan oleh diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Adapun beberapa capaian kinerja di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- Nilai Sakip Kota Subulussalam mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Subulussalam memperoleh predikat C, naik menjadi CC pada tahun 2024.

- b. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks-RB) Kota Subulussalam meningkat dari 40,02 pada tahun 2020 menjadi 59,24 pada tahun 2024. Peningkatan ini tergolong sangat lambat setiap tahunnya.
- c. Capaian penilaian LPPD Kota Subulussalam fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 memperoleh predikat Rendah, lalu turun pada 2021 menjadi Sangat Rendah dan naik kembali menjadi Rendah pada tahun 2022-2024.
- d. Indeks Pelayanan Publik di Kota Subulussalam tergolong Baik atau berkategori B.
- e. Kepatuhan standar pelayanan publik di Kota Subulussalam berada pada kategori B atau Kualitas Kepatuhan Tinggi.
- f. Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa meningkat setiap tahunnya, dari 18,20 atau kategori Kurang pada tahun 2021, meningkat menjadi 63,92 atau kategori Cukup pada tahun 2024.
- g. Indeks Reformasi Hukum Kota Subulussalam meningkat dari 58,20 pada tahun 2022 menjadi 77,34 pada tahun 2024.

Tabel 2.36.
Beberapa Capaian Kinerja pada Sekretariat Daerah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sakip	44,56 / C	45,05 / C	45,50 / C	47,79 / C	52,40 / CC
Indeks Reformasi Birokrasi	40,02 / C	44,65 / C	46,95 / C	42,02 / C	59,24 / CC
LPPD	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Indeks Pelayanan Publik	NA	3,16 / B-	3,52 / B	3,44 / B	3,82 / B
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI	NA	84,05 / B	85,35 / B	84,94 / B	85,78 / B
Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00 / Kurang	18,20 / Kurang	23,80 / Kurang	42,51 / Kurang	63,92 / Cukup
Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	58,20	55,51	77,34

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 81 kasus sampai 82 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020 ke angka 179 kasus sampai 180 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Angka Kriminalitas Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.73. Pemerintah Kota Subulussalam memberikan program-program dalam upaya penciptaan polhukam yang kondusif serta bekerja sama dengan institusi vertikal dalam hal ini POLRI dan TNI.

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi di Kota Subulussalam hanya 3 kali dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2023, hanya sekali demonstrasi terkait ekonomi. Lalu pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah demonstrasi, yaitu terkait politik dan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan terselenggaranya pemilu dan pilkada serentak pada Februari 2024 dan November 2024.

Tabel 2.37.
Jumlah Demo di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Politik	-	-	-	-	1
Ekonomi	-	-	-	1	1
Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-	1	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Tabel 2.38.
Angka Kriminalitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus narkoba	25	35	34	56	39
Jumlah kasus pembunuhan	0	2	1	1	0
Jumlah kejahatan seksual	3	12	5	14	4
Jumlah kasus penganiayaan	20	24	58	55	56
Jumlah kasus pencurian	20	30	54	142	66
Jumlah kasus penipuan	6	18	25	37	13
Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	0	0	0
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	74	121	177	305	178
Jumlah penduduk	90.751	92.671	95.199	97.770	99.062
Angka kriminalitas (8)/(9)	81,54	130,57	185,93	311,96	179,69

Sumber : Polres Kota Subulussalam, 2025

3) Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan

Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kota Subulussalam tergolong sukses. Hal ini terlihat bahwa semua kasus ditangani hingga selesai atau mencapai 100,00 persen pada tahun 2020-2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 98 persen. Begitu juga terhadap pelanggaran perda. Adapun Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambaran kondisi ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di Kota Subulussalam direfleksikan dari data tentang sarana keamanan, angka kriminalitas, serta upaya dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.39.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	98
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	98

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota Subulussalam, 2025

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Pada tahun 2021, penilaian dilakukan atas 4 aspek, yaitu aspek Ekosistem Inovasi, Aspek Penguat, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Pasar. Kota Subulussalam memperoleh nilai 1,952 atau kategori Sedang. Aspek pendukung paling besar adalah Aspek Penguat dan Aspek Sumber Daya Manusia. Sedangkan aspek yang harus ditingkatkan adalah Aspek Ekosistem Inovasi (0,818) dan Aspek Pasar (1,729).

Namun, pada tahun 2022, Kota Subulussalam memperoleh nilai NA. Nilai NA ini dikarenakan terdapat satu indikator penilaian yang tidak memiliki data (Komponen Lingkungan Pengendalian). Lalu pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 2,77 dan 3,24 pada tahun 2024.

Tabel 2.40.
IDSD Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
IDSD	1,952	NA	2,77	3,24

Sumber : BRIN, 2024

Beberapa pilar IDSD Kota Subulussalam Tahun 2024 yang sudah tergolong baik (>3,00) di antaranya adalah:

- Institusi
- Adopsi TIK
- Kualitas Ekonomi Makro
- Kesehatan
- Keterampilan
- Pasar Produk
- Pasar Tenaga Kerja
- Ukuran Pasar
- Dinamika Bisnis

Sedangkan pilar IDSD Kota Subulussalam Tahun 2024 yang perlu peningkatan di antaranya adalah:

- Infrastruktur
- Sistem Keuangan
- Kapabilitas Inovasi.

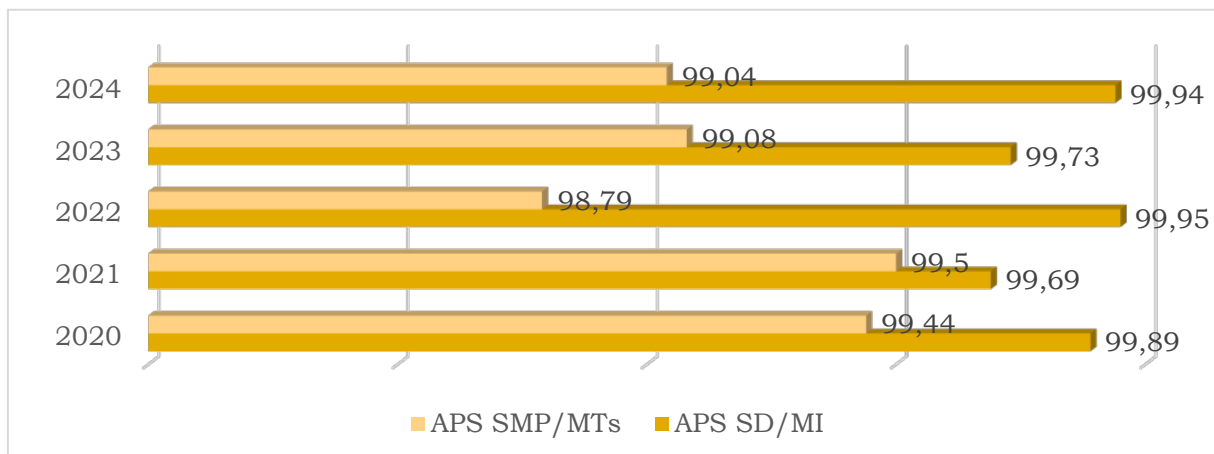
2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.4.1. Bidang Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APS)

APS Kota Subulussalam jenjang SD/MI mengalami fluktuasi setiap tahunnya. APS tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 99,95 persen. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu 99,94 persen. Angka ini tentunya menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang usia sekolah. APS jenjang SMP/MTs juga mengalami hal yang sama. APS SMP/MTs tertinggi pada tahun 2021, yaitu 99,5 persen. Namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,79 persen, dan naik kembali tahun 2024 menjadi 99,04 persen.

Beberapa faktor penyebab rendahnya APS Kota Subulussalam adalah kemiskinan dan kebutuhan anak bekerja, aksesibilitas pendidikan, dan bencana alam tahunan.



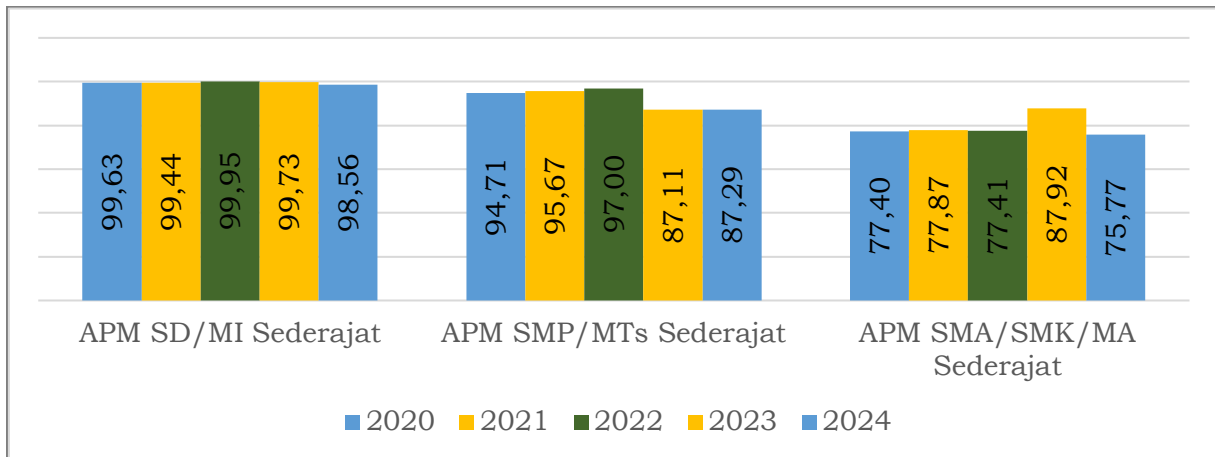
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.79.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM SD/MI Sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, APM SD/MI Sederajat Kota Subulussalam berada pada angka 99,63 persen, lalu turun menjadi 98,56 persen pada tahun 2024. Hal ini merupakan suatu peringatan mengingat angka capaian APM SD/MI Sederajat pada tahun 2024 turun. Untuk APM SMP/MTs Sederajat, juga mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, APM SMP/MTs Sederajat Kota Subulussalam pada angka 94,71 persen, menurun menjadi 87,29 pada tahun 2024. APM SMA/SMK/MA Sederajat mengalami penurunan sejak tahun 2020 ke tahun 2024, dari 77,30 persen menjadi 75,77 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan

partisipasi penduduk usia 15-18 tahun untuk bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat. Hal ini juga selaras dengan rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam yang hanya berada pada kelas VIII SMP/MTs Sederajat.



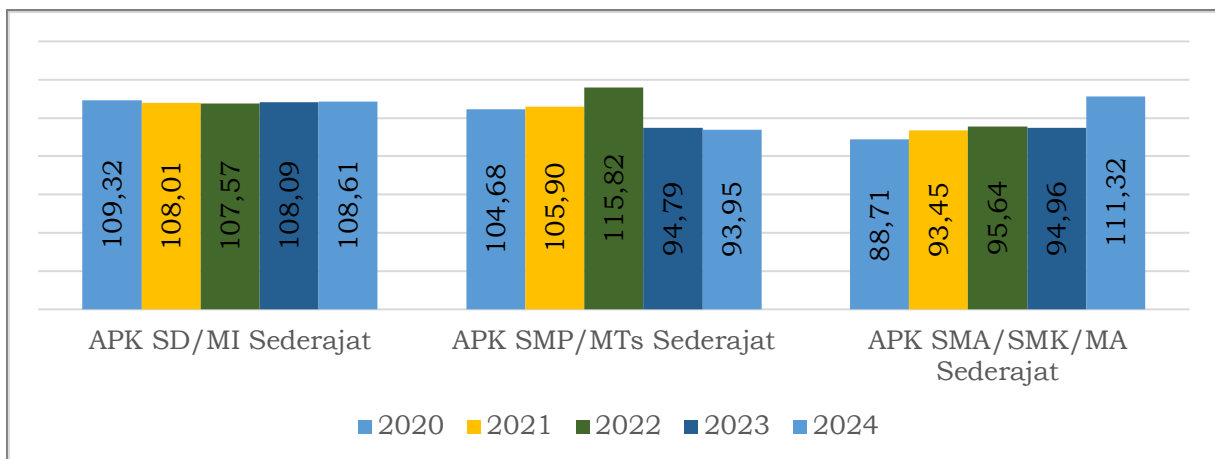
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.80.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020-2024 APK Kota Subulussalam di atas angka 100,00 persen dimana hal ini berbanding lurus dengan APM Kota Subulussalam yang meningkat sejak tahun 2020. Artinya, penduduk usia 6-12 tahun telah bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/MI sederajat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.81.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Capaian APK SMP/MTs sederajat Kota Subulussalam dimana mengalami kenaikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, APK SMP/MTs sederajat Kota Subulussalam sebesar 104,68 persen, menurun menjadi 93,95 persen pada tahun 2024. Namun untuk APK SMA/SMK/MA sederajat Kota Subulussalam, meningkat sejak tahun 2020, dari 88,71 persen menjadi 111,32 persen. Meskipun demikian, APK SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat yang tinggi sangat mempengaruhi peningkatan IPM Kota Subulussalam.

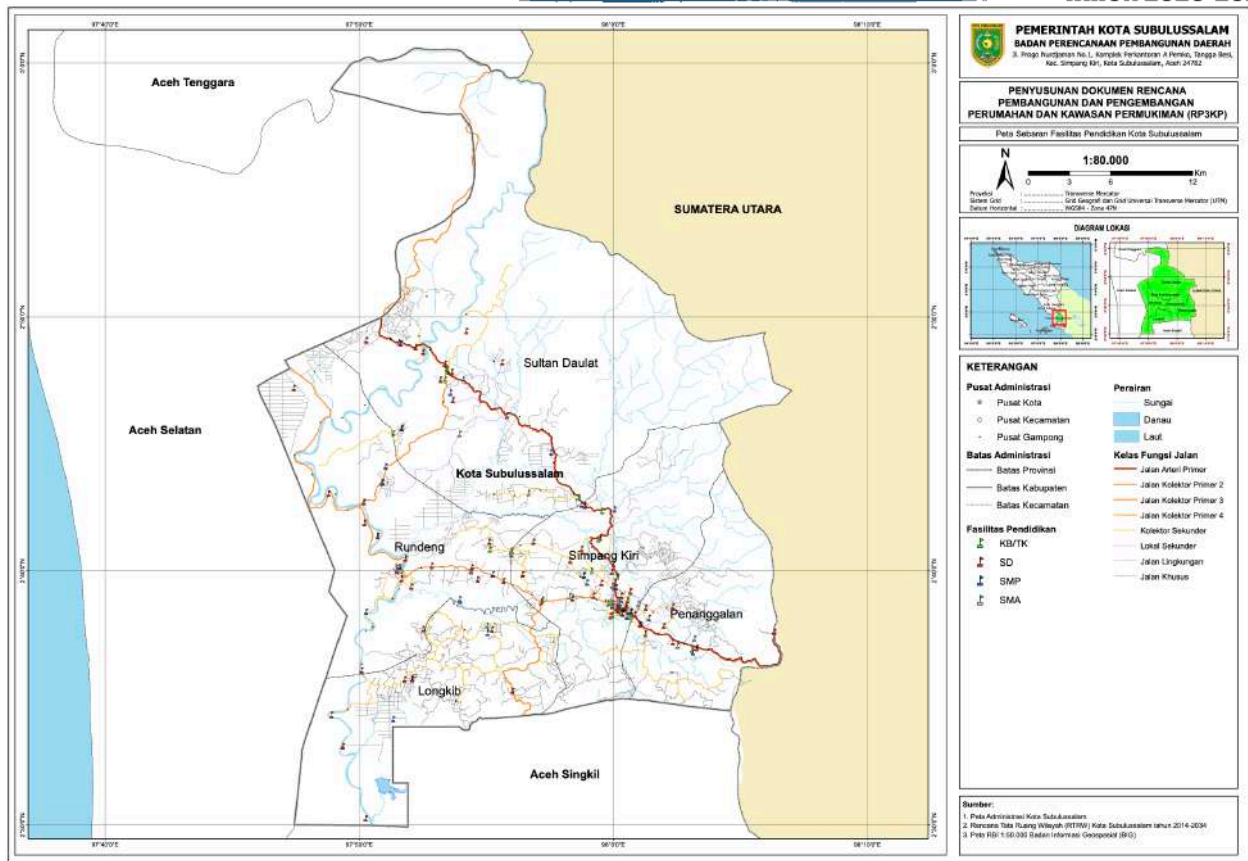
4) Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10.000 di Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020, dari 72,70 menjadi 78,72 pada tahun 2024 (melebihi angka ideal yaitu 52 per 10.000 penduduk). Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah sekolah pada semua jenjang sejak 2020. Namun, penurunan Jumlah penduduk usia (13 sd 15) thn hanya 5.777 orang pada tahun 2024, lebih rendah dari penduduk usia 7 sd 12 tahun, yaitu 12.134 orang. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidik menengah per 10.000 menurun dari 34,29 pada tahun 2020 menjadi 50,92 pada tahun 2024. Adapun Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41.
Fasilitas Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10.000	72,7	74,8	75,83	76,8	78,72
Rasio ideal per 10.000			52		
Total Sekolah pendidikan dasar (unit)	125	130	134	138	141
Jumlah sekolah (SD) Unit	83	86	86	86	86
Jumlah sekolah (SMP) Unit	28	30	33	37	40
Jumlah sekolah (MI) Unit	5	5	5	5	5
Jumlah sekolah (MTs) Unit	9	9	10	10	10
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn + (13 sd 15) orang	17.193	17.379	17.671	17968	17.911
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn	11.597	11.720	11.915	12094	12.134
Jumlah penduduk usia (13 sd 15) thn	5.596	5.659	5.756	5874	5.777
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah X 10.000	34,29	35,17	34,5	35,11	50,92
Total unit	26	27	27	28	28
Jumlah sekolah (SMA) unit	14	14	14	14	14
Jumlah sekolah (SMK) unit	5	6	6	6	6
Jumlah sekolah (MA) unit	7	7	7	8	8
Jumlah penduduk usia (16 sd 19) Tahun (orang)	7.583	7.678	7.827	7974	5.498

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024



Sumber : RP3KP Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.82.
Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Subulussalam

5) Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang *qualified* adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesarjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.42.
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Tahun	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru (Orang)	Kualifikasi S1/D-IV (Orang)	Persentase (%)
2020	SD	918	756	82,35
	SMP	485	469	96,7
	SMA	535	535	100
2021	SD	1047	885	84,53
	SMP	2649	2633	99,4
	SMA	558	558	100
2022	SD	1047	885	84,53
	SMP	2649	2633	99,4
	SMA	558	558	100
2023	SD	1083	983	90,77
	SMP	593	593	100,00
	SMA	604	604	100
2024	SD/MI	1203	1203	100,00
	SMP/MTs	603	603	100,00
	SMA/SMK/MA	602	602	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

6) Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk menunjukkan adanya akuntabilitas publik di bidang pendidikan. Data Akreditasi Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Subulussalam menunjukkan bahwa untuk satuan jenjang pendidikan SD, sebagian besar berakreditasi B dan C (masing-masing 55,81 persen dan 39,53 persen). Hanya sedikit sekolah yang berakreditasi A, yaitu sebanyak 1,16 persen. Masih terdapat 3 sekolah yang tidak terakreditasi (TT), yaitu sebesar 3,49 persen. Sedangkan untuk jenjang MI, terdapat 3 sekolah yang berakreditasi B dan 3 sekolah terakreditasi C.

Untuk satuan pendidikan SMP, sebagian besar terakreditasi C dan B (masing-masing 54,29 persen dan 31,43 persen). Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi A, hanya 3 sekolah dari total 35 unit. Namun masih terdapat sekolah yang tidak terakreditasi, yaitu sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan MTs, terdapat 3 sekolah terakreditasi B, 7 sekolah terakreditasi C, dan terdapat 2 sekolah yang tidak terakreditasi. Hal ini menjadi perhatian penting untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan akreditasi sekolah yang berakreditasi A dan tergolong kecil untuk jenjang SD dan SMP. Selain itu masih terdapat beberapa sekolah SD dan SMP yang belum terakreditasi.

Untuk satuan pendidikan SMA, terdapat 4 sekolah telah terakreditasi A, 7 sekolah terakreditasi B, dan 3 lainnya C. Untuk jenjang MA, 2 sekolah terakreditasi A, 5 sekolah C dan terdapat 1 tidak terakreditasi. Sedangkan untuk jenjang SMK, 3 dari 6 sekolah telah terakreditasi B, sisanya masing-masing 1 sekolah untuk akreditasi A, B, dan tidak terakreditasi.

Tabel 2.43.
Daftar Akreditasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Kota Subulussalam

Jenjang Satuan Pendidikan	A	B	C	TT	TOTAL
SD	1	48	34	3	86
MI	0	3	2	0	5
SMP	3	11	19	2	35
MTs	0	3	7	2	12
SMA	4	7	3	0	14
MA	2	0	5	1	8
SMK	1	3	1	1	6
TOTAL	11	75	71	9	166

Sumber: <https://archive.ban-pdm.id/data/akreditasi#>, diakses Januari 2024

2.4.4.2. Bidang Urusan Kesehatan

1) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Subulussalam untuk jenis rumah sakit dan puskesmas sudah terpenuhi, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tersedia di Kecamatan Simpang Kiri (Ibu Kota Subulussalam) dengan tipe C dan akreditasi paripurna (A) serta puskesmas tersedia 8 unit pada yang tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan Poskesdes yang berjumlah 77 unit. Sementara jumlah desa di Kota Subulussalam sebanyak 82 desa. Ini berarti masih terdapat kampong yang belum memiliki poskesdes.

Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Subulussalam tahun 2024 mendekati 1 (0,89). Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 fasilitas kesehatan telah secara ideal melayani 1.000 penduduk. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya jumlah poskesdes.

Meskipun jumlah puskesmas dan rumah sakit tetap stabil, rasio rumah sakit per 100.000 penduduk yang konstan di angka 1 justru mengindikasikan beban yang semakin besar pada fasilitas kesehatan rujukan tersebut. Kondisi ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam memenuhi target program nasional, khususnya dalam hal pemerataan dan penambahan fasilitas kesehatan primer, serta perlu upaya strategis untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 2.44.
Fasilitas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk x 1.000	1,02	1,03	0,97	0,97	0,89
Rasio Rumah sakit persatuan penduduk x 100.000	1	1	1	1	1
Jumlah puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk	93	95	92	93	88
Puskesmas	7	8	8	8	8
Klinik	3	4	6	3	2
Poskesdes	82	82	77	77	77
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	90.751	92.671	95.199	97.770	99.062

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

2) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Rasio ketersediaan dokter umum di Kota Subulussalam telah mencapai jumlah ideal yaitu 0,31 per 1.000 penduduk atau 31 dokter per 100.000 penduduk. Angka

ini hampir mencapai angka ideal yaitu 38 dokter per 100.000 penduduk. Begitu juga halnya dengan dokter gigi dan dokter gigi spesialis, hampir mencapai angka ideal yaitu 0,98 per 7.500 penduduk atau 13 dokter per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis Kota Subulussalam belum mencapai jumlah ideal karena hanya terdapat 19 dokter per 100.000 penduduk.

Tabel 2.45.
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1.000	8,07	4,75	11,37	11,53	5,23
Jumlah Keseluruhan Tenaga Kesehatan	732	440	1.082	1.127	519
Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk	0,37	0,47	0,52	0,39	0,31
Dokter Umum	34	44	50	38	31
Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk	0,09	0,15	0,16	0,16	0,19
Dokter Spesialis	8	14	15	16	19
Rasio Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi Per 7.500 Penduduk	0,41	0,49	9,06	11,58	0,98
Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	5	6	115	151	13
Perawat	218	75	300	313	105
Bidan	326	201	427	435	272
Tenaga Kefarmasian	60	30	63	71	19
Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	30	56	63	31
Tenaga Kesehatan Lingkungan	9	10	10	16	12
Tenaga Gizi	13	7	13	14	9
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	24	23	33	10	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

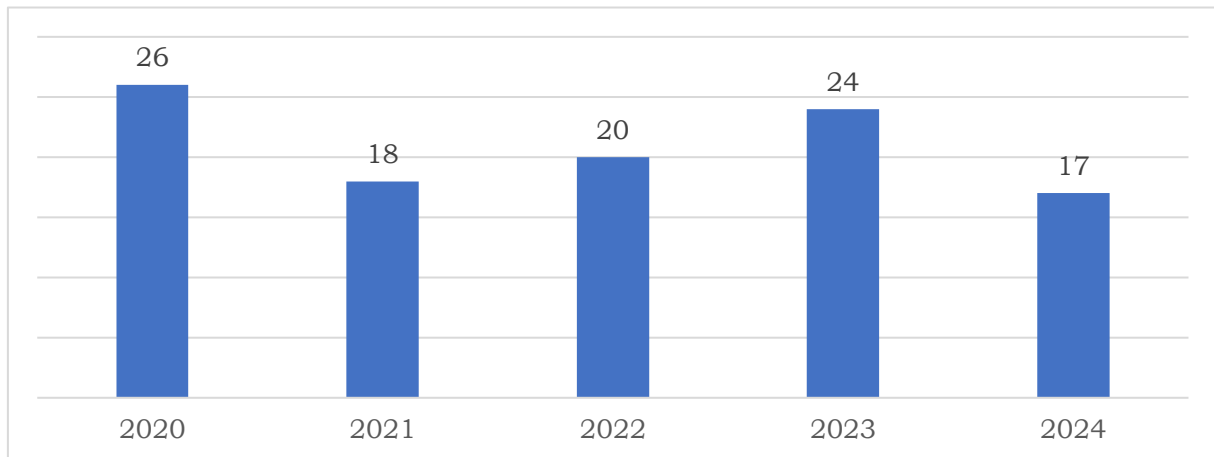
3) Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization atau biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan di mana lebih 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat Desa UCI di Kota Subulussalam mengalami perubahan di tahun 2024 yaitu sebanyak 17 persen tergolong desa UCI. Imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd imunity) yaitu adalah suatu kondisi dimana sebagian besar masyarakat telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga mencegah penularan suatu penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah dengan imunisasi. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai

minimal 96 persen secara merata di seluruh wilayah, sampai unit terkecil yaitu tingkat desa/kelurahan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan UCI yaitu melalui komunikasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam mengikuti program imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.83.
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Tuberkulosis (TBC)

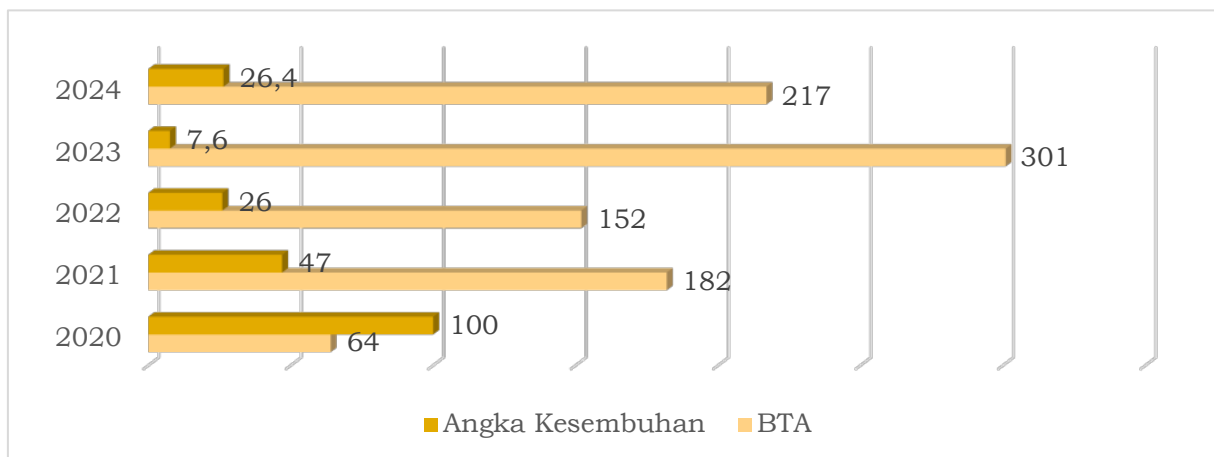
Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung, disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam Positif (BTA Positif) melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. Tuberkulosis dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil. Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur dengan Case Notification Rate, Prevalens (Jumlah Kasus Tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu). Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan diantara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2024 jumlah BTA positif sebanyak 217 kasus dengan jumlah angka kesembuhan 26,4 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang

berjumlah 301 kasus dengan angka kesembuhan mengalami kenaikan sebesar 7,6 persen.

Kasus TBC ini mengalami kenaikan, untuk itu pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan standar orang terduga TBC terdiri dari Pemeriksaan klinis (gejala dan tanda), pemeriksaan penunjang dan edukasi. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Puskesmas telah memberikan pelayanan kepada orang terduga TBC yaitu pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi / promosi dan rujukan.

Salah satu upaya untuk mengendalikan TBC yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan TBC adalah angka keberhasilan pengobatan (Success Rate). Success Rate merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan ini menggambarkan kualitas pengobatan TBC.



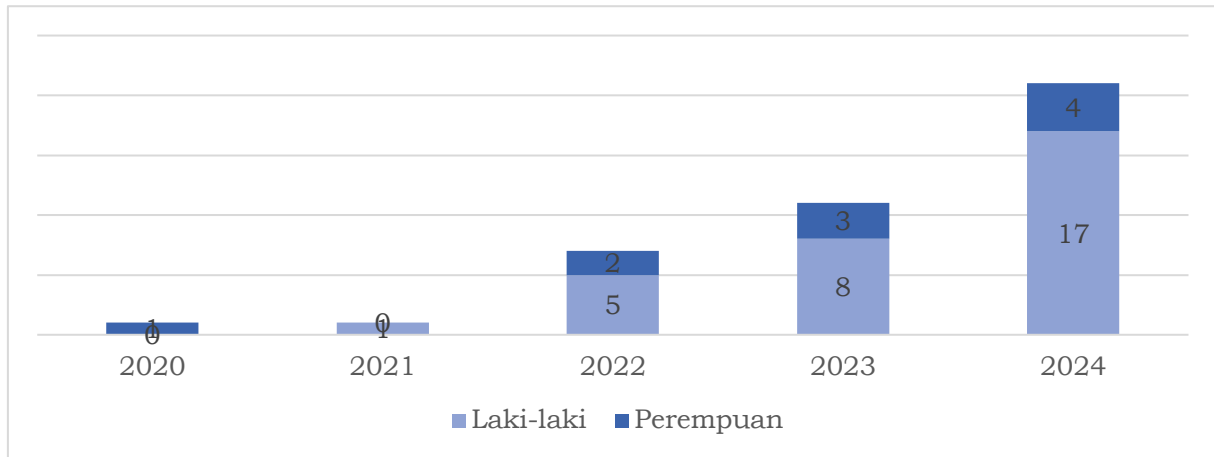
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.84.
Kasus Tuberkulosis di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

5) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai penyakit lain. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (prenatal). Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara

sukarela (konseling dan tes sukarela/KTS) maupun atas dasar tes atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan dan Konseling (TIPIK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode Sero Survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

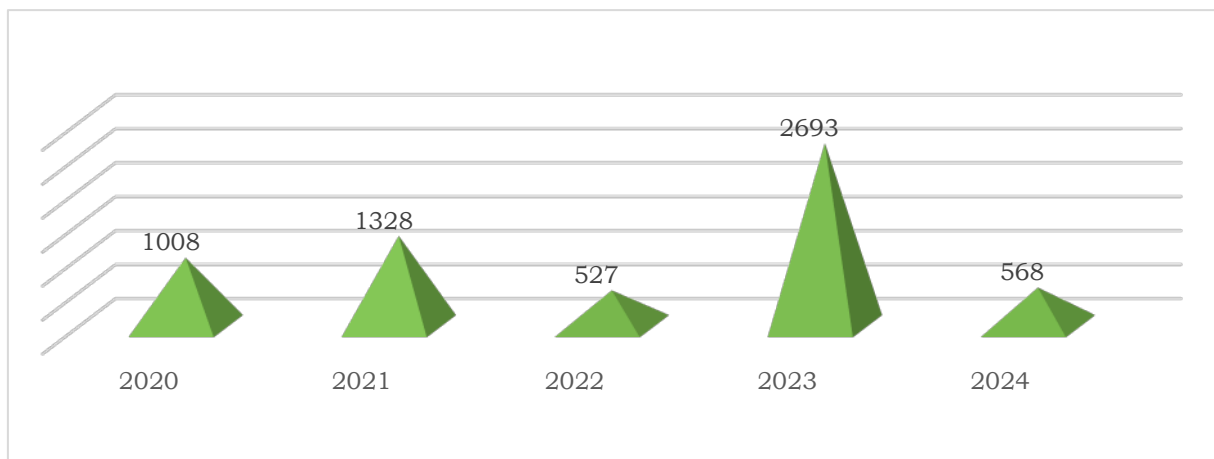
Gambar 2.85.
Kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan angka penderita HIV di tahun 2020 berjumlah 1 kasus perempuan, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus yaitu laki-laki dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 21 kasus, 17 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (konseling dan sukarela/KTS) maupun atas dasar tes inisiatif pemberian layanan kesehatan dan konseling (TIPIK). Dinas kesehatan kota Subulussalam melalui Puskesmas telah memberikan layanan berupa tes HIV di 7 Puskesmas dan 1 RSUD serta melakukan layanan klinik PDP (pelayanan, dukungan dan pengobatan).

6) Diare

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian. Target cakupan pelayanan penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader kesehatan adalah 10 persen dari perkiraan jumlah penderita diare (insiden diare dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). 15 Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup sehat yang belum baik, masih banyak sampah yang dibuang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak di jamban, serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan.

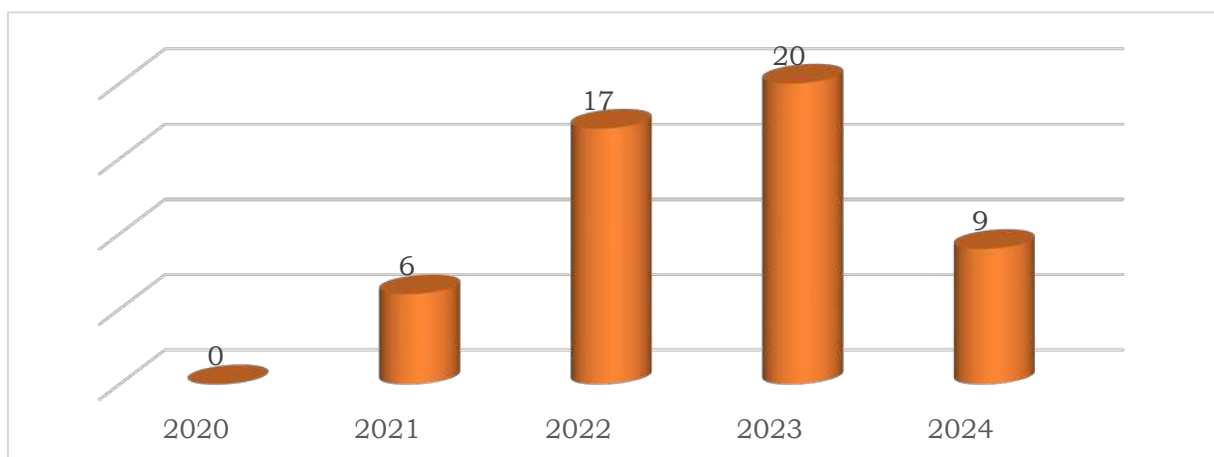
Grafik di bawah menunjukkan persentase diare tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 568 kasus. Target Penemuan Penderita Diare di Sarana adalah 90 persen. Kualitas pelayanan proporsi penderita diare balita rata-rata penggunaan oralit proporsi penderita diare pada balita yang diberi zink. Cakupan penanganan diare pada Kota Subulussalam belum maksimal, masih banyak terjadinya kasus diare yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang belum baik, masih banyak sampah yang dibuang bukan pada tempatnya dan kebiasaan minum air mentah serta makan yang tidak di dahulukan dengan mencuci tangan terlebih dahulu.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.86.
Angka Kesakitan Diare di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

7) Demam Berdarah Dengue (DBD)



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

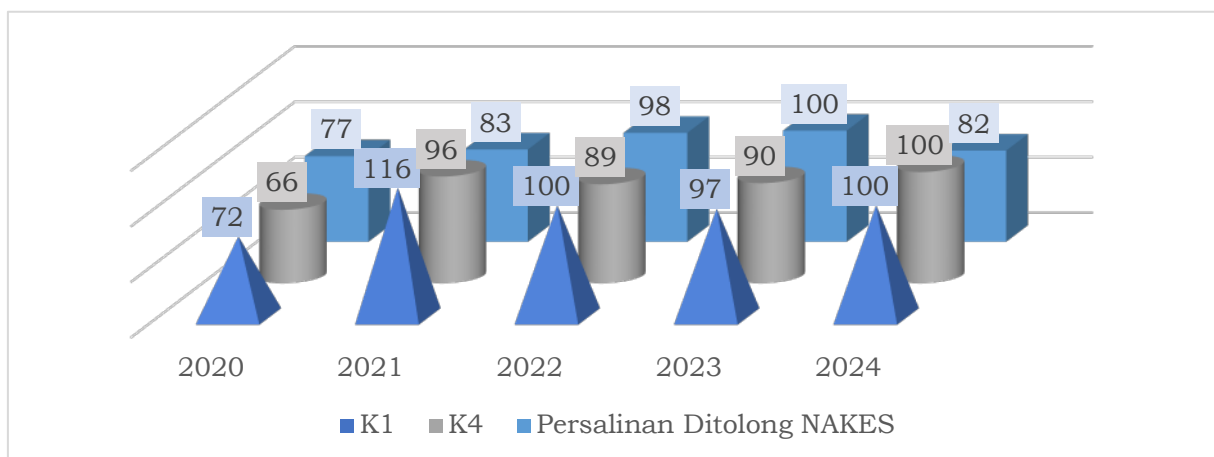
Gambar 2.87.
Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus* dan famili *Flaviviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama *Aedes aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus DBD pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 20 kasus menjadi 9 kasus. Selain angka kesakitan, besaran masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau CFR yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Tingginya kasus DBD di Kota Subulussalam pada tahun 2024 memerlukan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada anggota keluarganya yang memiliki gejala DBD. Hal ini menjadi penting sebagai pertolongan segera untuk mencegah keparahan dan komplikasi yang berujung pada fatalitas. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Puskesmas akan terus berupaya untuk menekan kasus DBD di Kota Subulussalam dengan mensosialisasikan program 1 rumah 1 jumantik, *pilot project* kawasan bebas jentik dan GIRIJ.

8) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.88.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu

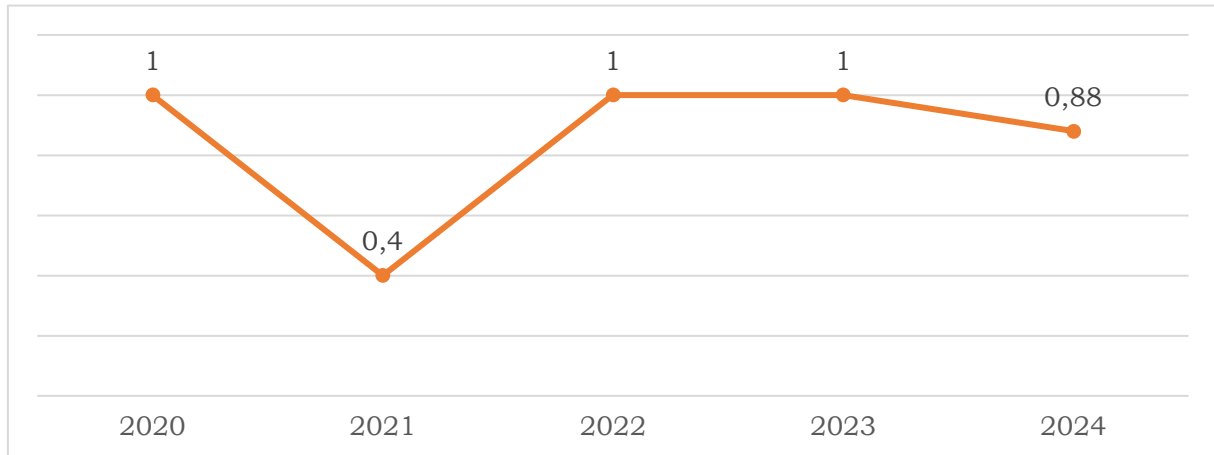
kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan/atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang akan memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar di atas menunjukkan kunjungan K1, K4 di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi masing-masing 100 persen. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan menjadi 82 persen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di atas adalah dengan menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat antara Puskesmas dengan Bidan Praktik Swasta (BPS) yang berpraktik di wilayah kerja Puskesmas dibutuhkan, sehingga kunjungan K4 terpantau dan dilaporkan dengan baik. Diharapkan ke depan Puskesmas lebih meningkatkan forum komunikasi BPS di Puskesmas, sehingga kualitas dan kuantitas pemantauan dan pelaporan dari BPS ke Puskesmas akan semakin lebih baik dan lebih maksimal.

9) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

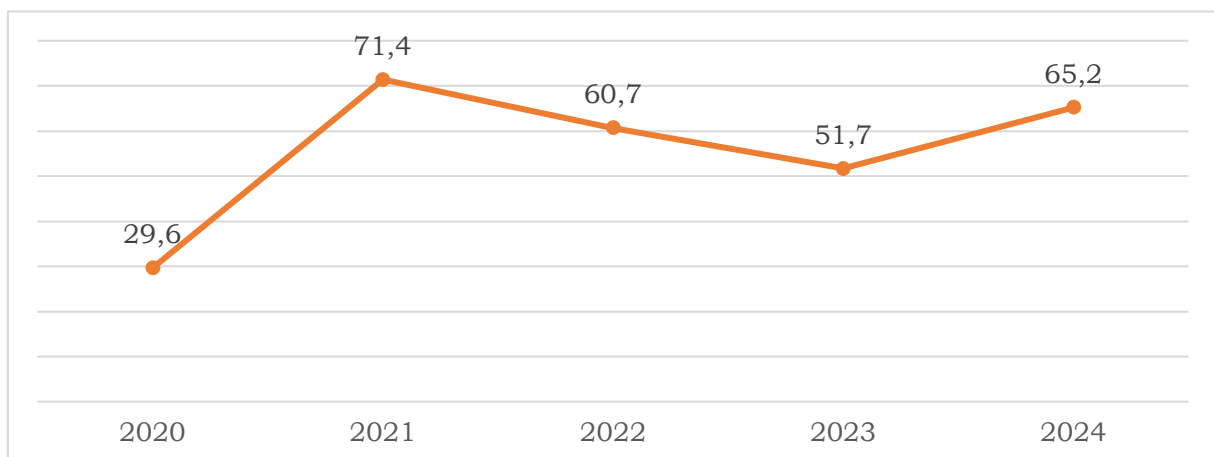
Persentase BBLR di Kota Subulussalam pada tahun 2024 yaitu 0,88 persen, yang artinya terdapat 88 bayi dari 1.000 bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah ini rentan sakit atau mengalami infeksi, sedangkan dalam jangka panjang, bayi tersebut berisiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau kemampuan dalam belajar. Semakin rendah berat badan bayi lahir maka semakin banyak masalah medis yang akan dihadapi, apalagi jika bayi tersebut terlahir prematur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan BBLR ini dengan memperhatikan gizi ibu hamil dan pemeriksaan antenatal yang adekuat.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.89.
Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

10) Pemberian ASI Eksklusif



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

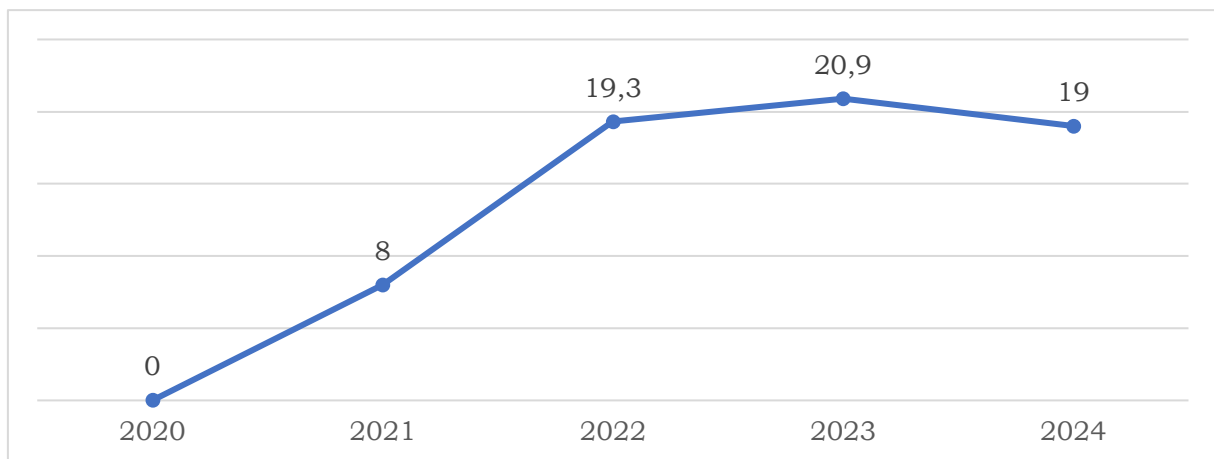
Gambar 2.90.
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 bulan di Kota Subulussalam pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan persentase 65,2 persen dibandingkan tahun 2021 yang sudah mencapai 71,4 persen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan dengan program cakupan bayi berusia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 24 bulan. Mulai umur 6 bulan bayi mendapatkan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Menyusui secara eksklusif

adalah tidak memberikan bayi makanan dan minuman lain, termasuk air putih, selain menyusui (kecuali obat-obatan, vitamin/mineral tetes dan ASI perah).

11) Angka kematian kasar/ *Gross Death Rate (GDR)* di Rumah Sakit

Angka kematian kasar (Gross Death Rate/GDR) di rumah sakit adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien yang keluar rumah sakit, baik yang hidup maupun yang meninggal. GDR merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan medis di rumah sakit. GDR dihitung berdasarkan jumlah kematian dalam periode tertentu dibagi dengan populasi yang berisiko meninggal dalam periode tersebut.



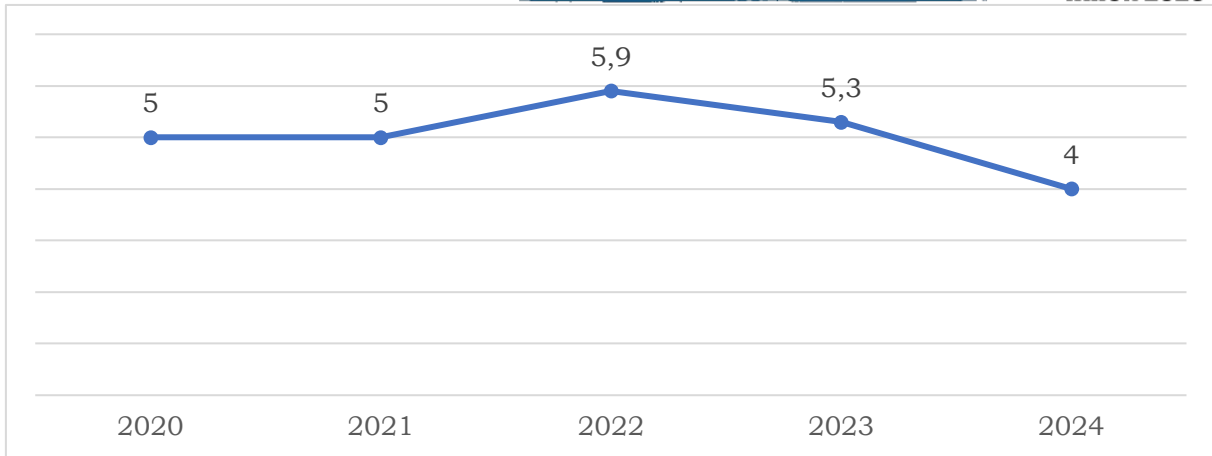
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.91.
Angka Kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

GDR RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024. GDR Kota Subulussalam Tahun 2020 bahkan mencapai 0 kasus per 1.000 pasien keluar. Angka ini tentunya menjadi anomali mengingat kasus Covid-19 yang telah terjadi di Kota Subulussalam. Kemudian pada tahun 2021-2024 mengalami kenaikan dari 8 kasus per 1.000 pasien keluar menjadi 19 kasus per 1.000 pasien keluar.

12) Angka kematian murni/ *Nett Death Rate (NDR)* di Rumah Sakit

Nett Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 pasien yang keluar dari rumah sakit. NDR merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang masih dapat ditoleransi adalah 25 per 1.000.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

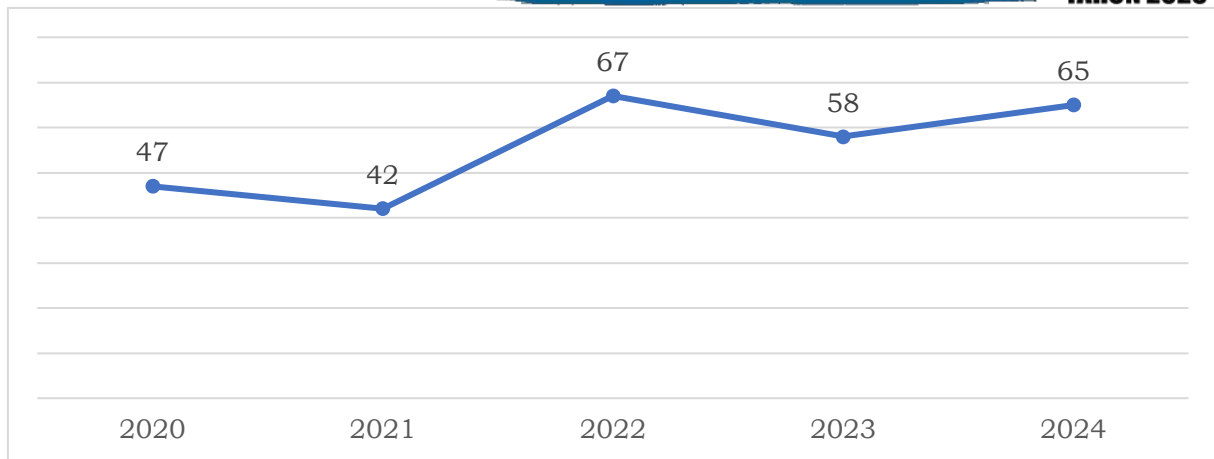
Gambar 2.92.
Angka kematian murni/ *Nett Death Rate* (NDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NDR RSUD Kota Subulussalam mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. NDR RSUD Kota Subulussalam berkisar pada angka 4 kasus per 1.000 pasien keluar. NDR tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 59 kasus per 10.000 pasien keluar, lalu turun kembali pada tahun 2023 menjadi 53 kasus per 10.000 pasien keluar.

13) *Bed Occupation Rate* (BOR) di Rumah Sakit

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit pada satuan waktu tertentu. BOR merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85 persen. BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit, sedangkan BOR yang tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat BOR, antara lain: Ketersediaan sumber daya manusia, Ketersediaan sarana dan prasarana, Prosedur yang belum terstandarisasi, Peralatan dan perlengkapan, Modal atau investasi.

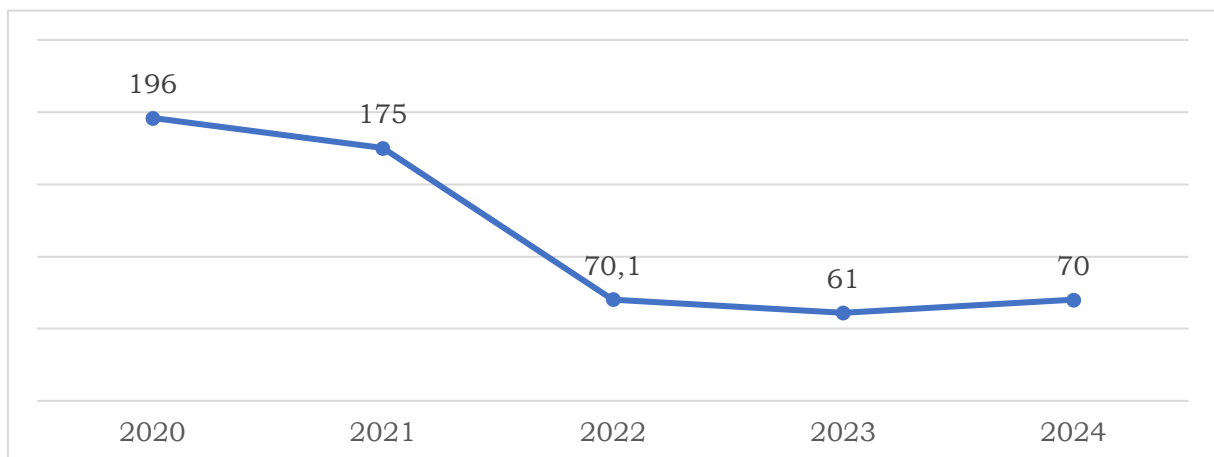
BOR RSUD Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2022 yang memenuhi BOR yang ideal, lalu pada tahun 2024. BOR RSUD Kota Subulussalam Tahun 2024 hanya berkisar pada angka 65 persen.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.93.
Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

14) Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

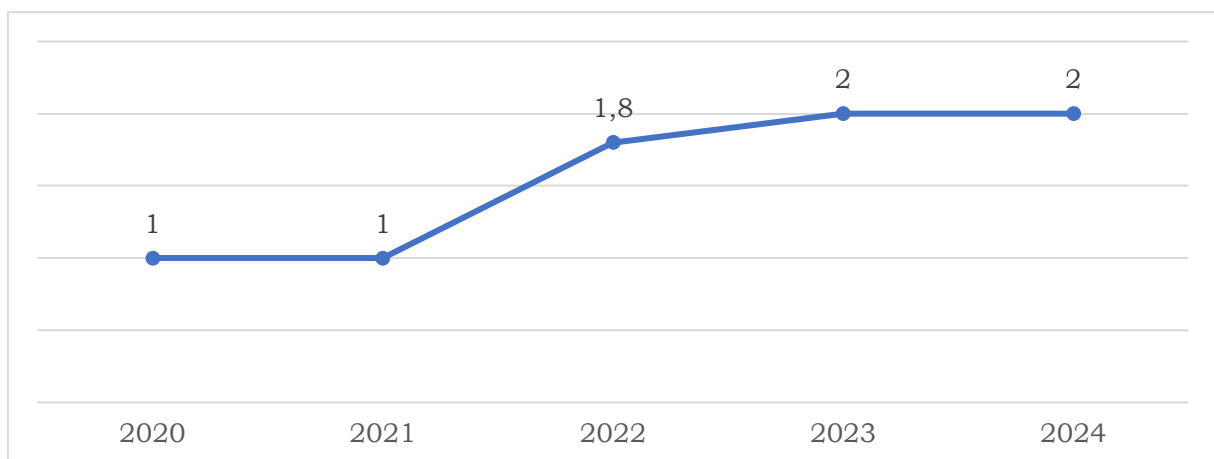
Gambar 2.94.
Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

Bed Turn Over (BTO) yaitu Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. BTO RSUD Kota Subulussalam mengalami penurunan setiap tahunnya sejak 2020-2023. Pada tahun 2020-2021, BTO RSUD Kota Subulussalam berada di atas angka 100 kali, dan turun menjadi 70 kali pada tahun 2024. Angka ini tentunya masih jauh dari angka ideal.

15) *Turn of Interval (TOI)* di Rumah Sakit

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati setelah diisi oleh pasien sebelumnya. TOI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai TOI yang ideal adalah antara 1–3 hari. Semakin besar nilai TOI, artinya semakin lama tempat tidur kosong dan tidak digunakan oleh pasien. Kondisi ini dapat membuat tempat tidur menjadi tidak produktif dan merugikan manajemen rumah sakit secara ekonomi.

TOI RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak 2020-2024, yaitu dari 1 hari menjadi 2 hari. Angka ini masih dalam ambang ideal TOI.



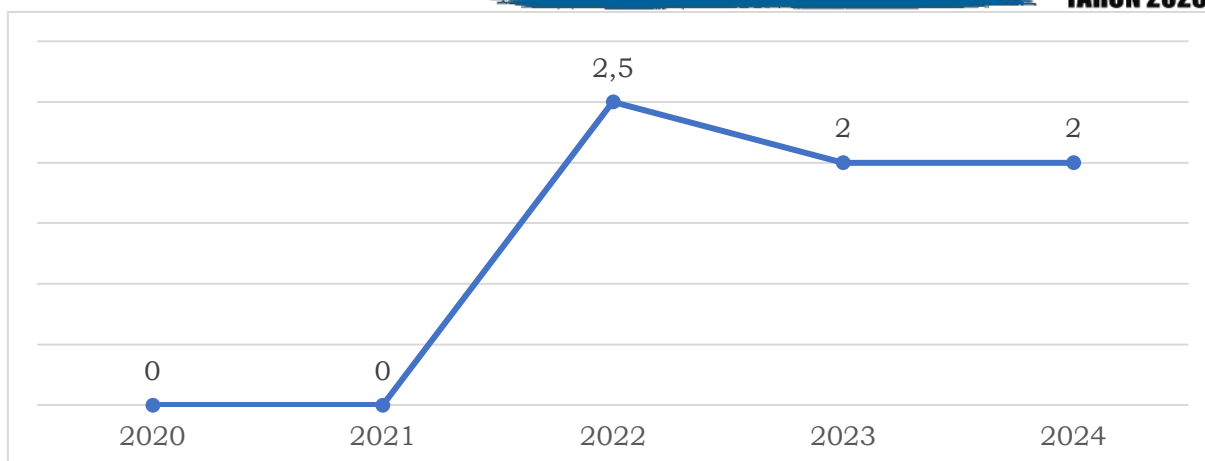
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.95.
***Turn of Interval (TOI)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam**
Tahun 2020-2024

16) *Average Length of Stay (ALOS)* di Rumah Sakit

Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat inap pasien di rumah sakit dalam satuan hari. ALOS dihitung dengan membagi jumlah total hari rawat semua pasien dengan jumlah pasien yang masuk atau keluar selama periode tertentu. Pasien rawat jalan tidak termasuk dalam perhitungan. ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Sedangkan untuk pasien BPJS, batas maksimal rawat inap hanya 3 hari.

ALOS RSUD Kota Subulussalam mengalami peningkatan sejak 2020-2024, yaitu dari 0 hari menjadi 2 hari. Pada tahun 2022, mengalami peningkatan hingga 2,5 hari. Angka ini dapat disebabkan oleh banyak pasien BPJS pada RSUD Kota Subulussalam.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.96.
Average Length of Stay (ALOS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

17) Posyandu

Posyandu di Kota Subulussalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Posyandu aktif tertinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai 70,00 persen dari total 120 posyandu. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 47,00 persen dari 115 posyandu. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 99,13 persen posyandu yang aktif. Begitu juga rasio posyandu per 100 balita berkisar pada angka 1,1-1,2.

Tabel 2.46.
Kondisi Posyandu di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu (Unit)	115	120	120	115	115
Posyandu Aktif (Persen)	57,00	39,00	70,00	47,00	114
Rasio Posyandu per 100 balita	1,1	1,2	1,2	1,1	99,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jalan

Berdasarkan *Data Base Jalan Tahun 2024* Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa provinsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Subulussalam pada tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kondisi jalan baik di Kota Subulussalam meningkat pada tahun 2024, dari 149,2 Km menjadi 206,56 Km atau meningkat 38,45 persen.

Rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi baik ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu dari faktor mutu jalan dimana jalan yang baru dibangun

kurang dari 1 tahun sudah kembali rusak atau berlubang. Faktor selanjutnya adalah beban kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi batas beban/tonase dari kelas/mutu jalan sehingga jalan menjadi rusak kemudian faktor kebijakan dan perencanaan jalan yang masih bersifat parsial dan faktor terakhir dikarenakan terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan jalan.

Tabel 2.47.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

Kondisi Jalan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik (Km)	149,2	182,19	176,622	207,033	206,359
Sedang (Km)	96,01	182,58	108,077	66,961	76,805
Rusak (Km)	94,62	79,16	163,617	6,210	6,330
Rusak Berat (Km)	133,86	29,76	25,366	193,476	184,186
Total Panjang Jalan (Km)	473,69	473,69	473,69	473,680	473,680
Persentase jalan dalam kondisi Baik (Persen)	31,37	38,3	37,287	43,71	43,56
Persentase jalan dalam kondisi Sedang (Persen)	20,18	38,38	22,816	14,14	16,22
Persentase jalan dalam kondisi Rusak (Persen)	19,89	16,64	34,542	1,32	1,34
Persentase jalan dalam kondisi Rusak Berat (Persen)	28,14	6,26	5,3547	40,84	38,88

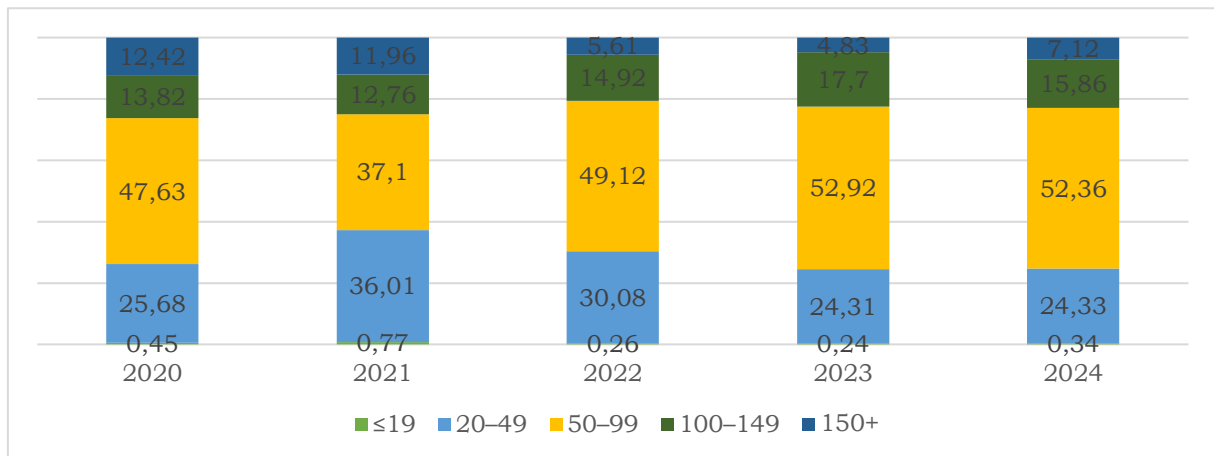
Sumber: Dinas PUPR Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (meter persegi)

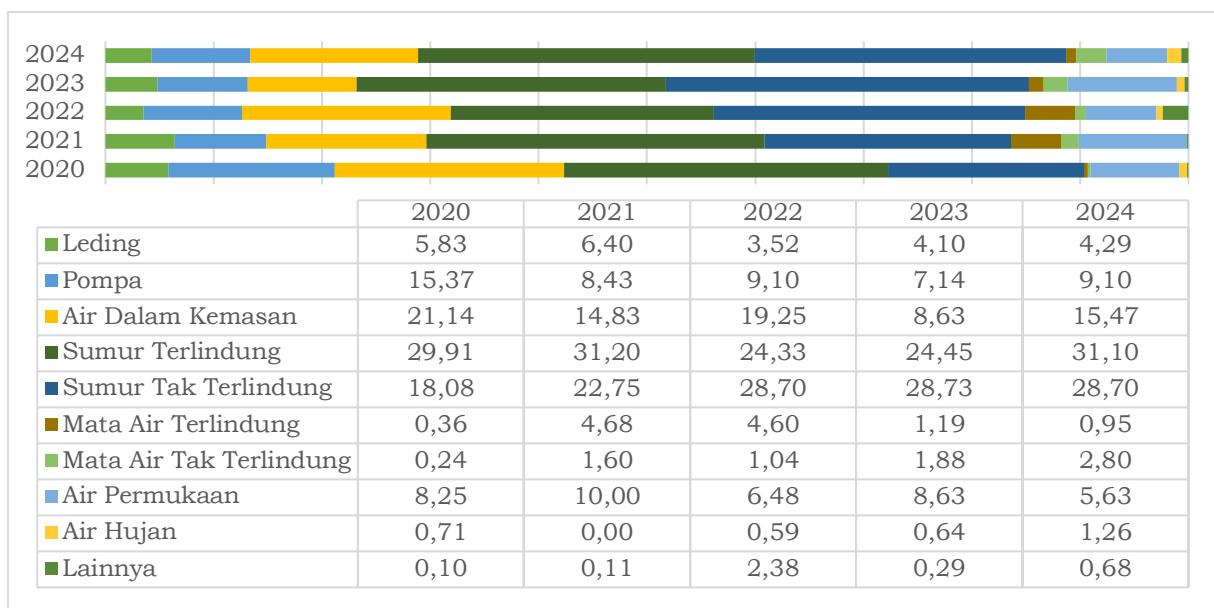
Sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam memiliki luas lantai antara 50-99 meter persegi. Kurang 1 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 19 meter persegi. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih dari 150 meter persegi hanya 7,12 persen pada tahun 2024.

2) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.97.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai (meter persegi)



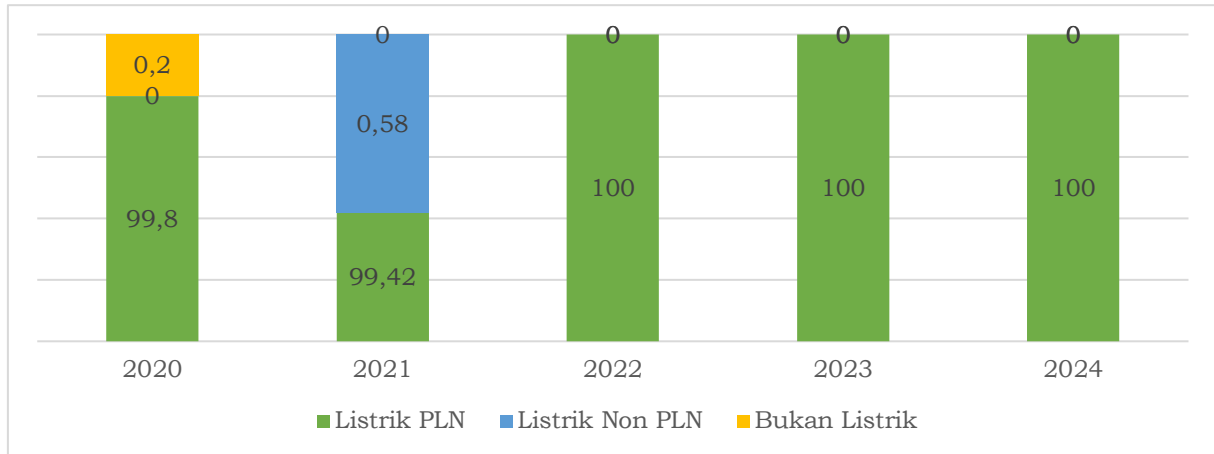
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.98.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

Dalam 5 tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam memiliki sumber air minum sumur dan air kemasan. Kurang 6 persen rumah tangga yang bersumber air minum dari mata air.

3) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan

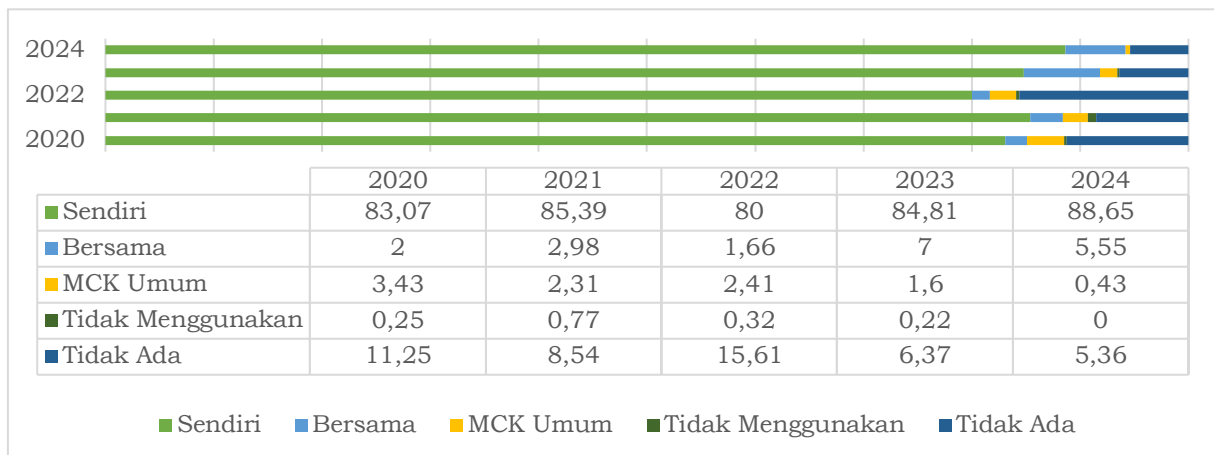
Penggunaan sumber penerangan dari Listrik PLN pada tahun 2024 mencapai 100,00 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021, yaitu 99,42 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Gambar 2.99.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

4) Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Subulussalam, 2023

Gambar 2.100.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Selama 5 tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga di Kota Subulussalam menggunakan fasilitas buang air besar Sendiri. Pada tahun 2024, masih terdapat 5,36 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Hal ini merupakan catatan penting dalam meningkatkan rumah layak huni di Kota Subulussalam. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran PHBS ke masyarakat Kota Subulussalam.

5) Persentase areal kawasan kumuh

Berdasarkan Surat keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam, luas kawasan kumuh di Kota Subulussalam seluas 320,17 Ha. Pada tahun 2021, belum terdapat perubahan SK terkait kawasan kumuh. Angka ini tidak ada berubah sejak tahun 2020-2023, yaitu 0,24 persen. Namun angka ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,26 persen. Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.48.
Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase areal kawasan kumuh	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26

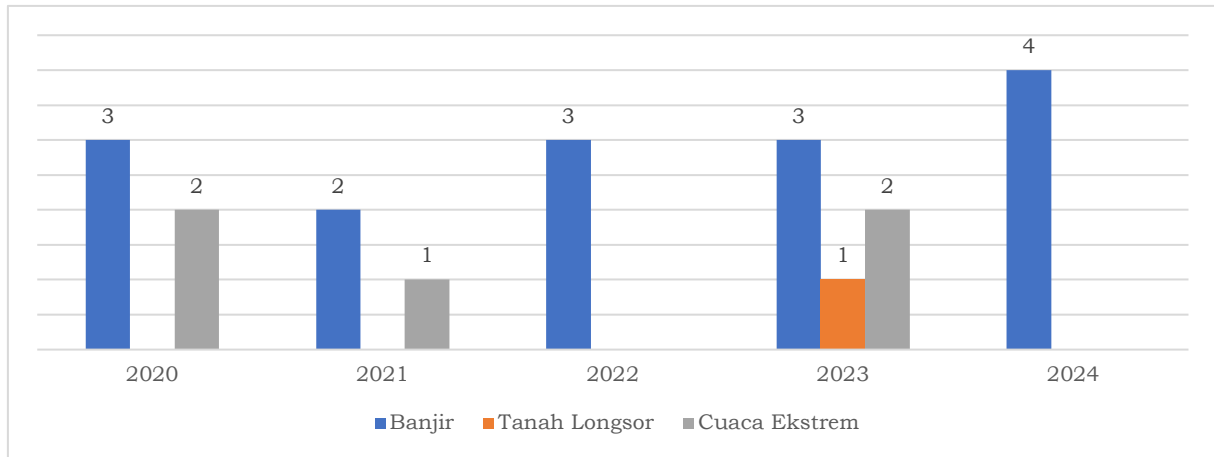
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, 2025

Penanganan kawasan kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan berkolaborasi program Kotaku pemerintah pusat. Penanganan kawasan kumuh serta pembangunan rumah layak huni termasuk di dalamnya merupakan program prioritas.

2.4.4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bencana Daerah

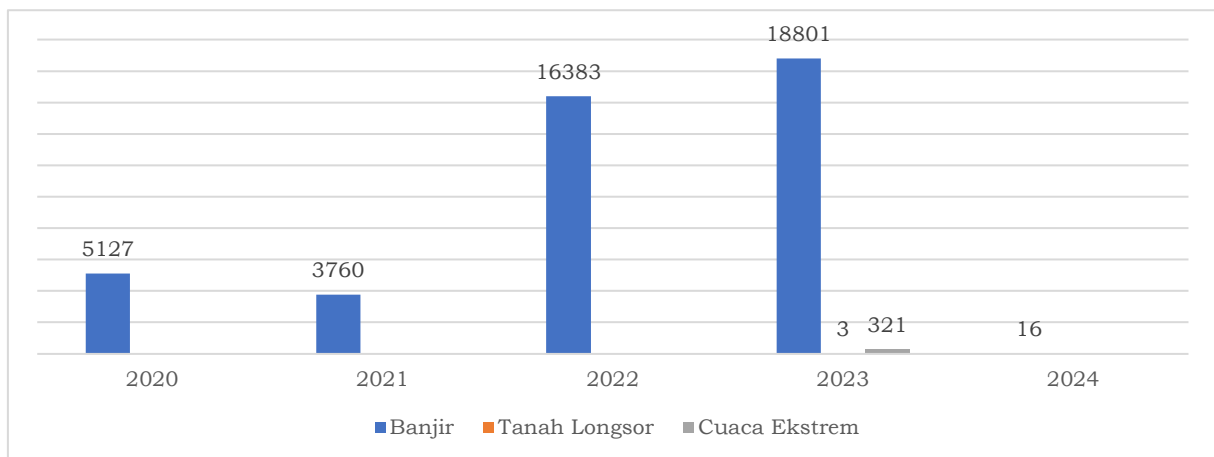
Jumlah korban bencana akibat bencana hidrometeorologis mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah korban tertinggi diakibatkan oleh bencana banjir yang berasal dari Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Longkib, dan Kecamatan Rundeng yang merupakan daerah aliran sungai Lae Soraya. Jenis bencana yang sering terjadi di Kota Subulussalam adalah banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.



Sumber : BNPB, 2025

Gambar 2.101.
Jumlah Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam

Sedangkan untuk korban, banjir merupakan penyumbang korban bencana tertinggi. Meskipun demikian, korban bencana banjir hanya sebatas mengungsi dan tidak menyebabkan korban jiwa. Sedangkan untuk tanah longsor memakan korban jiwa sebanyak 3 orang pada tahun 2023.



Sumber : BNPB, 2025

Gambar 2.102.
Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologis di Kota Subulussalam

Dengan adanya bencana hidrometeorologis tersebut, dapat berdampak pada daerah, di antaranya:

- 1) Dampak sosial seperti korban jiwa dan pengungsian, gangguan pendidikan dan konflik sosial;

- 2) Dampak ekonomi seperti kerugian materi langsung, penurunan produktivitas dan kemiskinan;
- 3) Dampak infrastruktur seperti rusaknya jaringan transportasi, gangguan listrik dan komunikasi dan risiko kesehatan masyarakat;
- 4) Dampak jangka panjang seperti ketahanan pangan terganggu, migrasi penduduk dan beban fiskal pemerintah daerah.

2.4.4.6. Bidang Urusan Sosial

1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

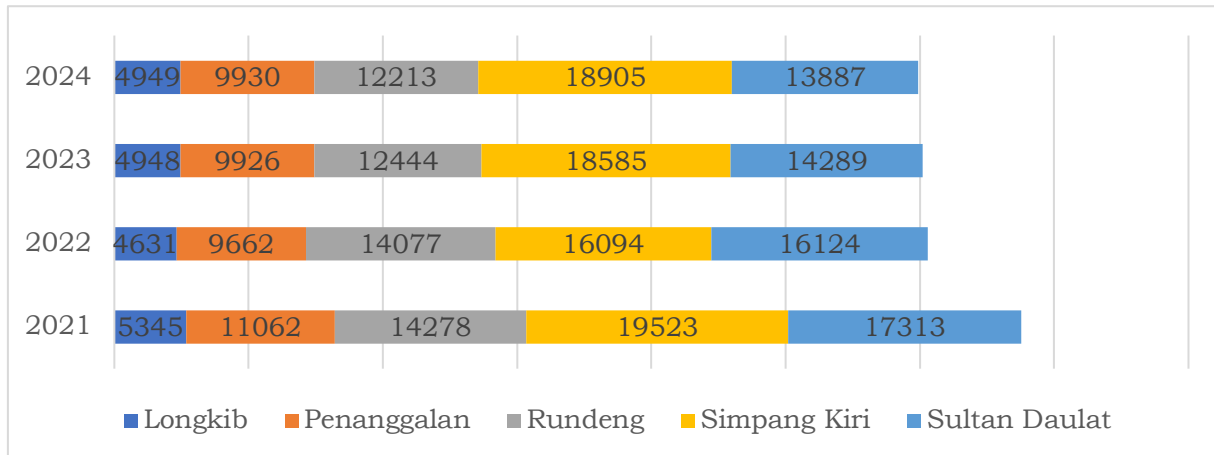
Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) turut meningkat secara kuantitas maupun kompleksitasnya termasuk bentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Semakin meningkatnya kondisi kemajuan masyarakat terutama PMKS ini tercermin pada indikator sosial, antara lain meningkatnya jangkauan pelayanan sosial, menurunnya jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta semakin tumbuh berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Berikut akan disajikan jumlah PMKS di Kota Subulussalam yang tertangani.

Data PMKS di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Fakir Miskin, lanjut usia/Jompo, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan Korban Narkotika. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upaya-upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Kota Subulussalam adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

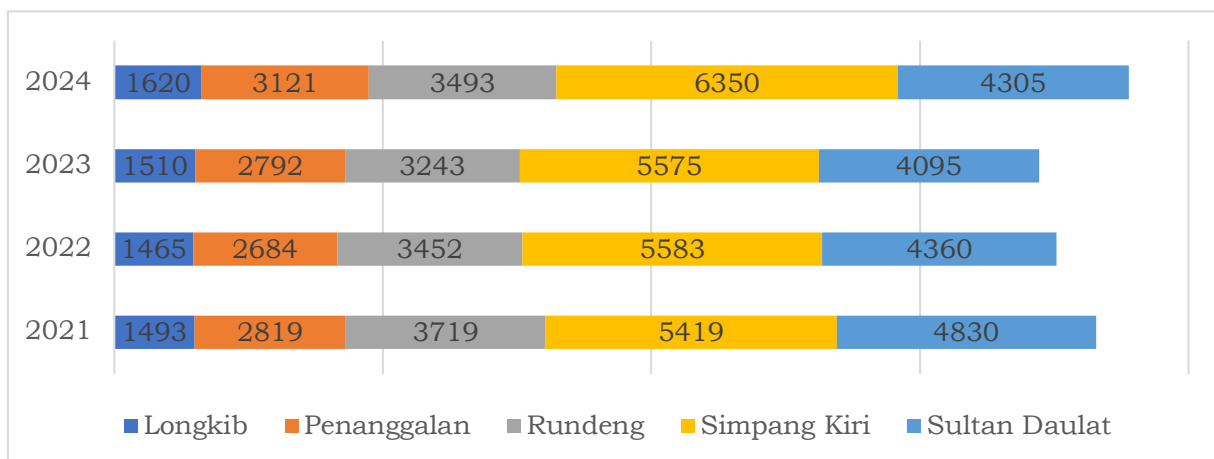
2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data DTKS menunjukkan terdapat penurunan jumlah penduduk DTKS di Kota Subulussalam sejak 2021-2024. Begitu juga dengan jumlah KK. DTKS tertinggi terdapat pada kecamatan Simpang Kiri dan terendah dari Kecamatan Longkib.



Sumber : Dinas Sosial , 2025

Gambar 2.103.
Rekapitulasi Penduduk yang tergolong DTKS
di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Sosial , 2025

Gambar 2.104.
Rekapitulasi Keluarga yang tergolong DTKS
di Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Tabel 2.49.
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

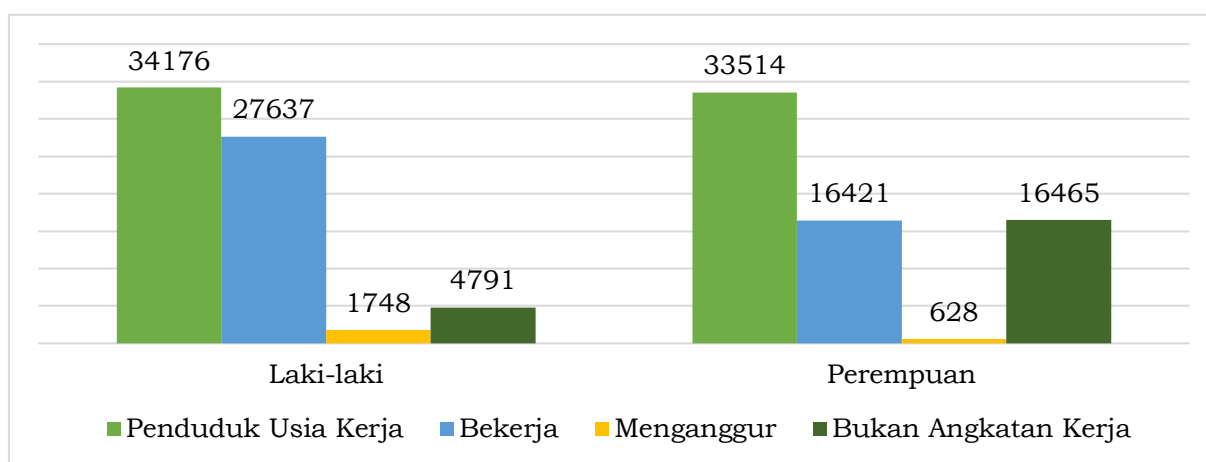
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anak Terlantar	1.191	1.108	1.065	946	3
Anak Nakal	0	0	0	14	4
Korban Narkotika	2	1	1	27	34
Penyandang Cacat	455	401	373	393	403
Gelandangan dan Pengemis	3	3	5	0	0
Tuna Susila	2	2	2	6	6
Fakir Miskin	26.493	26.493	26.493	6054	6749
Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan	2	2	1	1	0
Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	0	0
Bekas Narapidana	55	50	53	67	76
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.096	911	917	924	896
Keluarga berumah Tidak Layak Huni	1.974	1.795	1.730	1004	1003
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	6	15	13	18	21
Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0
Anak Jalanan	0	0	0	0	0
TOTAL	31.998	31.502	31.370	9.454	9.195

Sumber: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.7. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1) Penduduk Usia Kerja

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di Kota Subulussalam, Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun ke atas di Kota Subulussalam pada 2024 diperkirakan mencapai 67.690 orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 34.176 orang atau 50,49 persen sebanding dengan PUK perempuan yaitu 33.514 orang atau 49,51 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.105.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Tahun 2024

Upaya-upaya terus dilakukan selama satu dekade pemerintahan Kota Subulussalam, melalui instansi terkait setiap tahun dilakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja baik yang terdaftar maupun untuk usia angkatan kerja lain.

2) Jumlah Program BLK

Tabel 2.50.
Program Balai Tenaga Kerja Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Program Pelatihan	8	5	10	15	11
Jumlah BLK	1	1	1	1	1

Sumber : Disnakertrans Kota Subulussalam, 2025

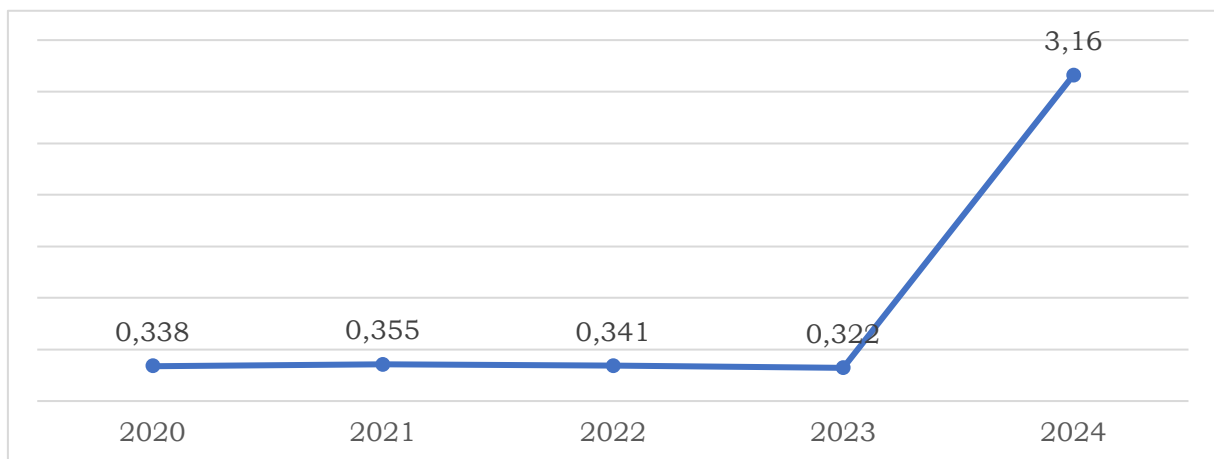
Jumlah Program Pelatihan pada BLK Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga 2024. Tercatat pada tahun 2020 jumlah BLK Kota Subulussalam sebesar 8 program, meningkat pada tahun 2024 menjadi 11 program. Dengan meningkatnya program BLK setiap tahunnya, juga mendukung peningkatan

kewirausahaan di Kota Subulussalam. Diharapkan kedepannya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi usaha wirausaha muda.

2.4.4.8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Perempuan Melahirkan Berumur Kurang 20 Tahun

Angka perempuan melahirkan berumur kurang dari 20 tahun di Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak 2020. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan hingga angka 3,16 persen. Angka ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk memberikan pelayanan keluarga sejahtera dan meningkatkan kesiapan ibu hamil.



Sumber : Sistem Informasi Keluarga, 2024

Gambar 2.106.

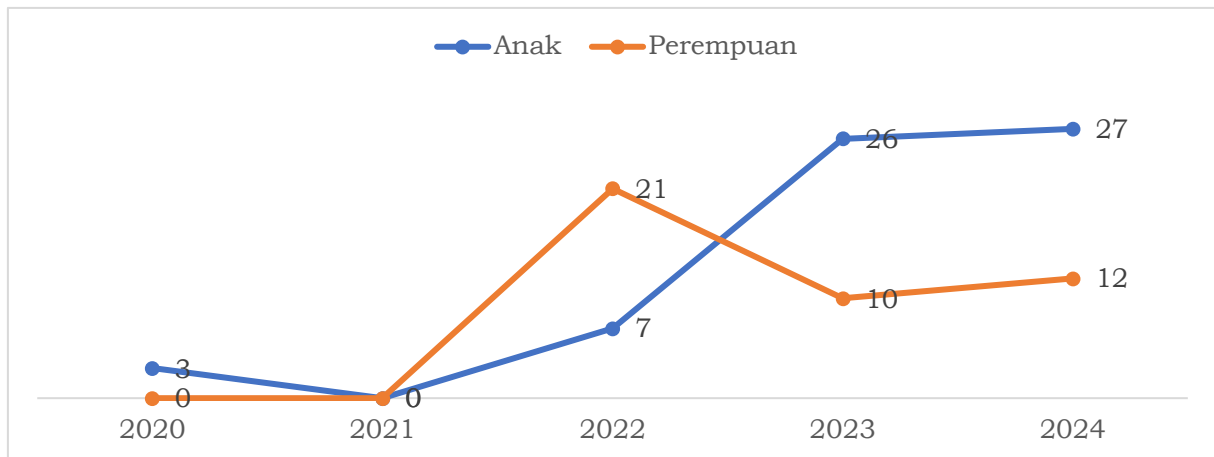
Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Pernikahan dini, kenakalan remaja yang mengarah pada kehamilan di luar nikah dan usia sekolah, kemiskinan, rendahnya pendidikan seksual, akses terbatas terhadap layanan KB, rendahnya kontrol orang tua serta dispensasi nikah oleh pengadilan agama menjadi beberapa penyebab perempuan melahirkan berumur kurang 20 tahun.

2) Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kota Subulussalam meningkatkan setiap tahunnya sejak tahun 2020. Kekerasan pada anak tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 27 kasus. Sedangkan kekerasan pada perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 21 kasus.

Beberapa kekerasan yang terjadi di Kota Subulussalam adalah fisik, seksual, eksploitasi, dan penelantaran.

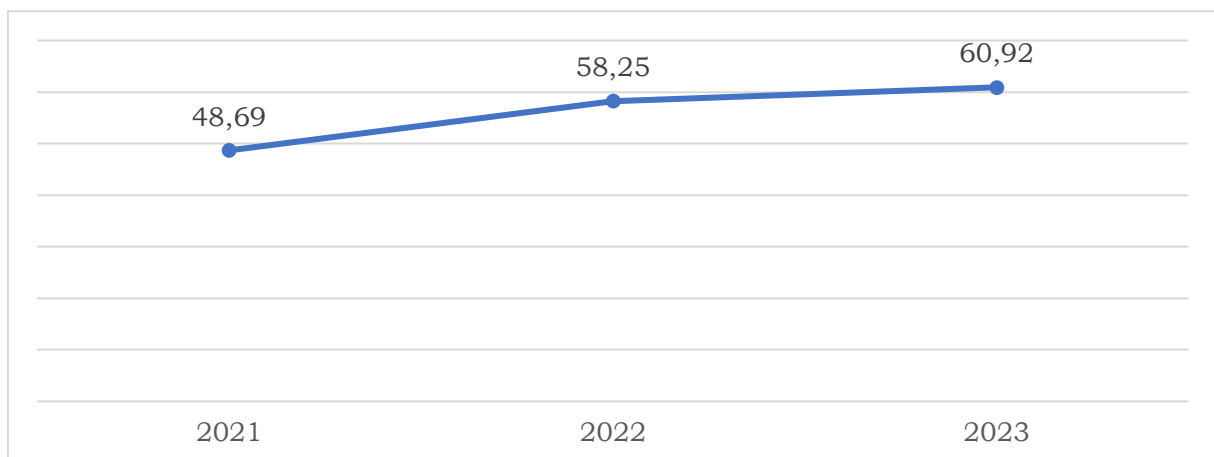


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024

Gambar 2.107.
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, IPHA Kota Subulussalam sebesar 48,69 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 60,92. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kota Subulussalam dengan memerhatikan pemenuhan hak anak terus dilaksanakan setiap tahunnya.



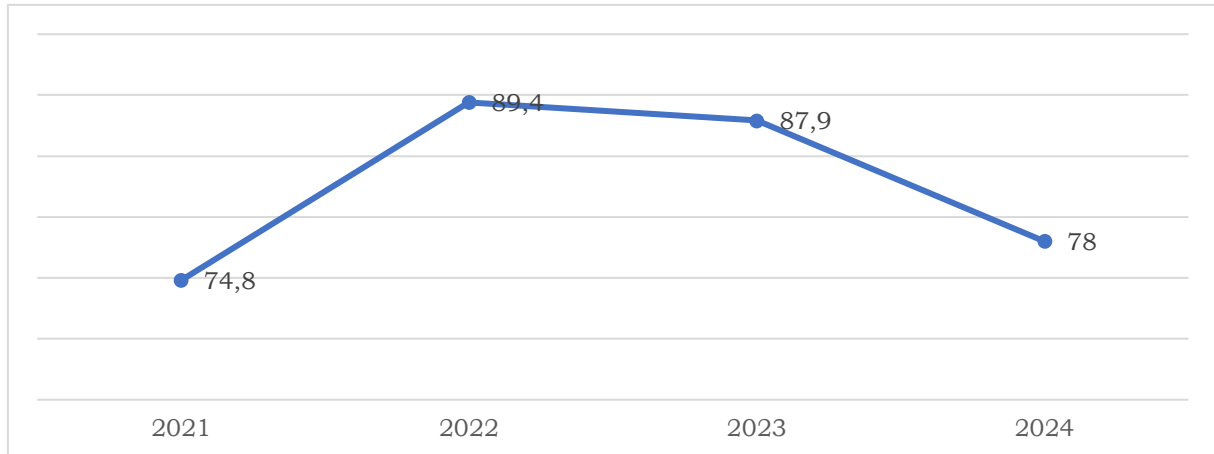
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Gambar 2.108.
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Subulussalam Tahun 2021-2023

2.4.4.9. Bidang Urusan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

Skor pola pangan harapan (PPH) Kota Subulussalam sejak tahun 2021-2024 mengalami kenaikan, dari 74,8 menjadi 78. Puncak PPH tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 89,4.



Sumber : BPS Aceh, 2025

Gambar 2.109.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Subulussalam Tahun 2021-2024

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya skor PPH adalah:

- Faktor ketersediaan pangan seperti gagal panen dan ketergantungan impor dari kabupaten/kota lain;
- Faktor ekonomi dan harga pangan seperti inflasi harga pangan pokok dan daya beli masyarakat rendah;
- Faktor sosial dan budaya seperti kebiasaan konsumsi tidak beragam dan urbanisasi (cenderung mengonsumsi makan cepat saji);
- Faktor kebijakan dan distribusi;
- Faktor lingkungan dan kesehatan seperti degradasi lahan pertanian.

2.4.4.10. Bidang Urusan Pertanahan

1) Sertifikat Tanah

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Subulussalam melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kekhususan Aceh, Pemerintah Kota Subulussalam juga

berkedudukan sebagai daerah Otonomi Khusus dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan kekhususan.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya Kekhususan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni:

- a. permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan
- b. permasalahan pertanahan terkait dengan tanah aset pemerintah Kota Subulussalam.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kota Subulussalam sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut jenis hak atas tanah di Kota Subulussalam tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51.
Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Hak Milik	809	3.427	2.408	1797
Hak Guna Bangunan	164	62	3	5
Hak Guna Usaha	0	13	0	31
Hak Pakai	8	27	12	18
Tanah Wakaf	0	0	1	0

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Subulussalam, 2025

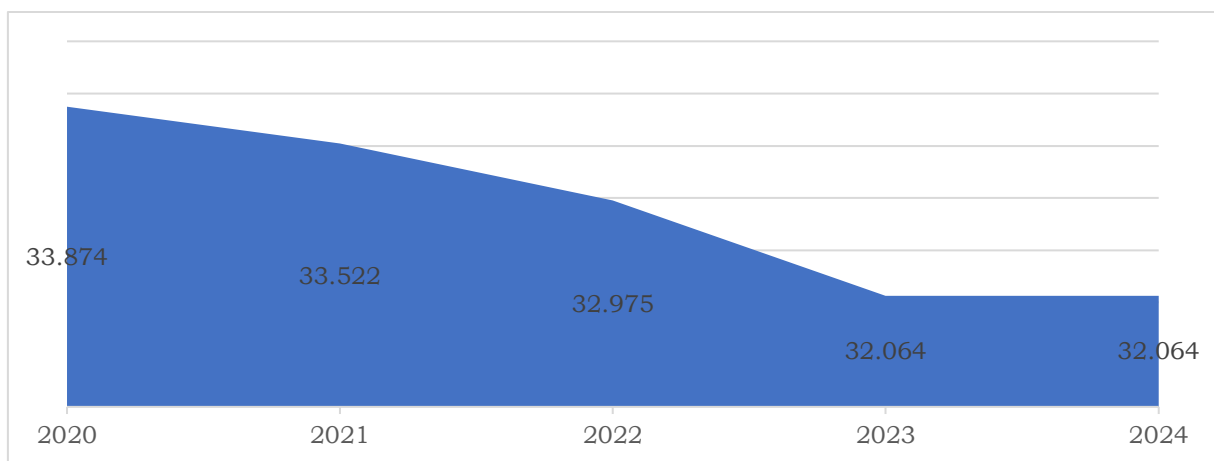
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Subulussalam antara lain tingkat pemahaman masyarakat yang rendah, banyaknya status kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan menyediakan fasilitas dan SDM Kota Subulussalam di Bidang Pertanahan, menyediakan fasilitas bebas biaya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin dengan proda dan prona, melakukan identifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dari lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU di wilayah Kota Subulussalam.

2) Sengketa Tanah

Hingga 2024, belum ada sengketa tanah negara yang diselesaikan.

2.4.4.11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Wilayah tutupan hutan di Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, tutupan hutan di Kota Subulussalam seluas 33.874 hektar, lalu menurun menjadi 32.064 hektar pada tahun 2024. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Subulussalam belum ada pendataan secara menyeluruh untuk penetapan dan luas RTH terbaru.



Sumber : BPS Aceh, 2025

Gambar 2.110.
Luas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Tabel 2.52.
Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Luas RTH (Ha)					Letak Kota	Luas Wilayah Kota	Besar Persentase RTH
		2020	2021	2022	2023	2024		(Ha)	≤ 10%
1	Kota Subulussalam	1.809,64	1809,64	1.809,64	1.809,64	1.809,64	Kota Subulussalam	139.100,00	1,3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2024

2.4.4.12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Penduduk Ber E-KTP

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan dan salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Gambaran rinci jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.53.
Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Penduduk yang memiliki KTP	64.999	69.241	71.852	62.277	66.169
Jlh. Penduduk yang wajib KTP >17 thn	55.871	60.001	62.883	65.880	67.003
Rasio	1,16	1,15	1,14	0,95	0,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2025

Tahun 2020, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 64.999 orang dari total jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 55.871 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP elektronik telah lebih 100 persen. Jumlah penduduk wajib KTP terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 66.169 orang. Salah satu alasan kenapa rasio yang lebih dari 1 karena banyaknya pendatang yang mengurus KTP di Kota Subulussalam. Sehingga jumlah KTP yang tercatat lebih banyak daripada jumlah penduduk wajib KTP. Sedangkan untuk tahun 2023-2024, jumlah penduduk yang memiliki KTP justru lebih sedikit daripada yang seharusnya wajib memiliki KTP.

Hal ini dapat disebabkan di antaranya:

- 1) Dinas Dukcapil telah melakukan pemutakhiran data yang lebih akurat. Penduduk yang sudah pindah atau meninggal mungkin telah dikeluarkan dari data "wajib KTP", sehingga angkanya menjadi lebih realistis.
- 2) Sebagian penduduk yang seharusnya sudah wajib KTP (misalnya yang baru genap 17 tahun atau pendatang yang menetap) belum mengurus KTP-nya, menyebabkan angka kepemilikan KTP menjadi lebih rendah.

2) Rasio bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah bayi yang berakte kelahiran di Kota Subulussalam pada tahun 2025 mencapai

13.796 bayi dengan bayi yang telah memiliki akte kelahiran sebanyak 0,96. Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.54.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Bayi lahir berakte kelahiran (org)	12232	12232	10.572	13.631	13.796
Jlh. Keseluruhan Bayi yang Lahir Hidup(org)	1766	1513	1.739	4.246	14.307
Rasio	6,93	8,02	6,08	3,21	0,96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2025

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2024 adalah 0,96 yang mengindikasikan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan tidak mencakup keseluruhan bayi. Namun menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya dinas yang terkait untuk dapat melakukan dan tindakan agar akta kelahiran dengan mudah diperoleh. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya dinas catatan sipil dan kependudukan dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit, bidan, klinik bersalin agar setiap anak yang lahir pihak keluarga bayi dapat secara langsung mendapatkan akta kelahiran.

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kota Subulussalam tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dari 0,41 di tahun 2020 meningkat menjadi 0,54 pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pasangan nikah di Kota Subulussalam masih banyak yang belum memiliki akte nikah. Jumlah persentase pasangan berakte nikah tersebut masih tergolong rendah, terdapat jumlah pasangan sebesar 46,00 persen yang belum memiliki akte nikah.

Tabel 2.55.
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Pasangan yang telah Berakte Nikah	15.902	18.250	21.102	22.467	23.372
Jumlah Keseluruhan pasangan Nikah	38.568	39.845	41.809	43.080	44.353
Rasio	0,41	0,46	0,50	0,52	0,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, 2024

Hal ini dapat disebabkan seperti :

- a. kurangnya pemahaman pasangan menikah terhadap pentingnya tertib administrasi nikah;
- b. banyaknya pasangan nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA); dan
- c. rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan administrasi nikah.

2.4.4.13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya perkantoran pemerintahan desa di setiap desa. Berikut disajikan cakupan kantor pemerintahan desa di Kota Subulussalam pada Tabel berikut.

Tabel 2.56.
Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jlh. Kantor Desa	47	47	47	47	47
Jlh. Seluruh Pemerintahan Desa	82	82	82	82	82
Persentase (Persen)	57,32	57,32	57,32	57,32	57,32

Sumber: DPMK Kota Subulussalam, 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan informasi bahwa hingga tahun 2024 Sudah 47 kampung yang memiliki kantor Desa tetap, jumlah ini masih jauh dari harapan dikarenakan jumlah kampung di Kota Subulussalam mencapai 82 kampung atau sekitar 50 persen dari total kampung yang memiliki kantor, selebihnya masih dalam status penyewaan.

Pemerintah Kota Subulussalam mengupayakan pembangunan kantor pemerintahan kampung secara bertahap sehingga seluruh desa/kampung memiliki kantor pemerintahan yang tetap.

2) BUMDes yang aktif

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Kampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes, setiap pemerintah kampung mendaftarkan BUMDes pada Portal BUMDes yang disediakan. Hingga tahun 2022, terdapat 71 Kampung yang telah membentuk BUMDes (86,59 persen). Dari 71 kampung tersebut, terdapat 41 kampung yang telah

mendaftar pada Portal BUMDES atau sebanyak 57,75 persen. Hanya terdapat 1 BUMDes yang telah berbadan hukum dari 71 BUMDes yang terbentuk.

2.4.4.14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam tahun 2020 adalah sebesar 2,91 persen, menurun pada tahun 2024 yaitu 2,70 persen. Jumlah persentase tersebut merupakan kategori tinggi dalam klasifikasi pertumbuhan penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sangat berhubungan dengan letak strategis Kota Subulussalam sebagai jalur lintas Aceh-Sumatera Utara dan memiliki tingkat aktivitas perekonomian yang beragam dan cepat. Daerah ini menjadi daya tarik beberapa investor yang bergerak dibidang perkebunan, industri tambang, perumahan, perbankan, industri makanan dan minimarket/retail waralaba, sehingga banyak penduduk di Kota Subulussalam datang dari luar dan menetap di Kota Subulussalam.

2) Rasio Akseptor KB

Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.57.
Rasio Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur
di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Akseptor KB	82,77	82,77	47,64	18,70	83,33
Jumlah Akseptor KB	25.388	25.388	6.745	2.784	18.281
Jumlah pasangan usia subur	30.673	30.673	14.158	14.882	15.836

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam, 2024

Adanya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan akseptor KB sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 terjadinya fluktuasi jumlah pengguna akseptor KB. Semakin tinggi penggunaan akseptor KB semakin tinggi juga penanganan jumlah penduduk yang meningkat.

3) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun

Pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang menikah sampai pada tahun 2023 mencapai 82,77 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 18,7 persen. Ke depan Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih aktif dan berkelanjutan. Berikut jumlah pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun sejak tahun 2020-2024 pada Tabel di bawah.

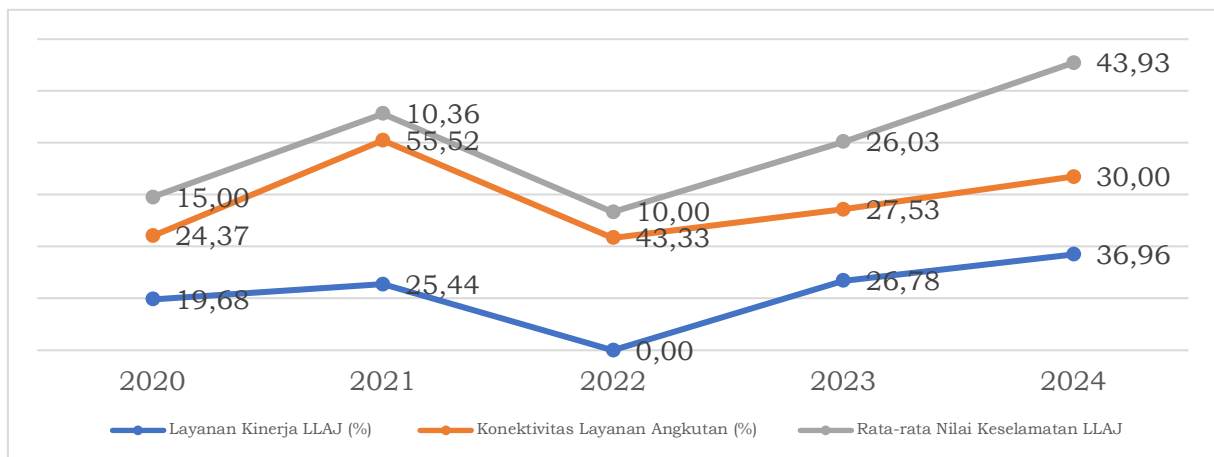
Tabel 2.58.
Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)	82,77	82,77	47,64	18,7	83,32
Jumlah peserta KB Aktif	25.388	25.388	6.745	2.784	10.565
Jumlah pasangan usia subur	30.673	30.673	14.158	14.882	15.386

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.15. Bidang Urusan Perhubungan

1) Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.111.
Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Persentase Layanan Kinerja LLAJ Kota Subulussalam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 sebesar 19,68 persen lalu meningkat pada tahun 2024 menjadi 36,96 persen. Begitu juga 2 komponen pendukungnya, mengalami peningkatan sejak 2020-2024.

2) Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini Kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

3) Jumlah Terminal Bis

Kota Subulussalam hanya memiliki 1 terminal Bis tipe C yang sudah tidak berfungsi optimal untuk melayani armada angkutan penumpang. Kondisi saat ini terminal tersebut beralih fungsi sebagai pusat pasar. Hal ini disebabkan kurang tepatnya lokasi terminal yang berada di tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

4) Jumlah Locket Travel

Hingga tahun 2024, jumlah loket travel di Kota Subulussalam berjumlah 13 loket. Beberapa Locket Travel di antaranya adalah Mulia Wisata, Mentari Tour Utama, Sadakata Travel, Himpak, Mentari Jaya.

2.4.4.16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**1) Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi**

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kota Subulussalam terdiri dari: akses internet, *hotspot*, jaringan telepon seluler, media informasi dan radio komunikasi. Hanya terdapat 27 kampung yang memiliki BTS (*base transceiver station*) dan sisanya tidak memiliki BTS. Masih terdapat 23 kampung yang memiliki kekuatan sinyal internet lemah. Hanya 66 kampung yang memiliki sinyal 5G/4G/LTE, sisanya masih kualitas 3G ke bawah.

Hanya 3 kecamatan yang memiliki warnet dan jasa ekspedisi swasta, terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki sarana komunikasi, yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib.

Tabel 2.59.

Jumlah Kampung menurut Keberadaan BTS, Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kota Subulussalam

Kecamatan	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler				Sinyal Internet Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Sinyal	5G/4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
Simpang Kiri	9	8	3	13	1	0	17	0	0	0
Penanggalan	7	6	2	10	1	0	13	0	0	0
Rundeng	3	20	3	7	13	0	11	10	2	0
Sultan Daulat	5	14	5	10	4	0	18	0	1	0
Longkib	3	7	1	5	4	0	7	3	0	0
Subulussalam	27	55	14	45	23	0	66	13	3	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

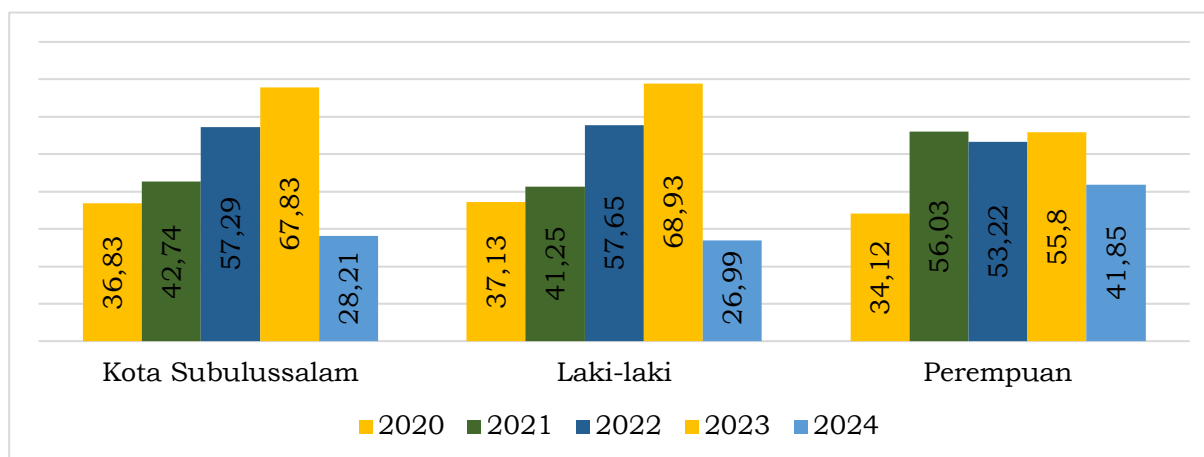
Tabel 2.60.
Jumlah Kampung menurut Keberadaan Fasilitas Komunikasi
di Kota Subulussalam

Kecamatan	Warnet	Kantor Pos / Pos Pembantu / Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
Simpang Kiri	6	0	0	4
Penanggalan	7	1	0	1
Rundeng	0	0	0	0
Sultan Daulat	4	0	0	1
Longkib	0	0	0	0
Subulussalam	17	1	0	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

2) Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet

Anggota rumah tangga yang mengakses internet di Kota Subulussalam penurunan sejak tahun 2020-2024. Tercatat tahun 2020, Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet sebesar 36,83 persen, menurun menjadi 28,21 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 28,21 persen. Secara umum, penduduk perempuan lebih dominan menggunakan internet dibandingkan laki-laki pada tahun 2024.



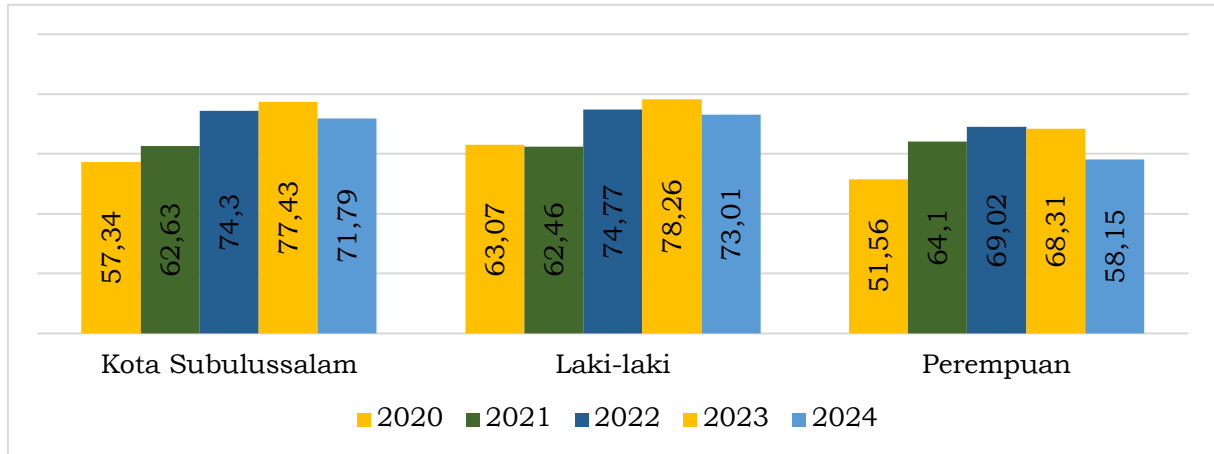
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.112.
Persentase Anggota Rumah Tangga Mengakses Internet
Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

3) Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer

Anggota rumah tangga yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020. Tercatat tahun 2020, Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/

Nirkabel atau Komputer sebesar 57,34 persen, pada tahun 2024 menjadi 71,79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya penduduk di Kota Subulussalam yang melek teknologi. Secara umum, penduduk laki-laki lebih dominan menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer dibandingkan perempuan.

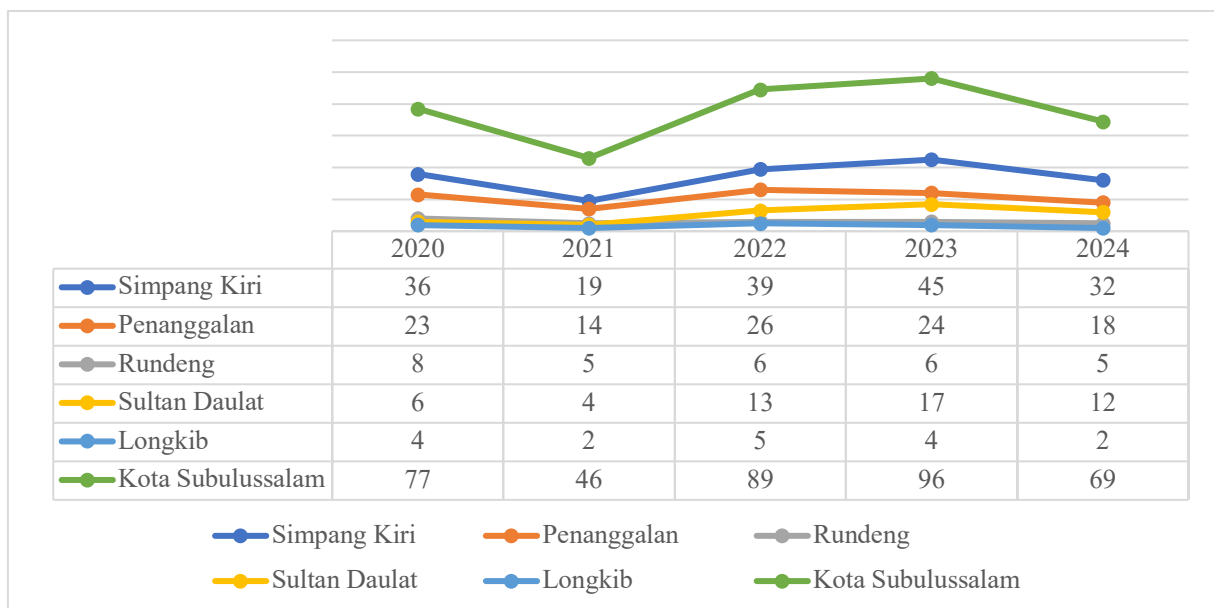


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.113.
Persentase Anggota Rumah Tangga Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Jumlah Koperasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.114.
Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kota Subulussalam sejak tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di atas ini.

Secara umum, jumlah koperasi aktif di Kota Subulussalam menurun sejak tahun 2020-2024. Peningkatan yang terjadi dari 77 koperasi menjadi 69 koperasi. Koperasi paling banyak berada pada Kecamatan Simpang Kiri.

2) Jumlah Usaha Kecil Menengah

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria usaha kecil dan menengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 2.61.

Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2020–2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Agro Industri	256	271	271	174
2	Industri pengolahan	955	714	718	825
Jumlah		1211	985	989	999

Sumber: Disperindagkop & UKM Kota Subulussalam, 2024

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menengah di Kota Subulussalam terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak kenaikan

jumlah UKM terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.211 UKM. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, namun secara tren mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh usaha ini bergerak di usaha makanan, pakaian jadi, furnitur, komputer, logam, perbengkelan dan reparasi elektronik.

Walaupun adanya peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, pemerintah harus terus memberikan dukungan dan akses informasi kepada pengusaha terutama terhadap permodalan, jaminan berusaha dan peningkatan hasil dan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Permodalan dapat ditempuh dengan membangun keaktifan koperasi dan perbankan. Sedangkan jaminan berusaha serta peningkatan mutu hasil produksi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang baik dan pemerintah dapat melakukan pelatihan bagi pengusaha demi pengembangan usaha ke level yang lebih baik lagi.

2.3.1.18. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi yang ada di Kota Subulussalam secara keseluruhan merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Subulussalam masih sangat sedikit jumlahnya. Pada tahun 2020 jumlah investor sebanyak 157 investor. Pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah investor menjadi 112 investor dengan nilai investasi sebesar 1.854.625.839.298 rupiah.

Tabel 2.62.
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Investor	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2020	157	296.667.242.789	-	296.667.242.789
2021	232	169.445.600.000	-	169.445.600.000
2022	32	335.982.549.440	-	335.982.549.440
2023	34	914.125.993.087	-	914.125.993.087
2024	112	1.854.625.839.298	-	1.854.625.839.298

Sumber: DPMP2TSP Kota Subulussalam, 2025

Jika dibandingkan Tahun 2022, indeks daya saing investasi Tahun 2023 menunjukkan penurunan nilai di beberapa kabupaten/kota. Kenaikan atau penurunan nilai indeks daya saing investasi didukung dan dipengaruhi oleh empat lingkup di setiap kabupaten/kota. Pada peringkat 3 (tiga) teratas tetap diduduki oleh Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Utara. Sementara untuk peringkat 10 (sepuluh)

besar masih didominasi oleh kabupaten/kota yang sama. Kota Subulussalam tahun 2022-2023 masih menduduki peringkat 23 se-Aceh.

Tabel 2.63.
Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		Nilai Indeks Daya Saing Investasi		Peringkat	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Banda Aceh	1,843	1,286	-0,182	0,067	3,132	3,312	1,920	1,496	1,678	1,540	1	1
Aceh Besar	1,504	1,320	1,745	1,485	0,624	0,072	1,288	2,136	1,359	1,253	2	2
Aceh Utara	1,031	1,627	0,309	1,113	1,171	0,685	0,433	0,329	0,568	1,050	3	3
Bener Meriah	-0,592	-0,514	0,186	1,461	-0,035	0,166	1,082	0,623	0,126	0,362	10	4
Aceh Barat	-0,005	0,049	1,060	-0,087	0,413	0,553	0,130	1,224	0,319	0,344	5	5
Lhokseumawe	1,428	1,283	-0,568	-0,339	0,400	0,194	0,214	0,352	0,303	0,300	6	6
Sabang	-0,918	-0,803	-0,207	1,363	-0,661	-0,402	1,849	1,483	0,016	0,285	12	7
Bireuen	0,536	0,476	0,521	-0,293	0,640	0,612	0,394	0,191	0,523	0,269	4	8
Nagan Raya	1,596	1,428	-0,674	-0,989	0,376	1,097	-0,141	-0,083	0,229	0,252	8	9
Pidie	0,288	0,519	0,316	0,557	0,095	0,297	0,086	-0,639	0,190	0,233	9	10
Aceh Tengah	-0,020	-0,227	0,277	0,310	0,310	-0,069	0,461	0,348	0,259	0,113	7	11
Aceh Selatan	-0,550	-0,711	0,624	-0,140	-0,113	0,128	-0,112	-0,369	0,031	-0,259	11	12
Aceh Tamiang	-0,420	-0,162	-0,769	0,130	0,130	0,037	-0,887	-1,240	-0,472	-0,294	17	13
Aceh Timur	0,153	0,380	-0,355	-0,682	0,135	0,191	-1,352	-1,348	-0,323	-0,302	15	14
Pidie Jaya	-0,994	-0,925	0,575	0,297	-1,117	-0,830	-0,156	-0,004	-0,360	-0,333	16	15
Langsa	-0,407	0,049	0,089	-0,448	0,032	-0,777	-0,132	-0,364	-0,105	-0,385	14	16
Aceh Barat Daya	-0,408	-0,497	-1,359	0,116	-0,796	-1,035	-1,284	-0,575	-0,961	-0,485	21	17
Aceh Jaya	-0,560	-0,741	0,408	-0,188	-0,538	-0,340	0,374	-0,701	0,007	-0,492	13	18
Singkil	-0,878	-1,010	0,267	0,199	-1,321	-1,257	-0,801	-0,191	-0,654	-0,543	18	19
Simeulue	-1,030	-1,122	-0,781	-1,921	-1,154	-1,011	0,070	0,424	-0,742	-0,861	19	20
Aceh Tenggara	-0,600	-0,656	-1,400	-1,070	-1,026	-0,812	-1,159	-1,217	-1,046	-0,939	22	21
Gayo Lues	-0,914	-0,782	-0,495	-0,785	-1,046	-1,046	-1,289	-1,349	-0,936	-0,991	20	22
Subulussalam	-0,552	-0,993	-1,270	-1,170	-1,025	-1,005	-1,869	-1,523	-1,179	-1,173	23	23

Sumber: DPMPTSP Aceh, 2024

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Adapun beberapa peraturan daerah atau qanun yang mendukung iklim usaha adalah sebagai berikut:

- Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampong (BUMK);
- Peraturan Daerah Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Subulussalam;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lae Kombih;
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

2.4.4.19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**1) Jumlah Organisasi Pemuda**

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Subulussalam Tahun 2022 ada 18 organisasi pemuda yang semuanya terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

2) Jumlah Organisasi Olah Raga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam

pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Berdasarkan data dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota Subulussalam terdapat 10 klub olahraga yang mendapatkan sentuhan tangan pemerintah yaitu klub sepak bola dan klub bola voli yang berada di setiap kecamatan dalam Kota Subulussalam. Jika dilihat lebih jauh, banyak klub olahraga lainnya dalam berbagai cabang yang berada di Kota Subulussalam seperti: bulu tangkis, tenis meja, futsal, karate, taekwondo, tarung derajat, pencak silat, sepeda, panahan, catur, balap motor, perbakin dan lain-lain.

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi mereka sebagai bekal untuk menjadi masyarakat yang berpikir positif, inovatif dan produktif, serta untuk melatih sikap mandiri, bekerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Subulussalam, Mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baru satu kegiatan kepemudaan yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Subulussalam yaitu kegiatan Pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan generasi Muda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk itu pemerintah ke depan perlu mengupayakan penambahan kegiatan kepemudaan.

4) Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Disporapar melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini ada 10 klub olahraga yang mendapatkan pembinaan pemerintah yaitu klub sepak bola dan bola voli yang berada di setiap kecamatan. Namun klub olah raga lainnya seperti; bulu tangkis, tenis meja, futsal, renang, sepeda, tinju, dan panjat tebing belum terdata dengan baik.

Tabel 2.64.

Keaktifan Organisasi Olahraga di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

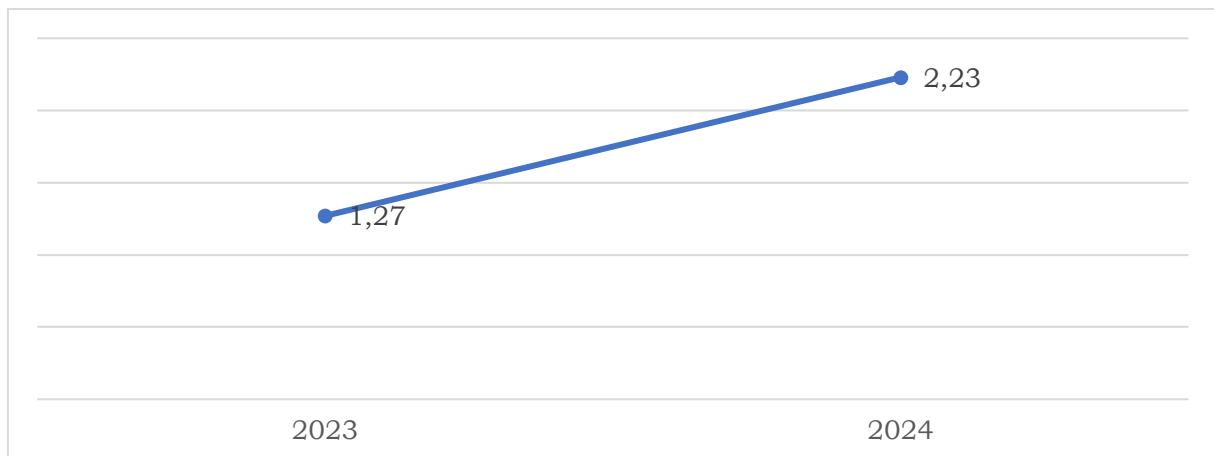
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Olahraga Aktif	27	28	28	28	10
Jumlah Organisasi Olahraga	33	33	33	33	33
Persentase Organisasi Olahraga Aktif	81,82	84,85	84,85	84,85	30

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam, 2024

Persentase organisasi olahraga aktif menurun sejak 2020, dari 81,82 persen menjadi 30,00 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini tergolong baik dengan semakin bertambahnya organisasi olahraga yang aktif.

2.4.4.20. Bidang Urusan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Subulussalam baru mulai dihitung sejak tahun 2022 dengan status uji coba. Perolehan nilai IPS tahun 2023 sebesar 1,27 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,23. Hal ini menunjukkan perbaikan pembangunan bidang statistik setiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.115.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Subulussalam Tahun 2023-2024

2.4.4.21. Bidang Urusan Kebudayaan

Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, Dari 3 Situs Budaya yang ada di Subulussalam baru satu yang memiliki juru pelihara dan sudah di lakukan pemugaran oleh pemerintah yaitu Kompleks makam Syekh Hamzah Fansyuri di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Keragaman budaya di Kota Subulussalam juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya yang bersejarah seperti Makam, Tugu, Rumah Tradisional,

Monumen dan Benteng.

Tabel 2.65.
Cagar Budaya di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cagar Budaya	6	6	6	15	15
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	0	0	20	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

Hingga tahun 2024, jumlah cagar budaya di Kota Subulussalam berjumlah 15 cagar. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 serta 2024 tidak cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2020 dimana terdapat 2 cagar budaya yang dilestarikan.

Seni Budaya

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat sehingga menghasilkan seni budaya yang beragam juga. Beberapa seni budaya yang terdapat di Kota Subulussalam di antaranya seperti Tari Dampeng, Tari Piring, Tari Lambe-lambe, Tari Srindayung, Tari siwah, Tari Adok, Tari Sikambang, Tari Ambai-ambai ken, Tari rapai sedok, Tari Mendatar Inai, Tari Biyahat sampai dengan saat ini masih digunakan.

Tabel 2.66.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Subulussalam Tahun 2020 s.d. 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	1,1	1,1	1,4	2,0	3,0
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

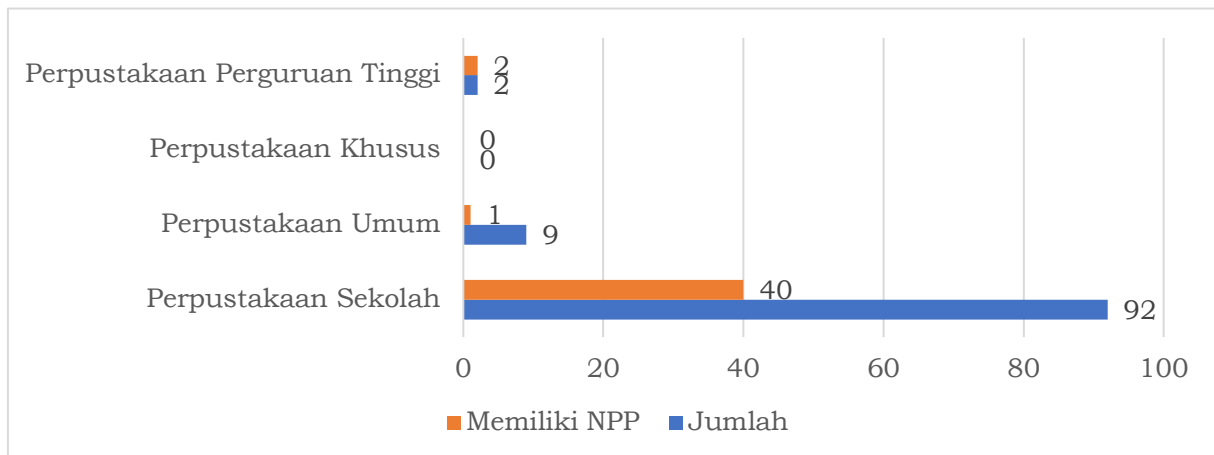
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.22. Bidang Urusan Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana di dalamnya terdapat berbagai jenis dan kelompok bahan pustaka yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.



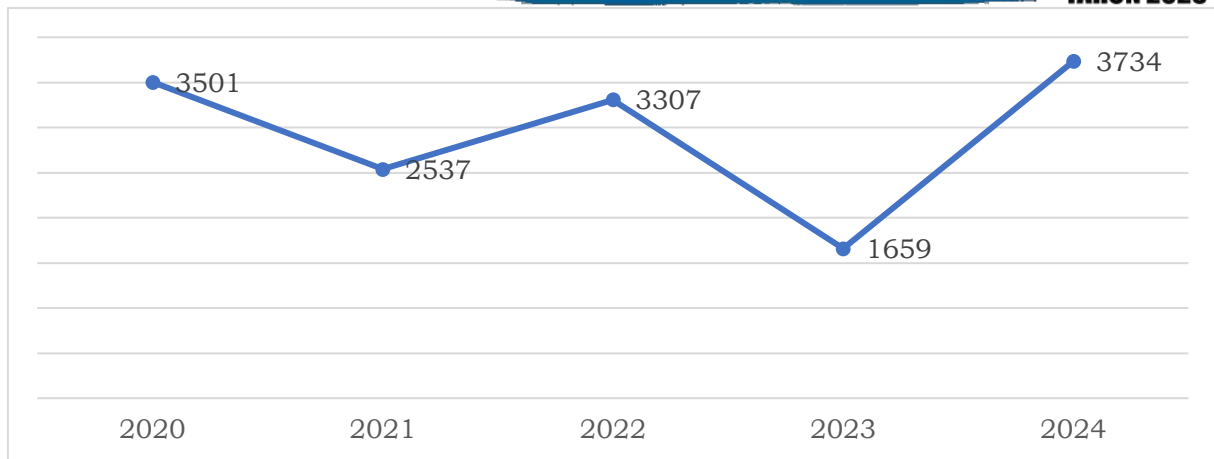
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.116.
Perpustakaan di Kota Subulussalam

Selama kurun waktu tahun 2020–2024, Kota Subulussalam hanya memiliki 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun jumlah perpustakaan lain seperti perpustakaan sekolah pada tahun 2024 sebanyak 92 unit, perpustakaan perguruan tinggi 2 unit, dan perpustakaan umum 9 unit.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kunjungan perpustakaan mencapai 3.501 kunjungan, menurun pada angka 1659 kunjungan pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.734 kunjungan. Ini menunjukkan minat baca masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah kota Subulussalam ke depan perlu meningkatkan sosialisasi minat baca bagi masyarakat baik melalui media iklan, Poster, baliho, ataupun dengan menggunakan media lainnya yang efektif dapat meningkatkan minat baca masyarakat.



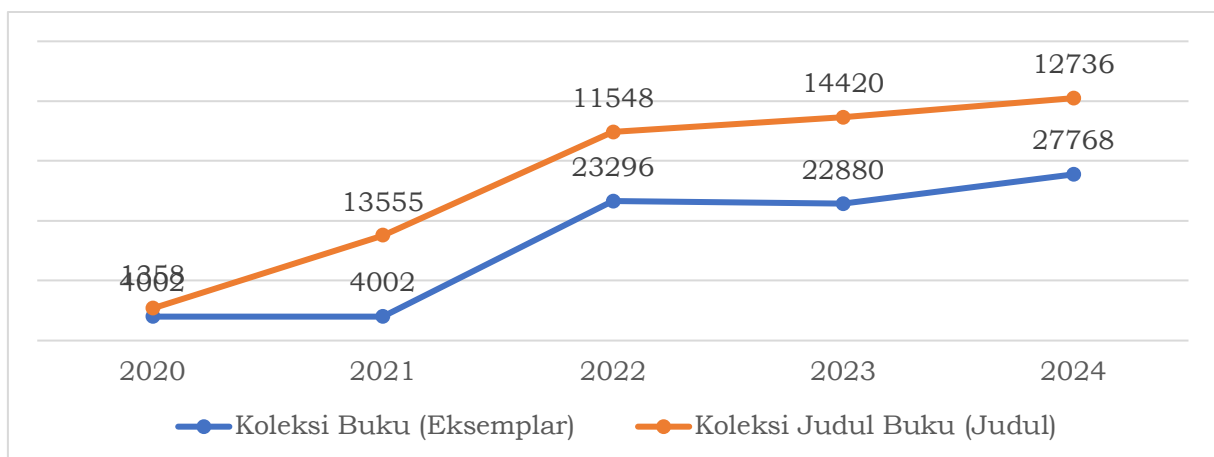
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.117.
Kunjungan Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024

3) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Fasilitas yang memadai belum terlihat di Perpustakaan Umum Kota Subulussalam dengan persediaan buku di rak-rak perpustakaan yang tidak banyak serta buku yang disediakan kebanyakan buku-buku tahun tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung ke Perpustakaan Kota Subulussalam.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.118.
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Tahun 2020-2024

Sejauh ini buku yang disediakan di perpustakaan Kota Subulussalam sebanyak 27.768 eksemplar dan 12.736 judul buku. Buku-buku ini dikumpulkan dari sejak kota Subulussalam berdiri hingga saat ini. Buku di perpustakaan Kota Subulussalam berdasarkan bantuan perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional dan pihak ketiga. Koleksi buku di Kota Subulussalam masih banyak yang belum *update* dan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan.

2.4.4.23. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2020-2024 di Kota Subulussalam masih sangat rendah, hingga tahun 2022 belum ada 1 (Satu) SKPD pun yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan kelemahan SDM aparatur pengelola arsip pada SKPD Kota Subulussalam, SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam masih sedang berbenah dalam segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk tata pengelolaan arsip yang baik dan benar. Di samping itu masih banyak SKPD dalam lingkup Pemerintah kota Subulussalam yang belum memiliki gedung kantor dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku.

Pada tahun 2024 juga hanya 2 perangkat daerah yang baru menerapkan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Hal ini menjadi perhatian bagi lembaga kearsipan daerah dalam menerapkan Srikandi secara menyeluruh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam sebagai lembaga kearsipan memperoleh predikat “Tidak Diberikan Kategori” oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024 pada pengawasan kearsipan.

2.4.4.24. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya ikan di Kota Subulussalam cukup besar, mengingat Kota Subulussalam mempunyai jumlah panjang sungai sekitar 16,72 Km. Lahan budidaya perikanan dapat memanfaatkan lahan daratan basah(sawah), kolam, tambak dan rawa. Ketersediaan ikan per kapita Kota Subulussalam mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di Kota Subulussalam yang terus tumbuh terutama

pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di Kota Subulussalam masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil serta Provinsi Sumatera Utara. Secara rinci produksi ikan di Kota Subulussalam tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.67.
Produksi Perikanan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	128,6	127,7	79,02	87,49	49
Perikanan Budidaya	33	35	32,15	37,48	3
Jumlah	161,6	162,7	111,2	124,97	52

Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2024

Ke depan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengoptimalan pembangunan perikanan terutama dalam sektor budidaya ikan untuk peningkatan produksi, memanfaatkan penerapan dan implementasi teknologi dan informasi perikanan dan mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih ikan unggul.

2.4.4.25. Bidang Urusan Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan di Kota Subulussalam selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Berikut disajikan dalam tabel perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2020-2024.

Tabel 2.68.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tamu Mancanegara	70	NA	68	4	457
2	Jumlah Tamu Nusantara	14.615	13.330	15.989	24.841	24.841

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

2) Tempat Wisata dan Cagar Budaya

Kota Subulussalam memiliki keragaman objek wisata baik wisata alam maupun wisata religi. Beberapa objek wisata di Kota Subulussalam di antaranya adalah.

Tabel 2.69.

Nama dan Lokasi Objek Wisata yang Ada di Kota Subulussalam

No.	Nama Objek Wisata	Alamat
1.	Tahura Lae Kombih	Desa Jontor
2.	Arung jeram lae Kombih	Desa Sikelang
3.	Wisata Alam Penuntungan	Desa penuntungan
4.	Air Terjun SKPC	Desa penuntungan
5.	Air Terjun Kedabuhan	Desa lae Ikan
6.	Irigasi Bahorok	Desa Namo Buaya
7.	Air Terjun Silangit-langit	Desa Singgersing
8.	Pemandian Nantampuk Mas	Desa lae Mbersih
9.	Air Terjun Batu Napal	Desa lae Raso
10.	Makan Syech Hamzah fansuri	Desa Obob

Sumber : Disparpora Kota Subulussalam, 2025

Dari beberapa objek wisata seperti yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Subulussalam memiliki jumlah wisata alam yang banyak dan masing-masing lokasi wisata alam tersebut memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Namun sampai pada saat ini lokasi objek wisata tersebut masih belum menjadi perhatian pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta promosi destinasinya.

Peluang dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, mengingat bahwa Kota Subulussalam berada di jalur lintas dua kabupaten yang sudah memiliki pengembangan wisata yang sudah lebih baik. Kabupaten Aceh singkil memiliki pulau banyak, dimana rata-rata wisatawan yang datang pasti singgah atau menginap dahulu di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wisata pesisir pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan lokal. Jadi pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait membaca peluang pengembangan objek wisata yang ada.

3) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Tabel 2.70.

Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Tahun	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Akomodasi Lainnya
2020			1			10
2021			1			9
2022			1			10
2023			1			15
2024	1		1			14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Terdapat 1 Hotel Bintang 1, 1 Hotel Bintang 3 dan 14 Akomodasi penginapan lainnya di Kota Subulussalam hingga 2024.

4) Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Rumah makan / restoran di Kota Subulussalam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah rumah makan / restoran di Kota Subulussalam mencapai 48 unit, lalu meningkat tahun 2025 menjadi 54 unit. Rumah Makan / Restoran terbanyak terdapat pada Kecamatan Simpang Kiri.

Tabel 2.71.

Jumlah Rumah Makan / Restoran di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Simpang Kiri	37	37	...	41	41
Penanggalan	11	11	...	12	12
Rundeng					1
Sultan Daulat					
Longkib					
Subulussalam	48	48	...	53	54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.26. Bidang Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi tiga besar penyumbang PDRB di Kota Subulussalam, sebesar 25,05 persen pada tahun 2024. Namun kontribusi sektor pertanian Kota Subulussalam cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020-2024, ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya. Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah. Sehingga alih fungsi lahan menjadi isu strategis Kota Subulussalam agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar.

1) Tanaman Pangan

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Namun yang menjadi inti utama pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2020 sebesar 3344,80 ton menurun menjadi 487,32 ton pada tahun 2024. Produktivitas

padi sawah per hektar rata-rata berkisar 5,56 ton per Ha. Sedangkan komoditi jagung mengalami penurunan luasan tanam dan panen, sehingga mempengaruhi jumlah produksi tiap tahunnya. Produktivitas jagung mengalami penurunan dari 5,30 Ton/Ha di tahun 2020 menjadi 5,32 ton per Ha di tahun 2024.

Tabel 2.72.
Luas Panen, Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Komoditi Pangan Utama	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Padi	Luas Panen (Ha)	978,00	525,00	349,10	63,00	63,00
	Produksi (Ton)	3344,80	2.100	44,69	350,28	350,28
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,42	0,25	0,12	5,56	5,56
Jagung	Luas Panen (Ha)	3083,00	2898,00	1.449,00	1.975,00	93
	Produksi (Ton)	16588,00	20.286	57,02	161,31	487,32
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,30	7,00	0,04	8,15	5,24

Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2025

Dari penjelasan secara ringkas mengenai keadaan komoditi tanaman pangan utama di atas dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat maka Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan antara lain:

- penerapan anjuran teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul;
- pengendalian hama dan penyakit tanaman padi;
- Peningkatan fungsi penyuluh pertanian;
- peningkatan sarana produksi pertanian; dan
- peningkatan luas tanam khusus untuk tanaman padi ladang, talas dan jagung.

2) Perkebunan

Potensi perkebunan di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, khususnya komoditi kelapa sawit, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah luasan kebun kelapa sawit rakyat dan minat masyarakat dalam budidaya sawit. Ketersediaan permintaan akan buah kelapa sawit oleh beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit di Kota Subulussalam menjadikan komoditi ini menjadi komoditi unggulan daripada komoditi perkebunan lainnya. Seperti kakao, karet, kelapa dalam, gambir dan lada. Berikut disajikan dalam tabel luas dan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan Kota Subulussalam.

Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 jumlah luas panen perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan mencapai 11.529 Ha dengan produksi panen sebesar 35.729 ton. Produksi ini menurun pada tahun 2024 menjadi 20.221 Ha dengan menghasilkan 24.004 ton. Semua Kecamatan di Kota Subulussalam memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu perkebunan karet mengalami perluasan luas panen, pada tahun 2024 mencapai

3.154 Ha dengan produksi 1.209 ton. Pada tahun 2024, mengalami penurunan areal panen kakao menjadi 456 ha dengan jumlah produksi sebesar 120 ton.

Tabel 2.73.
Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Perkebunan
Unggulan di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Komoditi Perkebunan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	11.529	10.689	19.304	19.304	20.221
	Produksi (Ton)	35.729	29.120	28.800	28.800	24.004
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,1	2,72	1,49	1,49	1,18
Karet	Luas Panen (Ha)	2828	2.896	3.467	3.467	3.154
	Produksi (Ton)	1.628	1.636	1.555	1.555	1.209
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,58	0,56	0,58	0,58	0,38
Kakao	Luas Panen (Ha)	388	378	674	674	456
	Produksi (Ton)	253	216	233	233	120
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,65	0,57	0,35	0,35	0,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit, karet dan kakao antara lain:

- kurangnya pemeliharaan;
- berkurangnya Tanaman Menghasilkan (TM);
- bertambahnya jumlah Tanaman Rusak (TR).

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao antara lain:

- peningkatan pemeliharaan dan melaksanakan *replanting* (menanam kembali) untuk semua komoditi perkebunan;
- peningkatan penerapan anjuran teknologi budidaya yang baik;
- perluasan areal penanaman; dan
- peningkatan penyuluhan kepada petani.

3) Peternakan

Populasi hewan ternak utama di Kota Subulussalam mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Tercatat pada tahun 2020 jumlah populasi ternak di Kota Subulussalam mencapai 179.484 ekor. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 260.425 ekor pada tahun 2023. Populasi ternak kambing sebagian besar berada di kecamatan Rundeng, dan kecamatan Simpang Kiri sedangkan Populasi ternak domba terbesar berada di Kecamatan Rundeng dan kecamatan Longkib.

Tabel 2.74.

Populasi Ternak di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	2207	3021	3407	3344	3410
2	Kambing	5330	8766	4765	9810	9845
3	Kerbau	225	184	163	246	250
4	Domba	2108	2602	1494	1872	1900
5	Ayam Kampung	53524	134541	8328	7348	-
6	Ayam Pedaging	33896	159058	263000	233000	239000
7	Ayam Petelur	60792	11380	1000	2500	-
8	Itik	21402	1904	1696	2305	1715
Total		179484	321456	283853	260425	256120

Sumber : Distanbunkan Kota Subulussalam, 2024

Usaha peternakan secara umum sampai saat ini merupakan usaha sampingan/usaha rumah tangga, terutama pada ternak besar seperti sapi dan kerbau, sehingga produksi dan produktivitasnya masih dikategorikan rendah. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak (kecil dan besar) antara lain:

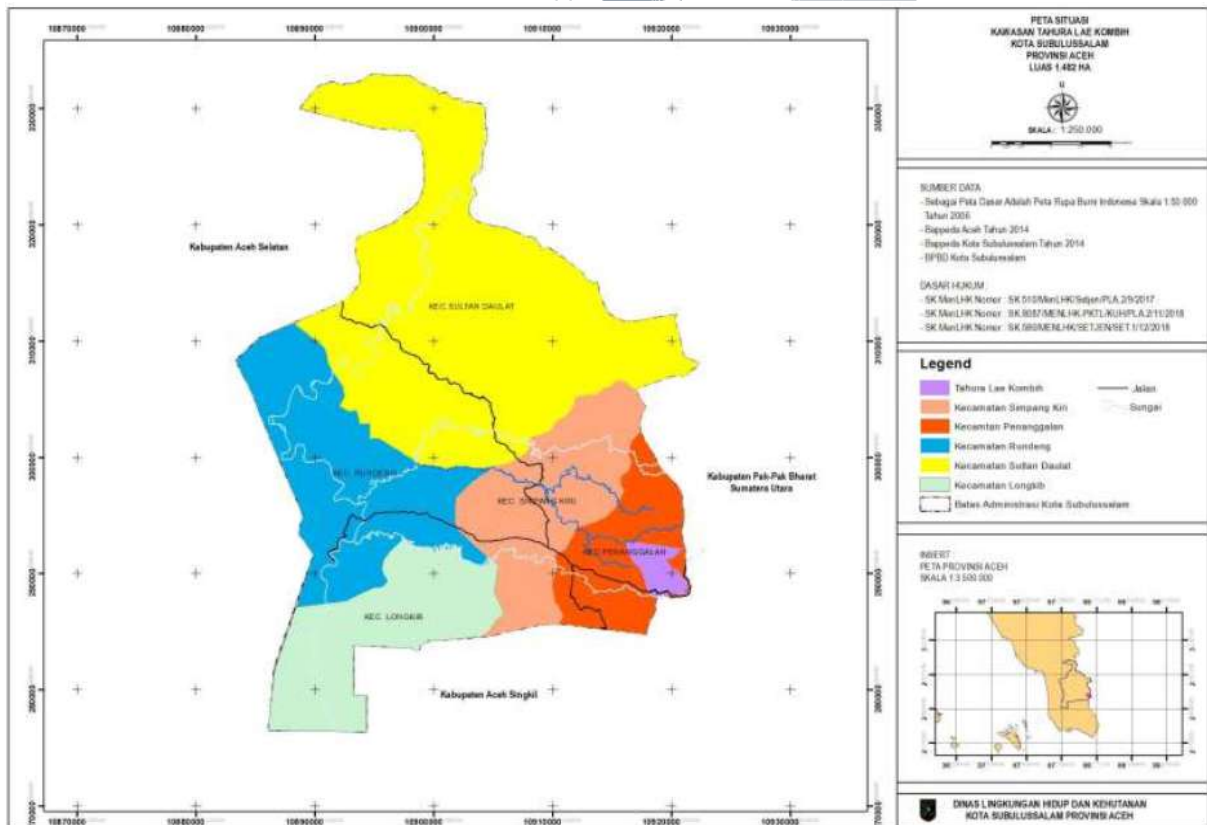
- peningkatan populasi ternak; dan
- pengembangan kawasan peternakan terpadu.

2.4.4.27. Bidang Urusan Kehutanan

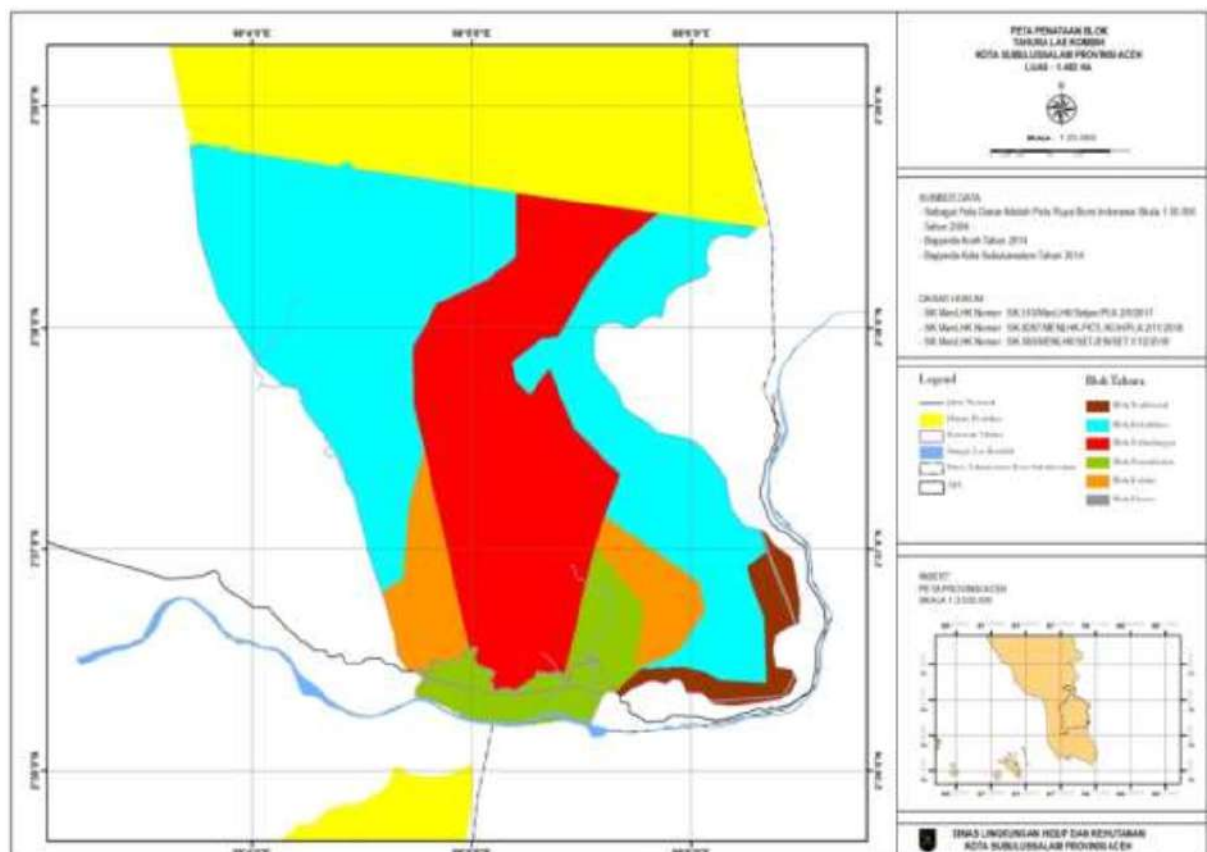
Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) Lae Kombih terletak pada 02°36' - 02°38' Lintang Utara (LU) dan 98°04' - 98°06' Bujur Timur (BT). Lokasi TAHURA secara administratif terletak di Kecamatan Penanggalan di 2 (dua) desa/kelurahan yaitu Jontor dan Lae Ikan. Lokasi areal Taman Hutan Raya (TAHURA) Lae Kombih seluas 1.482 (Seribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua) Hektar.

Tujuan pengelolaan sebagai berikut :

- Mempertahankan Tegakan Pohon Kapur (*Dryobalanops aromatica*);
- Meningkatkan penerimaan sektor wisata alam dalam kontribusi PAD.



Gambar 2.119.
Peta Kawasan TAHURA Lae Kombih



Gambar 2.120.
Peta Blok Kawasan TAHURA Lae Kombih

TAHURA Lae Kombih yang luasnya 1.482 ha tersebut dibagi ke dalam beberapa blok yakni :

- 1) Blok Perlindungan;
- 2) Blok Rehabilitasi;
- 3) Blok Khusus;
- 4) Blok Pemanfaatan;
- 5) Blok Koleksi; dan
- 6) Blok Tradisional

2.4.4.28. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah memadai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Subulussalam selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Listrik (KWH)	45.576.112	45.576.112	48.257.186	48.257.186	4.754.068
Konsumsi Listrik (KWH)	42.901.111	42.901.111	44.996.204	44.996.204	4.413.492
Rasio	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2024

Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah kebutuhan energi listrik Kota Subulussalam pada tahun 2020 sebesar 42.901.111 KWh dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 44.996.204 KWh. Penyebab bertambahnya kebutuhan energi listrik ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pelayanan sosial, bisnis, industri, kantor pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bila mencermati ketersediaan daya listrik yang ada, maka di perkirakan pada tahun-tahun mendatang produksi listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi listrik seluruh Kota Subulussalam, dengan asumsi bahwa semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya tumbuh usaha-usaha industri terbaru yang sangat membutuhkan energi listrik, jadi ini

merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah Kota Subulussalam Ke depan.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi krisis daya listrik antara lain:

- a. mencari alternatif lain dalam hal pemenuhan ketersediaan daya listrik daerah;
 - b. koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Subulussalam;
- mencari investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam pada sektor kelistrikan.

2.4.4.29. Bidang Urusan Perdagangan

1) Jumlah Pedagang

Peran pedagang dalam upaya mempercepat ekonomi sangat penting dikarenakan pedagang adalah sebagai pelaku utama dalam pembangunan perdagangan di suatu daerah. Semakin banyak dan beragamnya aktivitas perdagangan pada suatu daerah semakin membuka peluang penciptaan lapangan usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut disajikan dalam tabel jumlah pedagang besar, menengah dan kecil di setiap Kecamatan di Kota Subulussalam.

Jumlah pedagang di Kota Subulussalam didominasi oleh pedagang kecil yakni sebesar 85,82 persen dari keseluruhan pedagang di Kota Subulussalam dan secara sebarannya berpusat di Ibukota Subulussalam. Sebagian besar pedagang berada di ibukota (Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan), yaitu mencapai 60,58 persen. Adapun sebaran pedagang di Kota Subulussalam Tahun 2023 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.76.

Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2024

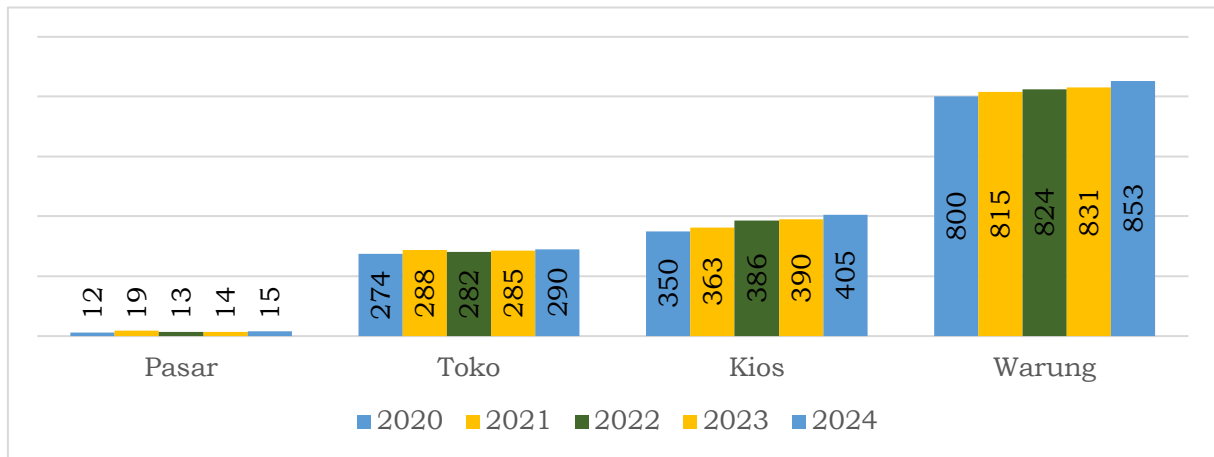
Kecamatan	Pedagang Besar (org)	Pedagang Menengah (org)	Pedagang Kecil (org)	Jumlah
Simpang Kiri	49	93	625	767
Penanggalan	18	20	220	258
Rundeng	7	14	167	188
Sultan daulat	8	20	310	338
Longkib	3	8	130	141
Jumlah	85	160	1452	1692
Persentase (%)	5,02	9,46	85,82	100,00

Sumber : Disperindagkop & UKM Kota Subulussalam, 2025

2) Jumlah Sarana Perdagangan

Perdagangan di Kota Subulussalam di dukung dengan sarana prasarana seperti pasar umum, pasar desa dan pasar modern. Adanya peningkatan jumlah

sarana perdagangan di Kota Subulussalam sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi di Kota Subulussalam khususnya di sektor perdagangan sangat baik perkembangannya, dan ini akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



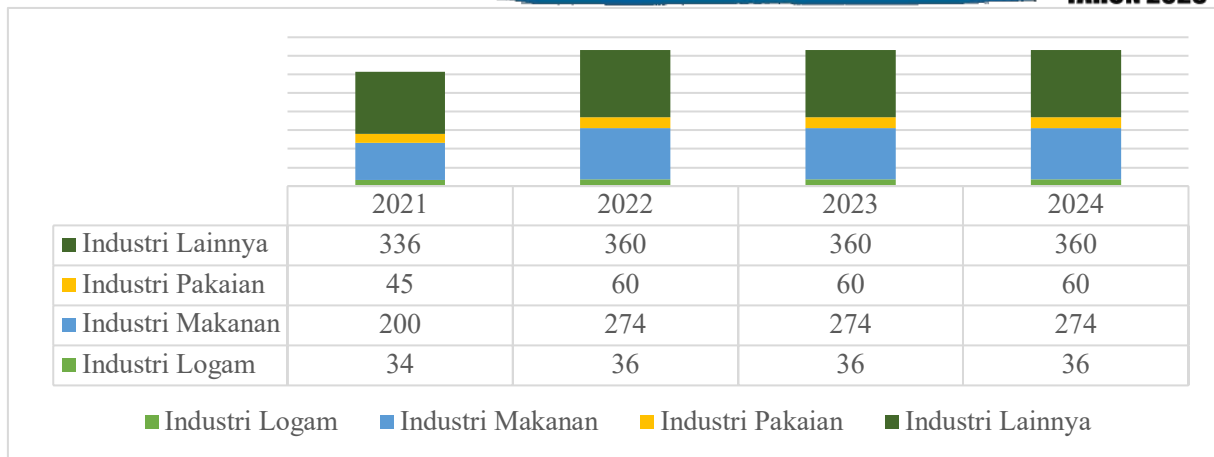
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2025

Gambar 2.121.
Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

2.4.4.30. Bidang Urusan Perindustrian

Potensi industri di Kota Subulussalam secara keseluruhan di tahun 2024 berjumlah 730 unit usaha, yang terdiri dari industri dalam skala kecil sampai besar. Kehadiran industri secara langsung juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Berikut ditampilkan beberapa jenis industri di Kota Subulussalam.

Pertumbuhan sektor industri di Kota Subulussalam sangat cepat. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah industri yang beroperasi di Kota Subulussalam terus bertambah bahkan mencapai dua kali lipat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pertumbuhan ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan sektor industri melalui pembinaan para pelaku usaha industri (hulu dan hilir) khususnya industri kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk kelompok-kelompok industri binaan pemerintah.



Sumber : BPS Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.122.
Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kota Subulussalam
Tahun 2021-2024

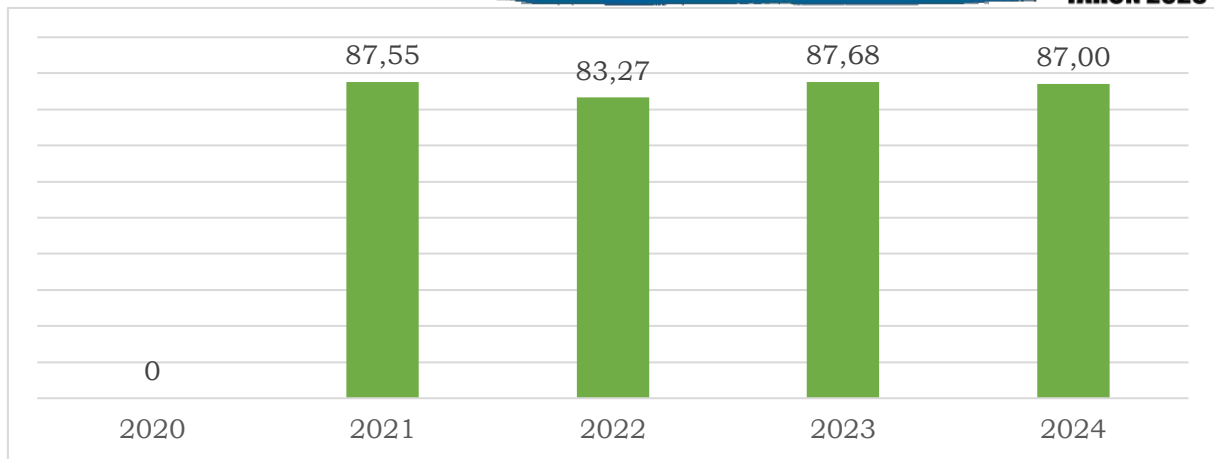
2.4.4.31. Bidang Urusan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Jumlah transmigrasi lokal di Kota Subulussalam sampai pada tahun 2024 berjumlah 7 kelompok transmigrasi.

2.4.4.32. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

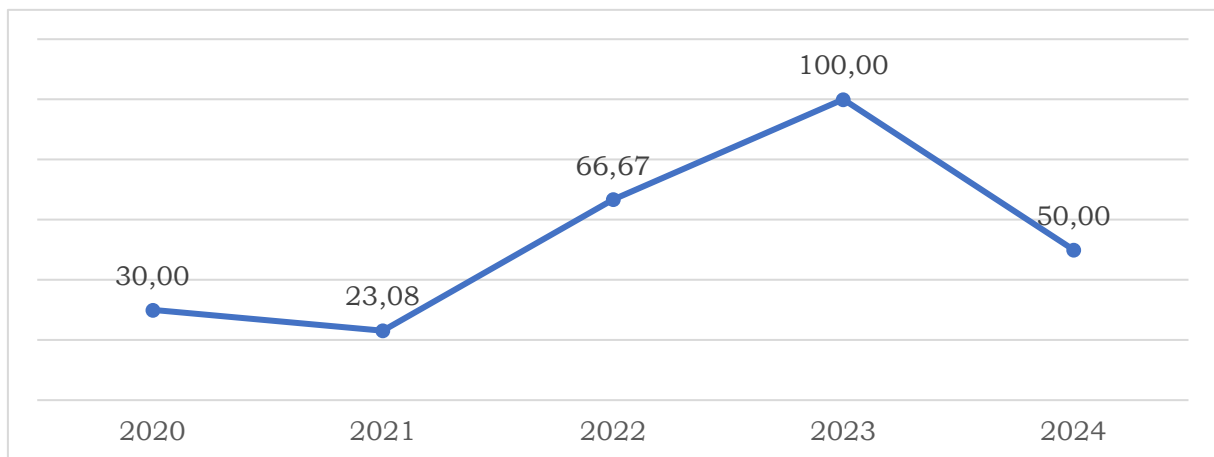
Kepuasan masyarakat di Kota Subulussalam mengalami berada di atas angka 80,00 dari interval 100,00, artinya terdapat 8 dari 10 orang yang puas dengan pengelolaan pemerintahan di Kota Subulussalam tahun 2020-2024. Data dari Sekretariat Daerah Kota Subulussalam menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 87,00 atau kategori “Baik”.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.123.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.33. Bidang Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Sumber : Sekretariat DPRK Subulussalam, 2025

Gambar 2.124.
Persentase Qanun Kota Subulussalam yang Disahkan Tahun 2020-2024

Persentase qanun yang disahkan paling tinggi pada tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Semua rancangan qanun disahkan pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024, kembali menurun pengesahan qanun menjadi 50 persen dari total rancangan qanun.

2.4.4.34. Bidang Urusan Perencanaan

1) Konsistensi Program

Adapun tingkat konsisten adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat konsistensi program RPJMD ke Renstra mengalami fluktuasi setiap tahun. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,30 persen. Pada tahun 2024, tingkat inkonsistensi sebesar 1,80 persen.
- b. Tingkat inkonsistensi program RPJMD ke RKPK juga mengalami inkonsistensi. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,70 persen dan tingkat inkonsistensi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,61 persen.
- c. Tingkat inkonsistensi program RPJMD ke RKPK juga mengalami inkonsistensi. Tingkat inkonsistensi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 4,82 persen dan tingkat inkonsistensi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,60 persen.
- d. Tingkat inkonsistensi dokumen perencanaan ke dokumen penganggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,94 persen. Sedangkan tingkat inkonsistensi terendah sebesar 1,26 persen.

Tabel 2.77.
Konsistensi RPJMD dengan Renstra, RKPK, Perubahan Renstra dan Perubahan RKPK Tahun 2021-2024

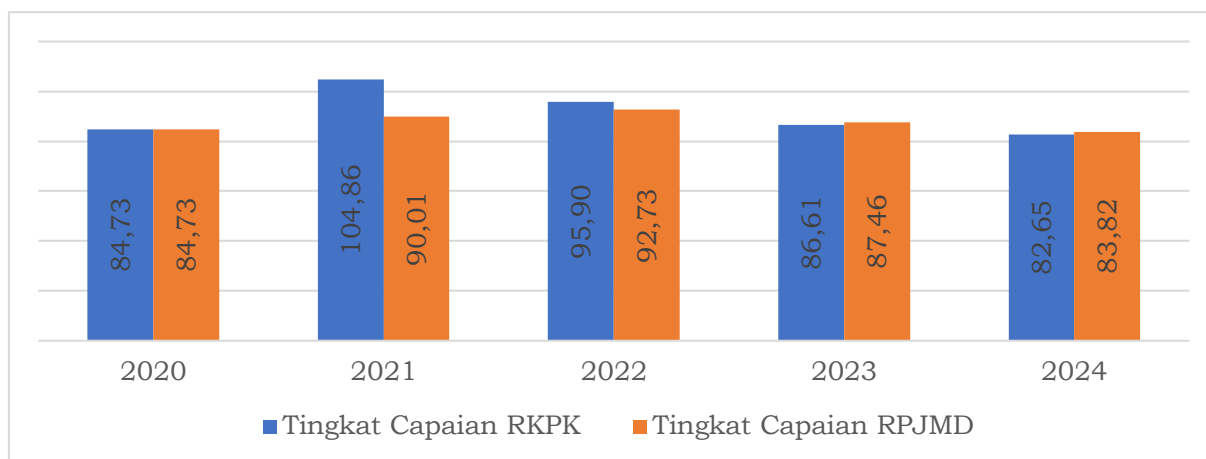
Tahun	Dokumen Perencanaan	Jumlah	Dokumen Perencanaan	Konsisten		Tidak Konsisten	
				Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
2021	RPJMD	185	Renstra	171	98,84	2	1,16
			RKPK	162	97,01	5	2,99
			Perubahan RKPK	154	97,47	4	2,53
2022	RPJMD	185	Renstra	176	96,70	6	3,30
			RKPK	150	96,77	5	3,23
			Perubahan RKPK	151	96,79	5	3,21
2023	Perubahan RPJMD	172	Perubahan Renstra	166	98,81	2	1,19
			RKPK	163	99,39	1	0,61
			Perubahan RKPK	165	99,40	1	0,60
2024	Perubahan RPJMD	172	Renstra	164	98,20	3	1,80
			RKPK	156	96,30	6	3,70
			Perubahan RKPK	158	95,18	8	4,82

Tabel 2.78.
Konsistensi RKPD/Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS/KUPA-PPPAS Tahun 2021-2024

Tahun	Dokumen Perencanaan	Jumlah	Dokumen Perencanaan	Konsisten		Tidak Konsisten	
				Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
2021	RKPK	167	KUA-PPAS	165	98,21	3	1,79
2022	RKPK	155	KUA-PPAS	154	95,06	8	4,94
2023	RKPK	164	KUA-PPAS	161	98,17	3	1,83
2024	RKPK	162	KUA-PPAS	157	98,74	2	1,26

2) Capaian Kinerja RKPK dan RPJMD

Capaian kinerja program RKPK mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024. Capaian tertinggi pada tahun 2020, yaitu 84,73 persen. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 86,61 persen. Capaian kinerja RPJMD juga mengalami penurunan pada tahun 2024, yaitu 83,82 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu 84,73 persen. Penurunan capaian kinerja dapat disebabkan oleh beban defisit anggaran.



Gambar 2.125.
Capaian Kinerja Program RKPK dan RPJMD 2020-2024

2.4.4.35. Bidang Urusan Keuangan

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

IPKD Kota Subulussalam mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2021-2022, IPKD Kota Subulussalam berkategori B atau Perlu Perbaikan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi C atau Sangat Perlu Perbaikan.

Tabel 2.79.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	NA	62,2076	70,5588	59,8902	NA
Kategori	NA	B / Perlu Perbaikan	B / Perlu Perbaikan	C / Sangat Perlu Perbaikan	NA

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam, 2024

2) Opini BPK

Gambaran umum pengelolaan keuangan dan aset Kota Subulussalam sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan

keuangan di Kota Subulussalam yang pada masuk ke dalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2020-2024.

3) Penetapan APBK

Penetapan APBK Subulussalam hanya tepat waktu pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kota Subulussalam, terutama tahun 2024 yang ditetapkan pada Maret 2024.

Tabel 2.80.
Penetapan APBK Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBK	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu

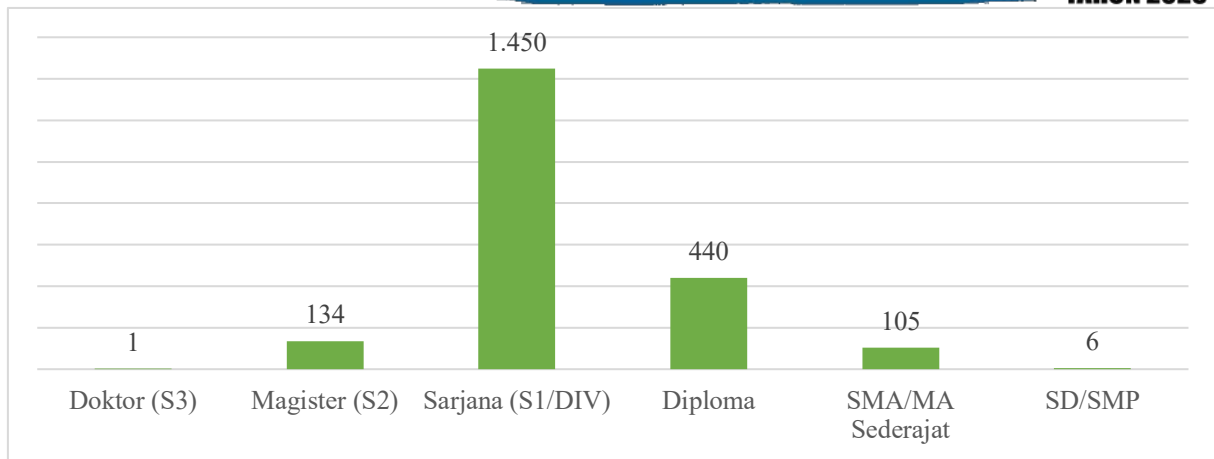
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam, 2024

2.4.4.36. Bidang Urusan Kepegawaian

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Kota Subulussalam yang memiliki belum banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.

1) Tingkat Pendidikan ASN Kota Subulussalam

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*). Kondisi aparatur sipil negara di Pemerintahan Kota Subulussalam dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Subulussalam, 2025

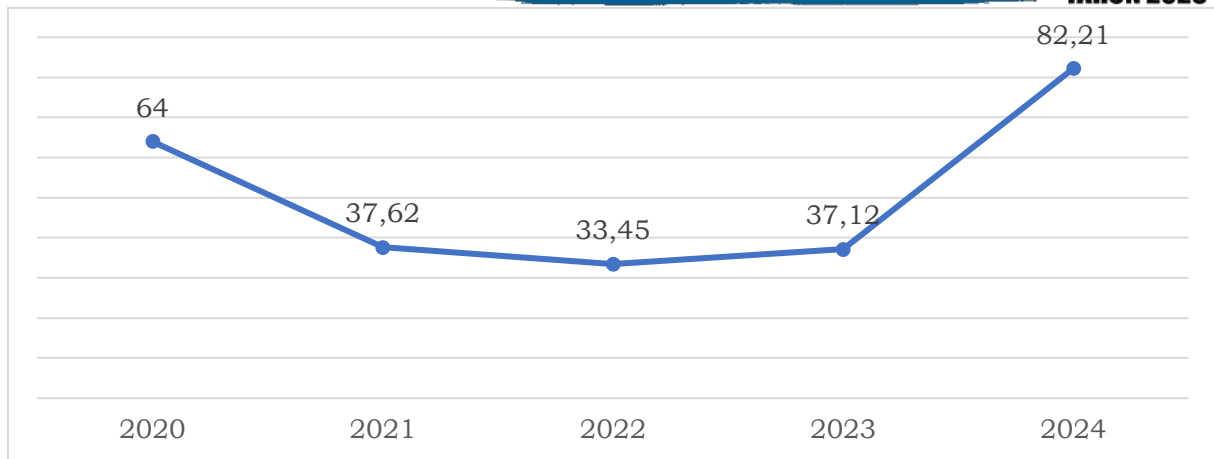
Gambar 2.126.
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2024

Secara kuantitas dapat dilakukan dengan menambah jumlah aparatur sipil negara jika memang dibutuhkan demi mencapai kondisi ideal, dan secara kualitas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara. Secara umum ada dua hal pokok yang merupakan pelaksanaan dari fungsi Manajemen ASN yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK meliputi penyusunan dan penetapan formasi/kebutuhan PNS, pengadaan, pemberian kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, pengembangan karier, penetapan sistim pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan terhadap pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

2) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesional ASN mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam sebesar 64, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 82,21.

Rendahnya pengembangan kapasitas ASN, sistem meritokrasi yang tidak sesuai dengan kinerja, ketimpangan beban administrasi, fasilitas dan teknologi pekerjaan, dan invensi dan inovasi menjadi faktor rendahnya pencapaian IPASN.



Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2024

Gambar 2.127.
Indeks Profesionalitas ASN Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.37. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Hingga 2024, hanya 5 orang yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang eselonnya. Kelima tersebut mengikuti diklat PIM II.

Tabel 2.81.
Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon (Orang)	2	2	2	2	5

Sumber : BKPSDM Kota Subulussalam, 2025

2.4.4.38. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Produk Pengembangan

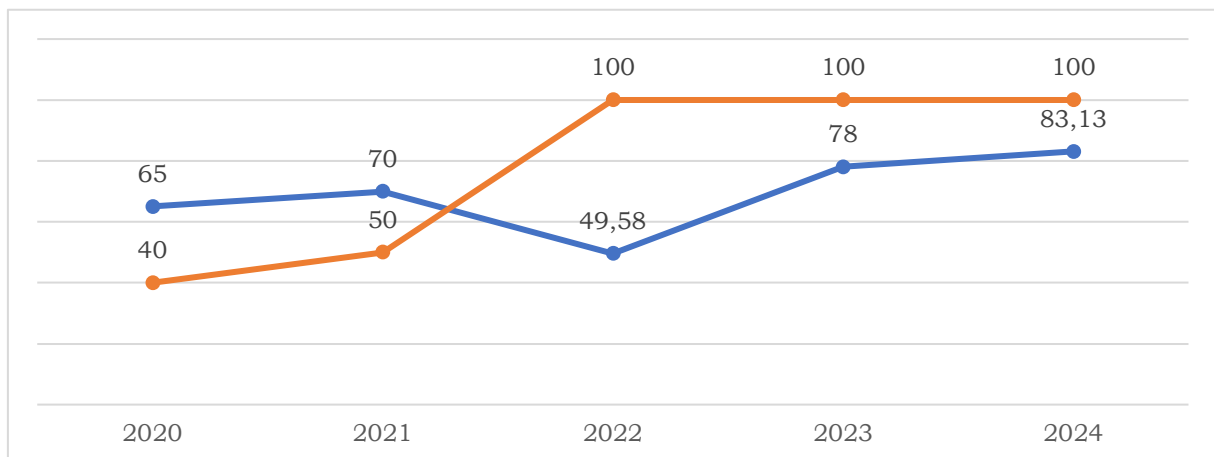
Adapun beberapa produk pengembangan pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA atau Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan) <Tahun 2024>;
- Penjaringan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Subulussalam <Tahun 2024>;
- Determination of characteristics of stunting risk families in Subulussalam, Aceh in 2022 using k-modes cluster analysis* <Tahun 2024>;
- Perbandingan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun 2021 Dan Tahun 2022 Berdasarkan Indeks Komposit Desa/Kampung <Tahun 2023>;
- Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) <2022>;

- f. Perbandingan kinerja indikator makro Kota Subulussalam dengan kabupaten tetangga <Tahun 2022>;
- g. Kajian capaian indikator makro pembangunan Kota Subulussalam tahun 2015-2020 <Tahun 2021>.

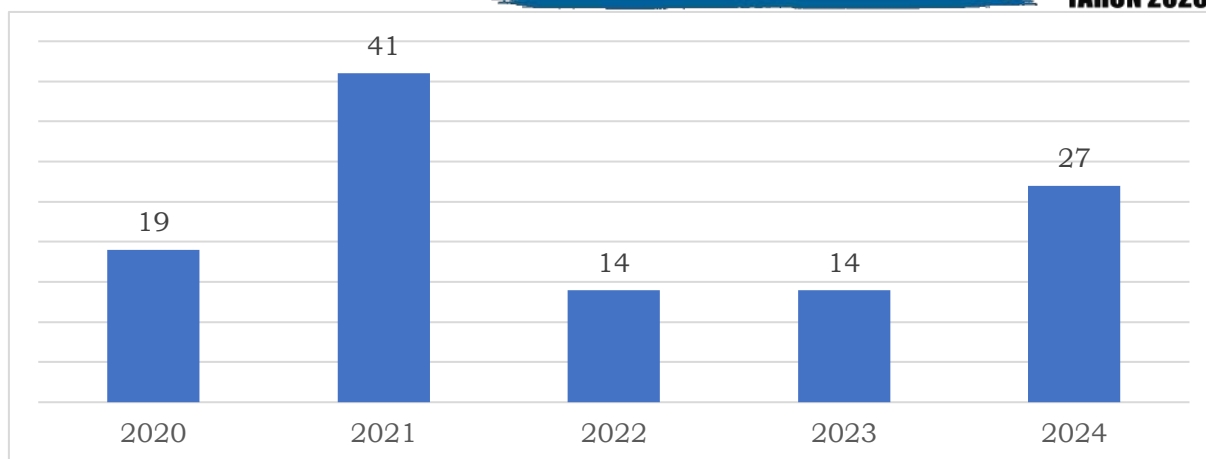
2.4.4.39. Fokus Layanan Urusan Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.



Gambar 2.128.
Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Penanganan Pengaduan Oleh Masyarakat di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Jumlah temuan BPK di Kota Subulussalam menurun sejak tahun 2020-2024. Tahun 2020 sebanyak 19 kasus, meningkat hingga tahun 2024, yaitu 23 kasus. Angka ini merupakan capaian yang sangat baik terhadap penurunan angka temuan BPK. Namun, persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal, yaitu hanya 83,13 persen.



Gambar 2.129.
Jumlah Temuan BPK di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.4.4.40. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Kecamatan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Subulussalam berdasarkan kecamatan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020-2022, IDM Kota Subulussalam tergolong Berkembang. Lalu pada tahun 2023-2024 tergolong Maju. Pada tahun 2024, terdapat 2 kecamatan yang tergolong Berkembang, yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Sultan Daulat, 2 kecamatan Maju, yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib, serta 1 kecamatan Mandiri yaitu Kecamatan Simpang Kiri.

Tabel 2.82.
Indeks Desa Membangun Kota Subulussalam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Simpang Kiri	0,6698 / Berkembang	0,6726 / Berkembang	0,7248 / Maju	0,81170 / Maju	0,8629 / Mandiri
Penanggalan	0,6711 / Berkembang	0,6728 / Berkembang	0,7539 / Maju	0,79259 / Maju	0,7907 / Maju
Longkib	NA	0,5591 / Tertinggal	0,5877 / Tertinggal	0,72895 / Maju	0,7385 / Maju
Rundeng	0,5775 / Tertinggal	0,5728 / Tertinggal	0,6018 / Berkembang	0,65380 / Berkembang	0,6740 / Berkembang
Sultan Daulat	0,6000 / Berkembang	0,5998 / Berkembang	0,6076 / Berkembang	0,64318 / Berkembang	0,6599 / Berkembang
Subulussalam	0,6143 / Berkembang	0,6139 / Berkembang	0,6510 / Berkembang	0,7152 / Maju	0,7363 / Maju

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2024

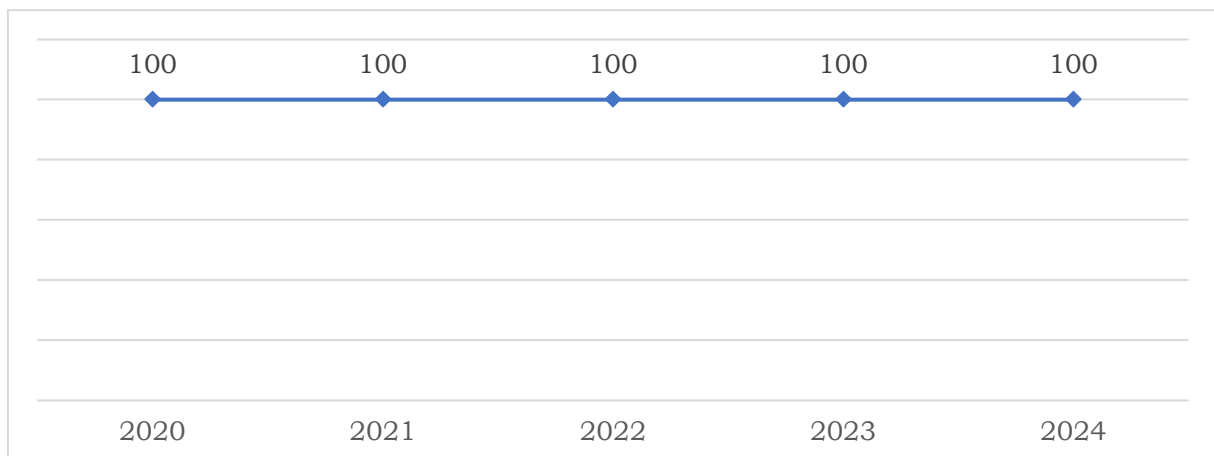
Desa mandiri di Kota Subulussalam sebesar 23,17 persen atau 19 dari 82 kampung. Masih terdapat 4,88 persen atau 4 dari 82 kampung tergolong tertinggal dan 1 kampung sangat tertinggal. Beberapa kampung yang tergolong tertinggal ini disebabkan:

- a. Ekonomi kampung yang lemah
- b. Keterbatasan infrastruktur dasar di kampung
- c. Sumber daya manusia (SDM) yang rendah
- d. Tata kelola pemerintahan kampung yang kurang baik
- e. Akses teknologi dan informasi yang terbatas
- f. Faktor geografis dan bencana alam
- g. Kurangnya partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah kota dalam pembangunan.

2.4.4.41. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persentase Penyelesaian Potensi Konflik

Persentase penyelesaian potensi konflik di Kota Subulussalam mencapai 100,00 persen, terutama potensi konflik yang diakibatkan oleh SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan) dan potensi akibat pemilu dan pilkada.



Gambar 2.130.
Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Kota Subulussalam
Tahun 2020-2024

b. Daftar Organisasi Masyarakat

Daftar organisasi masyarakat (ormas) di Kota Subulussalam berfluktuatif setiap tahun. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 68 ormas yang masih aktif di Kota Subulussalam berdasarkan masa aktif SKT.

Tabel 2.83.
Daftar Organisasi Masyarakat di Kota Subulussalam

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	LEMBAGA PEMERHATI SUKU SINGKIL (LPS2)	0117-00-00/046/III/2020	9 Maret 2020	9 Maret 2025				Jl. Pertemuan Dusun Sejahtera Kampong Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
2	PERSADAAN MERGA SILIMA (PMS) KOTA SUBULUSSALAM	0117-00-00/236/XI/2020	20 November 2020	20 November 2025	Ridwan Saragih	Chandra Kaban, A.Md.	Hasnah Karo-Karo	Jl. Syech Hamzah Fansuri desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
3	KOMUNITAS MAHASISWA PELAJAR PEDULI KOTA SUBULUSSALAM (KOMAPPSU)	0117-00-00/032/II/2021	2 Februari 2021	2 Februari 2026	Safi'I Ozi Sareji	Nur'Ani Ramadhani	Munawira nti Cibro	Jl. Teuku Umar Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
4	PENGURUS BESAR GERAKAN ANAK SUBULUSSALAM	011-00-00/0103/IV/2021	15 April 2021	15 April 2026	M. Sandi Angkat	M. Syababum Mubasyira. AR	Fatma Suri	Gang Padang, Kampong Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
5	ALIANSI MASYARAKAT PEDULI KOTA SUBULUSSALAM (LSM-AMPES)	0117-00-00/0125/V/2021	07 Mei 2021	07 Mei 2026	Justri Iskandar Berutu	M. Khadafi Cibro	Ahmadi Bacin	Jl. R. Usman Bacin Kampong Penanggalan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
6	PIMPINAN DAERAH PERSAUDARAAN MUSLIMAH KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0061806.01.07 Tahun 2016	26 Juli 2022	26 Juli 2026	Sayuti Lingga, S.Pd	Rika Puspa Gurusinga, S.Sos	Hotmariyani Tinendung, S.Pd	Dusun Surau Kampong Suka Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
7	DPC LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA (LAKI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0071017.AH.01.07 Tahun 2016	16 November 2021	16 November 2025	Ahmad Rambe	Marzuki K	Ahmad Yani	Jln. T.Umar Kampung Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
8	ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0009810.AH.01.07 Tahun 2018			Irwan Faisal, SH	Irwan Rahim	Safran, SE	Jl. Syech Hamzan Fansuri Kampung Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
9	PERKUMPULAN LSM GMBI (GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA)	AHU-0060294.AH.01.07 Tahun 2016	18 Oktober 2021	18 Oktober 2025	Tamren	Malim Sabar	Darmin Tinambun an	Jln. T. Umar Kampung Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
10	DPD LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KOROPSI NUSANTARA (LP TIPIKOR NUSANTARA) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0008140.AH.01.07 Tahun 2016	23 Juli 2021	23 Juli 2025	Hasan Gurinci	Putra Nasrulah	Sopiyan Ujung	Jl. Raja Asal Gang Sahabat Kampung Belegen Muliya Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
11	IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0009554-AH.01.07. Tahun 2017	22 September 2022	22 September 2027	Satria Tumangger	Juliadi	Salman	Jl. Raja Tua Kampung Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
12	PENGURUS DAERAH PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PD PARMUSI)	AHU-0018122.AH.01.07. Tahun 2017	10 Februari 2021	10 Februari 2025	Sudirman	Darni T	Junaidi Berutu	Jl. Syech Hamzah Fansuri No. 475 Dusun Pelita Kampung Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kota Subulussalam
13	PENGURUS BEDENG PUSAT PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL (PBD-DPN PERKASA) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0005715.AH.01.07. Tahun 2019			Hasbullah, SKM.M.K. M	Syafriandi, S.Pd	Hasanudin, SH	Kampung Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
14	PERKUMPULAN GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL (GANN) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0008527.AH.01.07.Tahun 2017	03 Maret 2021	03 Maret 2025	Muhamma d Rizal	Ahmad Angkat	Sarifudin, A.md	Jln. Syekh Hamza Fansyuri Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
15	PERKUMPULAN INSPIRASI KELUARGA ANTI NARKOBA (IKAN)	AHU-0004211.AH.01.07. Tahun 2020	17 Maret 2021	17 Maret 2025	Sedang Angkat, SE	Aswandi, S.Sos	Ulan Suci Maresa, SE	Kampung Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
16	PERKUMPULAN SATUAN SISWA PELAJAR MAHASISWA (SAPMA) PEMUDA PANCASILA	AHU-0000555.AH.01.08. Tahun 2020	18 Maret 2021	18 Maret 2025	Erwinsyah Putra Berutu	Mustaqim Hutabarat	Ani Souryani Dwi Martha	Jl. Teuku Umar Kampung Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
17	PERKUMPULAN BADAN PENELITIAN INDEPENDEN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PENGAWAS ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA	AHU-0000263.AH.01.07. Tahun 2015	30 Maret 2021	30 Maret 2025	Asrul Indra	Muhammad Daud Sitorus	Hartika Yusnan, SS	Jl. Nyak Adam Kamil Gang Prima Kampung Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
18	DPC PEMUDA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PEMUDA NKRI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0008240.AH.01.07. Tahun 2016	05 April 2021	05 April 2025	Masri Candra Wijaya	Al-Astiarti	Erwin Harianto	Dusun Sepakat Kampung Subulussalam Timur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
19	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000939.AH.01.08. TAHUN 2019	14 Juni 2021	14 Juni 2025	Antoni Berampu, S.Pd.M.Pd	Muhammad Sahwir, S.Pd	Ramawati, ST.MM	Kampung Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
20	YAYASAN PAKPAK SUAK BOANG INDONESIA	AHU-0025148.AH.01.04. Tahun 2020	06 Januari 2021	06 Januari 2025	Jamasa Cibro	Dedi Armansyah B Manalu	Suhadi, SE	Jln. Balai Budaya Pakpak Kampung Lae Oram Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
21	YAYASAN UMI AMANAH SHOLEHA (UAS) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000334.AH.01.04. Tahun 2021	03 Maret 2021	03 Maret 2025	Valana Meutia	Muhammad Rizal	Leny Fauziah	Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
22	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA)	AHU-2615.AH.01.01. Tahun 2011			Edi Sahputra, S.Sos	Kaya Alim	Mastutin, SH	Jln. T. Umar Kampung Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
23	YAYASAN PENDIDIKAN ASSILMI KOTA SUBULUSSALAM	AHU-8531.AH.01.04. Tahun 2011			H. Ismalik K, S.Pd	Saiban Gafar	Drs. Salmaza	Jln. T. Umar No. 17 Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
24	YAYASAN ABDUL KHALIK FAJDUANI	AHU-0004211.AH.01.07. Tahun 2017			Solikin	Syam Haris	Amarullah Sagala	Jln. Teuku Umar Desa Cepu Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
25	YAYASAN PUSAT PENELITIAN BANTUAN HUKUM KOTA SUBULUSSALAM (PPBH)	AHU-0013968.AH.01.04.Tahun 2020			M. Safrijal Bako	azmi, sh	Ahmad Efendi Angkat	Desa Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
26	IKATAN PEMUDA SULTAN DAULAT (IKAPAS)	0117-00-00/0183/VIII/2021	20 Agustus 2021	20 Agustus 2026	Muhamma d Joni	Raswanto Sagala	Abdul Majid	Desa Jambi Baru Kec. Sultan Daulat

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kota Subulussalam
27	YAYASAN ANNISA RAIHANI				Hj. Nurmiana Alwi	Zaimi Wardana	Salmudin	Jln. Cik Diotiro Kec Simpang Kiri Kota Subulussalam
28	DPC ORGANDA KOTA SUBULUSSALAM				Sobirin Hutabarat	Zulfan Bacin, SE	Darusman, SH	Kampung Subulussalam Selatan Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam
29	DPC FEDERASI SERIKAT TRANSPORT INDONESIA (F.SPTI) KOTA SUBULUSSALAM				Rahman	Salman	Surianto Kudadiri	Jln. T.Umar No. 17 Kampung Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
30	PERKUMPULAN PENGURUS NASIONAL BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA (PN BPAN) - PD PAKPAK SUAK BOANG KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000914.AH.01.08.TAHUN 2020	18 Oktober 2021	18 Oktober 2025	Ramadahan Tinambunan	Abdul Jamai Padang	Wiwik Artika	Kamp[ong Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
31	LEMBAGA PERKUMPULAN MARGA BERASA, BERRU/BERE KOTA SUBULUSSALAM	0117-00-00/0253/XI/2021	23 November 2021	23 November 2025	Samsul Berasa	Jasdin Berasa	Layani	Kampung Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
32	PENGURUS CABANG NAHDATUL ULAMA (PCNU)	220/120/2021	20 September 2021	20 September 2025	Tgk. Maksum Ls, S.Pd.I	Tgk. Syafruddin Alyusufi	Tgk. Tarmizi Sijabat	Jl. Sultan Daulat Kampung Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
33	DPD PERKUMPULAN JURNALIS INDONESIA DEMOKRASI NUSANTARA (PJID-Nusantara)	AHU-0007430.AH.01.07 TAHUN 2021	02 Desember 2021	02 Desember 2025	Antoni Tinendang	M. Yantoro	Malim Sabar	Kampung Suka Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
34	DPC BREGADE ANAK SERDADU KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000788.AH.01.07 TAHUN 2019	27 Desember 2021	27 Desember 2025	Syahbudin Padang	Alina Ujung	M. Nasir Lingga	Jln. Teuku Umar No. 106 Dusun Singa

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kampung Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
35	PIMPINAN DAERAH PERHIMPUNAN REMAJA MASJID DEWAN MASJID INDONESIA (PRIMA-DMI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0001070.AH.01.08 TAHUN 2019	28 Desember 2021	28 Desember 2025	Liza Anhar Efendi	Siti Nurjanah, S.Pd	Jaimansyah, SH	Dusun Pinagar Kampung Dah Kec. Rundeng Kota Subulussalam
36	DPC GRAHANA TRI MATRA (GAT) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-2838.AH.01.04 TAHUN 2013	03 Januari 2021	03 Januari 2025	Syahputra Bacin	Safda Bacin	Laila Sinaga	Jln. Teuku Umar Kampung Penanggalan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
37	DPW FORUM KERUKUNAN ANAK BANGSA (FORKAB) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0013729.AH.01.07.TAHUN 2021	18 Januari 2022	18 Januari 2026	M. Ali Hasbullah	Zulkifli	Nova Rissa	Jln. Nyak Adam Kamil Dusun Anshor Kampung Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
38	YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0007149.AH.01.12.TAHUN 2019	18 Januari 2022	18 Januari 2026	Munandar	Alkausarni	Indra Mudaris	Jln. Teuku Umar No. 347 Kampung Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
39	DPC PEMUDA KARYA NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0011951.AH.01.07.TAHUN 2019	24 Januari 2022	24 Januari 2026	Boss Ricki Ginasing Pinem	Robet Jabat	Fazri	Jln. Pertemuan No. 04 Kampung Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
40	DPD ORMAS PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA MAJU (MIM) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0006677.AH.01.07.TAHUN 2021	11 Maret 2022	11 Maret 2026	Kaya Alim, SH	Salmudin Kombih, ST	Azmi, SH	Kampung Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
41	PERKUMPULAN SEKOLAH SEPAK BOLA SADA KATA PERKASA (SSBSKP)	AHU-0011946.AH.01.07.TAHUN 2021	12 April 2026	12 April 2026	Syafnial, SE	Syafrizal	Rahmawati, ST	Jln. Muhammadiyah No. 133 Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
42	DPD SEKRETARIAT BERSAMA WARTAWAN INDONESIA (SWI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0007972.AH.01.07.TAHUN 2021	12 April 2022	12 April 2026	Suhendri solin	Putra Nasrulah	Muammar Khadafi. C	Kampung Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
43	DPW LSM SUARA PUTRA ACEH KOTA SUBULUSSALAM	Nomer SKT. 0115-00-00/117/IV/2020	19 April 2022	12 Juni 2025	Antoni Tinendang	Raja Uli	Salman	Jln. T. Umar, KampungTangga Besi, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
44	DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0060102.AH.01.07.TAHUN 2016	23 Juni 2022	23 Juni 2026	Siti Arniman, S.Pd.I	Dian Fitriani, S.TP	Leliati	Jln.T.Umar Kampung Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
45	DPD ORMAS PERKUMPULAN PEDANG KEADILAN PERJUANGAN KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0011379.AH.01.07.TAHUN 2019	23 Juni 2022	23 Juni 2026	Putra Nasrullah	Syamsul Bahri	Azizah	Jln. Hamza Fansyuri Dusun Rahmah Kampung Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
46	DPC HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000113.AH.01.08.TAHUN 2019	24 Juni 2022	24 Juni 2026	Tuti Afrianis Piliang, S.Pd	Rahimi Pangan, S.IP	Siti Maysyarah, ST	Jln. Cik Ditiro Kampung Persiapan Subulussalam Beringin Kec. Simpang Kiri

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kota Subulussalam
47	GERAKAN PECINTA ALAM SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM (G-PAL SULTAN DAULAT SUBULUSSALAM	Nomor SKT 0117-00-00/079/VI/2022	28 Juni 2022	28 Juni 2026	Ari Syahputra	Beni Fahrijal	Agus Rinaldi Sambo	Desa Pasir Belo Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam
48	DEWAN PENGURUS CABANG SERIKAT BURUH SEJAHTRA INDONESIA (DPC - SBSI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0001147.AH.01.08.TAHUN 2019	16 Agustus 2022	16 Agustus 2026	Ahmad Rambe	Mukaribin Pohan, SH.I	H. Ajo Irawan	Jln. T. Umar No. 169 Kampong Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
49	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000134.AH.01.08.TAHUN 2017	30 Agustus 2022	30 Agustus 2026	Asmial, S.Pd.M.Pd	Drs. Misdar	Hj. Nurbaina	Jln. T. Umar Dusun Sehati No. 123 Kampong Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
50	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (DPD LPK-GPI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0001953.AH.01.07.TAHUN 2021	06 September 2022	06 September 2026	Suparman Lb, Sip	Naswardi Lingga, SH	Nuraimah, S.Pdi	Jln. T. Umar Kampong Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
51	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SINAR NEGERIKU SADA KATA	AHU-0007835.AH.01.07.TAHUN 2022	15 Juni 2022	15 Juni 2027	Safi'I Ozi Sareji	Sudarman Padang	Buymin Manik	Kampong Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
52	PC IKATAN APOTEKER INDONESIA KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0001712.AH.01.08.TAHUN2 022	20 September 2022	20 September 2027	Apt. Munawaroh, S.Si.M.Kes	Apt. Safrina'Aisyah, S.Farm	Apt. Elliya Yusfitri, S.Farm	Dusun Pemancar Kampong Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
53	PENGAJIAN AZZIKRA SUBULURRAHMAH	0117-00-00/0125/IX/2022	23 September 2022	23 September 2027	Abdus Samad	Samsir Nazir	Mulyadi	Kompleks Pesantren Subulurrahm

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ah, Dusun Bahagia Kampung Pulo Kedep, Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam
54	HAMZAH FANSYURI CLUP KOTA SUBULUSSALAM (HFC)	0117-00-00/0128/X/2022	06 Oktober 2022	06 Oktober 2027	Jefri Husni M	Zikrymudin	Sarah Novie Fanesha	Jln. Hamza Fansuri Kampung Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam
55	LEMBAGA KARANG TARUNA SBS SELATAN	220/249/X/2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Anhar Nawawi	Rizal Manjorang	Yuni Sarah	Jln. Panglima Saman Kampung Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
56	IKATAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA SADAKATA KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0008108.AH.01.07.TAHUN 2022	11 Oktober 2022	11 Oktober 2027	Gunawan, S.Pd	Denny Julisbon, S.Hut.MM	Saidilisyah Lubis	Desa Subulussalam Timur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
57	SADA KATA MOTOR SPORT KOTA SUBULUSSALAM (SMS)	0117-00-00/0131/X/2022	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	Ahmad	Khairulsyah NST	Asnawi Hasan	Jln.Perpas, Kampung Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
58	PERKUMPULAN PERTAKI JONTOR SADA ARIH (PJSA)	AHU-0006715.AH.01.07.TAHUN 2022	09 Juni 2022	09 Juni 2027	Abdulah Berutu	Badsim Saleh Tinambunan	Haryani	Jln. T. Umar, Dusun Jihad, Desa Jontor, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam
59	DPW RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) 23 KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000704.AH.01.08.TAHUN 2022	04 Agustus 2020	04 Agustus 2025	Subangun Berutu	M.Ali Sakti	Khalidin Umar Barat	Jln. Teuku Cik Ditiro No. 16 Kampung Subulussalam Kec. Simpang

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kiri, Kota Subulussalam
60	DPD PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-133.AH.01.08.TAHUN 2015	28 Oktober 2022	28 Oktober 2027	Zulfan	Kasbar	Afrianti	Jln. Teuku Umar No. 127 Kampong Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam
61	DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI GURU AGAMA ISLAM INDONESIA (DPD AGPAII)	AHU-0000095.AH.01.08.TAHUN 2019	21 Desember 2022	21 Desember 2027	Aswin, S.Pd.I	Sri Indayani, S.Ag	Syahmiana, S.Pd.I	Jln. T. Abdullah Sani Gg. Alkausar Nomor 57 Kampong Subulussam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
62	DPD HIMPUNAN MASYARAKAT PAKPAK (HIMPAK) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0015332.AH.01.07.TAHUN 2021	29 Desember 2022	29 Desember 2027	Sahidin Berampu, sh	Khairul Booangmanal u, S.Sos	H. Sairun Ujung, S.ag	Jln. Teuku Umar Dusun Siaga Kampong Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
63	ORMAS SAHABAT TANI INDONESIA (SDT) SUBULUSSALAM	AHU-347.AH.02.01.2011	12 Juni 2024	12 Juni 2029	Tamrin	Farida Solin	H. Anwar Dedeh Bacin	Dusun Mekem Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
64	DPW PETANI DAN NELAYAN (PENA) PUJAKESUMA PROVINSI ACEH	AHU-0000405.AH.01.08.TAHUN 2022	19 Juli 2024	19 Juli 2029	Habibullah Hakim	Rubiat	Edi Suprianto	Jln. Cut Nyak Dhien, Kampog Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
65	DPC PERSATUAN WARTAWAN REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-00692.60.10.2014	25 Juli 2024	25 Juli 2029				Jl. Teuku Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Nama Ormas	NO. SKT / BADAN HUKUM	Tanggal Berlaku SKT	Tanggal Berakhir SKT	Nama Pengurus Organisasi			ALAMAT
					Ketua	Sekretaris	Bendahara	
66	DPC CENDIKIAWAN ANAK PAHLAWAN (CAPA) Kota Subulussalam	AHU-0002557.AH.01.07. Tahun 2020	24 Oktober 2024	24 Oktober 2025	Salman	Erwin Kombih	Jusmadi	Dusun Bahorok Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
67	DPD PAGUYUBAN KELUARGA BESAR PUJAKESUMA KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0000405.AH.01.08 Tahun 2022	24 Februari 2024	24 Februari 2029				Jl. Nyak Adam Kamil Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
68	DPC PERSATUAN PEMUDA JAWA (PENDAWA) KOTA SUBULUSSALAM	AHU-0003400.AH.01.07 Tahun 2021	20 Februari 2025	20 Februari 2030	Syamsirin, S.ST	Imam Gozali	Wagiman	Jl. Suka Makmur, Dusun Nangka, Kampong Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

2.4.4.42. Fokus Layanan Urusan Kekhususan**a. Syariat Islam**

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Syariat Islam telah berlaku secara sah menjadi hukum positif di Aceh sejak tahun 2002, mulai dari tahun ini sudah beberapa qanun yang di hasilkan, qanun-qanun tersebut adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Untuk menegakkan Syariat Islam dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

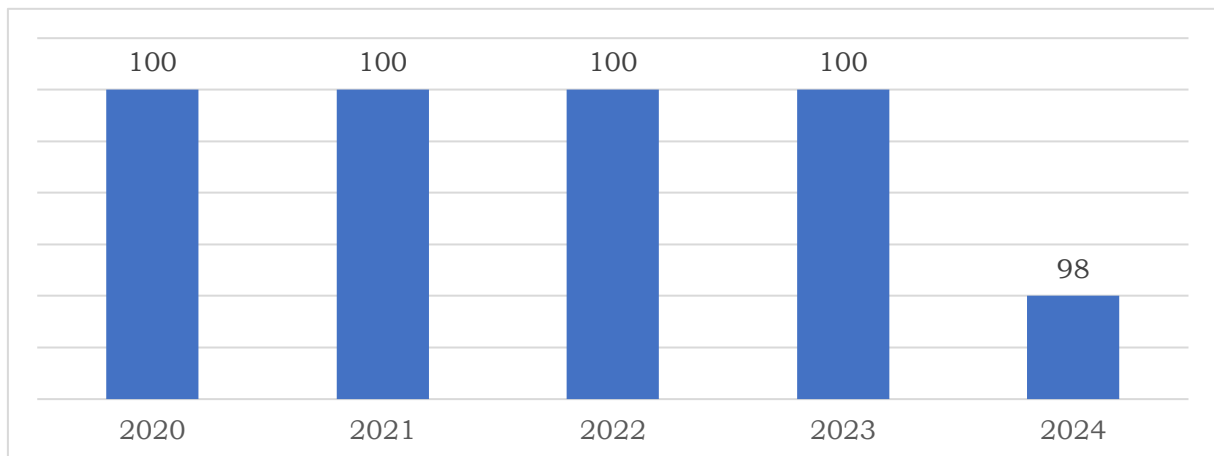
- **Menghidupkan Mesjid dan Meunasah**
Di samping menghidupkan Mesjid dan Meunasah melalui shalat jamaah, dianjurkan di setiap meunasah dan masjid diadakan pengajian untuk setiap tingkat umur, baik anak- anak dengan TPA dan TQA, maupun remaja dan orang tua. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi orang yang tinggal di Aceh tidak bisa mengaji dan tidak ada alasan tidak memahami agama Islam.
- **Pemberdayaan Zakat**
Wujud dari pemberdayaan zakat adalah terbentuknya Baitul Mal pada tingkat Kampong dan Kota. Sumber zakat pada tingkat kampong difokuskan pada hasil pertanian kampong dan usaha-usaha pada tingkat kampong, sedang sumber zakat Baitul Mal Kota adalah dari hasil perdagangan dan usaha pada tingkat Kota.
- **Lingkungan Kantor dan Sekolah yang Islami**
- **Semua orang pada pagi hari sampai siang berada di tempat kerja dan lembaga pendidikan, sehingga apa yang diprogramkan pada menghidupkan mesjid dan meunasah terpenuhi secara lengkap, maka setiap lembaga atau kantor bergabung menjadi satu dan mempunyai kewenangan yang berbeda. Wilayatul Hisbah (WH) berwenang mengawasi pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam,**

Satpol PP berwenang mengawasi Perda atau qanun non Syariat. Dalam pelaksanaan kewenangan ini di lapangan masih terjadinya benturan kewenangan, dikarenakan ada sebagian anggota dari Satpol PP dan WH belum memahami secara detail apa yang menjadi tugas mereka.

Tabel 2.84.
Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No.	Pelanggaran	Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Busana Muslim	0	0	0	0	1
2	Khamar	2	2	2	3	2
3	Maisir	0	2	2	1	3
4	Khalwat	0	0	0	0	2
Jumlah Kasus		0	2	4	4	8

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2024



Gambar 2.131.
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024

b. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi rumah ibadah berupa Mesjid dan meunasah, yang terus meningkat jumlahnya di Kota Subulussalam, ternyata belum sepenuhnya melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara berjemaah. Faktanya, masih sangat banyak Masjid dan meunasah yang tersebar dalam wilayah Kota Subulussalam yang belum benar-benar rutin melaksanakan salat berjemaah lima waktu, kebanyakan hanya melaksanakan salat berjemaah Magrib dan Isya serta pelaksanaan salat jemaah Jumat.

- **Penyelenggaraan Kehidupan Adat**

Dalam masyarakat Kota Subulussalam sebagai bagian dari masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari

para pemimpin dan para pengambil kebijakan terdahulu guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Kota Subulussalam, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan sebagai adat atau hukum adat haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat atau hukum adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Subulussalam sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

- **Penyelenggaraan Pendidikan**

Upaya Kota Subulussalam meningkatkan pendidikan Islami melalui dayah sudah membudaya, sehingga meskipun saat ini Kota Subulussalam memiliki lembaga pendidikan Formal, namun minat masyarakat Kota Subulussalam tetap tinggi untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala- gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Tabel 2.85.

Jumlah Masjid Dan Meunasah Dalam Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

No.	Kecamatan	Masjid dan Menasah/Mushalla	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Simpang Kiri	Masjid Agung	1	1	1	1	1
		Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	23	24	26	26	26
		Mushalla	17	52	53	53	53
2	Penanggalan	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	15	14	14	14	14
		Mushalla	16	32	33	33	33
3	Rundeng	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	22	24	24	24	24
		Mushalla	14	6	6	6	6
4	Sultan Dulat	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	19	19	19	19	19
		Meunasah	24	17	17	17	17
5	Longkib	Masjid Jami'i	1	1	1	1	1
		Masjid Biasa	14	14	14	14	14
		Mushalla	9	9	9	9	9
Jumlah Masjid			99	99	99	101	101
Jumlah Mushalla dan Meunasah			80	80	80	116	116
Jumlah Masjid/Mushalla			179	217	221	221	221

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2024

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah kebutuhan, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama Islam.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Capaian standar pelayanan minimal (SPM) Kota Subulussalam meningkat sejak tahun 2020. Peningkatan SPM ini tentunya dengan meningkatnya ketersediaan data yang disajikan pada *website* pelaporan SPM. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan SPM di Kota Subulussalam adalah:

- a. Pelayanan kesehatan yang belum memadai seperti fasilitas kesehatan tidak merata, SDM kesehatan yang tidak ideal, serta belum maksimalnya pelayanan kesehatan dasar
- b. Pendidikan yang kurang berkualitas seperti pemerataan guru, infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang tidak merata dan kurang bagus, tingkat partisipasi sekolah yang rendah, serta minimnya akses pendidikan inklusif
- c. Air bersih dan sanitasi
- d. Pelayanan terhadap korban bencana dan korban dampak program pemerintah
- e. Infrastruktur dasar yang masih kurang merata
- f. Kualitas SDM pelayanan dasar
- g. Keterbatasan anggaran

Tabel 2.86.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Subulussalam berdasarkan Bidang Urusan Pelayanan

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bidang Urusan Pendidikan					99,26	99,26	
		Pendidikan Anak Usia Dini				97,78	97,78	
		Pendidikan Dasar				100,00	100,00	
		Pendidikan Kesetaraan				100,00	100,00	
2	Bidang Urusan Kesehatan		69,58	63,98	77,75	68,89	82,23	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	99,48	100,00	100,00	94,23	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	95,70	98,00	54,29	86,35	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	99,37	100,00	51,25	89,47	
		Pelayanan Kesehatan Balita	60,00	64,53	72,00	76,92	99,14	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	45,00	72,23	93,00	97,49	60,70	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60,00	18,81	44,00	72,47	34,37	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	74,00	14,57	57,00	81,06	70,55	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13,00	7,75	15,00	49,05	84,33	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	81,00	66,20	100,00	74,96	97,65	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100,00	100,00	100,00	81,38	100,00	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	59,00	57,01	96,00	20,46	100,00	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	43,00	72,10	58,00	67,40	69,95	
3	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum		73,50	51,28	81,43	57,82	51,62	
		Penyediaan kebutuhan pokok air minum	97,00	52,41	90,47	44,84	29,96	
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	50,00	50,14	72,39	70,80	73,28	
4	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat		100,00	64,80		100,00	72,50	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00			100,00	100,00	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00	64,80		100,00	45,00	
5	Urusan Pemerintah Bidang Trantibumlinmas			99,38	59,93	88,34	98,39	
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		100,00	100,00	63,50	100,00	
		Pelayanan informasi rawan bencana		100,00	100,00	93,13	100,00	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100,00	33,44	92,39	97,14	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100,00	33,11	96,00	100,00	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		96,90	33,11	96,67	94,81	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		11,11	125,50		26,67	80,64	
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	3,33	88,00		75,54	84,33	

No.	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	10,00			19,56	61,28	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		180,00		9,44	87,66	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	20,00	50,00		18,50	85,00	
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		184,00		10,33	84,94	
		KOTA SUBULUSSALAM	63,55	80,99	73,04	73,50	80,77	

2.6. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Keuangan Negara diantaranya (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan sudah diturunkan kedalam Qanun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota serta secara khusus pengelolaan keuangan pemerintah Kota Subulussalam diatur dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBK merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.6.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode Tahun 2020-2024

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi belanja daerah. Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Subulussalam tahun 2020-2024 dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pembiayaan daerah selama ini difokuskan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Aceh dan menutupi defisit belanja.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019 sampai dengan 2023 bersifat fluktuatif, Pendapatan daerah pada Tahun 2020 merupakan yang terendah dengan realisasi sebesar Rp 605.538.551.548,68. Sedangkan Pendapatan Daerah terbesar terjadi pada Tahun 2019 dengan pendapatan dan realisasi sebesar Rp.727.219.608.547,52. Pada Tahun 2021-2022 Realisasi Pendapatan daerah sudah menunjukkan penambahan dari Pendapatan tahun 2020, hal ini disebabkan sudah mulai berkembangnya perekonomian masyarakat Kota Subulussalam covid-19 yang berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi secara makro yang melanda Kota Subulussalam. Kemudian Tahun 2023 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan kembali akibat tidak tercapainya target-target pendapatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan pada tahun 2024 realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 2,78 persen atau sebesar Rp. 18,238,802,849.87.

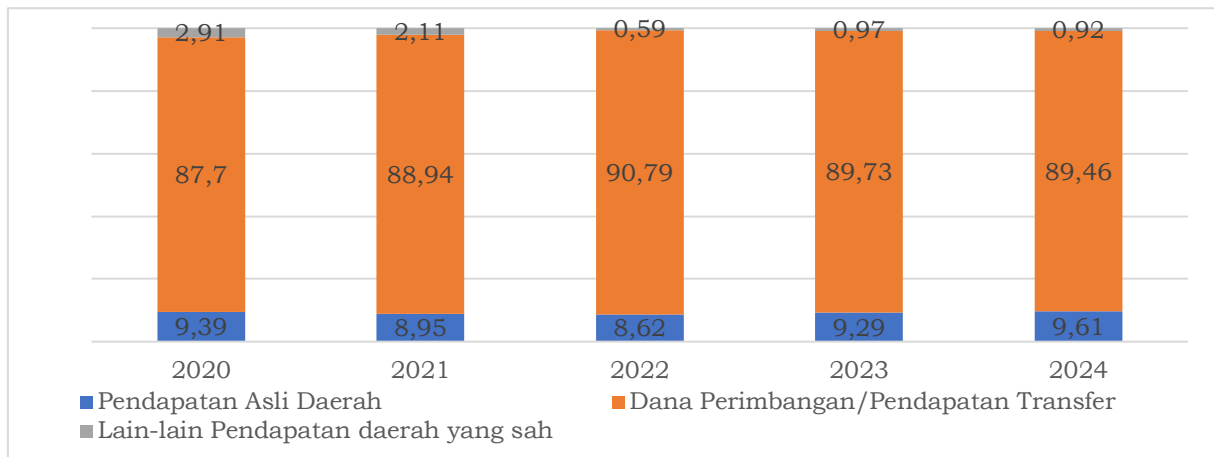
Proses penetapan APBK tahun 2020-2024 seperti dijelaskan pada **tabel 2.80 hal II-193** bahwasanya pada tahun 2020-2022 penetapan APBK Subulussalam tidak tepat waktu, kemudian tahun 2023 penetapan APBK Subulussalam tepat waktu dan pada tahun 2024 penetapan APBK Subulussalam mengalami kemunduran tidak tepat waktu kembali, hal ini dikarenakan adanya dinamika politik dan birokrasi pemerintahan setelah tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kemudian dapat dijelaskan juga bahwasanya dengan dinamika perjalanan APBK Subulussalam yang kurang stabil pemerintah Kota Subulussalam tetap melaksanakan proses keuangannya yang maksimal dan akuntabel. Hal ini dijelaskan dengan keluarnya opini BPK tentang audit laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.6.1.1. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (39), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBK. Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2020-

2024.

Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2020-2024.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam 2020- 2024

Gambar 2.132.

Proporsi PAD, Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah (Persen)

Secara umum, capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan meningkat, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam mencapai Rp. 708.299.892.766,39 yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tahun 2020-2024. Lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.87.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020 (audited) (Rp)	2021 (audited) (Rp)	2022 (audited) (Rp)	2023 (audited) (Rp)	2024 (audited) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	3	4	5	6	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56,850,612,680.68	57,924,002,571.86	61,061,505,670.25	60,960,388,635.73	64,293,336,422.21	3.15
4.1.01	Pajak Daerah	4,958,967,342.45	5,736,895,928.05	6,564,684,939.00	5,963,309,274.00	6,981,181,672.59	9.51
4.1.02	Retribusi Daerah	1,437,311,316.00	2,043,306,303.00	2,285,229,282.00	954,378,069.00	865,059,436.00	-3.40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	785,087,399.00	833,278,387.00	1,222,027,397.00	1,203,536,669.00	1,278,272,479.00	14.37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49,669,246,623.23	49,310,521,953.81	50,989,564,052.25	52,839,164,623.73	55,168,822,834.62	2.68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	531,087,452,868.00	575,900,242,051.00	643,080,217,096.14	588,604,798,025.00	603,673,744,526.00	3.55
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	456,796,043,202.00	553,802,278,965.00	548,467,909,206.00	535,622,774,871.00	575,967,600,147.00	6.37
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74,291,409,666.00	22,097,963,086.00	94,612,307,890.14	52,982,023,154.00	27,706,144,379.00	41.55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,600,486,000.00	13,689,266,000.00	4,158,170,000.00	6,382,783,047.61	6,219,691,610.00	-6.23
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,739,826,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,860,660,000.00	13,689,266,000.00	4,058,170,000.00	6,382,783,047.61	6,219,691,610.00	27.36
	Jumlah Pendapatan	605,538,551,548.68	647,513,510,622.86	708,299,892,766.39	655,947,969,708.34	674,186,772,558.21	2.93

Sumber : Laporan Keuangan Kota Subulussalam 2020-2024

Dari Tabel di atas Kota Subulussalam terlihat masih mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan, ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlebih dengan berkurangnya alokasi dana otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh akan berdampak langsung terhadap penerimaan Pemerintah Kota Subulussalam. Kondisi ini, berisiko bagi APBK dan pembangunan di Kota Subulussalam, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2020-2024 rata-rata kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap APBK Subulussalam sebesar 89,34 persen dengan persentase paling tinggi Tahun 2022 yaitu sebesar 90,79 persen. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan Kota Subulussalam dari tahun 2020-2024 cenderung semakin meningkat. Rata-rata persentase penerimaan dana transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan kota Subulussalam mengalami kenaikan berkisar 81,13 persen. Persentase dana transfer pemerintah pusat mengalami fluktuasi tahun 2020-2024 dimana pada tahun 2020 sebesar 75,44 persen dan meningkat sebesar 10,14 persen pada tahun 2024, yaitu sebesar 85,57 persen. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 menurun sebesar 1,05 persen yang mana merupakan akibat dari kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan pendapatannya bersifat spesifik untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan PPPK dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 sebesar 2,78 persen atau sebesar Rp.18,238,802,849.87.

Realisasi PAD selama kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 3,15 persen. Pada pelaksanaan APBK kurun waktu tahun 2020-2024 kontribusi pertumbuhan PAD rata-rata berkisar 9,16 persen. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020-2024 adalah Komponen Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah. PAD Kota Subulussalam di luar pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah rata-rata berkisar 10 miliar rupiah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan rata-rata 85,70 persen dikarenakan dalam uraian lain-lain yang sah terdapat realisasi pendapatan BLUD yang masuk ke dalam rincian lain-lain yang sah. Selain itu Retribusi daerah dan Pajak Daerah juga menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 pajak daerah dan retribusi memberikan kontribusi besar dalam

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 10,00 persen dan 2,54 persen dari Total PAD. Pada tahun 2024, pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar dengan sebesar 10,00 persen. Sedangkan kontribusi paling besar dari retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 3,74 persen. Penerimaan Retribusi Daerah Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

- 1) Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dengan dibantu pihak-pihak yang berwenang

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi pendapatan asli daerah berturut-turut tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 85,70 persen dari total PAD
- b. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 10,00 persen dari total PAD
- c. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 2,54 persen dari Total PAD
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 1,76 persen dari total PAD.

2.6.1.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Subulussalam masa lalu juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama tahun 2020-2024. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Total realisasi belanja Kota Subulussalam dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Total realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp.600.172.073.744,49 meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp.660,975,864,813.50. Realisasi Belanja tahun 2022 merupakan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp.802.720.509.014,74. Peningkatan realisasi belanja ini berasal dari pinjaman PEN. Proporsi realisasi belanja di atas memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan terus meningkat, untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

Urutan persentase realisasi belanja daerah Kota Subulussalam dari tahun 2020-2024 persentase terbesar adalah belanja operasional sebesar 67,20 persen, kemudian belanja modal 18,36 persen, belanja transfer 13,24 persen dan belanja tidak terduga sebesar 0,90 persen dari total realisasi belanja keseluruhan APBD Kota Subulussalam. Realisasi belanja daerah Kota Subulussalam pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut ini:

Tabel 2.88.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (audited)	2023 (audited)	2024 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	3	4	5	6	8
I	BELANJA OPERASIONAL	401,598,380,161.68	443,176,490,303.41	472,968,725,899.84	454,222,056,263.00	482,396,075,906.50	4.83
5.1.01	Belanja Pegawai	233,263,521,213.00	174,981,178,824.00	180,853,375,988.00	189,077,407,720.00	225,335,202,444.00	0.52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152,622,224,948.68	253,838,564,479.41	266,712,669,455.84	245,398,574,544.00	211,423,625,707.50	12.39
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	199,800,000.00	6,509,652,906.00	4,712,531,499.00	2,103,279,745.00	-0.55
5.1.05	Belanja Hibah	9,540,634,000.00	7,074,453,500.00	13,845,418,550.00	11,340,492,500.00	38,339,405,036.00	72.46
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,172,000,000.00	7,082,493,500.00	5,047,609,000.00	3,693,050,000.00	5,194,562,974.00	-0.04
II	BELANJA MODAL	136,373,287,218.81	110,639,118,634.99	227,715,163,886.90	79,772,620,579.00	74,968,046,020.00	3.99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21,074,579,286.32	4,238,300,457.00	3,247,601,010.00	84,281,522.00	0.00	-75.17
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,734,509,450.00	19,545,513,555.00	30,847,532,467.37	10,020,553,917.00	13,126,037,503.00	-0.69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87,322,165,263.49	27,844,533,317.47	53,292,368,394.69	21,846,649,185.00	38,908,128,677.00	10.59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,242,033,219.00	56,361,223,262.52	137,048,435,615.84	45,421,141,700.00	20,023,603,540.00	608.56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	140,835,300.00	1,524,775,408.00	2,200,122,955.00	1,768,810,300.00	335.78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	2508712743.00	1,754,450,991.00	199,871,300.00	1,141,466,000.00	100.00
IV	BELANJA TIDAK TERDUGA	16,637,609,438.00	3,277,020,504.00	5,862,266,278.00	2,217,984,600.00	851,092,325.00	-31.30
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16,637,609,438.00	3,277,020,504.00	5,862,266,278.00	2,217,984,600.00	851,092,325.00	-31.30
V	BELANJA TRANSFER	45,562,796,926.00	97,031,815,069.00	96,174,352,950.00	104,170,858,472.00	102,760,650,562.00	29.76
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	45,562,796,926.00	97,031,815,069.00	96,174,352,950.00	104,170,858,472.00	102,760,650,562.00	29.76
	BELANJA	600,172,073,744.49	654,124,444,511.40	802,720,509,014.74	640,383,519,914.00	660,975,864,813.50	3.67

Sumber : Laporan Keuangan Kota Subulussalam 2020-2024

2.6.1.3. Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (41), Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan Kota Subulussalam dari tahun 2020-2024 fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp10.763.885.967,10 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Dimana selama kurun waktu dari tahun 2020-2024 realisasi penerimaan pembiayaan Kota Subulussalam yang terbesar yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 109.152.146.727,68 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 4.204.643.006,68 dan pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional dari PT.MSI sebesar Rp 104.947.503.721,00. SiLPA tahun 2022 ini terjadi karena penghematan belanja dan adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Kemudian realisasi penerimaan pembiayaan Kota Subulussalam tahun 2024 sebesar Rp 2,696,781,780.30 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Rincian pembiayaan daerah tahun 2020-2024 terlihat pada tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89.

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (audited)	2023 (audited)	2024 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.763.885.967,10	10.999.428.670,29	109.152.146.727,68	8.802.780.111,33	2.696.781.780,30	200,48
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.763.885.967,10	10.999.428.670,29	4.204.643.006,68	8.802.780.111,33	2.696.781.780,30	12,27
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			104.947.503.721,00	-	-	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.763.885.967,10	10.999.428.670,29	109.152.146.727,68	8.802.780.111,33	2.696.781.780,30	200,48
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	-	5.928.750.368,00	21.608.127.024,00	11.853.922.000,00	(0,45)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang			3.928.750.368,00	21.608.127.024,00	10.853.922.000,00	33,17
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.05	Pembayaran Utang Pihak Ketiga						
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	5.928.750.368,00	21.608.127.024,00	11.853.922.000,00	(0,23)
	PEMBIAYAAN NETTO	9.763.885.967,10	10.999.428.670,29	103.223.396.359,68	(12.805.346.912,67)	(9.157.140.219,70)	184,60

Sumber : Laporan Keuangan Kota Subulussalam 2020-2024

2.6.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

Dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Subulussalam beberapa perkiraan tahun terakhir terjadi peningkatan, antaranya pos Aset rata-rata peningkatan per tahun sebesar 45,20 persen direntang tahun 2020-2024, yang mana peningkatan yang paling besar berasal dari penambahan aset tetap sebesar 52,28 persen, sementara itu peningkatan jumlah ekuitas dana bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Subulussalam dari tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.90 berikut:

Tabel 2.90.
Neraca Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020(audited) (Rp)	2021(audited) (Rp)	2022(audited) (Rp)	2023(audited) (Rp)	2024(audited) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1,454,331,524,743.26	1,471,013,669,621.51	1,658,174,566,073.99	1,647,274,654,355.45	1,531,979,862,996.33	1.55
1.1	ASET LANCAR	46,045,866,768.53	58,272,963,322.95	122,239,457,743.17	133,350,914,123.84	115,610,306,825.22	33.03
1.1.1	Kas di Kas Daerah	805,192,029.57	1,255,416,263.74	4,456,662,155.47	824,182,793.63	1,738,262,059.98	85.08
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	3,586,137.00	-	-	-100.00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	160,314,883.00	84,024,517.00	164,416,932.00	60,225,505.00	301,775.00	-28.69
1.1.5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	9,054,791,622.00	2,326,772,943.88	4,161,724,575.79	704,258,751.99	946,064,957.35	-11.05
1.1.7	Kas di Bendahara FKTP	270,232,463.00	521,820,032.06	13,098,786.07	197,993,285.68	21,501,177.68	329.50
1.1.8	Kas di Bendahara BOS	207,650,250.00	16,609,250.00	3,271,525.00	316,700.00	508,944.00	-50.48
1.1.9	Kas di Bendahara BOK	-	-	-	909,804,744.00	1,347,128,611.00	0.00
1.1.10	Kas Lainnya	240,863,867.00	140,289,035.00	144,533,451.13	78,854,407.05	84,671,831.99	-11.68
1.1.11	Setara Kas	-	-	-	-	-	-
1.1.12	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.13	Piutang Pendapatan	27,296,790,188.96	30,743,660,449.96	49,582,535,016.04	55,394,423,067.04	42,884,414,374.04	15.76
1.1.14	Piutang Lainnya	470,573,338.00	470,573,338.00	470,573,338.00	470,573,338.00	470,573,338.00	0.00
1.1.15	Penyisihan Piutang	(10,652,729,213.90)	(12,021,764,409.50)	(13,700,267,094.70)	(15,304,416,674.70)	(20,009,041,750.50)	17.32
1.1.16	Beban Dibayar Dimuka	-	1,437,610.00	70,763,741.37	12,469,822.47	54,404,062.19	-65.60
1.1.17	Persediaan	18,192,187,340.90	34,734,124,292.81	76,868,559,180.00	90,002,228,383.68	88,071,517,444.49	56.79
	Jumlah Aset Lancar	46,045,866,768.53	58,272,963,322.95	122,239,457,743.17	133,350,914,123.84	115,610,306,825.22	33.03
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.96
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.96
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.96
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.96
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.96
1.2	ASET TETAP	1,369,739,258,108.23	1,372,253,306,432.06	1,445,025,573,431.32	1,445,077,207,472.61	1,346,398,739,412.11	-0.33
1.2.1	Tanah	99,417,077,027.50	99,477,460,827.50	101,754,841,399.50	102,141,119,070.50	101,792,140,872.50	0.60
1.2.2	Peralatan dan Mesin	248,201,823,374.40	270,011,526,537.66	303,829,797,759.77	313,185,513,226.77	332,333,713,814.77	7.63
1.2.3	Gedung dan Bangunan	562,366,042,019.77	583,903,985,568.64	605,299,497,301.02	631,006,775,883.02	659,029,283,993.02	4.05
1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	934,459,909,306.35	972,321,579,340.02	1,151,202,694,770.02	1,198,505,783,831.11	1,223,360,724,921.11	3.09
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	33,510,068,357.16	34,527,923,157.16	35,700,645,857.16	37,747,390,337.16	39,266,390,488.16	4.05
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	80,421,840,513.00	85,046,986,762.60	29,982,130,334.80	29,145,260,903.00	40,049,084,244.00	-6.09
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(588,637,502,489.95)	(673,036,155,761.52)	(782,744,033,990.95)	(866,654,635,778.95)	(1,049,432,598,921.45)	15.61
	Jumlah Aset Tetap	1,369,739,258,108.23	1,372,253,306,432.06	1,445,025,573,431.32	1,445,077,207,472.61	1,346,398,739,412.11	-0.33
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	2020(audited) (Rp)	2021(audited) (Rp)	2022(audited) (Rp)	2023(audited) (Rp)	2024(audited) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	ASET LAINNYA	34,546,399,866.50	34,487,399,866.50	82,909,534,899.50	60,846,532,759.00	13,436,252,362.00	8.93
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	1,243,550,000.00	-100.00
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	44,460,742,397.00	44,460,742,397.00	-	-100.00
1.3.4	Dana Treasury Deposit Facility (TDF) DBH-DAU	-	-	1,597,565,631.00	3,131,398,000.00	131,860,000.00	0.11
1.3.5	Aset Tidak Berwujud	1,267,648,270.00	1,267,648,270.00	1,559,678,270.00	1,659,178,270.00	1,709,178,270.00	8.11
1.3.6	Aset Lain-Lain	33,278,751,596.50	33,219,751,596.50	35,291,548,601.50	11,595,214,092.00	10,351,664,092.00	-17.95
Jumlah	Aset Lainnya	34,546,399,866.50	34,487,399,866.50	82,909,534,899.50	60,846,532,759.00	13,436,252,362.00	8.93
1.6	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	47,534,564,397.00	-
1.6.02	Properti Investasi Bangunan Gedung	-	-	-	-	47,534,564,397.00	-
Jumlah	Properti Investasi	-	-	-	-	47,534,564,397.00	-
	JUMLAH ASET DAERAH	1,454,331,524,743.26	1,471,013,669,621.51	1,658,174,566,073.99	1,647,274,654,355.45	1,531,979,862,996.33	1.55
2	KEWAJIBAN	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	141,867,802,922.72	240,784,346,585.46	258,999,595,992.92	112.60
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	141,867,802,922.72	189,710,597,872.46	231,498,349,487.92	105.42
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	240,863,867.00	2,417,547,500.00	2,815,305,729.00	2,444,949,123.00	3,227,719,866.00	11.77
2.1.2	Utang Kepada Pemerintah Pusat	3,256,819,134.00	3,050,507,194.00	-	560,696,119.29	2,634,814,479.00	87.86
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	2,059,589.04	54,189,151.00	49,663,477.33	16,519,757.67	44,414,730.17	51.06
2.1.4	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Bukan Bank	-	-	23,572,502,208.00	25,536,877,392.00	38,255,457,600.00	33.25
2.1.5	Utang Belanja	72,325,146,329.92	33,830,148,649.08	115,430,331,508.39	161,151,555,480.50	183,074,724,812.75	26.61
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	4,261,218,000.00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	141,867,802,922.72	189,710,597,872.46	231,498,349,487.92	105.42
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	51,073,748,713.00	27,501,246,505.00	-85.71
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	74,646,250,921.00	51,073,748,713.00	27,501,246,505.00	-85.71
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	51,073,748,713.00	27,501,246,505.00	-85.71
	JUMLAH KEWAJIBAN	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	141,867,802,922.72	240,784,346,585.46	258,999,595,992.92	112.60
3	EKUITAS DANA	1,378,506,635,823.30	1,431,661,277,127.43	1,516,306,763,151.27	1,406,490,307,769.99	1,272,980,267,003.41	-1.74
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,378,506,635,823.30	1,431,661,277,127.43	1,516,306,763,151.27	1,406,490,307,769.99	1,272,980,267,003.41	-1.74
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,454,331,524,743.26	1,471,013,669,621.51	1,658,174,566,073.99	1,647,274,654,355.45	1,531,979,862,996.33	1.55

Sumber : Laporan Keuangan Kota Subulussalam Tahun 2020–2024

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/ elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Subulussalam cenderung menurun meski masih positif. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Berdasarkan Tabel 2.90 meskipun terlihat mengalami tren penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 namun rasio lancar mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024, hal ini perlu diwaspadai Pemerintah Kota Subulussalam karena likuiditas kemampuan aset lancarnya sudah mulai tidak sehat yang menunjukkan nilai aset lancar lebih kecil daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Rasio Cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar yang sudah dikurangi tingkat persediaan dengan kewajiban lancar. Meskipun mengalami penurunan namun secara umum rasio cepat menunjukkan Pemerintah Kota Subulussalam masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Menurunnya kedua rasio likuiditas menunjukkan adanya tekanan keuangan (*financial distress*) yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam walaupun tidak akan mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Analisis *rasio solvabilitas* dilakukan dengan menghitung analisis rasio total hutang terhadap total aset atau *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan Rasio hutang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Tabel 2.90 menunjukkan bahwa hasil analisis DAR tahun 2020 s/d tahun 2021 jauh di bawah 1%. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh

lebih kecil dari nilai aset yang dimiliki, tetapi pada tahun 2022 dan 2023 serta 2024 analisis DAR Kota Subulussalam menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk membayar hutang sudah mulai kurang bagus hal ini ditunjukkan dengan besarnya kewajiban yang semakin bertambah sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.91.

Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A. Rasio Likuiditas						
	Aset Lancar	46,045,866,768.53	58,272,963,322.95	122,239,865,201.41	133,338,444,301.37	99,442,482,359.59
	Kas dan Piutang	27,853,679,427.63	23,538,839,030.14	45,571,306,021.41	43,336,215,917.69	11,370,964,915.10
	Persediaan	18,192,187,340.90	34,734,124,292.81	76,668,559,180.00	90,002,228,383.68	88,071,517,444.49
	Kewajiban Jangka Pendek	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	141,867,782,922.72	189,710,597,872.46	231,498,349,487.92
1	Rasio Lancar (Current Rasio)	0.61	1.48	0.86	0.70	0.43
2	Rasio Cepat (Quick Rasio)	0.61	1.48	0.86	0.70	0.43
B. Rasio Solvabilitas						
	Total Aset	1,454,331,524,743.26	1,471,013,669,621.51	1,658,174,973,532.23	1,647,274,654,355.45	1,531,979,862,996.33
	Total Kewajiban	75,824,888,919.96	39,352,392,494.08	216,514,033,843.72	240,784,346,585.46	258,999,595,992.92
	Total Ekuitas	1,378,506,635,823.30	1,431,661,277,127.43	1,441,660,939,688.51	1,406,490,307,769.99	1,272,980,267,003.41
1	DAR (Rasio Total Hutang Terhadap Aset)	0.05	0.03	0.13	0.15	0.17
	DER (Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas)	0.06	0.03	0.15	0.17	0.20
2						

Sumber :Laporan Keuangan Kota Subulussalam 2020-2024

2.6.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja serta pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan
- 3) membayar tagihan pihak ketiga;
- 4) Penerimaan Daerah;
- 5) Pengeluaran Daerah;
- 6) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 7) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

2.6.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Besarnya proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah selama dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 rata-rata sebesar 30,35 persen.

Penganggaran belanja aparatur dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan proporsi kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 38,87 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 34,09 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja untuk kebutuhan aparatur masih banyak menyerap dalam proporsi APBK Kota Subulussalam. Pemerintah Kota Subulussalam tetap berupaya untuk lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah demi tercapainya tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	2020	233,263,521,213.00	559,740,211,919.49	41.67
2	2021	174,140,933,824.00	556,665,840,442.40	31.28
3	2022	180,853,375,988.00	808,649,259,382.74	22.36
4	2023	189,077,407,720.00	661,991,646,938.00	28.56
5	2024	225,335,202,444.00	672,829,786,813.50	33.49

Sumber: Laporan Keuangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

2.6.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Kota Subulussalam mengalami defisit anggaran, dan defisit anggaran pada tahun tersebut terjadi mulai dari tahun 2020-2024 secara berurutan. Namun demikian tahun 2022 terjadi defisit yang sangat besar akibat adanya *refocusing* anggaran akibat covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar (Rp1.365.386.041,61). Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.93.

Pada tabel 2.93 dapat dilihat adanya defisit anggaran yang terjadi mulai dari tahun 2020-2024. Hingga tahun 2024, defisit dan hutang daerah mencapai

Rp110.894.960.262,00. Namun angka ini masih di luar pembayaran rutin hutang PEN. Hal ini terjadi karena penundaan pembayaran atas kegiatan-kegiatan dikarenakan kondisi kas yang tidak stabil dan minim pada saat akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan pola penganggaran berulang yang menyebabkan pembengkakan belanja setelah APBK ditetapkan melalui perubahan peraturan walikota untuk menampung belanja wajib dan kewajiban yang tidak terbayarkan ditahun sebelumnya.

Tabel 2.93.
Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	605,538,551,548.68	647,513,510,622.86	708,299,892,766.39	655,947,969,708.34	674,186,772,558.21
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	605,303,008,845.49	651,697,655,511.40	802,720,509,014.74	640,383,519,914.00	660,975,864,813.50
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,763,885,967.10	2,000,000,000.00	5,928,750,368.00	21,608,127,024.00	11,853,922,000.00
	Defisit riil	(10,528,343,263.91)	(6,184,144,888.54)	(100,349,366,616.35)	(6,043,677,229.66)	1,356,985,744.71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam , 2020-2024

Tabel 2.94.

Struktur Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.082.889.328,00	86.186.889.328,00	85.663.296.301,00	90.122.296.301,00	72.137.220.843,00	3,32
4.1.01	Pajak Daerah	4.270.000.000,00	6.330.000.000,00	9.330.000.000,00	9.480.000.000,00	9.480.000.000,00	9,66
4.1.02	Retribusi Daerah	4.377.268.904,00	4.437.268.904,00	3.864.268.904,00	3.318.668.904,00	3.056.511.101,00	(3,28)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	745.620.424,00	995.620.424,00	1.472.027.397,00	1.222.027.397,00	1.278.272.479,00	14,37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.690.000.000,00	74.424.000.000,00	70.997.000.000,00	76.101.600.000,00	58.322.437.263,00	2,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	646.653.986.674,00	586.974.471.697,00	647.260.442.884,00	601.683.692.346,00	614.039.667.864,00	3,48
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	397.426.935.926,00	484.294.896.249,00	542.469.794.043,00	540.895.873.225,00	578.339.127.200,00	6,37
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	249.227.050.748,00	102.679.575.448,00	104.790.648.841,00	60.787.819.121,00	35.700.540.664,00	40,83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.772.445.000,00	13.270.370.683,00	100.000.000,00	7.459.000.000,00	7.459.000.000,00	(6,23)
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.772.445.000,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00			50,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	12.270.370.683,00	-	7.459.000.000,00	7.459.000.000,00	27,36
	Jumlah Pendapatan	728.509.321.002,00	686.431.731.708,00	733.023.739.185,00	699.264.988.647,00	693.635.888.707,00	2,88
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	449.602.683.935,06	492.453.022.696,00	532.819.480.859,00	602.928.508.961,00	570.243.048.320,25	4,77
5.1.01	Belanja Pegawai	240.258.696.281,06	176.305.094.149,00	194.009.200.762,00	213.956.959.778,00	238.006.405.602,00	0,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.412.187.654,00	297.840.641.245,00	314.445.393.032,00	352.706.034.655,00	279.918.701.813,25	12,23
5.1.03	Belanja Bunga		3.510.000.000,00	6.709.613.890,00	6.463.450.000,00	5.689.597.716,00	(0,55)
5.1.05	Belanja Hibah	10.819.300.000,00	7.279.453.500,00	11.029.618.750,00	22.572.564.528,00	40.002.042.270,00	72,46
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.112.500.000,00	7.517.833.802,00	6.625.654.425,00	7.229.500.000,00	6.626.300.919,00	(0,04)
5.2	BELANJA MODAL	195.061.589.317,00	221.687.897.741,00	286.737.413.629,00	128.279.645.987,00	107.562.758.452,75	(17,88)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.203.375.000,00	7.156.727.000,00	3.870.850.804,00	1.921.059.720,00	-	(75,17)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.451.046.722,00	26.671.702.132,00	36.116.957.390,00	15.983.545.635,00	20.004.811.110,75	(0,69)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.895.299.115,00	36.534.691.374,00	65.927.896.774,00	31.215.182.172,00	47.641.549.047,00	10,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.354.108.707,00	146.461.211.252,00	172.075.448.661,00	76.181.130.960,00	35.950.476.795,00	608,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.157.759.773,00	1.863.565.983,00	6.246.260.000,00	2.878.727.500,00	2.166.421.500,00	276,84
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	100.000.000,00	1.799.500.000,00	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.094.926.726,00	7.301.819.134,00	5.963.379.199,00	2.353.911.000,00	2.047.329.550,00	(31,30)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.094.926.726,00	7.301.819.134,00	5.963.379.199,00	2.353.911.000,00	2.047.329.550,00	(31,30)
5.4	BELANJA TRANSFER	126.066.451.315,00	112.978.629.903,00	113.360.425.450,00	122.020.538.125,00	124.677.712.646,00	29,76

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	126.066.451.315,00	112.978.629.903,00	113.360.425.450,00	122.020.538.125,00	124.677.712.646,00	29,76
	Jumlah Belanja	787.825.651.293,06	834.421.369.474,00	938.880.699.137,00	855.582.604.073,00	804.530.848.969,00	0,91
	Total Surplus/(Defisit)	(59.316.330.291,06)	(147.989.637.766,00)	(205.856.959.952,00)	(156.317.615.426,00)	(110.894.960.262,00)	33,87
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.316.330.291,06	149.989.637.766,00	211.856.959.952,00	181.317.615.426,00	137.431.837.654,00	200,48
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.763.885.967,10	10.999.428.670,00	4.204.643.007,00	8.802.780.111,00	2.696.781.780,30	12,27
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	49.552.444.323,96	138.990.209.096,00	207.652.316.945,00	172.514.835.315,00	134.735.055.873,70	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.316.330.291,06	149.989.637.766,00	211.856.959.952,00	181.317.615.426,00	137.431.837.654,00	200,48
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	25.000.000.000,00	26.536.877.392,00	(50,23)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang			4.000.000.000,00	24.000.000.000,00	25.536.877.392,00	33,17
6.2.04	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga					-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	25.000.000.000,00	26.536.877.392,00	(33,48)
	Pembiayaan Netto	59.316.330.291,06	147.989.637.766,00	205.856.959.952,00	156.317.615.426,00	110.894.960.262,00	184,60
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	
	TOTAL APBD	788.825.651.293,06	836.421.369.474,00	944.880.699.137,00	880.582.604.073,00	831.067.726.361,00	1,64

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam , 2020-2024

Asal usul defisit Kota Subulussalam

Defisit Kota Subulussalam yang sampai saat ini merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana salah satu penyebab utama defisit adalah tidak tercapainya target realisasi pendapatan yang sudah dianggarkan tiap tahunnya, belanja daerah yang semakin membengkak dan kurangnya pengendalian dan evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini sangat berdampak terhadap rencana pelaksanaan program prioritas pembangunan tiap tahunnya. Pada APBK Subulussalam tahun 2016 defisit APBK Subulussalam sebesar Rp.2,025,406,556.40 dan mulai naik pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 49,619,344,919.30 kemudian naik sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.(205,856,959,952.00 kemudian mulai turun sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 110,894,960,262.00. Pemerintah Kota Subulussalam berupaya terus tiap tahunnya untuk mengurangi laju defisit untuk mengurangi beban kewajiban yang selalu ada tiap tahunnya dan mengganggu aktivitas perekonomian di Kota Subulussalam.

Roadmap Penanganan defisit Kota Subulussalam

Defisit Kota Subulussalam dalam periode RPJMD 2019-2024 sangatlah besar, hal ini berakibat banyaknya program-program prioritas yang tidak terlaksanakan oleh SKPK pengampu program prioritas yang sudah dia anggarakan. Pada RPJMD 2026-2030 Kota Subulussalam mencanangkan langsung prioritas utama dalam mengurangi defisit anggaran dan pembayaran kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan Wali Kota terpilih yang baru. Untuk melaksanakan prioritas tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut :

- a. Optimalisasi pendapatan asli daerah
 - Melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang bersumber dari pajak daerah
 - Melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang bersumber dari retribusi daerah
 - Melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain daerah yang sah
 - Mencari sumber pendapatan lain yang sah sesuai regulasi yang ada
- b. Efisiensi belanja daerah
 - Melakukan rasionalisasi belanja daerah yang benar-benar prioritas dan mempunyai *output* program yang jelas dan terarah

- Efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan mengurangi alokasi belanja modal yang kurang penting
- c. Pengelolaan kewajiban-kewajiban yang masih berjalan dalam konstruksi APBK tiap tahunnya
 - Penyusunan rencana pembayaran hutang berdasarkan prioritas pendanaan serta prioritas daerah
 - Memperluas sumber-sumber pendanaan yang lain untuk pembayaran hutang dan kewajiban yang belum selesai
- d. Evaluasi kinerja SKPD
 - Melakukan evaluasi kinerja SKPK terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan untuk mendapatkan capaian kinerja yang efisien, efektif dan optimal

Tabel 2.95.
Roadmap Penanganan Defisit Dan Hutang Daerah

No	2025	2026	2027
1	Mengalokasikan Program prioritas yang didanai dari pendanaan yang bersifat emark	Mengalokasikan Program prioritas yang didanai dari pendanaan yang bersifat emark	Mengalokasikan Program prioritas yang didanai dari pendanaan yang bersifat emark
2	Efisiensi belanja guna menyiapkan cadangan anggaran surplus untuk membayar kewajiban	Efisiensi belanja guna menyiapkan cadangan anggaran surplus untuk membayar kewajiban	Efisiensi belanja guna menyiapkan cadangan anggaran surplus untuk membayar kewajiban
3	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya pendapatan daerah	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya pendapatan daerah	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya pendapatan daerah
4	Melakukan penyusunan rencana pembayaran kewajiban yang bersifat prioritas khususnya yang berbasis sumber dana emark	Melakukan penyusunan rencana pembayaran kewajiban yang bersifat prioritas khususnya yang berbasis sumber dana emark	Melakukan pelunasan pembayaran kewajiban dan menghentikan potensi hutang lagi yang akan terjadi di tahun 2027

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, maka diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, maka pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Subulussalam dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk *saving* (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	Persentase dari SiLPA	Rp	Persentase dari SiLPA	Rp	Persentase dari SiLPA	Rp	Persentase dari SiLPA	Rp	Persentase dari SiLPA
Jumlah SiLPA	10.763.885.967,10	100	10.999.428.670,29	100	4.204.643.006,68	100	2.759.102.881,67	100	2.696.781.780,30	100
Pelampauan penerimaan PAD										
Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	10.763.885.967,10	100	10.999.428.670,29	100	4.204.643.006,68	100	2.759.102.881,67	100	2.696.781.780,30	100
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
Kegiatan lanjutan										

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2020-2024

2.6.4. Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026-2030, direncanakan berdasarkan realisasi pertumbuhan pendapatan 5 tahun yang lalu dan potensi-potensi untuk tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah Kota Subulussalam akan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

Hasil tinjauan terhadap kondisi pengelolaan keuangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024, maka untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dalam tahun tersebut. Struktur anggaran Pemerintah Daerah sudah menyesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadikan langkah awal Pemerintah Kota Subulussalam dalam mengambil langkah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya di sektor pendapatan asli daerah, yang mana sudah ditindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Qanun Nomor

1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Dengan langkah tersebut diharapkan peran semua pihak dan masyarakat dalam mengoptimalkan semua potensi-potensi pendapatan asli daerah Kota Subulussalam yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
- b. Mensosialisasikan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.
- c. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang kurang kooperatif.
- e. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lembaga serta evaluasi terhadap realisasi PAD secara rutin.

Pendapatan Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,50 persen, untuk tahun 2026 sebesar Rp. 681.983.649.363,00 dan di akhir periode RPJMD 2026-2029 menjadi Rp. 752.803.444.226,15. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dengan kenaikan rata-rata nya sebesar 1,00 persen kemudian Pendapatan Transfer sebesar 2,64 persen sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan kenaikan 5,00 persen. Proyeksi kenaikan dana Perimbangan khususnya DAU diasumsikan adanya kenaikan jumlah ASN melalui pengadaan CPNS/PPPK dan asumsi kenaikan gaji ASN/PPPK.

Pendapatan daerah pada tahun 2026-2030 masih didominasi dari sumber pendapatan transfer pemerintah yang mencapai Rp. 586.702.479.873,16 pada akhir periode RPJMD atau sebesar 88,00 persen dari jumlah pendapatan tahun 2030, yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah sebesar Rp. 586.702.479.873,16 atau sebesar 88,00 persen dari pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 563.824.080.353,63 sebesar 96,10 persen, dan pendapatan transfer dari pemerintah daerah Rp. 22.878.399.519,54 sebesar 3,90 persen dan dana otonomi khusus Rp. 33.047.194.000,00 sebesar 5,44 persen dan dana desa Rp. 66.956.755.000,00 sebesar 11,01 persen. Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2026 sebesar Rp. 6.500.000.000,00 dan di akhir periode tahun 2030 adalah Rp. 7.900.790.625,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen tiap tahunnya.

Pada tahun 2028 proyeksi pendapatan daerah dari transfer pemerintah untuk jenis penerimaan dana otonomi khusus aceh sudah tidak dimasukkan kedalam

proyeksi pendapatan daerah Kota Subulussalam, hal ini sangat berdampak sekali terhadap kondisi pembangunan yang ada di Kota Subulussalam. untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Subulussalam akan berupaya semaksimal mungkin dalam membuat terobosan pendanaan dalam melaksanakan dan mengali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah melalui insentififikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan bertanggungjawab guna membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Subulussalam.

Kemudian untuk pendapatan asli daerah periode tahun 2026–2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Pada tahun 2026 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 69.316.211.488,95 dan di akhir periode RPJMD kontribusinya sebesar Rp. 72.130.727.632,95 atau sebesar 10,82 persen dari total pendapatan daerah, yang mana secara berurutan pada akhir periode RPJMD adalah retribusi daerah sebesar Rp. 52.935.261.594,70 atau sebesar 73,39 persen yang terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi pelayanan umum dan retribusi perizinan, kemudian kemudian pajak daerah sebesar Rp. 11.466.144.483,87 atau sebesar 15,90 persen yang terdiri pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak jalan raya, pajak reklame, pajak kesenian dan pajak PBB-P2 dan BPHTB, kemudian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 6.399.146.086,86 atau sebesar 8,87 persen yang terdiri dari jasa giro, hasil sewa barang milik daerah dan zakat , dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.330.175.467,52 atau sebesar 1,84 persen yang merupakan deviden yang diperoleh dari penyertaan modal ke bank.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Dana Perimbangan. Meskipun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah kontribusinya masih sangat kecil dari Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Subulussalam, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penggunaan sistem informasi Pajak dan Retribusi daerah yang berbasis digital dan *user friendly* (penetapan, pemungutan dan pelaporan)
2. Pemberian *Reward* kepada wajib pajak yang taat terhadap peraturan pajak daerah, antara lain:
 - Penganugerahan Walikota Subulussalam setiap tahun diberikan kepada Wajib Pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif di dalam pemeriksaan pajak daerah dan lainnya.

- Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian keringanan/penghapusan denda keterlambatan pajak.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada *event-event* yang digelar oleh Pemerintah Kota Subulussalam, seperti *Ramadhan Fair* dan lainnya.
3. Pemberian Punishment kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan antara lain:
 - Pemberian sanksi denda bagi Wajib Pajak yang terlambat bayar pajak
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak kooperatif setelah dilakukan upaya-upaya persuasif
 4. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi kepada Wajib Pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka sampai ke level pemerintahan desa
 5. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya
 6. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran baik secara *offline* maupun *online*
 7. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
 8. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek dan atau studi tiru ke daerah lain yang manajemen pajak daerahnya lebih bagus
 9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPAM di Kota Subulussalam dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
 10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan secara efisien dan efektif serta berbasis prioritas pendanaan.

Proyeksi belanja mempertimbangkan kenaikan belanja pegawai serta permasalahan pembangunan dan kewajiban yang mengikat yang harus segera dibayarkan guna mengurangi beban defisit APBK yang akan berjalan. Proyeksi belanja Kota Subulussalam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja operasi diproyeksikan setiap tahunnya naik dengan rata-rata pertumbuhan 3,40 persen dengan rincian:
 - Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 5,00 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan

kenaikan gaji ASN (PNS dan PPPK). Kenaikan ini juga telah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD

- Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 1,00 persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp. 2,15 Miliar yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan jaminan kesehatan. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena akan terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2028 dan tahun 2029 yaitu untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada Tahun 2029. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
 - Proyeksi belanja bunga dialokasikan hanya sampai tahun 2026 sebesar Rp. 5.689.597.716,00, dan mengalami penurunan pada tahun 2027 sebesar Rp. 33.046.175,00 dikarenakan pada tahun 2027 pokok pinjaman PEN diasumsikan sudah selesai terbayar lunas oleh Pemerintah Kota Subulussalam.
 - Proyeksi belanja hibah dialokasikan sama dari tahun 2026-2027 dan akan bertambah alokasinya pada tahun 2028 dan tahun 2029 dikarenakan bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2029.
 - Proyeksi belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami kenaikan 2,50 persen tiap tahunnya.
2. Belanja modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1 persen tiap tahunnya
 3. Belanja tidak terduga rata-rata kenaikan diproyeksikan sebesar 0,51 persen mulai dari tahun 2026-2030
 4. Belanja transfer bantuan keuangan ke pemerintah desa diasumsikan mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 0,74 persen sampai akhir periode RPJMD tahun 2030 sebesar Rp. 105.036.366.846,00 yang meliputi kewajiban 10 persen dari TKD, transfer bagi hasil ke desa pajak dan retribusi daerah serta kemukiman.

Alokasi belanja pada tahun 2026-2027 memang tidak sebesar tahun sebelumnya dikarenakan pemerintah Kota Subulussalam masih prioritas dalam pembayaran hutang pokok pinjaman PEN dan membayar kewajiban-kewajiban akibat tidak mempunyai kas daerah dalam beberapa tahun terakhir, dan diharapkan pada tahun 2027 kondisi keuangan sudah stabil dan kembali bisa melaksanakan roda pemerintahan dengan maksimal.

Proyeksi pembiayaan mempertimbangkan potensi untuk melakukan penambahan penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo serta pembayaran hutang kepada pihak ketiga Pemerintah Kota Subulussalam yang menjadi beban beberapa akhir tahun ini. Pembebanan hutang belanja tersebut akan diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan terkait sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2026-2030 penerimaan pembiayaan Kota Subulussalam hanya bersumber dari asumsi silpa keuangan saja. Hal ini diambil kebijakan untuk menekan laju defisit anggaran supaya pada struktur belanja tidak melebihi pagu pendapatan yang sudah ditetapkan guna menyiapkan dana untuk pembayaran kewajiban yang masih besar. Sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam bahwasanya pada tahun 2027 defisit Kota Subulussalam harus nol rupiah, ini tentunya mengindikasikan bahwa diperlukannya kerja keras untuk menambah sumber-sumber penerimaan daerah dan melakukan efisiensi belanja yang tidak perlu atau bukan prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2026-2027 pemerintah Kota Subulussalam masih harus mengalokasikan sebesar Rp. 23.572.502.208,00 atau sebesar 95,93 persen dari total pembiayaan keluar dan pada tahun 2027 mengalokasikan Rp. 3.928.744.297,00 untuk pembayaran pokok hutang PEN yang akan lunas pada tahun 2027. Kemudian pembiayaan keluar juga dialokasikan juga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada Bank Aceh sebagai andil serta pemerintahan daerah dalam mengembangkan badan usaha daerah di Aceh atau sekitar 4,06 persen.

Alokasi belanja Kota Subulussalam tahun 2026-2030 tidak berbeda jauh dengan alokasi belanja tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2026 dan 2027 pemerintah Kota Subulussalam di tahun pertama dan kedua periode RPJMD masih memfokuskan pada prioritas pembayaran kewajiban dan mencegah laju defisit anggaran yang terjadi akibat dampak dari penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan target dan membesarnya kewajiban-kewajiban yang harus ditanggulangi pemerintah Kota Subulussalam. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dapat terlihat dalam tabel 2.95 berikut:

Tabel 2.97.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026–2030

Kode	Uraian	APBK 2024 (Audited)	2026	2027	2028	2029	2030	Rata rata Pertumbuhan (%)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.293.336.422,21	69.316.211.488,95	70.009.373.603,76	70.709.467.339,71	71.416.562.012,96	72.130.727.632,95	0,74
4.1.01	Pajak Daerah	6.981.181.672,59	11.018.739.476,00	11.128.926.870,76	11.240.216.139,47	11.352.618.300,86	11.466.144.483,87	5,06
4.1.02	Retribusi Daerah	865.059.436,00	50.869.745.923,00	51.378.443.382,15	51.892.227.815,88	52.411.150.093,90	52.935.261.594,70	-0,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.278.272.479,00	1.278.272.479,00	1.291.055.203,79	1.303.965.755,83	1.317.005.413,39	1.330.175.467,52	1,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.168.822.834,62	6.149.453.610,95	6.210.948.147,06	6.273.057.628,53	6.335.788.204,82	6.399.146.086,86	0,65
4.1.04.05	Jasa Giro	20.190.158,05	21.762.154,95	21.979.776,50	22.199.574,26	22.421.570,01	22.645.785,71	-23,29
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	57.214.556,00	57.214.556,00	57.786.701,56	58.364.568,58	58.948.214,26	59.537.696,40	16,87
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	111.756.803,00	70.476.900,00	71.181.669,00	71.893.485,69	72.612.420,55	73.338.544,75	2,01
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	965.647.829,71	1.000.000.000,00	1.010.000.000,00	1.020.100.000,00	1.030.301.000,00	1.040.604.010,00	2,01
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	49.557.051.562,36	-	-	-	-	-	-
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.456.961.925,50	5.000.000.000,00	5.050.000.000,00	5.100.500.000,00	5.151.505.000,00	5.203.020.050,00	-0,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	603.673.744.526,00	563.492.278.904,00	578.050.138.774,20	557.407.259.384,88	571.861.225.439,10	586.702.479.873,16	-0,63
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	575.967.600.147,00	544.670.163.000,00	558.286.917.075,00	536.655.876.600,72	550.072.273.515,73	563.824.080.353,63	-0,28
	Dana Bagi Hasil	21.118.669.900,00	14.226.302.000,00	14.581.959.550,00	14.403.397.558,22	14.763.482.497,17	15.132.569.559,60	-1,33
	Dana Alokasi Umum	348.449.716.280,00	335.036.039.000,00	343.411.939.975,00	351.997.238.474,38	360.797.169.436,23	369.817.098.672,14	1,83
	DAK Fisik	52.831.692.326,00	25.640.103.000,00	26.281.105.575,00	26.938.133.214,38	27.611.586.544,73	28.301.876.208,35	-10,47
	DAK Non Fisik	55.190.992.674,00	70.552.341.000,00	72.316.149.525,00	74.124.053.263,13	75.977.154.594,70	77.876.583.459,57	7,80
	Dana Desa	69.058.548.000,00	65.858.945.000,00	67.505.418.625,00	69.193.054.090,63	70.922.880.442,89	72.695.952.453,96	2,13
	Dana Otonomi Khusus	29.317.980.967,00	33.356.433.000,00	34.190.343.825,00	-	-	-	2,50
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.706.144.379,00	18.822.115.904,00	19.763.221.699,20	20.751.382.784,16	21.788.951.923,37	22.878.399.519,54	-5,40
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.219.691.610,00	6.500.000.000,00	6.825.000.000,00	7.166.250.000,00	7.524.562.500,00	7.900.790.625,00	1,85
4.3.01	Pendapatan Hibah							
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.219.691.610,00	6.500.000.000,00	6.825.000.000,00	7.166.250.000,00	7.524.562.500,00	7.900.790.625,00	1,85
	Jumlah Pendapatan	674.186.772.558,21	639.308.490.392,95	654.884.512.377,96	635.282.976.724,58	650.802.349.952,07	666.733.998.131,12	-0,47
5	BELANJA							
5.1	BELANJA OPERASI	482.396.075.906,50	423.111.299.558,00	440.237.646.990,85	460.861.399.887,17	476.342.004.602,35	492.528.914.900,50	2,09
5.1.01	Belanja Pegawai	225.335.202.444,00	249.160.787.218,00	261.618.826.578,90	274.699.767.907,85	288.434.756.303,24	302.856.494.118,40	7,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.423.625.707,50	170.877.004.195,00	172.585.774.236,95	169.311.631.979,32	171.004.748.299,11	172.714.795.782,10	-4,70
5.1.03	Belanja Bunga	2.103.279.745,00	1.070.142.145,00	33.046.175,00	-	-	-	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	38.339.405.036,00	1.003.366.000,00	5.000.000.000,00	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	134,84
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.194.562.974,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.102.500.000,00	1.157.625.000,00	-16,19
5.2	BELANJA MODAL	74.968.046.020,00	87.148.753.000,00	88.724.292.376,11	58.907.778.980,42	59.423.978.503,72	59.168.716.384,61	-5,98

Kode	Uraian	APBK 2024 (Audited)	2026	2027	2028	2029	2030	Rata rata Pertumbuhan (%)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.126.037.503,00	6.515.473.465,00	6.580.628.199,65	1.058.221.080,65	1.068.803.291,45	1.079.491.324,37	-32,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.908.128.677,00	40.847.023.535,00	41.959.545.616,46	27.263.598.154,17	27.463.355.869,21	26.888.487.523,76	-8,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.023.603.540,00	39.586.256.000,00	39.982.118.560,00	30.381.939.745,60	30.685.759.143,06	30.992.616.734,49	11,97
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.768.810.300,00	200.000.000,00	202.000.000,00	204.020.000,00	206.060.200,00	208.120.802,00	-20,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.141.466.000,00	-	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	851.092.325,00	1.500.000.000,00	18.000.000.000,00	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	238,88
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	851.092.325,00	1.500.000.000,00	18.000.000.000,00	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	238,88
5.4	BELANJA TRANSFER	102.760.650.562,00	102.157.613.840,00	103.993.828.714,00	104.513.797.857,00	105.036.366.846,00	105.036.366.846,00	0,74
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.760.650.562,00	102.157.613.840,00	103.993.828.714,00	104.513.797.857,00	105.036.366.846,00	105.036.366.846,00	0,74
	Jumlah Belanja	660.975.864.813,50	613.917.666.398,00	650.955.768.080,96	635.282.976.724,58	650.802.349.952,07	666.733.998.131,12	-0,35
	Total Surplus/(Defisit)	13.210.907.744,71	25.390.823.994,95	3.928.744.297,00	-	-	-	-
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.696.781.780,30	18.572.502.208,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-29,76
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.696.781.780,30	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	12,50
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	16.572.502.208,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.696.781.780,30	18.572.502.208,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-29,76
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.853.922.000,00	43.963.326.202,95	4.928.744.297,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-22,40
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	1.000.000.000,00	23.572.502.208,00	3.928.744.297,00	-	-	-	0,00
6.2.04	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	10.853.922.000,00	20.390.823.994,95	-	-	-	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.853.922.000,00	43.963.326.202,95	4.928.744.297,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-22,40
	Pembiayaan Netto	(9.157.140.219,70)	(25.390.823.994,95)	(3.928.744.297,00)	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeanaan	4.053.767.525,01	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD		657.880.992.600,95	655.884.512.377,96	636.282.976.724,58	651.802.349.952,07	667.733.998.131,12	-1,31

Sumber: BPKD Kota Subulussalam 2024 dan data analisis

2.6.5. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II dan III Tahun 2026-2030.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a) Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c) Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- d) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

2.6.6. Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam proses penganggaran di daerah, dana yang bebas dialokasikan oleh pemda tersebut tentunya pertama akan dialokasikan ke semua belanja wajib (yang diwajibkan oleh undang-undang) termasuk ADD. Namun dalam kondisi jumlah yang terbatas, tidak semua belanja wajib akan terpenuhi. Sehingga akan ada belanja wajib mendapat prioritas pertama dan akan ada mendapat prioritas kedua dan seterusnya. Belanja wajib utama biasanya dikaitkan dengan urusan wajib pemerintah daerah

yang ada di UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja wajib yang muncul akibat undang-undang lain (seperti alokasi wajib minimum 20 persen untuk bidang pendidikan dan lima persen untuk bidang kesehatan), tentu menjadi tingkatan berikutnya untuk didanai. Sehingga, dari sudut pandang pemerintah kabupaten/kota, pemenuhan kewajiban ADD akan menjadi kewajiban berikutnya setelah kebutuhan dana untuk urusan wajib terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa peta kapasitas fiskal daerah dihitung dengan dua tahap, yaitu: tahap I Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dan tahap II Perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Untuk menghitung kapasitas fiskal dalam rangka memenuhi belanja wajib (ruang fiskal), dimulai dengan identifikasi dana yang leluasa (bebas) dialokasikan oleh pemda, yang biasanya disebut dengan penerimaan umum.

Sementara itu pendapatan daerah lainnya seperti Dana Alokasi Umum yang peruntukannya sudah ditetapkan, Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, dana transfer khusus lainnya, tidak bebas digunakan oleh daerah. Dana yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat tersebut, pada dasarnya juga akan jadi bagian dari belanja wajib, terutama untuk urusan wajib layanan dasar yang menjadi tugas daerah. Perhitungan kapasitas fiskal daerah Kota Subulussalam tahun 2023-2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.98.
Kapasitas Fiskal Kota Subulussalam 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan	456.787.346.540,00	451.622.788.311,21	397.330.404.372,00
Pendapatan Asli Daerah	82.581.296.301,00	64.293.336.422,21	66.285.368.889,00
Pendapatan Transfer	349.306.550.172,00	381.109.760.279,00	331.045.035.483,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	6.219.691.610,00	-
Penerimaan Pembiayaan Tertentu	24.899.500.067,00	7.025.546.000,00	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.899.500.067,00	2.696.781.780,30	-
Sub Total	481.686.846.607,00	458.648.334.311,21	397.330.404.372,00
Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan	211.690.812.311,00	222.563.984.247,00	229.952.327.000,00
Pengajian Formasi PPPK	5.871.150.000,00	5.103.801.281,00	5.199.840.000,00
Bidang Pendidikan	24.520.779.000,00	41.480.120.000,00	41.480.120.000,00
Bidang Kesehatan	30.653.193.000,00	20.607.276.000,00	20.607.276.000,00
Bidang Pekerjaan Umum	24.945.545.000,00	18.032.120.999,00	18.032.121.000,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	39.727.032.000,00	52.831.692.326,00	53.349.664.000,00
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	59.956.140.000,00	55.190.992.674,00	58.236.112.000,00
Dana Otonomi Khusus	26.016.973.311,00	29.317.980.967,00	33.047.194.000,00
Belanja Tertentu	201.311.373.334,00	228.390.482.189,00	235.155.905.287,00
Belanja Pegawai	194.547.923.334,00	225.335.202.444,00	228.966.307.571,00

Uraian	2023	2024	2025
Belanja Bunga	6.763.450.000,00	2.103.279.745,00	6.189.597.716,00
Belanja Bagi Hasil	-	952.000.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	99.956.755.000,00	101.811.650.562,00	103.555.430.690,00
Dana Desa	66.956.755.000,00	66.956.755.000,00	66.956.755.000,00
Alokasi Dana Desa	33.000.000.000,00	34.854.895.562,00	36.598.675.690,00
Pengeluaran Pembiayaan Tertentu	24.000.000.000,00	10.853.922.000,00	24.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	24.000.000.000,00	10.853.922.000,00	24.000.000.000,00
Sub Total	437.002.185.645,00	461.808.388.436,00	489.108.232.287,00
KFD	918.689.032.252,00	920.456.722.747,21	886.438.636.659,00
Belanja Pegawai	194.547.923.334,00	225.335.202.444,00	228.966.307.571,00
RFKD	4,72	4,08	3,87

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis

2.7.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan bertujuan agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas kehidupan dan dapat memperbaiki kesejahteraan dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya terwujud kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat, secara menyeluruh. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, terdapat permasalahan sesuai kondisi daerah. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, perlu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan dengan penuh kehati-hatian, hal ini sangat penting dalam upaya perumusan kebijakan publik. Suatu analisis permasalahan pembangunan bertujuan untuk menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah dan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, capaian realisasi indikator pembangunan sudah dalam kondisi baik, namun masih terdapat permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan juga munculnya permasalahan baru yang perlu diperhatikan. Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 Tahap I, ditemukan 8 (delapan) masalah utama di Kota Subulussalam dalam rangka mewujudkan tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Subulussalam 2025-2045.

Secara sistematis uraian masalah utama, masalah daerah dan permasalahan renstra sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2025-2045

tahap I dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.7.1.1 Tingginya angka defisit dan hutang daerah

Tingginya angka defisit dan hutang daerah Kota Subulussalam merupakan persoalan fiskal yang kompleks dan bersifat struktural. Defisit anggaran yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja, tetapi juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor kelembagaan, kebijakan fiskal yang tidak realistis, serta lemahnya kontrol dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut beberapa poin penting yang menyebabkan tingginya angka defisit dan hutang daerah Kota Subulussalam:

1) Warisan defisit dari pemerintahan sebelumnya

Defisit kas nyata sudah terjadi sejak tahun 2018-2019. Hal ini disebabkan oleh pembatalan saluran DAK Infrastruktur pada tahun 2018 pada pekerjaan yang sudah dilakukan proses tender pada tahun berjalan dan beban defisit ini akibat warisan pengelolaan periode berikutnya (Tabel 2.93). Puncak defisit anggaran adalah pada tahun 2022 yang mana mencapai nilai Rp. 205.856.959.952,00 , kemudian menurun pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp. 110.894.960.262,00. Hal ini diperburuk oleh tumpukan kewajiban pembayaran utang dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada kegiatan fisik dan non-fisik yang belum terbayarkan. Dimana nilai defisit yang semula berkisar Rp31 miliar pada tahun 2019 terus meningkat hingga diproyeksikan mencapai Rp110 miliar pada akhir tahun 2024. Dalam Tabel 2.90 dapat dilihat bahwasanya neraca audited menunjukkan bahwasanya per 31 Desember 2024 total kewajiban Pemerintah Kota Subulussalam mencapai angka Rp. 258,999,595,992.92 yang terbagi dari kewajiban lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang lainnya.

2) Asumsi PAD yang tidak realistis

Salah satu penyebab utama dari defisit anggaran ini adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan aktual. Pemerintah daerah menetapkan asumsi penerimaan yang terlalu optimistis tanpa memperhitungkan realisasi dari penerimaan pendapatan daerah dua tahun terakhir serta kemampuan riil ekonomi lokal dan kapasitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, ketika realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, belanja daerah tetap berjalan sesuai rencana, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal yang signifikan.

3) Pengeluaran melebihi penerimaan

Disisi lain, pola pengeluaran daerah juga menjadi penyumbang utama terhadap membengkaknya defisit. Belanja operasional, termasuk honorarium, biaya

perjalanan dinas, dan kegiatan rutin lainnya, cenderung tetap tinggi tanpa dilakukan rasionalisasi yang seimbang dengan kondisi keuangan daerah. Kemudian kurangnya manajemen kas daerah yang bagus dalam mengelola keuangan sehingga harus dipisahkan mana yang prioritas, earmark dan mana yang harus disegerakan realisasi pembayarannya.

4) Kurang transparansi dan kontrol APBD

Lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi keuangan daerah. Tidak optimalnya fungsi pengendalian internal oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta lemahnya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan perangkat daerah lainnya menyebabkan pengeluaran tidak terkendali dan utang semakin menumpuk.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penataan kembali sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada kemampuan fiskal riil, pengendalian belanja yang ketat dan terukur, serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pelayanan publik. Reformasi manajemen keuangan daerah menjadi keharusan untuk mencegah terjadinya krisis fiskal yang lebih dalam dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Kota Subulussalam.

2.7.1.2 Rendahnya capaian pelayanan dasar

Kota Subulussalam menghadapi masalah serius terkait rendahnya capaian pelayanan dasar. Rendahnya capaian pelayanan dasar di Kota Subulussalam mencerminkan adanya hambatan struktural dan sistemik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya capaian tersebut antara lain:

1) Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Kondisi geografis Kota Subulussalam yang berada di wilayah perbatasan dan memiliki sebaran penduduk yang tidak merata, menyebabkan akses terhadap infrastruktur dasar menjadi sangat terbatas. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, air minum, terutama di daerah terpencil dan pinggiran, masih minim dan tidak merata. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Salah satu contohnya ini dapat dilihat salah pada Tabel 2.47 yang mana menunjukkan bahwasanya jalan dalam kondisi baik di Subulussalam

masih pada angka 43,56 persen pada tahun 2024, kemudian cakupan air minum layak yang digunakan oleh rumah tangga pada tahun 2024 sebesar 57,25 persen ini menunjukkan bahwasanya masih ada keterbatasan penyediaan air minum baik yang dikelola oleh pemerintah daerah atau oleh swasta (Gambar 2.36), kemudian untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak merata di lima kecamatan yang ada di Kota Subulussalam.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kualitas tenaga pendidik (Tabel 2.42), tenaga kesehatan (Tabel 2.45), serta petugas pelayanan sosial di Kota Subulussalam masih belum mencukupi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Rendahnya ketersediaan tenaga medis spesialis dan guru berkualifikasi menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Di sisi lain, distribusi tenaga kerja profesional juga tidak merata, yang membuat beberapa wilayah mengalami kekosongan tenaga layanan esensial karena masih terjadi ketimpangan yang ada di Kecamatan Simpang Kiri dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di wilayah Kota Subulussalam.

3) Minimnya Anggaran dan Ketergantungan pada Dana Transfer

Kapasitas fiskal daerah yang rendah membuat pemerintah kota sulit untuk secara mandiri membiayai program pelayanan dasar secara berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat ruang fiskal untuk penguatan layanan dasar menjadi terbatas. Akibatnya, banyak program strategis yang harus ditunda atau tidak dapat dijalankan secara optimal. Dilihat dari hasil realisasi lima tahun terakhir (Tabel 2.87) bahwasanya kontribusi pendapatan asli daerah hanya sebesar 9,16 persen dari seluruh penerimaan yang ada di Kota Subulussalam, yang mana masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar 89,34 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,50. Dari nilai 9,16 ini ada pendapatan yang sifatnya *in out* sebesar 85,70 persen yaitu pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan (BLUD) dan dari zakat, infaq dan sedekah.

4) Manajemen dan Tata Kelola Layanan yang Belum Efisien serta Komitmen Pimpinan

Sistem manajemen pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi antar lembaga, akuntabilitas birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Belum optimalnya integrasi data antar sektor, seperti data pendidikan dan kesehatan, menyebabkan tumpang tindih program, keterlambatan pelayanan, dan inefisiensi anggaran sehingga kinerja pelayanan publik menjadi

tidak konsisten. Kurangnya komitmen pimpinan dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelayanan dasar. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai dnegan tahun 2024 nilai SAKIP Kota Subulussalam memiliki nilai CC dan Indeks Reformasi Birokrasi masih diangka 59,24 dan masih tergolong lambat peningkatan tiap tahunnya

5) Kurang efektifnya Partisipasi Masyarakat dan Edukasi Publik

Pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Subulussalam dalam menjaga kesehatan keluarga, mengikuti program pendidikan, serta memanfaatkan layanan publik sudah mulai baik dan meningkat tetapi masih kurang efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya kampanye informasi, pendidikan masyarakat (public awareness), dan pemberdayaan komunitas lokal. Ketidaktahuan atau ketidakpercayaan terhadap layanan publik sering kali membuat program pemerintah tidak maksimal dalam penerapannya di lapangan.

Rendahnya capaian pelayanan dasar di Kota Subulussalam bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan kapasitas fiskal, lemahnya SDM layanan publik, serta masih terbatasnya sistem tata kelola yang efektif. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus bersifat sistemik melalui reformasi tata kelola pelayanan publik, penguatan kapasitas daerah, dan peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

2.7.1.3 Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik belum optimal

Tata kelola pemerintahan daerah merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Di Kota Subulussalam, upaya peningkatan kesadaran pegawai melalui pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar layanan. Namun, tantangan struktural masih menghambat implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara menyeluruh. Struktur organisasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan penempatan sumberdaya aparatur yang tepat serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender. Jenis pelayanan juga harus diberikan secara maksimal dengan menerbitkan inovasi-inovasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Untuk meningkatkan transformasi tata kelola pemerintah dan optimalisasi pelayanan publik, diperlukan komitmen kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

reformasi tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Subulussalam untuk memperbaiki tata kelola pemerintah secara menyeluruh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memerangi korupsi, memperkuat kapasitas institusi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam secara keseluruhan. Berikut beberapa indikator yang menyebabkan belum optimalnya transformasi dan tatakelola pemerintah Kota Subulussalam, sebagai berikut:

- 1) Reformasi birokrasi yang belum optimal, dari hasil evaluasi KemenPAN-RB menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Subulussalam bernilai CC pada tahun 2024, termasuk dalam kategori yang belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya pada area manajemen kinerja, pengawasan, pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja, dan belum mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu B.
- 2) Pemanfaatan digital untuk pelayanan publik belum optimal, hal ini ditandai dengan rendahnya nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Subulussalam pada Tahun 2024 masih berada pada kategori cukup, yaitu sebesar 2,48 dan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan belum berjalan secara menyeluruh, baik dari aspek tata kelola data, infrastruktur TIK, maupun interoperabilitas sistem antar instansi.
- 3) Pelayanan publik yang belum optimal, ditandai dengan nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Subulussalam pada Tahun 2024 memiliki nilai B- lebih rendah dari Provinsi Aceh dengan nilai A. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketersediaan layanan berbasis digital, pemerataan pemanfaatan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap beberapa layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan.
- 4) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja, ditandai dengan nilai Sakip Kota Subulussalam pada Tahun 2024 memiliki nilai CC, belum mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu B. Kelemahan ini diperparah oleh rendahnya kapasitas aparatur, kurangnya penguatan sistem merit, serta minimnya pengawasan dan akuntabilitas internal.

2.7.1.4 Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing baik tingkat lokal, regional, maupun nasional

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal masih menjadi tantangan strategis dalam pembangunan daerah Kota Subulussalam. Kondisi ini ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya keterampilan kerja masyarakat, dan lemahnya daya saing SDM di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal ini ditandai dengan:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Subulussalam tahun 2024 yang hanya mencapai 70,64, yang berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Aceh sebesar 75,36 dan nasional sebesar 75,02. Capaian IPM ini menunjukkan masih lemahnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat yang menjadi indikator utama pembangunan manusia.
- 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, ditunjukkan oleh rendahnya rata-rata lama sekolah dan capaian mutu pembelajaran. Berdasarkan data tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Subulussalam tercatat sebesar 8,43 tahun, terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar dan belum menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, minimnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil, serta tingginya angka putus sekolah.
- 3) Tingginya angka stunting dan kemiskinan, yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak dan produktivitas generasi muda yang dapat memperburuk kualitas SDM. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Kota Subulussalam masih berada pada angka 16,38 persen, sedangkan prevalensi stunting sudah mengalami penurunan signifikan ditahun 2024 menjadi 27,5 persen, jauh menurun dari tahun 2022 sebesar 47,9 persen. Tingginya angka stunting pada tahun sebelumnya mencerminkan permasalahan gizi kronis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, serta produktivitas di masa depan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi komprehensif dalam sektor kesehatan masyarakat, terutama pemenuhan gizi pada ibu hamil, balita, serta peningkatan sanitasi dan layanan kesehatan dasar.
- 4) Tingkat inovasi daerah Kota Subulussalam juga masih tergolong rendah, tercermin dari nilai indeks inovasi daerah tahun 2024 sebesar 43,88. Rendahnya posisi ini menunjukkan bahwa ekosistem inovasi, termasuk kreativitas

pemerintah daerah dalam mendorong kebaruan dan efisiensi pelayanan publik, belum berkembang secara optimal.

- 5) Indeks Daya Saing Investasi Daerah Kota Subulussalam tahun 2023 tercatat sebesar -1,173, yang merupakan peringkat terendah dari 23 kabupaten/kota di Aceh, jauh di bawah Kota Banda Aceh yang mencatat indeks tertinggi sebesar 1,540. Kondisi ini mencerminkan rendahnya daya tarik daerah terhadap investasi akibat kurangnya SDM yang siap kerja, minimnya ekosistem inovatif, serta belum berkembangnya sistem pelayanan investasi yang efisien dan ramah investor.

Rendahnya indikator-indikator tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan SDM di Kota Subulussalam belum berbasis pada kebutuhan zaman dan dunia usaha, serta belum terintegrasi dengan penguatan inovasi, teknologi, dan daya saing daerah.

2.7.1.5 Tingginya Angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kota Subulussalam. Meskipun terdapat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan, angka kemiskinan Kota Subulussalam tercatat sebesar 16,38 persen pada tahun 2024, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Aceh. Kondisi ini memperlihatkan masih banyaknya penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan dasar secara layak, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Hal ini tergambar dari:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Subulussalam tahun 2024 tercatat sebesar 5,12 persen, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Aceh (5,75 persen), namun angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,91 persen). Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan lapangan kerja yang produktif dan inklusif belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja, terutama yang berpendidikan rendah dan berkeahlian terbatas.
- 2) Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang masih rendah, tercermin dari PDRB per kapita Kota Subulussalam tahun 2024 yang hanya sebesar Rp. 27,88 juta, jauh di bawah Provinsi Aceh sebesar Rp. 44,78 juta dan nasional sebesar Rp. 78,62 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi per individu masih sangat terbatas, akibat struktur ekonomi daerah yang belum bertransformasi secara signifikan menuju sektor produktif bernilai tambah tinggi.

- 3) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Subulussalam hanya sebesar Rp. 8,49 juta per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Aceh Rp. 10,81 juta dan nasional Rp. 12,34 juta. Rendahnya daya beli ini menandakan lemahnya konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan keterbatasan daya jangkauan masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Subulussalam bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi inklusif, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, serta lemahnya perlindungan sosial dan akses layanan dasar. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, melalui penguatan kapasitas pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi lintas sektor.

2.7.1.6 Kerentanan ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Namun, Kota Subulussalam saat ini menghadapi permasalahan serius terkait kerentanan pangan. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024, Kota Subulussalam mencatat skor sebesar 41,12 dari skala 0–100, menjadikannya sebagai kota dengan ketahanan pangan terendah di Indonesia dan tergolong dalam kategori rentan (prioritas II).

Nilai IKP yang sebesar 41,12 mencerminkan rendahnya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pada tiga pilar ketahanan pangan—*availability* (ketersediaan), *access* (akses), dan *utilization* (pemanfaatan)—yang belum terpenuhi secara memadai oleh warga Subulussalam.

2.7.1.7 Investasi dalam negeri dan luar negeri yang Lesu

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah.

Kualitas investasi dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Investasi, pada tahun 2023 Kota Subulussalam merupakan Kota di Provinsi Aceh dengan Indeks Daya

Saing Investasi terendah sebesar -1,173 dan yang tertinggi yaitu Kota Banda Aceh sebesar 1,540, sementara itu Kota Subulussalam masih berada di peringkat 23 sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Berikut ini beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab lesunya investasi di Kota Subulussalam:

- 1) Ketidakpastian Politik dan Hukum: Ketidakpastian politik dan hukum seringkali menjadi hambatan besar bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Konflik politik, ketidakstabilan keamanan, serta perubahan regulasi yang tidak konsisten dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya.
- 2) Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas terhadap listrik dan air bersih, serta layanan komunikasi yang terbatas, dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menurunkan daya tarik investasi.
- 3) Kurangnya Akses Terhadap Modal dan Kredit: Kurangnya akses terhadap modal dan kredit dapat menjadi penghalang bagi pengusaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Ketersediaan fasilitas perbankan dan lembaga keuangan yang terbatas dapat membatasi kemampuan pengusaha untuk memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.
- 4) Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, inflasi yang tinggi, dan ketidakstabilan pasar keuangan, dapat membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya. Ketidakpastian ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun internal, dan mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang.
- 5) Kurangnya Sarana Penunjang Bisnis: Fasilitas dan dukungan bagi pengembangan bisnis, seperti inkubator bisnis, pusat inovasi, dan pelatihan kewirausahaan, seringkali kurang tersedia di wilayah yang lesu investasi. Hal ini dapat menghambat perkembangan usaha baru dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi.
- 6) Ketidakpastian Sosial dan Budaya: Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti konflik antar etnis, perbedaan budaya, dan masalah keamanan, juga dapat mempengaruhi minat investor. Lingkungan sosial yang tidak stabil atau tidak ramah bagi investasi dapat membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
- 7) Kurangnya Promosi dan Pemasaran: Kurangnya upaya promosi dan pemasaran potensi investasi di Kota Subulussalam dapat membuat investor kurang mengetahui peluang yang tersedia di wilayah tersebut. Promosi yang efektif dan

jaringan yang luas dapat meningkatkan visibilitas wilayah dan menarik minat investor potensial.

- 8) Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi : Ketidakpatuhan masyarakat dalam mendaftarkan jenis usahanya, menjadikan kendala data potensi investasi kota Subulussalam yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Subulussalam.
- 9) Peningkatan layanan investasi berbasis TIK: Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK.

2.7.1.8 Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal

Dalam konteks kekinian Kota Subulussalam memiliki keunggulan komparatif (kedudukan geografis, kekayaan sumber daya alam, populasi penduduk) yang belum dimanfaatkan secara maksimal. RTRW Aceh telah menetapkan Kota Subulussalam sebagai kawasan agroindustri di wilayah barat Aceh. Namun, produktivitas dan daya saing yang rendah untuk pengembangan agroindustri belum mampu diwujudkan pengelolaannya secara optimal, seperti tercermin pada beberapa persoalan berikut:

- 1) Pengelolaan perkebunan sawit yang kurang terkontrol, dapat dilihat dari banyaknya petani dan pabrik kelapa sawit yang masih menggunakan sistem lama, tanpa penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) atau kelola limbah sesuai standar, sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan isu lingkungan, tergambar dari timbulnya kasus-kasus limbah pabrik pengelolaan kelapa sawit yang mencemari aliran sungai. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan limbah industri lokal.
- 2) Deforestasi dan pembukaan lahan yang tidak terkendali, menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan ekosistem. Praktik deforestasi yang tidak berkelanjutan, termasuk penebangan liar dan perambahan hutan untuk pertanian atau pengembangan infrastruktur, dapat menyebabkan kerusakan habitat, erosi tanah, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- 3) Infrastruktur yang belum mendukung seperti irigasi dan distribusi pangan, menyebabkan ketergantungan pada impor pangan, sementara produksi lokal seperti padi, jagung dan ikan masih bersifat sporadis tanpa dukungan sistem produksi yang terencana.
- 4) Kurangnya partisipasi multi-pihak dalam pengelolaan sumber daya alam juga dapat menjadi masalah. Peran serta keterlibatan LSM, swasta dan masyarakat setempat harus saling terintegrasi dan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan

keberlanjutan sumber daya dan memperhitungkan kepentingan mereka dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pembangunan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, promosi praktik-praktik berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

2.7.1.9 Penerapan Syariat Islam belum optimal

Penerapan syariat Islam di Kota Subulussalam belum dilaksanakan secara menyeluruh (kaffah). Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Indeks Melek Alquran di Kota Subulussalam merupakan salah satu kabupaten/kota yang terendah hingga tahun 2023. Selain itu, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, seperti maisir, khalwat, khamar, praktik rentenir, judi *online* hingga pelanggaran berat lainnya yang bersifat pidana. Hingga tahun 2024, pelanggaran syariat Islam yang terjadi sebanyak 8 kasus yang sebagian besar adalah maisir dan khalwat.

Selain itu, beberapa permasalahan terkait implementasi Syariat Islam di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan aturan dan implementasi yang tidak konsisten, keterbatasan sinergi OPD, lembaga agama, dan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menghasilkan interpretasi dan aplikasi hukum yang tidak konsisten di antara individu dan lembaga yang berwenang.
- 2) Kekurangan keterampilan dan pengetahuan petugas penegak hukum Syariat Islam. Ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum atau pengambilan keputusan yang tidak adil.
- 3) Kurangnya kepatuhan masyarakat meskipun hukum syariat islam diberlakukan secara resmi, tidak semua warga Kota Subulussalam sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan tersebut. ini bisa menjadi tantangan bagi otoritas dalam menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat terhadap hukum Syariat Islam.
- 4) Masih minimnya penerapan sertifikasi halal di Kota Subulussalam, hal ini didapatkan dari hasil FGD multi-sektor.
- 5) Pengaruh politik dan ekstremisme, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan hukum Syariat Islam dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak politik atau kelompok

ekstremis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menguatkan kekuasaan politik atau memperkuat ideologi tertentu.

2.7.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil sintesis permasalahan utama daerah dan isu lingkungan strategis, dirumuskan isu strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Penurunan angka defisit dan hutang daerah
 - a. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan basis pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pemungutan pajak dan pengembangan potensi ekonomi lokal
 - b. Efisiensi belanja daerah dengan alokasi anggaran secara tepat sasaran, memperkuat pengadaan barang dan jasa secara efisien serta mengurangi belanja tidak produktif
 - c. Restrukturisasi hutang melalui negosiasi ulang skema pembayaran utang
 - d. Penguatan tata kelola keuangan daerah melalui transparansi dan akuntabilitas APBD, audit kinerja keuangan daerah dan penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja
 - e. Mendorong investasi dan kerja sama ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, menggalang kerja sama dengan swasta/BUMN, dan memaksimalkan dana transfer pusat dengan proyek yang menghasilkan ROI (*return on investment*)
- 2) Peningkatan capaian pelayanan dasar yang berkualitas
 - a. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar, perbaikan fasilitas pelayanan publik serta pemerataan distribusi infrastruktur
 - b. Peningkatan kualitas tenaga pelayanan melalui peningkatan kompetensi guru, dokter, perawat dan tenaga pelayanan publik, penyediaan insentif yang memadai, dan perkuat sistem rekrutmen sesuai dengan kebutuhan daerah
 - c. Digitalisasi layanan publik melalui pengembangan platform digital untuk pelayanan kesehatan (*telemedicine*), pendidikan (*e-learning*), dan administrasi publik serta memastikan akses internet merata
 - d. Peningkatan anggaran efisiensi penggunaan dana melalui alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pelayanan dasar serta mendorong kolaborasi dengan swasta
 - e. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
 - f. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan

- g. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - h. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang permukiman
 - i. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum
 - j. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial
 - k. Peningkatan rumah tangga berakses air minum layak
 - l. Peningkatan rumah tinggal bersanitasi layak
 - m. Pengelolaan persampahan perkotaan yang berkelanjutan
- 3) Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
- a. Penguatan sistem *e-government* dengan mengembangkan platform digital terintegrasi untuk pelayanan publik, meningkatkan interoperabilitas data antar-instansi serta perluas layanan *online one-stop service* (OSS)
 - b. Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, rasionalisasi regulasi, penerapan meritokrasi, pelatihan berbasis kompetensi untuk aparatus
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat, publikasi *open data* anggaran dan kinerja instansi pemerintah, dan optimalisasi peran pengawas internal yang legal
 - d. Peningkatan kualitas layanan dasar
 - e. Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - f. Pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- 4) Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan
- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal melalui perbaikan infrastruktur pendidikan, kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi pendidikan
 - b. Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan
 - c. Pendidikan non-formal dan *lifelong learning* melalui program kesetaraan, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja serta gerakan literasi digital dan finansial
 - d. Penguatan peran sektor swasta dan masyarakat
 - e. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
 - f. Pemberdayaan perempuan dan anak
- 5) Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan
- a. Kebijakan untuk masyarakat menengah ke bawah
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta pengembangan ekonomi lokal

- c. Perluasan lapangan kerja melalui investasi sektor padat karya, program padat karya, dan penguatan sektor informal
 - d. Penguatan pendidikan dan keterampilan melalui beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, pendidikan vokasi dan teknik serta program literasi finansial
 - e. Perlindungan sosial dan kesehatan
 - f. Pengurangan ketimpangan wilayah
 - g. Pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik
 - h. Peningkatan masyarakat dan kesetaraan gender
- 6) Ketahanan dan Kemandirian Pangan
- a. Penguatan produksi pangan lokal melalui intensifikasi pertanian, diversifikasi pangan dan pemanfaatan teknologi pertanian
 - b. Pengembangan infrastruktur pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan logistik dan distribusi yang efisien
 - c. Pemberdayaan petani dan UMKM pangan melalui pelatihan dan edukasi, penguatan koperasi petani dan pemasaran digital
 - d. Inovasi dan teknologi pangan melalui pengembangan pangan fungsional dan alternatif dan *urban farming*
 - e. Mitigasi perubahan iklim dengan menerapkan pertanian berkelanjutan
 - f. Kolaborasi multi-sektor
 - g. Edukasi konsumen melalui gerakan konsumsi pangan lokal
- 7) Peningkatan Kualitas Ekonomi Lokal dan UMKM serta Investasi Daerah
- a. Penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, akses teknologi, serta sertifikasi dan standarisasi
 - b. Pengembangan pasar dan promosi melalui pameran, ekosistem digital dan kemitraan dengan perusahaan besar
 - c. Infrastruktur dan logistik pendukung melalui pembangunan kawasan khusus UMKM dengan fasilitas produksi, gudang dan distribusi, perbaikan jaringan distribusi serta konektivitas digital
 - d. Iklim investasi yang kondusif dengan regulasi, keamanan dan kepastian hukum
 - e. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan inovasi dengan pembentukan pusat inovasi dan *start up* lokal, pengembangan produk unggulan daerah serta integrasi UMKM dengan sektor pariwisata dan pertanian.
 - f. Kolaborasi pentahelix serta pembentukan forum investasi daerah
 - g. Penguatan *branding* dan identitas lokal
- 8) Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- a. Kebijakan dan regulasi yang kuat dibidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - b. Pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, restorasi ekosistem dan pengelolaan air terpadu
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal melalui pendidikan lingkungan, pelibatan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau
 - d. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
 - e. Kerjasama dengan swasta dan pegiat lingkungan
 - f. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 9) Penguatan penerapan syariat Islam
- a. Penguatan pendidikan dan sosialisasi syariat Islam melalui integrasi kurikulum syariah, program dakwah dan penyuluhan serta pendidikan ulama dan dai
 - b. Penguatan hukum dan regulasi melalui harmonisasi hukum nasional dengan syariah, penerapan qanun syariah secara optimal dan memperkuat peran lembaga peradilan syariah
 - c. Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui pengembangan ekonomi syariah, optimalisasi pengelolaan ZISWAF, dan pelarangan riba dan gharar
 - d. Penguatan peran keluarga dan masyarakat melalui pendidikan keluarga islami, komunitas Islami yang kuat dan pengawasan sosial
 - e. Pemanfaatan teknologi dan media
 - f. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat keagamaan
 - g. Perlindungan dari pemahaman yang menyimpang

Tabel 2.99.
Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ACEH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Potensi pemanfaatan lahan	1) Tingginya angka defisit anggaran dan hutang daerah	1) Bencana Hidrometeorologis dan Perubahan Iklim	1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital	1) Keterbatasan Sumber Daya Alam	1) Tingginya dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, kehutanan, dan pertambangan)	1) Potensi bencana hidrometeorologis (banjir, kekeringan, abrasi dan erosi tebing sungai)	1) Penurunan angka defisit dan hutang daerah
2) Potensi pertambangan dan mineral	2) Rendahnya capaian pelayanan dasar	2) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Tutupan Lahan	2) Transformasi Teknologi berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	2) Pencemaran Lingkungan	3) Kebencanaan	2) Potensi sumber daya alam dan jasa ekosistem	2) Peningkatan capaian pelayanan dasar yang berkualitas
3) Potensi Perkebunan	3) Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik belum optimal	3) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas	3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	4) Energi	4) Sosial Ekonomi	3) Pencemaran lingkungan	3) Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
4) Potensi Perikanan	4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing baik tingkat lokal, regional, maupun nasional	4) Kota Layak Huni dan Layak Anak	4) Sumber energi alternatif	5) Peningkatan Urbanisasi Dunia	2) Belum optimalnya diversifikasi dan hilirisasi industri	4) Kesejahteraan masyarakat (pendidikan, ekonomi dan kesehatan manusia)	4) Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan
5) Potensi Ekowisata TAHURA	5) Tingginya Angka kemiskinan	5) Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan	5) Peningkatan Urbanisasi Dunia	6) Pergeseran tata kelola keuangan global	3) Belum meratanya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	5) Kerentanan sosial dan budaya	5) Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan dan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
6) Potensi Pengembangan Jasa		6) Ketahanan dan Kemandirian Pangan	6) Pergeseran tata kelola keuangan global	7) Pertumbuhan ekonomi kelas menengah	4) Tingginya kerentanan dan potensi		6) Ketahanan dan Kemandirian Pangan
7) Produk Unggulan Daerah		7) Penguatan Iklim Investasi yang Hijau dan Inklusif					7) Peningkatan Kualitas Ekonomi Lokal dan UMKM serta
8) Potensi Sungai		8) Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan					
		9) Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ACEH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6) Kerentanan ketahanan pangan	10) Pencemaran dan Pengelolaan Limbah			bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan		Investasi Daerah
	7) Investasi dalam negeri dan luar negeri yang Lesu	11) Peningkatan Kualitas Ekonomi Lokal dan UMKM			5) Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan		8) Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
	8) Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal	12) Kerentanan Sosial dan Budaya			6) Belum optimalnya kualitas SDM, dan masih terjadinya kesenjangan angka partisipasi sekolah jenjang		9) Penguatan penerapan syariat Islam
	9) Penerapan Syariat Islam belum optimal	13) Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Berkelanjutan					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ACEH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					menengah atas/kejuruan dan pendidikan tinggi, serta masih banyaknya tenaga kerja ahli dan terampil yang memilih pindah ke daerah yang lebih maju		
					7) Prevalensi <i>stunting</i> masih relatif tinggi		
					8) Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera, dengan yang tertinggi pada Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen		
					9) Pada daerah- daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi,		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ACEH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas.		

2.8. Kerjasama Daerah

Jumlah kerja sama yang terinventarisir yang masih berlaku mencapai 14 kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepakatan. Ke-14 perjanjian tersebut masih aktif hingga 2025. Diharapkan ke depannya perjanjian semakin terjaring dan meningkatkan implementasi kerja sama yang dibangun.

Tabel 2.100.
Kerjasama Daerah Kota Subulussalam

No.	Nomor	Perihal	Mitra Kerjasama	Tahun Kerjasama	Periode Kerjasama	Masa Berlaku	Lokasi (Kecamatan)	OPD Pengampu	Keterangan
1.	220/015/75.206/2020	Peningkatan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam 10 program pokok PKK terkait dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	PKK Kota Subulussalam	2020	2020-2025	5 Tahun	Seluruh Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Kesepakatan Bersama
2.	220/016/75.206/2020	Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga	Kementerian Agama Kota Subulussalam	2020	2020-2025	5 Tahun	Seluruh Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Kesepakatan Bersama
3.	594.3/06/11.75/MoU/2022	Percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Pemerintah Kota Subulussalam	Badan Pertanahan Nasional	2022	2022-2027	5 Tahun	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanahan	Perjanjian
4.	912/24/11/75/KB/2023	Kerjasama teknis dengan program lanskap berkelanjutan LASR	Swisscontact	2023	2023-2025	3 Tahun	Seluruh Kecamatan	Sekretariat Daerah	Perjanjian Kerja Sama
5.	11/100.3.7.1/II/PKS-Setda/2024	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok	Firma Hukum <i>Pro Justisia</i>	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Bagian Hukum	Perjanjian Kerja Sama
6.	100.3.7 1/500.1.3.1/MOU/2024	Penyediaan dan distribusi beras	Pemkab Aceh Barat Daya	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pangan	Kesepakatan Bersama
7.	100.3.7.1/500.1.3.1/18/PKS/2024	Penyediaan dan distribusi beras	Pemkab Aceh Barat Daya	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pangan	Perjanjian Kerja Sama
8.	100.3.7.1/500.1.3.1/ 27/ MOU/2024	Penyediaan dan Distribusi Bawang Merah dan Cabai	Pemkab Gayo Lues	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Kesepakatan Bersama
9.	100.3.7.1/500.1.3.1/ 28 /PKS/2024	Penyediaan dan Distribusi Bawang Merah dan Cabai	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gayo Lues	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Perjanjian Kerja Sama

No.	Nomor	Perihal	Mitra Kerjasama	Tahun Kerjasama	Periode Kerjasama	Masa Berlaku	Lokasi (Kecamatan)	OPD Pengampu	Keterangan
10.	100.3.7.1/500.15.18/30/PKS/2024	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit di kota Subulussalam yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sawit Tahun anggaran 2024	BPJS Ketenagakerjaan	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Disnakertrans	Perjanjian Kerja Sama
11.	100.3.7.1/500.15.18/38/MOU/2024	Penyediaan dan Distribusi Ikan Laut dan Ikan Tawar	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Perjanjian Kerja Sama
12.	100.3.7.1/500.15.18/39/PKS/2024	Penyediaan dan Distribusi Ikan Laut dan Ikan Tawar	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Kesepakatan Bersama
13.	100.3.7.1/800.2/40/MOU/2024	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam melalui Penyelenggaraan Analis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan Tinggi Terapan	Lembaga Administrasi Negara	2024	2024-2026	2 Tahun	Semua Kecamatan	BKPSDM	Nota Kesepakatan
14.	100.3.7.1/400.7.1/06/PKS/2025	Jejaring pengampuan layanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak	RSUD dr. Zainoel Abidin	2025	2025-2027	2 Tahun	Semua Kecamatan	RSUD Kota Subulussalam	Nota Kesepakatan

2.9. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

2.9.1. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Kota Subulussalam

Arah pembangunan kewilayahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di wilayah Kota Subulussalam di antaranya adalah:

- 1) Kawasan pertumbuhan Perkotaan Subulussalam
 - a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Subulussalam, antara lain melalui:
 - a.1. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - a.2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - a.3. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - a.4. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
 - b. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan Perkotaan Subulussalam (PHTC);
 - c. Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam;
 - d. Pengembangan kota agropolitan Subulussalam;
 - e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, *stroke*, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Subulussalam (PHTC);
 - f. Preservasi jalan ruas Subulussalam Tapaktuan, Subulussalam-Singkil, dan Subulussalam-Salak.
- 2) Kawasan komoditas unggulan sawit dan karet untuk pesisir barat-selatan Aceh;
- 3) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kaban Jahe Kabupaten Karo dimana Preservasi jalan ruas Kabanjahe-Berastagi-Medan, Kabanjahe Sidikalang-Subulussalam, Kabanjahe-Kutacane.

2.9.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBA di Kota Subulussalam

Pembangunan kewilayahan Provinsi Aceh untuk Kota Subulussalam yang disajikan pada RPJM Aceh, yaitu:

- 1) Pengembangan wilayah perkotaan Kota Subulussalam

- 2) Pengembangan kawasan komoditas unggulan sawit dan karet di Kab. Aceh Timur dan Aceh Tamiang) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam)

Sedangkan kegiatan prioritas utama Aceh untuk Kota Subulussalam adalah:

- 1) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya
 - a. Pengembangan Kawasan Padi 20.000 ha (di Abes, Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Lhok, Atim, Langsa, Atam, Bener, Ateng, Galus, Agara, Ajay, Abar, Nagan, Abdya, Asel, Simeulue, Subulussalam, Singkil)
 - b. Pengembangan Kawasan Jagung 10.000 ha (di Abes, Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Bener, Ateng, Galus, Agara, Ajay, Abar, Nagan, Abdya, Asel, Subulussalam, Singkil)
- 2) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
 - a. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan (PUPM dan Kios Pangan) 23 kab/kota
 - b. Pembinaan dan pengembangan Gampong (Desa) B2SA/P2L pada 23 kab/kota
- 3) Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah periode lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Visi dan misi yang disampaikan pada masa pencalonan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 dimana visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam adalah:

“SUBULUSSALAM MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN”

Misi ini dijabarkan untuk Wali Kota Subulussalam dan Wakil Wali Kota Subulussalam selama empat periode pembangunan jangka menengah. Periode pembangunan tahun 2025-2029, visi dan misi Wali Kota Subulussalam dan Wakil Wali Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

“SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran dari visi ini yaitu:

1. **Kota Islami** menggambarkan sebuah kota yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Penerapan nilai-nilai syariat mulai dari level masyarakat, sistem pemerintahan, lingkungan sosial, ekonomi, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai.
2. Mewujudkan Kota Subulussalam sebagai **kota maju** yang berdaya saing tinggi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, kualitas sumber daya, dan pemanfaatan potensi dan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.
3. **Berkelanjutan** adalah kondisi pembangunan Kota Subulussalam yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat.

3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

3.2.1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan

Meningkatkan kualitas pendidikan maksudnya upaya yang dilakukan pada bidang urusan pendidikan sehingga pendidikan di Kota Subulussalam berkualitas. Berkualitas maksudnya adalah pendidikan di Kota Subulussalam mampu berdaya saing pada level infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem pendidikan lokal baik pada tingkat regional, Aceh, Nasional bahkan internasional.

Pembangunan bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; serta meningkatnya kemampuan Iptek. Pengembangan institusi pendidikan yang berdaya saing baik di tingkat provinsi, nasional bahkan global. Pengembangan pendidikan difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan menerapkan kurikulum yang berlaku secara maksimal dalam rangka inisiasi memunculkan potensi peserta didik sehingga memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global (MEA). Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional.

Selain itu, upaya yang dilakukan di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, SDM pendidikan lainnya, serta siswa melalui pelatihan, pendidikan, kompetisi, pengembangan cara belajar, penguatan kurikulum lokal serta peningkatan kesejahteraan SDM pendidikan. Meningkatkan infrastruktur pendidikan baik sarana dan prasarana dasar maupun sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Peningkatan infrastruktur dapat berupa penambahan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu melalui pemberian beasiswa, bantuan pembinaan dan operasional kompetisi siswa berprestasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti subsidi bus sekolah, penyediaan jalan yang berkualitas dan lainnya.

Penguatan sistem tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui pembinaan manajemen pendidikan oleh pihak sekolah sesuai dengan standar nasional. Mensinergikan pelaksanaan pendidikan umum dan

pendidikan keagamaan melalui pengembangan kurikulum lokal. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan kerjasama bidang pendidikan antar-pemda, antar-sekolah, dengan-lembaga pendidikan, perguruan tinggi serta skema kerjasama lainnya.

Program unggulan yang akan dihadirkan adalah

- 1) Penyediaan 2 (dua) sekolah dan dayah penggerak setiap kecamatan;
- 2) Penyediaan 2 (dua) guru penggerak setiap sekolah/dayah;
- 3) terdapat minimal 2 bus sekolah baru setiap kecamatan;
- 4) perguruan tinggi di Kota Subulussalam (pemda dan swasta).

Meningkatkan kualitas kesehatan maksudnya upaya yang dilakukan pada bidang urusan kesehatan sehingga derajat kesehatan di Kota Subulussalam tinggi dan berkualitas. Berkualitas maksudnya adalah Kota Subulussalam mampu berdaya saing baik pada tingkat regional, Aceh, Nasional bahkan internasional pada bidang urusan kesehatan. Berdaya saing terutama pada sistem tata kelola manajemen rumah sakit umum daerah, merangsang rumah sakit swasta, peningkatan persebaran usaha bidang kesehatan seperti klinik dan apotek serta kualitas pelayanan pada tingkat puskesmas, kecamatan, desa hingga tingkat keluarga.

Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, juga mampu menurunkan masalah-masalah kesehatan nasional bahkan internasional secara signifikan agar tercipta derajat kesehatan yang berkualitas. Penurunan *stunting* menjadi prioritas utama pada tahap pembangunan ini pada bidang kesehatan. Selain itu, juga menciptakan ketahanan dan keberlanjutan program JKN untuk masyarakat Aceh yang diakibatkan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2028.

Upaya yang dilakukan di antaranya adalah pemerataan ketersediaan dokter baik dokter umum maupun spesialis pada tingkat puskesmas, pengadaan tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, menjamin putra/putri daerah menjadi prioritas dalam pengadaan kebutuhan dokter di daerah, serta menjamin kesejahteraan dokter yang ditempatkan di daerah seperti pemberian insentif penghasilan khusus untuk dokter spesialis. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui pembinaan, pelatihan dan pertukaran informasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan terutama pada puskesmas rujukan, poskesdes, dan rumah sakit umum daerah.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Subulussalam melalui kampanye PHBS, pembinaan keluarga sehat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan gizi dan nutrisi ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan juga sebagai upaya penurunan angka *stunting*. Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan.

Penguatan sistem tata kelola dan manajemen kesehatan di daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melakukan kerjasama di bidang kesehatan, seperti pertukaran sumber daya, penempatan dokter-dokter muda dari perguruan tinggi, dan sistem skema kerjasama lainnya.

Program unggulan yang dihadirkan di antaranya:

- 1) Memastikan IGD Puskesmas aktif 24 jam;
- 2) Menyediakan bantuan 2 juta rupiah bagi pasien rujuk kurang mampu ke luar kota;
- 3) Menyediakan beasiswa bagi tenaga kesehatan.

Pada misi ini juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan hak-hak dasar dasarnya. Upaya yang dilakukan dengan menyediakan layanan pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak, memberdayakan perempuan baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan, penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik ramah anak. Program unggulan yang dihadirkan yaitu Mewujudkan Kota Subulussalam Layak Anak dengan menyediakan 2 (dua) fasilitas ramah anak setiap kecamatan.

3.2.2. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Subulussalam secara menyeluruh pada semua lapisan elemen masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, persaudaraan dan ketakwaan sehingga mewujudkan Kota Subulussalam yang harmoni, berbudaya, dan beradab. Seluruh komponen masyarakat telah mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Upaya yang dilakukan dengan peningkatan peran ulama dalam pengambilan kebijakan. Menyelenggarakan pendidikan agama yang berkualitas melalui pengembangan kurikulum lokal pada sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, meningkatkan peran TPA, TPQ, pesantren, dayah, serta balai pengajian masyarakat. Menghidupkan pengadilan syariat Islam. Meningkatkan

penegakan hukum dengan penguatan pada penyuluhan dan sosialisasi dengan menggandeng peran masyarakat. Meningkatkan kapasitas aparat penegakan Syariat Islam.

Upaya lainnya dengan menjalin kerjasama dengan TNI, Polri, dan lembaga pelaksanaan hukum lainnya dalam rangka penerapan Syariat Islam secara menyeluruh serta menjaga keharmonisan antar-umat beragama, antar-kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat. Peningkatan peran adat dan budaya dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan tokoh masyarakat adat dan tokoh budaya sehingga penerapan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai islami.

Program unggulan yang dihadirkan di antaranya adalah menyelenggarakan 2 (dua) kali *event-event* santri dan promosi kegiatan santri dalam setahun.

3.2.3. Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan mewujudkan Kota Subulussalam memiliki kedaulatan ekonomi rakyat dimana masyarakat mampu mengembangkan perekonomian rakyat berdasarkan pengembangan sumber daya lokal, potensi unggulan daerah, dan komoditas unggulan daerah. Program unggulan yang dihadirkan adalah dengan penggunaan lahan area penggunaan lahan (APL) pasca lahan HGU PT. Laot Bangko yang sudah kembali ke negara seluas sekitar 3.000 hektar dengan APL seluas 1400 hektar. Penggunaan lahan ini difokuskan untuk:

- 1) 2 (dua) hektar per 1 kepala keluarga kurang mampu.
- 2) 5 (lima) hektar per 1 dayah atau pesantren dalam rangka mewujudkan dayah/pesantren mandiri.

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk lebih memantapkan pengembangan agroindustri yang berbasis kepada keunggulan sumberdaya alam yang tersedia dan teknologi yang semakin berkembang. Industri dan perdagangan diupayakan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antar-industri, dan peningkatan tumbuhnya industri masa depan sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi semakin kompetitif dengan semakin terpadunya antara industri manufaktur dengan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang handal. Agroindustri yang dikembangkan harus diikuti dengan pemantapan kualitas untuk merespons setiap tuntutan konsumen, pada tahap ini diperlukan: pengelolaan kualitas rantai produksi (*supply chain management*) yang efektif dan efisien; budaya kualitas dan merek; sertifikasi dan standarisasi produk; respons terhadap upaya mencapai

kepuasan konsumen; kelembagaan penunjang yang efisien; membangun kemitraan untuk membuka jejaring perdagangan nasional dan internasional sesuai dengan tuntutan MEA.

Pembangunan di bidang ekonomi juga difokuskan pada transformasi digital pada industri kecil menengah dan UMKM. Transformasi digital pada UMKM ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan media daring lainnya untuk memasarkan produk, meningkatnya pendapatan daerah pada pajak penghasilan, dan semakin meluasnya jangkauan produk-produk daerah hingga mencapai seluruh Provinsi Aceh, Regional Sumatera, Nasional, bahkan Internasional serta munculnya *start up* daerah.

Upaya dalam memperkuat UMKM dengan pemberian akses permodalan, bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan, kemitraan, dan kemudahan birokrasi. Mendukung peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian dan peternakan melalui modernisasi pertanian, perbaikan dan peningkatan infrastruktur pertanian, menjaga stabilitas harga produk pertanian, serta disertifikasi produk. Memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka meningkatkan hajat hidup orang banyak. Pengembangan koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi agar lebih mandiri dan profesional, melibatkan koperasi dalam berbagai program pembangunan, serta meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan koperasi. Penerapan ekonomi syariah dengan memberdayakan lembaga Baitul Mal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian modal usaha dan pemberdayaan UMKM. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penggunaan produk lokal dan komoditas lokal secara maksimal serta meningkatkan kampanye 1 rumah tangga 1 perkarangan tanaman pangan. Peningkatan kampanye konsumsi produk lokal dengan kampanye cinta produk lokal, peningkatan data tarik produk lokal, serta peningkatan standarisasi produk.

Upaya lainnya bidang perdagangan dengan menjadikan Kota Subulussalam sebagai pusat sarana perdagangan terutama wilayah selatan Aceh dan pintu masuk dan keluar Aceh ke Sumatera Utara. Meningkatkan investasi daerah dengan menyediakan iklim investasi yang ramah investor. Meningkatkan peran swasta dengan mendorong perusahaan swasta untuk menjalankan program CSR yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan masyarakat serta mengembangkan kemitraan antara perusahaan swasta dengan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

3.2.4. Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Subulussalam dengan memberikan pelayanan PRIMA kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan yang adil dan merata, serta menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membantu menghapus defisit kota. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah strategis dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga tata laksana pemerintahan dalam mengoordinasi pelaksanaan pelayanan pada perangkat daerah. Penyusunan dan pembaruan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi prioritas, dengan tujuan memperkuat kelembagaan dan membangun sinergi yang solid dengan pemerintah provinsi, pusat, dan lembaga terkait lainnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menerapkan kebijakan berbasis bukti dengan menggunakan kajian-kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan sehingga menciptakan pemerintahan yang inovatif dan kreatif dan mampu berdaya saing di tingkat nasional. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi yang menyeluruh sehingga menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik menjadi perhatian utama, diwujudkan melalui penetapan standar kinerja yang jelas untuk semua perangkat daerah, mulai dari level instansi hingga individu. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, dan sistem *reward* serta *punishment* diterapkan secara adil untuk memastikan setiap pihak bertanggung jawab atas tugasnya. Kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), disertai penerapan sistem meritokrasi dalam pengangkatan dan promosi jabatan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperkuat dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Setiap aduan dari masyarakat dipastikan ditindaklanjuti untuk menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintahan. Selain itu, peran lembaga penelitian dan pengembangan juga ditingkatkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*). Inovasi dan kreativitas perangkat daerah didorong dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pelayanan publik agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.

Teknologi dan informasi digunakan secara menyeluruh untuk mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, dengan tujuan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Subulussalam. Transparansi pemerintah daerah juga diperkuat melalui penyediaan akses informasi publik yang mudah dan luas tentang pengelolaan keuangan daerah, serta publikasi laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu.

Pengawasan internal pemerintah diperkuat dengan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan anggaran, dan pemberian wewenang yang cukup untuk pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh. Pemerintah desa dan kecamatan didorong untuk meningkatkan perannya dalam pelayanan, dengan memastikan PATEN terlaksana secara optimal. Pengembangan potensi pendapatan daerah juga dilakukan dengan merasionalkan belanja daerah sesuai dengan kemampuan, serta mencari sumber pendapatan lainnya melalui kerjasama investasi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan optimalisasi CSR dalam pembangunan.

Program unggulan yang dihadirkan adalah:

- 1) Menyehatkan kondisi keuangan Kota Subulussalam dengan nol defisit dan bebas hutang dalam waktu 3 (tiga) tahun kepemimpinan Rabbani;
- 2) Memberikan pelayanan prima yang baik dan bersih pada semua sektor;
- 3) Mewujudkan reformasi birokrasi;
- 4) Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

3.2.5. Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Misi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan memastikan akses yang setara terhadap fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi di semua wilayah. Selain itu, misi ini bertujuan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan terbuka peluang investasi yang lebih luas, meningkatnya konektivitas antar-wilayah, percepatan distribusi barang dan jasa, serta pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemantapan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, sistem transportasi darat yang semakin baik mendukung aktivitas ekonomi yang mengarah pada pemantapan kondisi perekonomian yang berbasis agroindustri dimana arus pergerakan orang, barang, dan jasa lebih difokuskan pada aktivitas pabrikasi dan kegiatan ekspor. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sudah membaik seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan industri dan

pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukungnya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, juga terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Memperkuat sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika melalui pengembangan iptek dan peningkatan daya saing perlu dilakukan dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian dan dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah upaya dilakukan, termasuk membangun sistem perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis data yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, seperti kerjasama pemerintah dan swasta (KPSS) serta pendanaan lainnya, juga menjadi fokus. Pemanfaatan teknologi terbaru dan kolaborasi multisektoral diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi rumah tangga guna mengurangi masalah kesehatan, khususnya *stunting*. Selain itu, memastikan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu adalah langkah penting dalam mewujudkan wilayah perumahan dan permukiman yang sehat dan layak. Upaya lainnya meliputi peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memperluas aksesibilitas antar-wilayah. Ini mencakup juga kolaborasi untuk pembangunan jalan dan jembatan di luar wewenang kota. Meningkatkan mitigasi bencana melalui kerjasama dengan kabupaten tetangga, provinsi, dan pemerintah nasional juga menjadi bagian penting, khususnya dalam menangani bencana alam yang sering terjadi setiap tahun. Pengembangan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan, membangun pusat-pusat wilayah publik dan tempat rekreasi baru, serta meningkatkan peran ruang terbuka hijau. Pengelolaan persampahan secara menyeluruh di lima kecamatan adalah langkah tambahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Subulussalam periode 2025-2029 beserta indikator dan target kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2025-2030

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VISI : SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN												
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN												
1.1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia		Indeks Pengetahuan	Angka	0,706	0,717	0,725	0,734	0,742	0,750	0,758	
1.1.1.		Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Tinggi	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,75	8,87	8,99	9,11	9,23	9,35	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,31	15,32	15,47	15,62	15,77	15,92	16,07	
1.2.	Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Angka	0,766	0,769	0,772	0,774	0,777	0,780	0,785	
1.2.1.		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,8	70,01	70,15	70,3	70,5	70,7	71	
MISI 2: MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM												
2.1.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah		Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Angka	83,9	84	85	86	87	88	89	
2.1.1.		Menguatnya Budaya dan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat Islam	Cakupan Budaya dan Adat yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2.1.2.		Menguatnya Pelaksanaan Syariat Islam	Indeks Melek Al-Quran	Angka	83,25	83,5	83,75	84	84,25	84,5	84,75	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pada Setiap Lapisan Masyarakat										
2.2.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat		Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	Kasus	125,17	120	110	100	90	80	70	
2.2.1.		Meningkatnya kenyamanan masyarakat (Trantibunlinmas dan Polhukam)	Persentase Penurunan Kejadian Kejahatan	Persen	22,85	10	10	10	10	10	10	
MISI 3 : MEWUJUDKAN TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN												
3.1.	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5	4,6	
3.1.1.		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah yang signifikan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Persen	26,05	26,06	26,07	26,08	26,09	26,1	26,11	
3.1.2.		Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Sumber Daya Lokal	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,37	19,38	19,39	19,4	19,42	19,44	19,47	
			Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan	Persen	16,64	16,74	16,84	16,94	17,04	17,14	17,24	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor									
3.1.3.		Mewujudkan Iklim Investasi yang ramah Investor	Kontribusi PDRB sektor Jasa Perusahaan	Persen	0,26	0,265	0,27	0,275	0,28	0,285	0,29	
3.2.	Menurunkan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	16,38	13,88	13,63	13,38	13,13	12,88	12,5	
3.2.1.		Meningkatnya Intervensi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Memperluas Variasi Lapangan Pekerjaan	Tingkat kemiskinan Ekstrim	Persen	0,77	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,12	4,87	4,5	4,2	3,75	3,25	2,75	
MISI 4: MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH												
4.1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang reformatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,24	60	62	64	66	68	70	
4.1.1.		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan PRIMA	Nilai SAKIP	Angka	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,82	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,1	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.2.		Tranformasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Sangat Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Baik	Baik	Baik	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	3,3	3,36	3,39	3,41	3,44	3,47	3,49	
MISI 5 : MEWUJUDKAN TERCIPTANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA												
5.1.	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur Pelayanan Dasar secara Merata Berbasis Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana serta Berkelanjutan	Indeks Pilar Infrastruktur IDSD	Angka	2,05	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,17		
5.1.1.		Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Rata-rata capaian kinerja Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persen	69,73	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
5.1.2.		Terwujudnya Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,28	74,5	74,75	75	75,25	75,5	75,75	
			Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	

3.4. Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam

Terdapat 8 Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Periode 2025-2030, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Umum Dan Pendidikan Dayah
- 2) Pembangunan Perguruan Tinggi
- 3) Pelayanan Kesehatan Gratis Prima
- 4) Nol Defisit Dan Bebas Hutang Dalam Waktu 3 (Tiga) Tahun Kepemimpinan Rabbani
- 5) 2 In 1 (2 Hektar Kebun Kelapa Sawit Untuk 1 Kepala Keluarga Kategori Kurang Mampu)
- 6) 5 In 1 (5 Hektar Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Untuk 1 Pondok Pesantren/Dayah)
- 7) Pelayanan Prima Yang Baik Dan Bersih Pada Semua Sektor
- 8) Kota Santri Dan Kota Layak Anak

Tabel 3.2.
Program Unggulan Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN	MISI 2. MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM	MISI 3. MEWUJUDKAN TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN	MISI 4. MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH	MISI 5. MEWUJUDKAN TERCIPTANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA
1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR UMUM DAN PENDIDIKAN DAYAH 2. PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI 3. PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PRIMA 4. KOTA LAYAK ANAK	KOTA SANTRI	1. 2 IN 1 (2 HEKTAR KEBUN KELAPA SAWIT UNTUK 1 KEPALA KELUARGA KATEGORI KURANG MAMPU) 2. 5 IN 1 (5 HEKTAR PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT UNTUK 1 PONDOK PESANTREN/DAYAH)	1. NOL DEFISIT DAN BEBAS HUTANG DALAM WAKTU 3 (TIGA) TAHUN KEPEMIMPINAN RABBANI 2. PELAYANAN PRIMA YANG BAIK DAN BERSIH PADA SEMUA SEKTOR	

3.5. Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam

Adapun program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- 1) Menghapuskan angka defisit anggaran dan hutang daerah;
- 2) Pembayaran gaji, tambahan penghasilan, dan insentif guru dan tenaga kesehatan tepat waktu;
- 3) Pembayaran TPP dan Honor tepat waktu;
- 4) Penuntasan pembayaran gaji aparat kampung;
- 5) Pengisian jabatan Kepala Sekolah sesuai dengan Seleksi Calon Kepala Sekolah pada Sistem Pengangkatan KSPS;
- 6) Penyediaan 2 Guru Penggerak setiap Sekolah dan Dayah/Pesantren;
- 7) Penyediaan 2 Sekolah Penggerak dan Dayah/Pesantren setiap Kecamatan;
- 8) Kota Layak Anak;
- 9) Menjamin ketersediaan obat di RSUD Kota Subulussalam dan Puskesmas;
- 10) Penurunan angka *stunting*;
- 11) Memastikan IGD Puskesmas aktif 24 jam;
- 12) Bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk keluarga pasien rujuk kurang mampu;
- 13) Peningkatan peran ulama dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- 14) Menyelenggarakan *event* santri dan keagamaan setiap tahun;
- 15) Bantuan modal usaha, peralatan dan perlengkapan UMKM;
- 16) Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
- 17) Optimalisasi program CSR perusahaan swasta;
- 18) Menghapuskan segala bentuk pungutan liar (pungli);
- 19) Pembangunan konektivitas infrastruktur antar-wilayah terutama wilayah pertanian dan perkebunan;
- 20) Aktivasi PDAM Babah Luhung, PDAM Rundeng dan PDAM Jontor;
- 21) Penyediaan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu;
- 22) 2 hektar kebun kelapa sawit per 1 kepala keluarga kurang mampu dan 5 hektar kebun kelapa sawit per 1 dayah/pesantren.

3.6. Keterkaitan RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJM Nasional dan RPJM Aceh

Padanan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan berdasarkan padanan misi. Padanan ini menggambarkan jika misi pada RPJMD Kota Subulussalam mendukung pencapaian visi dan misi pada RPJMN. Begitu juga halnya untuk RPJMA. Padanan yang disajikan adalah misi pada

RPJMD Kota Subulussalam dengan misi pada RPJMA. Adapun pada misi pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMA Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3.

Misi pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

RPJM Nasional	RPJMD Kota Subulussalam
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan - Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam

Tabel 3.4.
Misi pada RPJMA Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

RPJM Aceh	RPJMD Kota Subulussalam
Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih
Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata

3.7. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Subulussalam tahun 2025-2029, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dimuat dalam RPJMD ini dilakukan penyempurnaan dengan melihat kondisi dari realisasi periode sebelumnya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda kebijakan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar kebijakan pembangunan inilah disusun program prioritas yang lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan tahapan RKPD. Strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan pada setiap misi adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan

Untuk mencapai misi ini diterapkan strategi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat akselerasi pembangunan sumber daya manusia. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi seperti teknologi pendidikan, saintifikasi pengetahuan tradisional kesehatan hingga teknologi tepat guna dalam upaya menurunkan ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Kemudian perlunya peran aktif peningkatan lembaga pendidikan keistimewaan khususnya dayah dan pondok pesantren dalam meningkatkan kapasitas dunia pendidikan.

Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, juga mampu menurunkan masalah-masalah kesehatan nasional bahkan internasional secara signifikan agar tercipta derajat kesehatan yang berkualitas.

Penurunan *stunting* menjadi prioritas utama pada tahap pembangunan ini pada bidang kesehatan. Selain itu, juga menciptakan ketahanan dan keberlanjutan program JKN untuk masyarakat Aceh yang diakibatkan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2028.

Kemudian salah satu dukungan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam di bidang pendidikan adalah pembangunan sekolah rakyat (SR) yang mana Pemerintah Kota Subulussalam akan menganggarkan biaya-biaya pemeliharaan dan operasional sekolah rakyat baik itu tenaga pendidik maupun sarana prasarannya demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang layak dan baik di setiap jenjang pendidikan.

2. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam

Misi ini mewujudkan pelaksana implementasi Syariat Islam secara kaffah yang mana untuk mewujudkannya diperlukan peran semua *stake holder* dalam penerapannya. Salah satu satunya meningkatkan peran ulama dalam mendukung dan memberikan masukan dan saran dalam kebijakan yang diambil pemerintah Kota Subulussalam khususnya di dalam kerukunan hidup dalam masyarakat, meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dengan sasaran meningkatnya kerukunan beragama dilakukan melalui strategi Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, dan peningkatan upaya penegakan qanun yang belum sempurna diterapkan.

3. Mewujudkan terciptanya ekonomi kerakyatan

Misi ini memiliki makna mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan untuk mendukung prioritas nasional yaitu pertumbuhan ekonomi ; serta mendukung prioritas nasional dan provinsi yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan upaya tersebut, penting untuk dilakukan peningkatan produktivitas sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan daya saing sektor industri, pengembangan usaha industri kreatif, optimalisasi pengelolaan

obyek wisata, penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa, penguatan pemasaran wisata, pengarusutamaan produk UMKM lokal, dan Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal serta pemberdayaan perekonomian melalui penyaluran zakat, infaq dan wakaf yang sesuai peruntukannya.

4. Mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang baik dan bersih

Penurunan angka defisit dan pembayaran hutang adalah hal utama yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam demi menciptakan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik dan handal. Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah untuk mendukung prioritas nasional yaitu tata kelola birokrasi efektif dan efisien; dan pemberantasan korupsi serta mendukung prioritas provinsi yaitu pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

5. Mewujudkan terciptanya pembangunan infrastruktur yang merata

Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi rumah tangga guna mengurangi masalah kesehatan, khususnya *stunting*. Selain itu, memastikan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu adalah langkah penting dalam mewujudkan wilayah perumahan dan permukiman yang sehat dan layak. Upaya lainnya meliputi peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memperluas aksesibilitas antar-wilayah. Ini mencakup juga kolaborasi untuk pembangunan jalan dan jembatan di luar wewenang kota.

Meningkatkan mitigasi bencana melalui kerjasama dengan kabupaten tetangga, provinsi, dan pemerintah nasional juga menjadi bagian penting, khususnya dalam menangani bencana alam yang sering terjadi setiap tahun. Pengembangan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan, membangun pusat-pusat wilayah publik dan tempat rekreasi baru, serta meningkatkan peran ruang terbuka hijau.

Pengelolaan persampahan secara menyeluruh di lima kecamatan adalah langkah tambahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Subulussalam dalam melaksanakan program prioritas dengan arah kebijakannya juga tidak terlepas dari program kerja dan arah pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melalui program-program strategisnya yaitu seperti pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan kawasan komoditi unggul sawit serta pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kaban Jahe Kabupaten Karo dimana Preservasi jalan ruas Kabanjahe-Berastagi-Medan, Kabanjahe Sidikalang-Subulussalam, Kabanjahe-Kutacane.

Dalam rangka mendukung program strategis nasional (PSN), pemerintah Kota Subulussalam menyediakan dukungan:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) serta melakukan intervensi kemiskinan dengan memanfaatkan unggulan daerah dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan;
- 2) Pembangunan sekolah rakyat di daerah dengan menyediakan biaya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyediaan biaya penunjang lainnya;
- 3) Pembangunan 3 juta rumah dengan melakukan revisi RTRW Kota Subulussalam, pengesahan legalitas dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kota Subulussalam, penyediaan perumahan layak, bantuan rehabilitasi rumah serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, diberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah serta penunjangnya;
- 4) Ketahanan pangan daerah dengan melakukan kerjasama daerah terkait penyediaan dan distribusi komoditas pangan dari kabupaten/kota tetangga serta meningkatkan kuantitas lahan penyedia pangan daerah;
- 5) Penyediaan kesehatan nasional melalui skema pembiayaan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) kepada seluruh masyarakat Aceh terutama Kota Subulussalam. Seluruh masyarakat Aceh memiliki kepesertaan Golongan III BPJS kesehatan. Pemerintah Kota Subulussalam juga menyiapkan skema pendanaan untuk keberlanjutan program BPJS ketenagakerjaan tahun 2028 pasca habisnya masa DOKA;
- 6) Pemerintah daerah memastikan bahan baku pelaksanaan makan bergizi gratis berasal dari komoditas pangan lokal serta mensukseskan pelaksanaan program

makan gizi gratis. Penggunaan sumber daya lokal diharapkan akan meningkatkan ekonomi di daerah;

- 7) Perluasan akses pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah dengan menyediakan data terbaru yang aktual dan faktual, penyediaan dokumen pendukung serta penyediaan kebutuhan lainnya;
- 8) Pengendalian inflasi melalui penjagaan harga barang pokok, melalui kerjasama antar-daerah, serta ketersediaan barang pokok di daerah;
- 9) Percepatan pembentukan koperasi merah putih melalui pembinaan dan pelatihan untuk aparatur pengelola koperasi merah putih, kemudahan perizinan dan kegiatan pendukung lainnya;
- 10) Memberikan kemudahan perizinan di daerah dalam peningkatan investasi daerah.

Untuk mendukung program prioritas tersebut, maka diperlukan terobosan dan inovasi serta langkah yang strategis untuk mendukung peningkatan indikator makro dengan memberikan alokasi pendanaan kepada program yang berdampak langsung dan tidak langsung peningkatan capaian indikator makro tersebut yang nantinya dapat diturunkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Perjanjian Kinerja Eselon II serta perjanjian kinerja di bawahnya. Pencapaian indikator makro tersebut juga dituangkan lebih lanjut terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang disajikan pada BAB III dan IV.

Penahapan pembangunan disusun dalam rangka memudahkan penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Atas dasar penahapan pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan tahapan RKPD sesuai dengan tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik dengan baik	Menghapus angka defisit anggaran dan meningkatkan pembangunan yang merata serta menerapkan syariat Islam secara kaffah	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan serta terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sumber ekonomi daerah serta kualitas pembangunan manusia ekonomi serta optimalisasi pengelolaan potensi pangan lokal	Mewujudkan Kota Subulussalam yang berdaya saing dalam kemandirian sosial, ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan

Tabel 3.6.
Program Prioritas RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN						
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan						
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia			Indeks Pengetahuan (Angka)		
		Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Tinggi		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan (Persentase)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan (Persentase)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi,	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan (Persentase)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan			
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan (Persentase)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan akhlak mulia untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah	Persentase Dayah dan Pondok Pesantren Mandiri (Persentase)	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	
			Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan akhlak mulia untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah	Persentase Dayah yang Memiliki Sarpras yang memadai (Persentase)	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	
			Meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh melalui perumusan kebijakan, pengawasan, dan pengembangan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kebudayaan Aceh	Persentase Implementasi Kebijakan Bidang Urusan Pendidikan (Persentase)	1.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah			
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan Pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Standar Nasional Perpustakaan			
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SD/MI) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SMP/MTs) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Presentase Atlet yang Masuk Pelatnas/Pelatda (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat			Indeks Kesehatan(Angka)		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan sediaan Farmasi, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rata-rata lama menginap atau rawat pasien di rumah sakit (ALOS) (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Terkendalnya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam						
	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah			Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)(Angka)		
		Menguatnya Budaya dan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat Islam		Cakupan Budaya dan Adat yang Dilestarikan (Persentase)		
			Melestarikan, mengembangkan, dan memperkuat nilai-nilai adat serta budaya Aceh untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan identitas daerah	Persentase Perangkat Adat Aktif Menerapkan Hukum Adat Yang Bersendikan Islam (Persentase)	2.22.07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (Persentase)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		Menguatnya Pelaksanaan Syariat Islam pada Setiap Lapisan Masyarakat		Indeks Melek Al-Quran (Angka)		
			Meningkatkan peran ulama dalam membimbing masyarakat Aceh berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis	Persentase Hasil Sidang yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan Daerah (Persentase)	9.01.03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran syariat islam (Persentase)	9.01.02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat			Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk(Kasus)		
		Meningkatnya kenyamanan masyarakat (Trantibunlinmas dan Polhukam)		Persentase Penurunan Kejadian Kejahatan (Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Persentase)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Persentase)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Persentase)		
Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan						
	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah yang signifikan		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan (Persentase)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan Produksi Holtikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha yang diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Sumber Daya Lokal		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persentase)		
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara efektif dan transparan	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS (Persentase)	9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Mewujudkan Iklim Investasi yang ramah Investor		Kontribusi PDRB sektor Jasa Perusahaan (Persentase)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan ijin membuka tanah	Persentase rekomendasi izin membuka tanah yang dikeluarkan (Persentase)	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Menurunkan Angka Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan((%))		
		Meningkatnya Intervensi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Memperluas Variasi Lapangan Pekerjaan		Tingkat kemiskinan Ekstrem (Persentase)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara efektif dan transparan	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS (Persentase)	9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rata-rata lama menginap atau rawat pasien di rumah sakit (ALOS) (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Pekerja indonesia yang terlindungi	Persentase jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				hak-hak Pekerjaan dan Dialog sosial (Persentase)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam pelayanan Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Data fakir Miskin (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				tergraduasi dari kemiskinan (Persentase)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Kebutuhan Dasarnya (Persentase)		
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat progam kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih						
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang reformatif			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan PRIMA		Nilai SAKIP (Angka)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Persentase)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Persentase)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Persentase)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya Efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang aktif dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	2.10.12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha yang diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan ijin membuka tanah	Persentase rekomendasi ijin membuka tanah yang dikeluarkan (Persentase)	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
			Meningkatnya kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kegiatan ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan kegiatan ASN (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Tersesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola Pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan (Persentase)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan (Persentase)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			pelayanan publik dan pembangunan nasional			
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan (Persentase)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Tercapainya Kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Tranformasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)		
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara efektif dan transparan	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS (Persentase)	9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL	
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Potensi Unggulan Daerah (Persentase)		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	9.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Angka)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata						
	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur Pelayanan Dasar secara Merata Berbasis Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana serta Berkelanjutan			Indeks Pilar Infrastruktur IDSD(Angka)		
		Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas		Rata-rata capaian kinerja Infrastruktur Pelayanan Dasar (Persentase)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang aktif dalam pengelolaan	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				informasi dan komunikasi publik (Persentase)		
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Angka)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				TPA/TPST Regional (Persentase)	DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Terwujudnya Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana padasaat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

Tabel 3.7.
Arah Kebijakan RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN	Peningkatan Sarana Dan Prasarana jenjang Paud sampai dengan Menengah Pertama	
		Peningkatan Akreditasi Sekolah PAUD Dan Pendidikan Dasar serta menengah Pertama	
		Peningkatan Mutu Dayah yang Berakreditasi	
		Peningkatan Ketrampilan Berbasis Teknologi Informasi	
		Peningkatan Kapasitas Pendidik yang Bersertifikasi	
		Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi	
		Mengembangkan kurikulum lokal berbasis ciri khas daerah	
		Meningkatkan literasi membaca masyarakat	
		Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	
		Perlunya perhatian dari pemerintah kepada mantan narapidana khususnya pemuda-pemuda	
		Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga	
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	
		Meningkatkan peran Tim Penggerak PKK sampai dengan level kampung	
		Peningkatan Koordinasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	
		Penguatan Kelembagaan Dan Jaringan PUG Dan PUHA	
		Pemberian Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Yang Terlibat Tindak Kekerasan	
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS KESEHATAN	Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan	
		Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Intervensi Lintas Sektor untuk Penurunan angka <i>Stunting</i>	
		Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sehat Melalui Peningkatan Kapasitas Kader Siaga Serta Meningkatkan Fungsi Monev Terintegrasi	
		Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Dan Pustu	
		Peningkatan Promosi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	
		Meningkatkan keaktifan dan sarana prasarana posyandu	
		Peningkatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	
		Mempercepat proses izin praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi persyaratan perijinan	
		Penggunaan obat dan bahan medis yang berlabel halal untuk ditinjau dan diterapkan pada fasilitas kesehatan pemerintah yang sudah bersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Halal	
		Pembukaan lapangan pekerjaan untuk apoteker difasilitas kesehatan swasta	
		Upgrade badan diklat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam agar terakreditasi oleh Kemenkes	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ke dalam dunia pendidikan khususnya kunjungan rutin ke Pondok Pesantren atau Dayah	
		Peningkatan peran organisasi kesehatan dalam mendukung program pemerintah	
		Dukungan untuk program gerakan ayah idaman dan penitipan anak di desa-desa	
		Pelaksanaan sekolah lansia di Kota Subulussalam	
		Peningkatan peran serta milenial dan gen-z untuk mendukung dan menciptakan pola pembelajaran yang lebih edukatif	
		Digitalisasi di dunia pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia teknologi informasi	
		Peningkatan peran lembaga pendidikan bidang kesehatan dalam program penurunan angka <i>stunting</i>	
2	MENINGKATKAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM	Terbinanya Hubungan Yang Harmonis Antara Ulama Dengan Pemerintah	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Dan SDM Dalam Mengembangkan Dan Mengawasi Adat Istiadat Sesuai Syariat Islam	
		Peningkatan semarak dan syiar Islam di setiap hari-hari besar keislaman	
		Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan budaya, kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat	
		Implementasi regulasi pelaksanaan, pengawasan dan penegakan Syariat Islam di semua lini	
		Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tangap terhadap ketenteraman dan keamanan Lingkungan	
		Peningkatan upaya preventif dalam mengatasi konflik horizontal	
		Perlunya regulasi tentang larangan hewan ternak yang masih berkeliaran di area umum dan perkebunan warga	
		Peningkatan terhadap kegiatan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi dini gangguan-gangguan internal	
		Peningkatan kerja sama dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan	
		Pelaksanaan program-program keagamaan khususnya dari mubaligh muda	
3	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN	Meningkatkan kualitas sumber daya dan petani, peternak, dan nelayan serta kualitas hasil pertanian, peternakan dan Perkebunan	
		Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung lancarnya perekonomian	
		Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing-masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal	
		Mengoptimalkan sumberdaya dan fasilitas perekonomian di semua sektor pendukung	
		Mengembangkan Destinasi Wisata Yang Memiliki Keunikan/Kekhasan Kota Subulussalam	
		Mengembangkan Kerjasama Dengan Pelaku Jasa Wisata Profesional, Serta Memberdayakan Kelompok Sadar Wisata	
		Menyederhanakan SOP prosedur perizinan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online dan mempersingkat pelayanan	
		Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan yang selektif dan berkesinambungan	
		Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Tenaga Kerja	
		Meningkatkan Kerjasama Hubungan Industrial Dalam Rangka Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	
		Mengoptimalkan Pembinaan Dan Penempatan Transmigrasi	
		Meningkatkan kapasitas SDM terhadap <i>digital marketing</i>	
		Memenuhi Layanan rehabilitasi Sosial di dalam panti dan di luar Panti	
		Meningkatnya PPKS Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan kelompok Rentan	
		Peningkatan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan	
		Meningkatkan Kapasitas Kinerja Manajemen Kelembagaan Baitul Mal	
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Zakat, Harta Waqaf Dan Harta Agama Lainnya sesuai	
		Peningkatan perekonomian produktif bagi penyandang disabilitas melalui bantuan modal usaha baik barang maupun uang	
		Peningkatan perekonomian bagi PMKS khususnya bagi perempuan rawan sosial	
		Peningkatan kesejahteraan terhadap mantan kombatan, tapol, napol dan korban konflik baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan	
		Peningkatan perekonomian terhadap kelompok asektor	
		Perlunya Qanun pariwisata yang ada di Kota Subulussalam demi memaksimalkan pengelolaan pendapatan retribusi yang bersumber dari lokasi pariwisata	
		Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta peningkatan kualitas SDM pariwisata	
		Peningkatan fasilitas hiburan khususnya untuk anak-anak di Kota Subulussalam yang mampu menunjang PAD	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan sumber daya pangan lokal yang bisa dijadikan bahan baku utama UMKM sebagai <i>brand</i> produk unggulan	
		Peningkatan fasilitas terhadap organisasi perdagangan	
4	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH	Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah Daerah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional Melaksanakan dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan secara elektronik, dengan kualitas informasi, dan komunikasi publik yang baik Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil Dan Kualitas Kependudukan Penyediaan Akses Dan Infrastruktur Teknologi Informasi Serta Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan PATEN Penguatan regulasi alokasi dana desa untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara Provinsi dan Nasional Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Aset daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja Menetapkan dan menerbitkan dokumen penganggaran tepat waktu	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penguatan kualitas reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	
		Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan	
		Penurunan Angka Defisit dan Hutang Daerah	
5	MEWUJUDKAN TERCIPTANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan	
		Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan	
		Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat dan Angkutan Massal Perkotaan	
		Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	
		Peningkatan Kemantapan Angkutan Jalan Sampai Ke Pelosok	
		Peningkatan Keselamatan Layanan Penyelenggaraan LLAJ	
		Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis	
		Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase	
		Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum	
		Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	
		Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat	
		Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air	
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH dan mitigasi perubahan iklim	
		Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan	
		Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat	
		Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS	
		Peningkatan tata kelola TAHURA	
		Peningkatan efektivitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS	
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	
		Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan	
		Peningkatan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	
		Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir	
		Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini	

Tabel 3.8 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

MISI I	MISI II	MISI III	MISI IV	MISI V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam	Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan	Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih	Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Peningkatan Kualitas Pendidikan:	Penegakan Qanun:	Sumber Pangan Lokal:	Tata Kelola Pemerintahan:	Pembangunan SPAM Perpipaan:
Semua Kecamatan di Wilayah Kota Subulussalam	Semua Kecamatan di Wilayah Kota Subulussalam	Kecamatan Longkib, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng	Semua Pelayanan Pemerintahan Kota Subulussalam yang berada di tiap-tiap Kecamatan	Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng
Peningkatan Kualitas Kesehatan :		Pusat distribusi barang dan Jasa :	Tata Kelola Pemerintahan :	Infrastruktur Jalan :
Semua Kecamatan di Wilayah Kota Subulussalam		Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan	Semua Pelayanan Pemerintahan Kota Subulussalam yang berada di tiap-tiap Kecamatan	Semua Kecamatan di Wilayah Kota Subulussalam
		Pusat pertumbuhan ekonomi :		Infrastruktur Irigasi dan Sungai :
		Semua desa di ibu kota Kecamatan		Semua Kecamatan di Wilayah Kota Subulussalam

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Rencana Program Perangkat Daerah

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2045 dan menjadi bagian yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Periode 2025-2030 serta program unggulannya. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dimuat dalam RPJMD ini dilakukan penyempurnaan dengan melihat kondisi dari realisasi periode sebelumnya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029.

Periode program pembangunan yang dirancang tahun 2030 bukan hanya untuk menuntaskan program prioritas dan target RPJMD Tahun 2025-2029, tetapi juga menjadi landasan dan mekanisme transisi yang berkesinambungan perencanaan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan demikian, semua rencana program Tahun 2030 menjadi rujukan bagi kepala daerah terpilih periode 2030-2034 dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD kepala daerah terpilih.

Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup seluruh program prioritas dan pendukung yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kota Subulussalam. Ini termasuk program-program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah, sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

Penyusunan program yang terstruktur, konsisten, dan berorientasi hasil, dan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan Kota Subulussalam dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan.

Informasi lebih rinci mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program Perangkat Daerah

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					363.592.482.444,00		377.627.918.158,88		357.488.569.804,06		367.452.054.893,15		377.716.697.171,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					163.574.930.457,00		173.610.015.132,14		165.390.308.716,79		169.698.114.891,12		175.007.678.368,94	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					106.496.447.766,00		108.626.376.721,32		110.798.904.255,75		113.014.882.340,86		115.275.179.987,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	106.496.447.766,00	85,00	108.626.376.721,32	85,00	110.798.904.255,75	87,00	113.014.882.340,86	89,00	115.275.179.987,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.043.727.691,00		1.064.602.244,82		1.085.894.289,72		1.107.612.175,51		1.129.764.419,02	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	86	84,00	1.043.727.691,00	85,00	1.064.602.244,82	85,00	1.085.894.289,72	87,00	1.107.612.175,51	89,00	1.129.764.419,02	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					43.664.755.000,00		48.306.636.166,00		41.277.768.889,32		43.108.324.267,11		45.891.091.932,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS PAUD)	Persen	70,77	73,03	43.664.755.000,00	74,16	48.306.636.166,00	75,30	41.277.768.889,32	76,43	43.108.324.267,11	77,56	45.891.091.932,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SD/MI)	Persen	99,94	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SMP/MTs)	Persen	99,04	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidikan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru	Angka	85	88,00	200.000.000,00	91,00	200.000.000,00	94,00	200.000.000,00	97,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	34,05	39,00		42,00		45,00		48,00		51,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH					11.605.000.000,00		14.837.100.000,00		11.441.935.282,00		11.670.773.987,64		11.904.189.467,39	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
			Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan akhlak mulia untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah	Persentase Dayah dan Pondok Pesantren Mandiri	Persen	16,67	50,00	11.605.000.000,00	66,67	14.837.100.000,00	83,33	11.441.935.282,00	100,00	11.670.773.987,64	100,00	11.904.189.467,39	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
			Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan akhlak mulia untuk mencetak generasi yang beriman	Persentase Dayah yang Memiliki Surpras yang memadai	Persen	70	74,00	20.000.000,00	76,00	20.400.000,00	78,00	20.808.000,00	80,00	21.224.160,00	82,00	21.648.643,20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	01	08	berilmu, dan berakhlakul karimah					495.000.000,00		504.900.000,00		514.998.000,00		525.297.960,00		535.803.919,20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Implementasi Kebijakan Bidang Urusan Pendidikan	Persen	50	63,00	495.000.000,00	66,00	504.900.000,00	69,00	514.998.000,00	72,00	525.297.960,00	75,00	535.803.919,20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					155.649.121.889,00		158.762.104.326,78		153.937.346.413,32		157.829.807.034,59		161.986.403.175,27	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.572.937.377,00		26.084.396.124,54		26.606.084.047,03		27.138.205.727,97		27.680.969.842,53	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	25.572.937.377,00	85,00	26.084.396.124,54	85,00	26.606.084.047,03	87,00	27.138.205.727,97	89,00	27.680.969.842,53	Dinas Kesehatan
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.013.982.993,00		65.294.262.652,86		66.600.147.905,92		67.932.150.864,04		69.290.793.881,32	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87,34	89,00	64.013.982.993,00	90,00	65.294.262.652,86	91,00	66.600.147.905,92	92,00	67.932.150.864,04	93,00	69.290.793.881,32	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					44.637.247.960,00		45.529.992.919,20		40.440.592.777,58		42.063.118.326,14		43.904.380.692,66	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	254	0,00	44.637.247.960,00	0,00	45.529.992.919,20	0,00	40.440.592.777,58	0,00	42.063.118.326,14	0,00	43.904.380.692,66	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	27,5	25,00		23,00		21,00		19,00		17,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					9.500.000.000,00		9.692.000.000,00		7.887.840.000,00		8.047.596.800,00		8.210.548.736,00	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rata-rata lama menginap atau rawat pasien di rumah sakit (ALOS)	Angka	2	2	9.500.000.000,00	2	9.692.000.000,00	2	7.887.840.000,00	2	8.047.596.800,00	2	8.210.548.736,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.930.873.602,00		1.969.691.074,04		2.009.284.895,52		2.049.670.593,43		2.090.864.005,30	Puskesmas Simpang Kiri
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0	0,00	1.930.873.602,00	0,00	1.969.691.074,04	0,00	2.009.284.895,52	0,00	2.049.670.593,43	0,00	2.090.864.005,30	Puskesmas Simpang Kiri
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	4	3,80		3,50		3,30		3,10		3,00		Puskesmas Simpang Kiri
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.341.615.000,00		1.368.747.300,00		1.396.422.246,00		1.424.650.690,92		1.453.443.704,74	Puskesmas Penanggalan
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0	0,00	1.341.615.000,00	0,00	1.368.747.300,00	0,00	1.396.422.246,00	0,00	1.424.650.690,92	0,00	1.453.443.704,74	Puskesmas Penanggalan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	4,2	4,10		4,00		3,90		3,80		3,70		Puskesmas Penanggalan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.639.930.928,00		1.673.529.546,56		1.707.800.137,49		1.742.756.140,24		1.778.411.263,05	Puskesmas Rundeng
			Meningkatnya Kualitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	Aneka	0	0,00	1.639.930.928,00	0,00	1.673.529.546,56	0,00	1.707.800.137,49	0,00	1.742.756.140,24	0,00	1.778.411.263,05	Puskesmas

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
			Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Rundeng
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15	14,00		14,00		13,80		13,60		13,40		Puskesmas Rundeng
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.851.318.500,00		1.888.744.870,00		1.926.919.767,40		1.965.858.162,75		2.005.575.326,00		Puskesmas Sultan Daulat
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0	0,00	1.851.318.500,00	0,00	1.888.744.870,00	0,00	1.926.919.767,40	0,00	1.965.858.162,75	0,00	2.005.575.326,00	Puskesmas Sultan Daulat
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	4,3	4,00		3,70		3,50		3,40		3,30		Puskesmas Sultan Daulat
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.158.412.000,00		1.181.980.240,00		1.206.019.844,80		1.230.540.241,70		1.255.551.046,53		Puskesmas Longkib
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	1020	0,00	1.158.412.000,00	0,00	1.181.980.240,00	0,00	1.206.019.844,80	0,00	1.230.540.241,70	0,00	1.255.551.046,53	Puskesmas Longkib
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,71	15,00		14,00		13,00		12,00		11,00		Puskesmas Longkib
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				929.321.000,00		948.207.420,00		967.471.568,40		987.120.999,77		1.007.163.419,76		Puskesmas Jontor
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	2857	0,00	929.321.000,00	0,00	948.207.420,00	0,00	967.471.568,40	0,00	987.120.999,77	0,00	1.007.163.419,76	Puskesmas Jontor
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	4	3,80		3,40		3,00		2,60		2,20		Puskesmas Jontor
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				851.731.970,00		869.546.609,40		887.717.541,59		906.251.892,42		925.156.930,27		Puskesmas Bakal Buah
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0	0,00	851.731.970,00	0,00	869.546.609,40	0,00	887.717.541,59	0,00	906.251.892,42	0,00	925.156.930,27	Puskesmas Bakal Buah
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,1	14,00		14,00		13,00		13,00		10,00		Puskesmas Bakal Buah
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				688.339.000,00		702.305.780,00		716.551.895,60		731.082.933,51		745.904.592,18		Puskesmas Batu-Batu
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	0	0,00	688.339.000,00	0,00	702.305.780,00	0,00	716.551.895,60	0,00	731.082.933,51	0,00	745.904.592,18	Puskesmas Batu-Batu
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	4	3,80		3,60		3,40		3,20		3,00		Puskesmas Batu-Batu
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				867.846.559,00		885.203.490,18		902.907.559,98		920.965.711,18		939.385.025,41		Dinas Kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100	100	867.846.559,00	100	885.203.490,18	100	902.907.559,98	100	920.965.711,18	100	939.385.025,41	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	0	2	100.000.000,00	4	100.000.000,00	6	100.000.000,00	8	100.000.000,00	10	100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				83.125.000,00		84.787.500,00		86.483.250,00		88.212.915,00		89.977.173,30		Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan sediaan Farmasi, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	83.125.000,00	100	84.787.500,00	100	86.483.250,00	100	88.212.915,00	100	89.977.173,30	Dinas Kesehatan

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					313.440.000,00		319.708.800,00		326.102.976,00		332.625.035,52		339.277.536,23	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	313.440.000,00	100	319.708.800,00	100	326.102.976,00	100	332.625.035,52	100	339.277.536,23	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Puskesmas Simpang Kiri
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Puskesmas Simpang Kiri
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	Puskesmas Penanggalan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Puskesmas Penanggalan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	Puskesmas Rundeng
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Puskesmas Rundeng
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Puskesmas Sultan Daulat
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Puskesmas Sultan Daulat
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Puskesmas Longkib
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Puskesmas Longkib
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	Puskesmas Jontor
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Puskesmas Jontor
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	Puskesmas Bakal Buah
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	Puskesmas Bakal Buah
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Puskesmas Batu-Batu
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					26.814.549.339,00		27.350.840.325,78		19.897.857.132,30		21.295.814.274,93		21.721.730.560,44	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.450.523.339,00		3.519.533.805,78		3.589.924.481,90		3.661.722.971,53		3.734.957.430,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	78	80,00	3.450.523.339,00	81,00	3.519.533.805,78	82,00	3.589.924.481,90	83,00	3.661.722.971,53	84,00	3.734.957.430,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN					1.050.500.000,00		1.071.510.000,00		1.092.940.200,00		1.114.799.004,08		1.137.094.984,08	Dinas Pekerjaan Umum dan

IV-6

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
			negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	memperoleh rumah layak huni												Perumahan Rakyat	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persen	0	0		65		66		67		68		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					700.000.000,00		666.000.000,00		682.320.000,00		698.966.400,00		715.945.728,00	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negar korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	0	700.000.000,00	65	666.000.000,00	66	682.320.000,00	67	698.966.400,00	68	715.945.728,00	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
			Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh<10 Ha yang Ditangani	Persen	19,05	21		23		25		27		30		Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	33,33	33,33	100.000.000,00	33,33	100.000.000,00	33,33	100.000.000,00	50,00	100.000.000,00	66,67	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.737.163.227,00		14.011.906.491,54		14.292.144.621,37		14.577.987.513,80		14.869.547.264,07
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.741.726.187,00		5.856.560.710,74		5.973.691.924,95		6.093.165.763,45		6.215.029.078,72	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	5.741.726.187,00	85,00	5.856.560.710,74	86,00	5.973.691.924,95	87,00	6.093.165.763,45	88,00	6.215.029.078,72	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.634.937.640,00		5.747.636.392,80		5.862.589.120,66		5.979.840.903,07		6.099.437.721,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,2	5.634.937.640,00	87,4	5.747.636.392,80	87,6	5.862.589.120,66	87,8	5.979.840.903,07	88	6.099.437.721,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					600.000.000,00		612.000.000,00		624.240.000,00		636.724.800,00		649.459.296,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	98	100,00	367.000.000,00	100,00	367.000.000,00	100,00	372.000.000,00	100,00	394.484.800,00	100,00	398.484.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	98	100,00	141.000.000,00	100,00	153.000.000,00	100,00	155.000.000,00	100,00	143.000.000,00	100,00	151.734.496,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan perlindungan Masyarakat	Persen	98	100,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	70.240.000,00	100,00	72.240.000,00	100,00	72.240.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	98	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					59.896.900,00		61.094.838,00		62.316.734,76		63.563.069,46		64.834.330,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasidan Edukasi Rawan Bencana	Persen	6,1	12,20	30.896.900,00	18,29	31.514.838,00	24,39	32.145.134,76	30,49	32.788.037,46	36,59	33.443.798,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya penanganan bencana padasaat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	14.000.000,00	100	14.280.000,00	100	14.565.600,00	100	14.856.912,00	100	15.154.050,24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Penanganan bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	30	35,00	15.000.000,00	40,00	15.300.000,00	45,00	15.606.000,00	50,00	15.918.120,00	55,00	16.236.482,40	Badan Penaneurelanean

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			pada saat pasca bencana														Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN NONKEBAKARAN					1.700.602.500,00		1.734.614.550,00		1.769.306.841,00		1.804.692.977,82		1.840.786.837,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	80	80	102.000.000,00	80	104.040.000,00	80	106.120.800,00	100,00	108.243.216,00	100,00	110.408.080,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	71,43	81,43	1.598.602.500,00	86,43	1.630.574.550,00	91,43	1.663.186.041,00	96,43	1.696.449.761,82	100,00	1.730.378.757,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.016.717.532,00		3.077.051.882,64		3.138.592.920,29		3.201.364.778,71		3.265.392.074,27	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.030.293.003,00		2.070.898.863,06		2.112.316.840,32		2.154.563.177,13		2.197.654.440,67	Dinas Sosial
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	98,44	98,55	2.030.293.003,00	98,60	2.070.898.863,06	98,65	2.112.316.840,32	98,70	2.154.563.177,13	98,75	2.197.654.440,67	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.100.029,00		3.162.029,58		3.225.270,17		3.289.775,58		3.355.571,09	Dinas Sosial
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	60	62,00	3.100.029,00	63,00	3.162.029,58	64,00	3.225.270,17	65,00	3.289.775,58	66,00	3.355.571,09	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	60	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	60	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Sosial
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan Sosial	Persen	60	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Sosial
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kualitasnya dalam pelayanan Sosial	Persen	60	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					767.022.000,00		782.362.440,00		798.009.688,80		813.969.882,58		830.249.280,23	Dinas Sosial
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	70	72,00	767.022.000,00	73,00	782.362.440,00	74,00	798.009.688,80	75,00	813.969.882,58	76,00	830.249.280,23	Dinas Sosial
				Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	70	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		Dinas Sosial
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	70	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		Dinas Sosial
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	0	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		Dinas Sosial
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	70	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN					3.300.000,00		3.366.000,00		3.433.320,00		3.501.986,40		3.572.026,13	Dinas Sosial

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			JAMINAN SOSIAL														
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima Manfaat yang terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	71	80,00	3.300.000,00	81,00	3.366.000,00	82,00	3.433.320,00	83,00	3.501.986,40	84,00	3.572.026,13	Dinas Sosial
				Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Data fakir Miskin	Persen	63	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00	Dinas Sosial	
				Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergradasi dari kemiskinan	Persen	63	65,00		66,00		67,00		68,00		69,00	Dinas Sosial	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				202.001.500,00		206.041.530,00		210.162.360,60		214.365.607,81		218.652.919,97	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Perindungan Sosial Korban Bencana	Persentase KorbanBencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	202.001.500,00	100	206.041.530,00	100	210.162.360,60	100	214.365.607,81	100	218.652.919,97	Dinas Sosial
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	94	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00	Dinas Sosial	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				11.001.000,00		11.221.020,00		11.445.440,40		11.674.349,21		11.907.836,19	Dinas Sosial	
			Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen	50	50,00	11.001.000,00	50,00	11.221.020,00	50,00	11.445.440,40	50,00	11.674.349,21	50,00	11.907.836,19	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.440.111.561,00		38.188.913.792,22		38.952.692.068,06		39.731.745.909,42		40.526.380.827,61		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.589.236.374,00		2.641.021.101,48		2.693.841.523,51		2.747.718.353,98		2.802.672.721,06		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.569.236.374,00		2.620.621.101,48		2.673.033.523,51		2.726.494.193,98		2.781.024.077,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	93,2	84,00	2.569.236.374,00	85,00	2.620.621.101,48	86,00	2.673.033.523,51	87,00	2.726.494.193,98	88,00	2.781.024.077,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				10.000.000,00		10.400.000,00		10.808.000,00		11.224.160,00		11.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	Persen	100	100,00	10.000.000,00	100,00	10.400.000,00	100,00	10.808.000,00	100,00	11.224.160,00	100,00	11.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan hak-hak Pekerja dan Dialog sosial	Persen	66	80,00	10.000.000,00	80,00	10.000.000,00	80,00	10.000.000,00	80,00	10.000.000,00	80,00	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.905.116.077,00		2.963.418.398,54		3.022.886.766,51		3.083.544.501,84		3.145.415.391,88		
1	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.735.116.077,00		2.789.818.398,54		2.845.614.766,51		2.902.527.061,84		2.960.577.603,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	2.735.116.077,00	85,00	2.789.818.398,54	86,00	2.845.614.766,51	87,00	2.902.527.061,84	88,00	2.960.577.603,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN				40.000.000,00		41.400.000,00		42.828.000,00		44.284.560,00		45.770.251,20	Dinas Pemberdayaan	

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
			GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Angka	0,031	0,05	40.000.000,00	0,07	41.400.000,00	0,08	42.828.000,00	0,09	44.284.560,00	0,11	45.770.251,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Angka	50,87	51,07		51,27		51,47		51,67		51,87		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		54.121.608,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Angka	100	100,00	50.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	52.020.000,00	100,00	53.060.400,00	100,00	54.121.608,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Angka	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Angka	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Terjaminnya Pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	63,89	64,09	20.000.000,00	64,29	20.400.000,00	64,49	20.808.000,00	64,69	21.224.160,00	64,89	21.648.643,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Persentase anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100,00	40.000.000,00	100,00	40.800.000,00	100,00	41.616.000,00	100,00	42.448.320,00	100,00	43.297.286,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus anak (IPKA)	Angka	75,99	76,50		77,00		77,50		78,00		78,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.073.530.097,00		1.095.000.698,94		1.116.900.712,92		1.139.238.727,18		1.162.023.501,72	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					993.414.351,00		1.013.282.638,02		1.033.548.290,78		1.054.219.256,60		1.075.303.641,73	Dinas Pangan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	83,00	993.414.351,00	84,50	1.013.282.638,02	86,00	1.033.548.290,78	87,50	1.054.219.256,60	89,00	1.075.303.641,73	Dinas Pangan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	70	70,50	10.000.000,00	71,00	10.000.000,00	71,50	10.000.000,00	72,00	10.000.000,00	72,50	10.000.000,00	Dinas Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					58.000.000,00		59.360.000,00		60.747.200,00		62.162.144,00		63.605.386,88	Dinas Pangan
			Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	78	81,00	58.000.000,00	81,50	59.360.000,00	82,00	60.747.200,00	83,00	62.162.144,00	83,50	63.605.386,88	Dinas Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00		6.494.592,96	Dinas Pangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	80	81,00	6.000.000,00	81,50	6.120.000,00	82,00	6.242.400,00	83,00	6.367.248,00	83,50	6.494.592,96	Dinas Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					6.115.746,00		6.238.060,92		6.362.822,14		6.490.078,58		6.619.880,15	Dinas Pangan
			Meningkatnya Pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	80	81,00	6.115.746,00	81,50	6.238.060,92	82,00	6.362.822,14	83,00	6.490.078,58	83,50	6.619.880,15	Dinas Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.607.973.230,00		1.640.132.694,60		1.672.935.348,49		1.706.394.055,46		1.740.521.936,57	
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.527.973.230,00		1.558.532.694,60		1.589.703.348,49		1.621.497.415,46		1.653.927.363,77	Dinas Pertanahan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	83	84,00	1.527.973.230,00	85,00	1.558.532.694,60	86,00	1.589.703.348,49	87,00	1.621.497.415,46	88,00	1.653.927.363,77	Dinas Pertanahan
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					5.000.000,00		5.100.000,00		5.202.000,00		5.306.040,00		5.412.160,80	Dinas Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Tercesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	70	80,00	5.000.000,00	82,00	5.100.000,00	84,00	5.202.000,00	86,00	5.306.040,00	90,00	5.412.160,80	Dinas Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ASENTTEE					40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,40	Dinas Pertanahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	60,00	40.000.000,00	70,00	40.800.000,00	80,00	41.616.000,00	90,00	42.448.320,00	95,00	43.297.286,40	Dinas Pertanahan
2	10	09	PROGRAM					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	Dinas Pertanahan

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			PENGLOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH														
			Meningkatnya Kualitas pengelolaan ijin membuka tanah	Persentase rekomendasi ijin membuka tanah yang dikeluarkan	Persen	0	60,00	10.000.000,00	65,00	10.200.000,00	70,00	10.404.000,00	75,00	10.612.080,00	80,00	10.824.321,60	Dinas Pertanahan
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH					25.000.000,00		25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.200,00		27.060.804,00	Dinas Pertanahan
			Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	25.000.000,00	100	25.500.000,00	100	26.010.000,00	100	26.530.200,00	100	27.060.804,00	Dinas Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.972.204.891,00		6.091.648.988,82		6.213.481.968,60		6.337.751.607,96		6.464.506.640,13	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.129.787.643,00		3.192.383.395,86		3.256.231.063,78		3.321.355.685,05		3.387.782.798,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	86,04	86,5	3.129.787.643,00	87,00	3.192.383.395,86	87,50	3.256.231.063,78	88,00	3.321.355.685,05	88,50	3.387.782.798,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	Persen	0	0	-	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	PROGRAM, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					112.416.370,00		115.064.697,40		117.765.991,35		120.521.311,17		123.331.737,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	65	66,00	112.416.370,00	67,00	115.064.697,40	68,00	117.765.991,35	69,00	120.521.311,17	70,00	123.331.737,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Indeks Kualitas Udara	Angka	95,07	95,08		95,09		96,00		96,02		96,04		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					262.710.000,00		267.964.200,00		273.323.484,00		278.789.953,68		284.365.752,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen	1,02	1,05	262.710.000,00	1,07	267.964.200,00	1,1	273.323.484,00	1,13	278.789.953,68	1,15	284.365.752,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	10,00	20.000.000,00	15,00	20.400.000,00	20,00	20.808.000,00	25,00	21.224.160,00	30,00	21.648.643,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/kasus Tindak pidana Lingkungan Hidup	Persen	0	50,00	20.000.000,00	50,00	20.000.000,00	50,00	20.000.000,00	50,00	20.000.000,00	50,00	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.427.290.878,00		2.465.836.695,56		2.515.353.429,47		2.565.860.498,06		2.617.377.708,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	61,37	61,87	2.427.290.878,00	62,37	2.465.836.695,56	62,87	2.515.353.429,47	63,37	2.565.860.498,06	63,87	2.617.377.708,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					2.608.614.334,00		2.660.786.620,68		2.714.002.353,09		2.768.282.400,16		2.823.648.048,16	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.528.614.334,00		2.579.186.620,68		2.630.770.353,09		2.683.385.760,16		2.737.053.475,36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Angka	85,62	87,00	2.528.614.334,00	88,00	2.579.186.620,68	89,00	2.630.770.353,09	90,00	2.683.385.760,16	91,00	2.737.053.475,36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					66.705.000,00		68.039.100,00		69.399.882,00		70.787.879,64		72.203.637,23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan Digital	Persen	2,3	20,00	66.705.000,00	25,00	68.039.100,00	32,00	69.399.882,00	40,00	70.787.879,64	40,00	72.203.637,23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	20,99	40,00		45,00		55,00		70,00		80,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					6.295.000,00		6.420.900,00		6.549.318,00		6.680.304,36		6.813.910,45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100,00	6.295.000,00	100,00	6.420.900,00	100,00	6.549.318,00	100,00	6.680.304,36	100,00	6.813.910,45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	97,16	98,25		98,50		98,75		99,00		99,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.000.000,00		1.020.000,00		1.040.400,00		1.061.208,00		1.082.432,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	10	10,00	1.000.000,00	25,00	1.020.000,00	25,00	1.040.400,00	25,00	1.061.208,00	25,00	1.082.432,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00		6.494.592,96	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100,00	6.000.000,00	100,00	6.120.000,00	100,00	6.242.400,00	100,00	6.367.248,00	100,00	6.494.592,96	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.754.589.627,00		1.789.681.419,54		1.825.475.047,93		1.861.984.548,89		1.899.224.239,87	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.674.589.627,00		1.708.081.419,54		1.742.243.047,93		1.777.087.908,89		1.812.629.667,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	90,00	1.674.589.627,00	90,00	1.708.081.419,54	100,00	1.742.243.047,93	100,00	1.777.087.908,89	100,00	1.812.629.667,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	85	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Meningkatnya Efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama desa	Persen	80	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					30.000.000,00		31.600.000,00		33.232.000,00		34.896.640,00		36.594.572,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	85	90,00	30.000.000,00	90,00	31.600.000,00	100,00	33.232.000,00	100,00	34.896.640,00	100,00	36.594.572,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	85	90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	85	90,00	30.000.000,00	90,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	85	90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.639.994.000,00		2.692.593.880,00		2.746.245.757,60		2.800.970.672,75		2.856.790.086,21	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,9	2,80	10.000.000,00	2,70	10.000.000,00	2,60	10.000.000,00	2,50	10.000.000,00	2,40	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Angka kelahiran menurut umur (Age Specific Fertility Rate) 15-19 Tahun	Angka	18,5	16,20		15,20		14,30		13,50		12,80		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.599.994.000,00		2.651.993.880,00		2.705.033.757,60		2.759.134.432,75		2.814.317.121,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	66,73	66,93	2.599.994.000,00	67,13	2.651.993.880,00	67,33	2.705.033.757,60	67,53	2.759.134.432,75	67,73	2.814.317.121,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	3,03	2,83		2,63		2,43		2,23		2,03		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	60	65,00	30.000.000,00	70,00	30.600.000,00	75,00	31.212.000,00	80,00	31.836.240,00	85,00	32.472.964,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.405.697.935,00		2.453.811.893,70		2.502.888.131,57		2.552.945.894,21		2.604.004.812,09	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.046.897.935,00		2.087.835.893,70		2.129.592.611,57		2.172.184.463,81		2.215.628.153,08	Dinas Perhubungan

KODE		BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		KABUPATEN/KOTA														
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	83	83,00	2.046.897.935,00	83,00	2.087.835.893,70	83,00	2.129.592.611,57	84,00	2.172.184.463,81	85,00	2.215.628.153,08	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				358.800.000,00		365.976.000,00		373.295.520,00		380.761.430,40		388.376.659,01	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Persen	19,23	19,23	358.800.000,00	19,23	365.976.000,00	19,23	373.295.520,00	23,08	380.761.430,40	23,08	388.376.659,01	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	35	35,00		37,00		40,00		40,00		45,00		Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.102.139.588,00		3.164.582.379,76		3.228.274.027,36		3.293.239.507,90		3.359.504.298,06	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.022.139.588,00		3.082.582.379,76		3.144.234.027,36		3.207.118.707,90		3.271.261.082,06	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,50	3.022.139.588,00	88,00	3.082.582.379,76	88,50	3.144.234.027,36	89,00	3.207.118.707,90	89,50	3.271.261.082,06	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang aktif dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	50,00	53,06	30.000.000,00	53,12	30.600.000,00	53,18	31.212.000,00	53,30	31.836.240,00	53,59	32.472.964,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				50.000.000,00		51.400.000,00		52.828.000,00		54.284.560,00		55.770.251,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Angka	2,48	2,60	50.000.000,00	2,70	51.400.000,00	2,80	52.828.000,00	2,90	54.284.560,00	3,00	55.770.251,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.520.000.000,00		1.550.400.000,00		1.581.408.000,00		1.613.036.160,00		1.645.296.883,20	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSA KOPERASI				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	100	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan	Persen	100	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				100.000.000,00		100.200.000,00		100.404.000,00		100.612.080,00		100.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	10	12,00	100.000.000,00	14,00	100.200.000,00	16,00	100.404.000,00	18,00	100.612.080,00	20,00	100.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Persentase pertumbuhan Wirausaha	Persen	-1,65	1,00		1,20		1,30		1,40		1,50		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN				1.120.000.000,00		1.150.200.000,00		1.181.004.000,00		1.212.424.080,00		1.244.472.561,60	Dinas Perindustrian,

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
			UMKM				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjamin Kemitraan dan Ekspor	Persen	10	13,00	1.120.000.000,00	15,00	1.150.200.000,00	17,00	1.181.004.000,00	19,00	1.212.424.080,00	20,00	1.244.472.561,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.025.597.036,00		2.066.108.976,72		2.107.431.156,25		2.149.579.779,38		2.192.571.374,97	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.945.597.036,00		1.984.508.976,72		2.024.199.156,25		2.064.683.139,38		2.105.976.802,17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,10	1.945.597.036,00	87,20	1.984.508.976,72	87,30	2.024.199.156,25	87,40	2.064.683.139,38	87,50	2.105.976.802,17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	120	30,00	10.000.000,00	35,00	10.000.000,00	40,00	10.000.000,00	45,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	19,15	20,00	10.000.000,00	22,00	10.000.000,00	24,00	10.000.000,00	26,00	10.000.000,00	28,00	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					30.000.000,00		31.000.000,00		32.020.000,00		33.060.400,00		34.121.608,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Persen	100	100	30.000.000,00	100	31.000.000,00	100	32.020.000,00	100	33.060.400,00	100	34.121.608,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.400.000,00	100	20.808.000,00	100	21.224.160,00	100	21.648.643,20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.404.000,00	100	10.612.080,00	100	10.824.321,60	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.353.558.046,00		2.400.629.206,92		2.448.641.791,06		2.497.614.626,88		2.547.566.919,42	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.673.558.046,00		1.707.029.206,92		1.741.169.791,06		1.775.993.186,88		1.811.513.050,62	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	100	100	1.673.558.046,00	100	1.707.029.206,92	100	1.741.169.791,06	100	1.775.993.186,88	100	1.811.513.050,62	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA					40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,40	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirasaha Pemuda	Persen	14,77	15,25	40.000.000,00	15,50	40.800.000,00	15,75	41.616.000,00	16,00	42.448.320,00	16,25	43.297.286,40	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					630.000.000,00		642.800.000,00		655.856.000,00		669.173.120,00		682.756.582,40	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Preseniasi Atlet yang Masuk Pelatnas/Pelatda	Persen	2	2,00	630.000.000,00	3,00	642.800.000,00	4,00	655.856.000,00	5,00	669.173.120,00	6,00	682.756.582,40	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPARAMUKAAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	90	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	10.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tercapainya Kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,23	2,70	10.000.000,00	2,90	10.000.000,00	3,10	10.000.000,00	3,30	10.000.000,00	3,50	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERSANDIAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMARAN INFORMASI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	50	51,00	10.000.000,00	52,00	10.000.000,00	53,00	10.000.000,00	54,00	10.000.000,00	55,00	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN					1.947.243.683,00		1.986.188.556,66		2.025.912.327,79		2.066.430.574,35		2.107.759.185,84	
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.194.743.683,00		1.218.638.556,66		1.243.011.327,79		1.267.871.554,35		1.293.228.985,44	Sekretariat Majelis Adat Aceh
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	82	84,00	1.194.743.683,00	85,00	1.218.638.556,66	86,00	1.243.011.327,79	87,00	1.267.871.554,35	88,00	1.293.228.985,44	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					650.000.000,00		663.000.000,00		676.260.000,00		689.785.200,00		703.580.904,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	80	85,00	650.000.000,00	87,00	663.000.000,00	89,00	676.260.000,00	91,00	689.785.200,00	93,00	703.580.904,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		54.121.608,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	6,7	13,33	50.000.000,00	20,00	51.000.000,00	26,67	52.020.000,00	33,33	53.060.400,00	40,00	54.121.608,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Persen	0	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					52.500.000,00		53.550.000,00		54.621.000,00		55.713.420,00		56.827.688,40	Sekretariat Majelis Adat Aceh
			Melestarikan, mengembangkan, dan memperkuat nilai-nilai adat serta budaya Aceh untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan identitas daerah	Persentase Perangkat Adat Aktif Menerapkan Hukum Adat Yang Bersendikan Islam	Persen	74,69	75,90	52.500.000,00	77,1	53.550.000,00	77,10	54.621.000,00	78,31	55.713.420,00	78,70	56.827.688,40	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN					2.914.272.883,00		2.972.558.340,66		3.022.009.507,47		3.082.649.697,62		3.144.502.691,58	
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					2.854.272.883,00		2.911.358.340,66		2.969.585.507,47		3.028.977.217,62		3.089.556.761,98	Dinas Perpustakaan dan

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												Kearsipan		
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87,04	87,20	2.854.272.883,00	87,30	2.911.358.340,66	87,40	2.969.585.507,47	87,50	3.028.977.217,62	87,60	3.089.556.761,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					60.000.000,00		61.200.000,00		52.424.000,00		53.672.480,00		54.945.929,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	68,25	69,25	60.000.000,00	69,75	61.200.000,00	70,25	52.424.000,00	70,75	53.672.480,00	71,25	54.945.929,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEARSIPAN					343.760,00		350.635,20		10.357.647,90		10.364.800,86		10.372.096,88	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					343.760,00		350.635,20		357.647,90		364.800,86		372.096,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	20	20	343.760,00	20	350.635,20	20	357.647,90	20	364.800,86	20	372.096,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	0	-	-	-	50,00	10.000.000,00	55,00	10.000.000,00	60,00	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					10.905.380.799,00		11.123.488.414,98		11.345.958.183,28		11.572.877.346,95		11.804.334.893,88	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					71.600.000,00		72.600.000,00		73.820.000,00		75.357.040,00		77.116.180,80	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					10.000.000,00		10.200.000,00		10.620.000,00		11.757.040,00	5,00	12.916.180,80	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	Ton	0	84,00	10.000.000,00	85,00	10.200.000,00	87,00	10.620.000,00	90,00	11.757.040,00	91,00	12.916.180,80	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					30.000.000,00		30.400.000,00		31.000.000,00		31.200.000,00		31.400.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	100	111,00	30.000.000,00	122,00	30.400.000,00	133,00	31.000.000,00	144,00	31.200.000,00	155,00	31.400.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					31.600.000,00		32.000.000,00		32.200.000,00		32.400.000,00		32.800.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Angka	58,95	54,00	31.600.000,00	56,00	32.000.000,00	58,00	32.200.000,00	60,00	32.400.000,00	62,00	32.800.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PARIWISATA					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.000.000,00		5.100.000,00		5.202.000,00		5.306.040,00		5.412.160,80	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	5,88	6,38	5.000.000,00	6,63	5.100.000,00	6,88	5.202.000,00	7,13	5.306.040,00	7,38	5.412.160,80	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.000.000,00		5.100.000,00		5.202.000,00		5.306.040,00		5.412.160,80	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	4,7	4,80	5.000.000,00	4,90	5.100.000,00	5,10	5.202.000,00	5,30	5.306.040,00	5,40	5.412.160,80	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN					7.734.819.003,00		7.889.947.383,06		8.047.978.330,72		8.208.877.257,34		8.372.802.802,48	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.503.459.003,00		7.653.528.183,06		7.806.598.746,72		7.962.730.721,66		8.121.985.336,09	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	83	84,00	7.503.459.003,00	85,00	7.653.528.183,06	86,00	7.806.598.746,72	87,00	7.962.730.721,66	88,00	8.121.985.336,09	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					40.000.000,00		41.000.000,00		42.020.000,00		43.060.400,00		44.121.608,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	0	10,00	40.000.000,00	12,00	41.000.000,00	14,00	42.020.000,00	16,00	43.060.400,00	18,00	44.121.608,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Persentase peningkatan Produksi Holtikultura	Persen	25	30,00		40,00		50,00		11,00		13,00		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Persentase peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	0	15,00		17,00		19,00		21,00		23,00		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Persen	0	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.000.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					8.000.000,00		8.400.000,00		9.200.000,00		9.800.000,00		10.200.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	0	40,00	8.000.000,00	38,00	8.400.000,00	36,00	9.200.000,00	34,00	9.800.000,00	32,00	10.200.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	0	5,00		7,00		8,00		10,00		12,00		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.400.000,00		51.600.000,00		52.232.000,00		52.800.000,00		53.400.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha yang diterbitkan	Persen	50	52,00	50.400.000,00	54,00	51.600.000,00	56,00	52.232.000,00	58,00	52.800.000,00	60,00	53.400.000,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					122.960.000,00		125.419.200,00		127.927.584,00		130.486.135,68		133.095.858,39	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persen	0	50,00	122.960.000,00	52,00	125.419.200,00	54,00	127.927.584,00	56,00	130.486.135,68	58,00	133.095.858,39	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	Persen	0	20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks keanekaragaman Hayati	Angka	5	6,00	20.000.000,00	7,00	20.400.000,00	8,00	20.808.000,00	9,00	21.224.160,00	10,00	21.648.643,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0		0		0		-		0	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.858.961.796,00		2.916.141.031,92		2.974.463.852,56		3.033.953.129,61		3.094.632.192,20	
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.645.761.796,00		2.698.677.031,92		2.752.650.572,56		2.807.703.584,01		2.863.857.655,69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	2.645.761.796,00	85,00	2.698.677.031,92	86,00	2.752.650.572,56	87,00	2.807.703.584,01	88,00	2.863.857.655,69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					193.200.000,00		197.064.000,00		201.005.280,00		205.025.385,60		209.125.893,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen	7	7,00	193.200.000,00	7,00	197.064.000,00	7,00	201.005.280,00	7,00	205.025.385,60	7,00	209.125.893,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	100,00	10.000.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	10.404.000,00	100,00	10.612.080,00	100,00	10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persen	0	100,00	10.000.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	10.404.000,00	100,00	10.612.080,00	100,00	10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN					170.000.000,00		173.400.000,00		176.868.000,00		180.405.360,00		184.013.467,20	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					160.000.000,00		163.200.000,00		166.464.000,00		169.793.280,00		173.189.145,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	2,958	3,20	160.000.000,00	3,40	163.200.000,00	3,60	166.464.000,00	3,80	169.793.280,00	4,00	173.189.145,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persen	100	100,00	10.000.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	10.404.000,00	100,00	10.612.080,00	100,00	10.824.321,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI					40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,40	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	12,5	12,5	20.000.000,00	12,5	20.400.000,00	12,5	20.808.000,00	12,5	21.224.160,00	12,5	21.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	12,5	12,5	20.000.000,00	12,5	20.400.000,00	12,5	20.808.000,00	12,5	21.224.160,00	12,5	21.648.643,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					45.479.856.861,00		46.389.453.998,22		47.317.243.078,19		48.263.587.939,75		49.228.859.698,55	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					27.113.565.923,00		27.655.837.241,46		28.208.953.986,29		28.773.133.066,02		29.348.595.727,34	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.643.565.923,00		22.076.437.241,46		22.517.965.986,29		22.968.325.306,02		23.427.691.812,14	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,50	21.373.565.923,00	88,00	21.786.437.241,46	88,50	22.227.965.986,29	89,00	22.648.325.306,02	89,50	23.082.691.812,14	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Angka	0	28,00	270.000.000,00	29,00	290.000.000,00	30,00	290.000.000,00	31,00	320.000.000,00	32,00	345.000.000,00	Sekretariat Daerah

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4	01	02	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.005.000.000,00		1.025.100.000,00		1.045.602.000,00		1.066.514.040,00		1.087.844.320,80	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama daerah	Persen	90	90,00	155.000.000,00	90,00	175.100.000,00	90,00	180.000.000,00	90,00	180.000.000,00	90,00	180.000.000,00	Sekretariat Daerah
				Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persen	66,67	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	90	90,00	650.000.000,00	90,00	650.000.000,00	90,00	650.000.000,00	90,00	650.000.000,00	90,00	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persen	85	90,00	200.000.000,00	90,00	200.000.000,00	90,00	215.602.000,00	90,00	236.514.040,00	90,00	257.844.320,80	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.465.000.000,00		4.554.300.000,00		4.645.386.000,00		4.738.293.720,00		4.833.059.594,40	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	60	62,00	200.000.000,00	62,50	250.000.000,00	63,00	270.000.000,00	65,00	290.000.000,00	65,50	290.000.000,00	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Persen	85	85	3.715.000.000,00	85	3.749.300.000,00	85	3.800.386.000,00	85	3.868.293.720,00	85	3.963.059.594,40	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Angka	63,92	65,00	550.000.000,00	70,00	555.000.000,00	70,00	575.000.000,00	70,00	580.000.000,00	75,00	580.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UNSUR SEKRETARIAT DPRD					18.366.290.938,00		18.733.616.756,76		19.108.289.091,90		19.490.454.873,73		19.880.263.971,21	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.779.764.868,00		16.095.360.165,36		16.417.267.368,67		16.745.612.716,04		17.080.524.970,36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	15.779.764.868,00	85,00	16.095.360.165,36	86,00	16.417.267.368,67	87,00	16.745.612.716,04	88,00	17.080.524.970,36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.586.526.070,00		2.638.256.591,40		2.691.021.723,23		2.744.842.157,69		2.799.739.000,85	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu	2.133.075.530,00	Tepat Waktu	2.175.737.039,40	Tepat Waktu	2.219.251.781,23	Tepat Waktu	2.263.636.817,69	Tepat Waktu	2.308.909.553,85	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	80	80		80		80		80		80		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	85	85	453.450.540,00	85	462.519.552,00	85	471.769.942,00	85	481.205.340,00	85	490.829.447,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
5			URUSAN PEMERINTAHAN					124.321.607.011,00		144.804.201.440,22		147.700.285.469,02		150.654.291.179,41		153.667.377.001,97	
5	01		BIDANG UNSUR PERENCANAAN					5.005.844.699,00		5.105.961.592,98		5.208.080.824,84		5.312.242.441,34		5.418.487.290,16	
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.310.844.699,00		3.377.061.592,98		3.444.602.824,84		3.513.494.881,34		3.583.764.778,96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,20	3.310.844.699,00	87,40	3.377.061.592,98	87,60	3.444.602.824,84	87,80	3.513.494.881,34	88	3.583.764.778,96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					795.000.000,00		810.900.000,00		827.118.000,00		843.660.360,00		860.533.567,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJM dengan RKPD	Persen	82,65	95	795.000.000,00	95	810.900.000,00	95	827.118.000,00	95	843.660.360,00	97	860.533.567,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	98,81	99,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					900.000.000,00		918.000.000,00		936.360.000,00		955.087.200,00		974.188.944,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			PEMBANGUNAN DAERAH														
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100,00	100,00	440.000.000,00	100,00	448.800.000,00	100,00	457.776.000,00	100,00	466.931.520,00	100,00	476.270.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100,00	100,00	300.000.000,00	100,00	306.000.000,00	100,00	312.120.000,00	100,00	318.362.400,00	100,00	324.729.648,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perencanaan dan SDA	Persen	100,00	100,00	160.000.000,00	100,00	163.200.000,00	100,00	166.464.000,00	100,00	169.793.280,00	100,00	173.189.146,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UNSUR KEUANGAN				116.170.043.675,00		136.493.444.548,50		139.223.313.439,47		142.007.779.709,26		144.847.935.302,43		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.192.467.691,00		9.376.317.044,82		9.563.843.385,72		9.755.120.253,43		9.950.222.658,50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	87	87,20	9.192.467.691,00	87,40	9.376.317.044,82	87,60	9.563.843.385,72	87,80	9.755.120.253,43	88,00	9.950.222.658,50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				106.134.239.309,00		126.256.924.095,18		128.782.062.577,08		131.357.703.829,63		133.984.857.905,20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	28,46	30,00	609.601.850,00	30,00	1.089.496.075,18	30,00	1.129.496.075,08	30,00	1.426.265.575,63	30,00	1.461.567.665,20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	22	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	50,00	50,00	105.232.912.009,00	50,00	124.620.580.245,00	50,00	127.068.409.352,00	50,00	128.831.683.329,00	50,00	131.401.540.216,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase Penurunan SILPA	Persen	50,31	30,00		25,00		20,00		20,00		20,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	291.725.450,00	100	546.847.775,00	100	584.157.150,00	100	1.099.754.925,00	100	1.121.750.024,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				435.192.400,00		443.896.248,00		452.774.172,96		461.829.656,42		471.066.249,55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	4,1	4,1	435.192.400,00	4,2	443.896.248,00	4,40	452.774.172,96	4,50	461.829.656,42	4,60	471.066.249,55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				408.144.275,00		416.307.160,50		424.633.303,71		433.125.969,78		441.788.489,18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,61	11,00	225.301.760,00	12,00	225.301.760,50	15,00	233.627.903,71	17,00	234.627.903,78	19,00	255.301.760,18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persen	70	72,00	120.000.000,00	74,00	120.000.000,00	76,00	120.000.000,00	78,00	120.000.000,00	80,00	120.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	50	52,00	62.842.515,00	54,00	71.005.400,00	56,00	71.005.400,00	58,00	78.498.066,00	60,00	66.486.729,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN				2.837.604.187,00		2.890.518.559,74		2.948.328.930,93		3.007.295.509,55		3.067.441.419,74		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.157.605.085,00		2.200.757.186,70		2.244.772.330,43		2.289.667.777,04		2.335.461.132,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	86	88,00	2.157.605.085,00	90,00	2.200.757.186,70	92,00	2.244.772.330,43	94,00	2.289.667.777,04	96,00	2.335.461.132,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				488.113.552,00		497.875.823,04		507.833.339,50		517.990.006,29		528.349.806,42	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	488.113.552,00	85,00	497.875.823,04	86,00	507.833.339,50	87,00	517.990.006,29	88,00	528.349.806,42	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					141.885.550,00		141.885.550,00		144.723.261,00		147.617.726,22		150.570.080,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Persen	81,98	82,50	34.479.150,00	83,00	34.479.150,00	83,50	35.798.261,00	84,00	38.692.726,22	84,50	41.645.080,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	80	81,00	52.895.000,00	82,00	52.895.000,00	83,00	52.895.000,00	84,00	52.895.000,00	85,00	52.895.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya tata kelola Pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	70	70,50	26.161.400,00	71,00	26.161.400,00	71,50	27.180.000,00	72,00	27.180.000,00	72,50	27.180.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	100	100	28.350.000,00	100	28.350.000,00	100	28.850.000,00	100	28.850.000,00	100	28.850.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kegiatan ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan kegiatan ASN	Persen	100	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	52.020.000,00	100,00	53.060.400,00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	04		UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					58.114.450,00		59.276.739,00		60.462.273,78		61.671.519,26		62.904.949,64	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					58.114.450,00		59.276.739,00		60.462.273,78		61.671.519,26		62.904.949,64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	80	81,00	20.000.000,00	82,00	20.885.939,00	83,00	21.312.273,00	84,00	21.170.519,00	85,00	21.450.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	80	81,00	12.814.350,00	82,00	12.820.000,00	83,00	13.000.000,00	84,00	13.500.000,00	85,00	13.850.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan Pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	70	70,50	25.300.100,00	71,00	25.570.800,00	71,50	26.150.000,78	72,00	27.001.000,26	72,50	27.604.649,64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					250.000.000,00		255.000.000,00		260.100.000,00		265.302.000,00		270.608.040,00	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					125.000.000,00		127.500.000,00		130.050.000,00		132.651.000,00		135.304.020,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	50.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pengembangan Potensi Unggulan yang memanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam penyelesaian Permasalahan Daerah yang memanfaatkan dalam Kebijakan pembangunan Daerah	Persen	100	100	25.000.000,00	100	27.500.000,00	100	30.050.000,00	100	32.651.000,00	100	35.304.020,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	0		10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5	05	03	pengkajian dan penerapan di daerah PROGRAM RISET INOVASI DAERAH					125.000.000,00		127.500.000,00		130.050.000,00		132.651.000,00		135.304.020,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persen	100	100,00	75.000.000,00	100,00	87.500.000,00	100,00	80.050.000,00	100,00	72.651.000,00	100,00	75.304.020,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	100						100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	100	100,00	50.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persenase Fasilitasi, pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	0				100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					5.597.707.276,00		5.709.661.421,52		5.823.854.649,95		5.940.331.742,95		6.059.138.377,81	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					5.597.707.276,00		5.709.661.421,52		5.823.854.649,95		5.940.331.742,95		6.059.138.377,81	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.597.707.276,00		3.669.661.421,52		3.743.054.649,95		3.817.915.742,95		3.894.274.057,81	Inspektorat
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	58,79	80,00	3.597.707.276,00	81,00	3.669.661.421,52	82,00	3.743.054.649,95	83,00	3.817.915.742,95	84,00	3.894.274.057,81	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.320.000.000,00		1.346.400.000,00		1.373.328.000,00		1.400.794.560,00		1.428.810.451,20	Inspektorat
			Memurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	74	80,00	1.320.000.000,00	81,00	1.346.400.000,00	82,00	1.373.328.000,00	83,00	1.400.794.560,00	85,00	1.428.810.451,20	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					680.000.000,00		693.600.000,00		707.472.000,00		721.621.440,00		736.053.868,80	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3,00	680.000.000,00	3,00	693.600.000,00	3,00	707.472.000,00	3,00	721.621.440,00	3,00	736.053.868,80	Inspektorat
				Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)	Level	2	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN					10.210.129.669,00		10.414.332.262,38		10.622.618.907,63		10.835.071.285,77		11.051.772.711,50	
7	01		KECAMATAN					10.210.129.669,00		10.414.332.262,38		10.622.618.907,63		10.835.071.285,77		11.051.772.711,50	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.705.962.420,00		1.740.081.668,40		1.774.883.301,77		1.810.380.967,80		1.846.588.587,16	Kecamatan Longkib
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	1.705.962.420,00	85,00	1.740.081.668,40	86,00	1.774.883.301,77	87,00	1.810.380.967,80	88,00	1.846.588.587,16	Kecamatan Longkib
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.051.480.274,00		2.092.509.879,48		2.134.360.077,07		2.177.047.278,61		2.220.588.224,18	Kecamatan Penanggalan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	70	84,00	2.051.480.274,00	85,00	2.092.509.879,48	86,00	2.134.360.077,07	87,00	2.177.047.278,61	88,00	2.220.588.224,18	Kecamatan Penanggalan
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.034.314.910,00		2.075.001.208,20		2.116.501.232,36		2.158.831.257,01		2.202.007.882,15	Kecamatan Rundeng

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	85	90,00	2.034.314.910,00	90,00	2.075.001.208,20	90,00	2.116.501.232,36	90,00	2.158.831.257,01	90,00	2.202.007.882,15	Kecamatan Rundeng
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.344.267.749,00		2.391.153.103,98		2.438.976.166,06		2.487.755.689,38		2.537.510.803,17	Kecamatan Simpang Kiri
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	90	84,00	2.344.267.749,00	85,00	2.391.153.103,98	86,00	2.438.976.166,06	87,00	2.487.755.689,38	88,00	2.537.510.803,17	Kecamatan Simpang Kiri
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.821.604.316,00		1.858.036.402,32		1.895.197.130,37		1.933.101.072,97		1.971.763.094,43	Kecamatan Sultan Daulat
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	1.821.604.316,00	85,00	1.858.036.402,32	86,00	1.895.197.130,37	87,00	1.933.101.072,97	88,00	1.971.763.094,43	Kecamatan Sultan Daulat
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					17.000.000,00		17.440.000,00		17.888.800,00		18.346.576,00		18.813.507,52	Kecamatan Penanggalan
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	100	100,00	17.000.000,00	100,00	17.440.000,00	100,00	17.888.800,00	100,00	18.346.576,00	100,00	18.813.507,52	Kecamatan Penanggalan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000,00		5.200.000,00		5.404.000,00		5.612.080,00		5.824.321,60	Kecamatan Rundeng
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	90	90,00	5.000.000,00	90,00	5.200.000,00	90,00	5.404.000,00	90,00	5.612.080,00	90,00	5.824.321,60	Kecamatan Rundeng
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.000.000,00		2.200.000,00		2.404.000,00		2.612.080,00		2.824.321,60	Kecamatan Simpang Kiri
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	100	100,00	2.000.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.404.000,00	100,00	2.612.080,00	100,00	2.824.321,60	Kecamatan Simpang Kiri
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					25.000.000,00		25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.200,00		27.060.804,00	Kecamatan Sultan Daulat
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	100	100,00	25.000.000,00	100,00	25.500.000,00	100,00	26.010.000,00	100,00	26.530.200,00	100,00	27.060.804,00	Kecamatan Sultan Daulat
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					63.000.000,00		64.260.000,00		65.545.200,00		66.856.104,00		68.193.226,08	Kecamatan Longkib
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan	Persen	100	100,00	63.000.000,00	100,00	64.260.000,00	100,00	65.545.200,00	100,00	66.856.104,00	100,00	68.193.226,08	Kecamatan Longkib

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	100	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	Kecamatan Penanggalan		
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan	Persen	100	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	Kecamatan Penanggalan		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	Kecamatan Rundeng		
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan	Persen	100	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	Kecamatan Rundeng		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	Kecamatan Simpang Kiri		
			Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan partisipasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya dan pembangunan berkelanjutan	Persentase kampung yang memperoleh pembinaan	Persen	100	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	Kecamatan Simpang Kiri		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00	Kecamatan Penanggalan		
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	95	95,00	10.000.000,00	95,00	10.200.000,00	95,00	10.404.000,00	95,00	10.612.080,00	Kecamatan Penanggalan		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.000.000,00		8.160.000,00		8.323.200,00		8.489.664,00	Kecamatan Rundeng		
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	100	100,00	8.000.000,00	100,00	8.160.000,00	100,00	8.323.200,00	100,00	8.489.664,00	Kecamatan Rundeng		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					15.000.000,00		15.300.000,00		15.606.000,00		15.918.120,00	Kecamatan Simpang Kiri		
			Mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif warga	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	100	100,00	15.000.000,00	100,00	15.300.000,00	100,00	15.606.000,00	100,00	15.918.120,00	Kecamatan Simpang Kiri		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00	Kecamatan Longkib		
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	30.000.000,00	100,00	30.600.000,00	100,00	31.212.000,00	100,00	32.472.964,80	Kecamatan Longkib		
7	01	05	PROGRAM					15.000.000,00		15.300.000,00		15.606.000,00		16.236.482,40	Kecamatan		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														Rundeng
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	15.000.000,00	100,00	15.300.000,00	100,00	15.606.000,00	100,00	15.918.120,00	100,00	16.236.482,40	Kecamatan Rundeng
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.000.000,00		25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.200,00		27.060.804,00	Kecamatan Sultan Daulat
			Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkualitas dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional	Persentase dokumen administratif yang diproses tepat waktu di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	25.000.000,00	100,00	25.500.000,00	100,00	26.010.000,00	100,00	26.530.200,00	100,00	27.060.804,00	Kecamatan Sultan Daulat
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.000.000,00		7.140.000,00		7.282.800,00		7.428.456,00		7.577.025,12	Kecamatan Penanggalan
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik	Persen	100	100,00	7.000.000,00	100,00	7.140.000,00	100,00	7.282.800,00	100,00	7.428.456,00	100,00	7.577.025,12	Kecamatan Penanggalan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.000.000,00		5.100.000,00		5.202.000,00		5.306.040,00		5.412.160,80	Kecamatan Rundeng
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik	Persen	100	100,00	5.000.000,00	100,00	5.100.000,00	100,00	5.202.000,00	100,00	5.306.040,00	100,00	5.412.160,80	Kecamatan Rundeng
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.500.000,00		7.650.000,00		7.803.000,00		7.959.060,00		8.118.241,20	Kecamatan Simpang Kiri
			Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kampung yang memiliki dokumen administrasi lengkap dan terdokumentasi dengan baik	Persen	100	100,00	7.500.000,00	100,00	7.650.000,00	100,00	7.803.000,00	100,00	7.959.060,00	100,00	8.118.241,20	Kecamatan Simpang Kiri
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.927.387.479,00		2.985.935.228,58		3.045.653.933,15		3.106.567.011,82		3.168.698.352,05	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.927.387.479,00		2.985.935.228,58		3.045.653.933,15		3.106.567.011,82		3.168.698.352,05	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.346.021.479,00		1.372.941.908,58		1.400.400.746,75		1.428.408.761,69		1.456.976.936,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	84,00	1.346.021.479,00	85,00	1.372.941.908,58	86,00	1.400.400.746,75	87,00	1.428.408.761,69	88,00	1.456.976.936,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					350.000.000,00		357.000.000,00		364.140.000,00		371.422.800,00		378.851.256,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	22,86	100,00	350.000.000,00	100,00	357.000.000,00	100,00	364.140.000,00	100,00	371.422.800,00	100,00	378.851.256,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			dan karakter kebangsaan														
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				703.366.000,00		717.433.320,00		731.781.986,40		746.417.626,13		761.345.978,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	37,50	37,50	703.366.000,00	37,50	717.433.320,00	37,50	731.781.986,40	100,00	746.417.626,13	100,00	761.345.978,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	50,00	55,00	25.000.000,00	60,00	25.000.000,00	65,00	25.000.000,00	70,00	25.000.000,00	70,00	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	33,33	33,33	25.000.000,00	33,33	25.000.000,00	50,00	25.000.000,00	50,00	25.000.000,00	50,00	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				478.000.000,00		488.560.000,00		499.331.200,00		510.317.824,00		521.524.180,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	Persen	63,64	70,00	478.000.000,00	70,00	488.560.000,00	70,00	499.331.200,00	75,00	510.317.824,00	75,00	521.524.180,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9			UNSUR KEKHUSUSAN				13.443.003.298,00		13.711.863.363,96		12.986.100.631,24		13.245.822.643,87		13.510.739.096,74		
9	01		KEKHUSUSAN ACEH				13.443.003.298,00		13.711.863.363,96		12.986.100.631,24		13.245.822.643,87		13.510.739.096,74		
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.543.780.105,00		1.574.655.707,10		1.606.148.821,24		1.638.271.797,67		1.671.037.233,62	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	95	95,50	1.543.780.105,00	96,00	1.574.655.707,10	96,50	1.606.148.821,24	97,00	1.638.271.797,67	97,50	1.671.037.233,62	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.250.113.726,00		1.275.116.000,52		1.300.618.320,53		1.326.630.686,94		1.353.163.300,68	Sekretariat Baitul Mai	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	81	1.250.113.726,00	82	1.275.116.000,52	83	1.300.618.320,53	84	1.326.630.686,94	85	1.353.163.300,68	Sekretariat Baitul Mai
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.942.736.688,00		3.001.591.421,76		3.061.623.250,20		3.122.855.715,20		3.185.312.829,50	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	60	70,00	2.942.736.688,00	75,00	3.001.591.421,76	80,00	3.061.623.250,20	85,00	3.122.855.715,20	90,00	3.185.312.829,50	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH				2.515.000.000,00		2.565.300.000,00		1.616.606.000,00		1.648.938.120,00		1.681.916.882,40	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
			Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran syariat islam	Persen	100,00	100,00	2.515.000.000,00	100,00	2.565.300.000,00	100,00	1.616.606.000,00	100,00	1.648.938.120,00	100,00	1.681.916.882,40	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH				180.000.000,00		183.600.000,00		187.272.000,00		191.017.440,00		194.837.788,80	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatkan peran ulama dalam membimbing masyarakat Aceh berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis	Persentase Hasil Sidang yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan Daerah	Persen	80	82,00	180.000.000,00	85,00	183.600.000,00	87,00	187.272.000,00	90,00	191.017.440,00	92,00	194.837.788,80	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL ACEH					5.011.372.779,00		5.111.600.234,58		5.213.832.239,27		5.318.108.884,06		5.424.471.061,74	Sekretariat Baitul Mal
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara efektif dan transparan	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS	Persen	100	90,00	5.011.372.779,00	90,00	5.111.600.234,58	90,00	5.213.832.239,27	90,00	5.318.108.884,06	90,00	5.424.471.061,74	Sekretariat Baitul Mal
								613.917.666.398,00		650.955.768.080,96		635.282.976.724,58		650.802.349.953,09		666.733.998.131,12	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Adapun IKU dan IKD RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 4.2. dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,75	8,87	8,99	9,11	9,23	9,35	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,32	15,47	15,62	15,77	15,92	16,07	
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,01	70,15	70,3	70,5	70,7	71	
4	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Angka	84	85	86	87	88	89	
5	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	Kasus	120	110	100	90	80	70	
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5	4,6	
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,88	13,63	13,38	13,13	12,88	12,5	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,87	4,5	4,2	3,75	3,25	2,75	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60	62	64	66	68	70	
10	Nilai SAKIP	Angka	55	57,5	60	62,5	65	67,5	
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	3,36	3,39	3,41	3,44	3,47	3,49	
12	Indeks Pilar Infrastruktur IDSD	Angka	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,17	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,5	74,75	75	75,25	75,5	75,75	
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Daerah

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	41,12	42	43	44	45	46	47	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	8,02	8	7,75	7,5	7,25	7	6,75	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	KWh / Kapita	144	145	147	149	151	153	155	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	57,25	60	63	66	69	72	75	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,28	74,5	74,75	75	75,25	75,5	75,75	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	61,57	62	63	65	67	70	73	
7	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton	12866,25	15000	16000	17000	18000	19000	20000	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	17,07	18,29	19,51	20,73	21,95	23,17	24,39	
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	87,87	87,37	86,87	86,37	85,87	85,37	84,87	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,1	2,05	2	1,9	1,8	1,7	1,6	
12	Rasio Penduduk	Persen	103	103	103	103	102	102	102	
13	Kepadatan Penduduk	Orang / Km persegi	76	77	78	79	80	81	82	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50	4,60	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,38	13,88	13,63	13,38	13,13	12,88	12,50	
3	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Juta / orang / tahun	27,88	28,73	29,58	30,43	31,28	32,13	32,98	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,12	4,87	4,50	4,20	3,75	3,25	2,75	
5	Rasio Gini	Angka	0,276	0,275	0,274	0,273	0,272	0,271	0,27	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,64	71,63	72,45	73,27	74,11	74,95	75,84	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,80	70,01	70,15	70,30	70,50	70,70	71,00	
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	Persen	27,5	27	25	23	21	19	17	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,75	8,87	8,99	9,11	9,23	9,35	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,31	15,32	15,47	15,62	15,77	15,92	16,07	
11	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Angka	46,32	48,82	51,32	53,82	56,32	58,82	61,32	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan	Angka	61,24	62,34	63,44	64,54	65,64	66,74	67,84	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Asesmen Nasional									
13	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Angka	45,38	48,28	51,18	54,08	56,98	59,88	62,78	
14	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	56,08	57,58	59,08	60,58	62,08	63,58	65,08	
15	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	71,93	72,18	72,43	72,68	72,93	73,18	73,43	
16	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	37,25	37,5	37,75	38	38,25	38,5	38,75	
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	40,51	41	41,5	42	42,5	43	43,5	
18	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,89	64,09	64,29	64,49	64,69	64,89	65,09	
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,525	0,495	0,465	0,435	0,405	0,375	0,345	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	85,88	86	86,25	86,75	87	87,75	88,75	
22	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun	Persen	96,44	97	97,25	97,5	97,75	98	98,25	
23	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	8491	8910	9311	9730	10168	10626	11104	
24	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Persen	1.111.170	1.250.000	1.345.000	1.440.000	1.535.000	1.630.000	1.725.000	
25	Persentase Penanganan Stunting	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	65,8	66,9	68	69	70	71	71,9	
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	60,6	63	65,2	67,2	68,9	70,5	72	
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Angka	53,99	53,74	53,49	53,24	52,99	52,74	52,49	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,37	19,38	19,39	19,40	19,42	19,44	19,47	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,92	0,93	0,94	0,95	0,97	0,99	1,02	
4	Rasio kewirausahaan	Persen	14,77	15	15,25	15,5	15,75	16	16,25	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,60	69,10	69,60	70,10	70,60	71,10	71,60	
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,88	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	50,00	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	47,72	47,77	47,82	47,87	47,92	47,97	48,02	
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	70,03	71	72	73	75	77	79	
9	Persentase Desa Mandiri	Persen	28,05	29,27	30,49	32,93	35,37	37,80	42,68	
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,2542	0,2592	0,2642	0,2692	0,2742	0,2792	0,2842	
11	Tingkat Inflasi (Meulaboh)	Persen	3,29	3	3	3	3	3	3	
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,61	10,00	11,00	12,00	15,00	17,00	19,00	
13	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	0,960	0,965	0,970	0,975	0,980	0,990	1,000	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,34	77,59	77,84	78,09	78,34	78,59	78,84	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,48	2,6	2,6	2,7	2,8	3	3,25	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,82	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,1	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	65,56	73	73,5	74	74,5	75	76	
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	96,3	
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,24	3,27	3,29	3,31	3,4	3,5	3,6	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
5.1	Bidang Urusan Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	48,40	49	49,5	50	50,5	51	51,5	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,56	100	100	99,8	99,85	99,9	99,95	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	87,29	97	98	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	56,53	63,02	69,51	76	76,76	77,52	78,29	
5	APK PAUD	Persen	44,82	46,9	49,51	52,01	54,51	57,01	59,51	
6	APK SD/MI	Persen	108,61	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	
9	APK SMP/MTs	Persen	93,65	100	100	115,85	115,86	115,87	115,88	
10	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persen	100	100	100	99,07	99,08	99,9	100	
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	
12	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,5	86,5	87,5	100	100	100	100	
13	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	99,8	99,8	100	100	100	100	100	
14	Rasio guru terhadap murid pendidikan SD/MI	Rasio	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	
15	Rasio guru terhadap murid pendidikan SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	
16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	Persen	99,69	99,76	99,82	99,89	99,95	100	100	
17	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	39,68	41,37	48,67	58,62	71,05	85,98	100	
18	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	47,39	53,32	54,07	54,82	55,57	56,32	57,07	
19	Iklim Inklusivitas SD	Angka	53,53	56,03	58,53	61,03	63,53	66,03	68,53	
20	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	55,11	57,51	59,91	62,31	64,71	67,11	69,51	
21	Iklim Keamanan SD	Angka	68,22	69,12	70,02	70,92	71,82	72,72	73,62	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Iklim Keamanan SMP	Angka	66,59	68,09	69,59	71,09	72,59	74,09	75,59	
23	Iklim Kebinekaan SD	Angka	66,38	67,38	68,38	69,38	70,38	71,38	72,38	
24	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	68,14	69,14	70,14	71,14	72,14	73,14	74,14	
25	Tingkat kenaikan jumlah Mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Kota Subulussalam	Persen	-84,14	0,1	0,1	0,5	0,7	1	2	
26	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	Persen	36,96	49,53	62,10	74,67	87,24	100,00	100,00	
27	Persentase Dayah Yang Menerapkan Standar Manajemen Dayah	Persen	33,33	47,22	61,11	75,00	88,89	100,00	100,00	
28	Jumlah sarana dan prasarana Dayah/BP Yang Dibantu Pemerintah	Dayah/BP	7	95	95	95	95	95	95	
5.2	Bidang Urusan Kesehatan									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,94	1,91	1,98	2,05	2,11	2,18	2,18	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	95,46	96,25	96,75	97,75	98,75	99,25	100	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	84,25	88,81	91,43	94,04	96,65	98,22	100	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	56,33	60	70	80	90	100	100	
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	21,19	60	80	80	80	80	80	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persen	67,00	70	80	80	80	80	80	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	75,12	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	73,97	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	52,43	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	66,62	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan Balita Stunting (EPPGBM)	Persen	14	14	14	14	14	12	10	
15	Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight) / (BB/U)	Persen	6,37	6	5,5	5	4,5	4	3,5	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Persentase Balita Kurus (Wasting) / (BB/TB)	Persen	4	4	3,5	3	2,5	2	1,5	
17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	9,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
18	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	9,2	9	9	9	9	9	9	
19	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	254	0	0	0	0	0	0	
20	Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	30	40	50	60	70	80	85	
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	90	
22	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persen	0,26	0,78	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	
23	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persen	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	
24	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	60,90	62,10	63,30	64,40	65,50	66,60	67,70	
25	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persen	10,75	10,50	10,25	10,00	9,50	9,00	8,50	
26	Penemuan Kasus TBC	Persen	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	
27	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	42,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	
29	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
30	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Angka	77,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	82,61	
31	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	37,50	37,50	62,50	75,00	87,50	100,00	100,00	
32	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Orang per 1000 penduduk	5,23	6,00	6,00	6,00	6,20	6,20	6,50	
34	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
35	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
36	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persen	60	60	60	70	70	75	80	
37	Persentase Posyandu aktif	Persen	99,13	100	100	100	100	100	100	
38	Penderita diare yang ditangani	Persen	67	100	100	100	100	100	100	
39	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
40	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	85	90	90	90	90	90	90	
41	Persentase Puskesmas yang Berstatus Rawat Inap	Persen	12,5	12,5	12,5	12,5	25	25	25	
42	Surveilant AFP per 100.000 Penduduk	Kasus	4,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Surveilant CRS per 10.000 Kelahiran Hidup	Kasus	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
44	Surveilant Tetanus Neonatorum (TN) per 1.000 Kelahiran Hidup	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	
45	Surveilans Campak Rubella per 100.000 Penduduk	Kasus	0	2	2	2	2	2	2	
46	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,21	0,17	0,15	0,125	0,1	0,05	0	
47	Persentase Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate	Persen	65	65	67	69	71	73	75	
48	Rata- rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien (hari kosong) / Turn Over Interval	Hari	2	2	2	2	2	2	2	
49	Rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over	Kali	70	65	60	55	50	45	40	
50	Angka kematian 48 jam setelah dirawat / Net Death Rate per 1.000 Penduduk	Kasus	4	4	4	4	4	4	4	
51	Angka kematian umum / Gross Death Rate per 1.000 Penduduk	Kasus	19	19	19	19	19	19	19	
5.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	7,2	7,2	14,64	18,36	22,08	25,8	28	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	0	0	2	2,5	3	3,5	4	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	57,25	58,00	59	61	63	65	67	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	49,76	49,76	54,75	59,75	64,75	69,75	74,75	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	45	47	49	51	53	55	57	
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	59,78	59,78	64	66,11	68,22	70,34	72,44	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	7,31	7,31	21,95	29,27	36,59	43,91	50	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Jalan yang Beraspal	Persen	45,98	47,98	49,98	51,98	53,98	55,98	57,98	
10	Proporsi Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Unit	58,1	59	60	61	62	63	64	
11	Panjang Jalan Kota Yang Direhab dan diperbaiki	Km	6,12	6	6	6	6	6	6	
12	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	50	52	54	56	58	60	62	
13	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	18,52	18,52	23,8	28,8	33,8	38,8	43,8	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	0	65	67	68	69	
2	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	65	67	68	69	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persen	19,050	19,050	21,00	23,00	25,00	27,00	30,00	
4	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	29,97	29	28	27	25	23	20	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	50,00	66,67	
6	Persentase Areal Wilayah Kumuh	Persen	0,26	0,26	0,24	0,24	0,22	0,2	0,18	
5.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	78,79	78,89	78,99	79,09	79,19	79,29	79,39	
4	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,24	0,34	0,44	0,54	0,64	0,74	0,84	
5	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	71,43	76,43	81,43	86,43	91,43	96,43	100,00	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	17,50	17	16,5	16	15,5	15	15	
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	80	80	80	80	80	100	120	
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5.6	Bidang Urusan Sosial									
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10,56	70	71	72	73	74	75	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	60,16	60	60	60	60	60	60	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	94,24	70	80	82	83	85	87	
5	Persentase PSKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	60	60	60	60	60	60	60	
5.7	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	67,61	68,61	69,61	70,61	71,61	72,61	73,61	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	38452882,93	39452882,93	40452882,93	41452882,93	42452882,93	43452882,93	44452882,93	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	54,17	55,17	56,17	57,17	58,17	59,17	60,17	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	16,88	17	18	19	20	21	22	
6	Persentase pekerja penuh waktu (>35 jam) dalam seminggu	Persen	58,33	58,5	58,55	58,6	58,65	58,7	58,75	
7	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani dan diselesaikan	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
5.8	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	0,031	0,04	0,05	0,071	0,081	0,091	0,11	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Orang per 100,000	25 : 100.000	23 : 100.000	21 : 100.000	19 : 100.000	17 : 100.000	15 : 100.000	10 : 100.000	
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	
5	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	62,34	62,5	62,75	63	63,25	63,5	63,75	
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	Rasio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	50,87	51	51,07	51,27	51,47	51,67	51,87	
8	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang mendapat pendampingan dan selesai ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penanganan kekerasan pada anak yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendapat pendampingan dan selesai ditangani									
10	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	<500	500	510	520	530	540	550	
5.9	Bidang Urusan Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	70	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
2	Persentase Kampung Tahan Pangan	Persen	78	80	82	84	86	88	90	
5.1	Bidang Urusan Pertanahan									
0.										
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	80	82	85	88	91	95	98	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	75	80	87	90	92	95	97	
3	Persentase ketersediaan Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	80	82	85	88	91	95	98	
4	Persentase ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	50	60	70	80	90	95	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	80	85	90	92	95	97	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	55	60	65	70	75	80	
7	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	0	60	65	70	75	80	85	
5.1	Bidang Urusan Lingkungan Hidup									
1.										
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0,00	50	40	35	30	25	20	
3	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	61,37	62,5	64,5	66,5	68	70	72	
4	Dokumen Daya Dukung Daya Tampung (D3TLH)	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Persentase RTH	Persen	1,02	1,02	1,05	1,07	1,1	1,13	1,15	
5.1	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.										
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	98,43	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	20,99	30	40	45	55	70	70	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,16	98	98,25	98,5	98,75	99	99	
4	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	Persen	25,64	5,13	10,26	15,38	20,51	25,65	25,64	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	2,3	8	20	25	32	40	40	
5.1	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	34,15	35,37	36,59	37,8	39,02	40,24	41,46	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	28,05	30,49	32,93	35,37	37,8	40,24	42,68	
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Desa yang Memiliki BUMDES	Persen	86,59	86,59	87,8	89,02	90,24	91,46	91,46	
5	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7363	0,7613	0,7863	0,8113	0,8363	0,8613	0,8863	
5.1	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,9	2,83	2,84	2,81	2,78	2,79	2,74	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	66,73	66,83	66,93	67,13	67,33	67,53	67,73	
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	72,7	73,7	74,6	75,5	76,3	77,1	77,8	
4	Rasio Akseptor KB	Rasio	83,82	84	84,5	85	85,5	86	86,5	
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	Persen	18,45	18,7	18,95	19,2	19,45	20	20,25	
6	Persentase Peserta KB Baru MKJP	Persen	23,18	23,68	23,88	24,08	24,28	24,48	24,68	
7	Angka kelahiran menurut umur (Age Specific Fertility Rate) 15-19 Tahun	Persen	18,5	17,3	16,2	15,2	14,3	13,5	12,8	
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	13,9	12,6	11,6	10,8	10,2	9,6	9,2	
9	Indeks Lansia Berdaya	Angka	60,9	62,1	63,3	64,4	65,5	66,6	67,7	
10	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Angka	92	92,7	93,3	93,9	94,4	94,9	95,3	
11	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	Persen	20,16	20,41	21,16	21,41	22,16	22,41	23,16	
5.1	Bidang Urusan Perhubungan									
1	Rasio konektivitas	Angka	57	57	57	63	63	63	69	
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	
4	Jumlah terminal kewenangan kota	Unit	3	3	3	3	3	3	3	
5	Jumlah Angkutan Umum Yang Dilakukan Uji KIR	Unit	0	0	20	60	80	80	100	
6	Persentase loket/travel yang terletak di terminal	Persen	0	0	0	0	10	15	15	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1 6.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	0	0	0	0	3	3	3	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	3,64	4	5	6	7	8	9	
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	71,79	72	74	76	78	80	82	
5	Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet	Persen	28,21	59	60	61	62	63	64	
6	Persentase kampung yang memiliki jaringan minimal 4G/LTE	Persen	80,49	81,71	82,93	84,15	85,37	87,80	85,37	
5.1 7.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	13,73	14	15	16	17	18	19	
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	10	11	12	13	14	15	16	
3	Persentase UMKM Aktif	Persen	10	13	15	17	19	21	23	
4	Persentase UKM Aktif	Persen	0	13	15	17	19	21	23	
5	Persentase Koperasi Aktif	Persen	75,28	80	80	80	80	85	90	
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Persen	0	30	30	30	30	30	30	
5.1 8.	Bidang Urusan Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	88,51	89	90	91	92	93	94	
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	112	122	132	142	152	162	172	
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	3.871	3.910	3.949	3.988	4.028	4.068	4.109	
4	Peringkat Indeks Daya Saing Investasi di Aceh	Peringkat	23	23	23	22	21	20	19	
5.1 9.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,83	26,08	26,33	26,58	26,83	27,08	27,33	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	33	33,64	33,89	34,14	34,39	34,64	34,89	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	14	14,25	14,50	14,75	15,00	15,25	15,50	
4	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	25	30	30	30	35	40	45	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	30	35	35	35	40	50	60	
6	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	17	20	22	25	30	35	40	
7	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	Prestasi	7	7	7	9	11	13	15	
5.2 0.	Bidang Urusan Statistik									
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,23	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	
5.2 1.	Bidang Urusan Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50	50,5	51	52	53	54	55	
5.2 2.	Bidang Urusan Kebudayaan									
1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	0	6,7	6,7	13,3	20,0	26,7	33,3	
2	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Festival	0	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Buah	0	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Buah	0	1	1	2	3	4	5	
5	Jumlah Adat Dan Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase penanganan kasus adat yang diselesaikan dengan hukum adat	Persen	0	5	7	9	11	13	15	
7	Persentase rekomendasi terkait adat yang dikeluarkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
5.2 3.	Bidang Urusan Perpustakaan									
1	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	68,25	68,75	69,25	69,75	70,25	70,75	71,25	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	71,93	72,18	72,43	72,68	72,93	73,18	73,43	
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	3.734	3.921	4.117	4.323	4.539	4.766	5.004	
4	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	eksemplar	27768	28.046	28.326	28.609	28.895	29.184	29.476	
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	12736	12.863	12.992	13.122	13.253	13.386	13.520	
5.2 4.	Bidang Urusan Kearsipan									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Persen	20	20	20	20	20	20	20	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	10,26	25,64	43,59	61,54	79,49	100,00	
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	3,00	10,26	25,64	43,59	61,54	79,49	100,00	
5.2	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan									
1	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Persen	52,46	54	56	58	60	62	64	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	100	100	111	122	133	144	155	
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	100	50	52	54	56	58	60	
5.2	Bidang Urusan Pariwisata									
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	5,88	6,13	6,38	6,63	6,88	7,13	7,38	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	7,29	7,79	8,29	8,79	9,29	9,79	10,29	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40	42	44	46	48	50	52	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	
6	Jumlah Wisatawan	Orang	16.523	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000	20.000	
7	Jumlah Wisata yang Masuk API Award	Objek	0	0	0	0	1	0	0	
5.2	Bidang Urusan Pertanian									
1	Produktivitas Padi per Hektar	Ton	4,7	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6	
2	Produktivitas Jagung per Hektar	Ton	5,24	5,8	6	6,2	6,4	6,6	6,8	
3	Produktivitas Kelapa Sawit per hektar	Ton	11,14	12	12,5	13	13,5	14	14,5	
4	Populasi Peternakan	Ekor	281.753	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	
5	Persentase Unggas yang terserang Penyakit	Persen	0	40	38	36	34	32	30	
6	Persentase Ruminansia yang terserang Penyakit	Persen	0	40	38	36	34	32	30	
7	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1,08	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5.2	Bidang Urusan Perdagangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5.3	Bidang Urusan Perindustrian									
1	Persentase pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	Persen	2,958	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0	0	0	0	0	100	0	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Industri Besar	Persen	8,3	13	14	15	16	17	18	
7	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	25	25	25	25	25	25	25	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3	Bidang Urusan Transmigrasi									
1.										
1	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang mendapat Pembinaan	Persen	0	12,5	12,5	12,5	6,25	6,25	6,25	
5.3	Sekretariat Daerah									
2.										
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa berikutnya. ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	80	85	85	90	90	90	90	
4	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	30	31	31	32	32	32	32	
5	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Kategori	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Tinggi	
6	Jumlah Qanun dan Perwal yang dipublikasikan pada JDIH	Dokumen	26	35	40	45	50	50	55	
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa (LKPP)	Indeks	63,92	65	65	70	70	70	75	
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	85,35	85,85	86,35	86,85	87,35	87,85	88,35	
5.3	Sekretariat DPRD									
3.										
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRK	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Fungsi anggaran dalam dokumen RPJMK maupun dokumen RKPK	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	80,00	80	80	80	80	80	80	
5.3	Perencanaan									
4.										
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	82,65	95	95	95	95	95	97	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	98,81	98,5	99	100	100	100	100	
3	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap	Persen	98,74	99	100	100	100	100	100	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penganggaran									
5.3	Keuangan									
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	persen	13,243	23,29	24,5	24,9	25	25,3	25,6	
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	persen	66,080	71,32	71,5	71,7	71,9	72	72,2	
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	0,98	0,9	0,7	0,5	0,25	0	0	
4	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	persen	-20,11	0	0	0	0	0	0	
5	Manajemen Aset	Persen	50	50	75	75	75	100	100	
6	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	0,61	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	17,691	100	100	100	100	100	100	
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	66,67	100	100	100	100	100	100	
9	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Persentase Program yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
11	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
5.3	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	91,09	93	94	95	96	99	100	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	16,23	18	20	24	27	30	33	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	10,42	15	20	24	28	30	33	
4	Indeks Profesional ASN	Indeks	82,21	83	84	85	86	87	88	
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pegawai pendidikan menengah/dasar (PNS)	Rasio	18,24	19,15	20,15	21,25	22,47	23,84	22,47	
6	Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Orang	9	12	15	18	21	24	27	
7	Jumlah Unit KORPRI pada SKPK yang aktif	Unit	0	20	25	30	35	40	45	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3	Penelitian dan pengembangan									
1	Jumlah Inovasi Daerah yang Didaftarkan	Inovasi	10	13	15	17	20	25	30	
2	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD)	Ada / Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.3	Inspektorat Daerah									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kategori	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kategori	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
3	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 -10 Opini WTP	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
4	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	83,13	65	70	75	77	80	83	
5	Jumlah Temuan BPK	Kasus	14	10	5	0	0	0	0	
6	Skor MCP KPK	Angka	82	83	84	85	86	87	90	
5.3	Kecamatan									
1	Persentase Kampung Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Baik Dan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Simpang Kiri	Indeks	0,8629	0,8729	0,8829	0,8929	0,9029	0,9129	0,9229	
3	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Penanggalan	Indeks	0,7907	0,8007	0,8107	0,8207	0,8307	0,8407	0,8507	
4	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Longkib	Indeks	0,7385	0,7385	0,7485	0,8000	0,8100	0,8200	0,8500	
5	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Rundeng	Indeks	0,6740	0,6840	0,6940	0,7040	0,7140	0,7240	0,7340	
6	Rata-rata Indeks Desa Membangunan (IDM) Kecamatan Sultan Daulat	Indeks	0,6599	0,6699	0,6799	0,6899	0,6999	0,7099	0,7199	
5.4	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja						K ET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penelitian									
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	63,64	63,64	70	70	70	75	75	
5.4	Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.										
1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ibadah Yang Dibantu Pemerintah	Mesjid/ Meunasah	4	10	10	10	10	10	10	
2	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Persen	81,7	82	82,3	82,6	82,9	83,2	83,5	
3	Persentase Pendapatan ZIS	Persen	94,68	85	85	85	85	85	85	
4	Persentase Penerima ZIS	Persen	284,44	90	90	90	90	90	90	
5	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS	Persen	100	90	90	90	90	90	90	
6	Persentase Hasil Sidang yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan Daerah	Persen	80	80	82	85	87	90	92	
7	Jumlah Kader Ulama Muda yang mendapatkan pendidikan	Orang	40	60	40	40	40	40	40	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2025–2029 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum, isu-isu strategis, Visi dan Misi pembangunan. Di samping itu, RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJMD ini disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan, dan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) serta sebagai pedoman pembangunan masa transisi tahun 2030. Keberhasilan Pemerintahan Kota Subulussalam periode 2025-2029 dalam mewujudkan Visi **“SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN”** perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam khususnya dan Aceh pada umumnya.

RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggungjawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, berkewajiban menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing yang berpedoman pada RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) mulai tahun 2026 hingga 2030.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam melakukan fasilitasi, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Renstra-PD;
5. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya;
6. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJM Kampong, maka Bappeda Kota Subulussalam berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi terhadap Pemerintahan Kampong.
7. Memperhatikan pengarusutamaan pembangunan daerah yaitu Gender dan Inklusi Sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Transformasi Digital, Pembangunan Rendah karbon, dan Pembangunan Berketahanan Iklim.

5.2 Pembiayaan

RPJMD Kota Subulussalam ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Aceh dan APBD Kota Subulussalam. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk local dari Kota Subulussalam khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Subulussalam. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kota Subulussalam. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2045: “Subulussalam Maju, Islam dan Berkelanjutan”.

5.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi dokumen RPJMD Kota Subulussalam untuk setiap tahapannya baik jangka menengah maupun jangka pendek, harus diantisipasi melalui manajemen risiko untuk mitigasi hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Strategi penanganan risiko terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko terhadap dokumen RPJMD adalah untuk mengoptimalkan hasil dengan mengelola risiko secara maksimal.

Capaian pada rencana pembangunan sangat bergantung pada proses mengantisipasi risiko yang telah dianalisis dari risiko yang telah teridentifikasi secara maksimal dengan mengendalikan risiko dan memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini telah tertuang dalam Penilaian Risiko Pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

5.4 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian :

a. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas penetapan program, kegiatan

dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup:

- Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah OPD;
- Kesiapan penetapan kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup :

- Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek SKPD;
- Kesiapan penetapan kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup :

- pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah;
- pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;
- evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan dan mensinergikan terhadap regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal SKPD.

5.5 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJMD Kota Subulussalam dapat dimutakhirkan melalui RKPD Kota Subulussalam.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025- 2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Keberhasilan pembangunan Kota Subulussalam dalam mewujudkan visi Subulussalam Maju, Islami dan Berkelanjutan diwujudkan dengan misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan
2. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam
3. Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan
4. Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih
5. Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Dukungan komitmen dan kerjasama dari semua sektor serta kepemimpinan Kota Subulussalam yang kuat, demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah kota, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif akan membuat Kota Subulussalam Maju, Islami dan Berkelanjutan.

Subulussalam, 04 Desember 2025

WALI KOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID

LAMPIRAN 1

SANDINGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, ASTACITA, 17 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
SUBULUSSALAM ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN						
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Kesehatan						
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Tinggi				
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			BIDANG PERPUSTAKAAN			harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas				
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0335 - Puskesmas Simpang Kiri	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0337 - Puskesmas Runding	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0338 - Puskesmas Sultan Daulat	Memperkuat pembangunan sumber daya

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			BIDANG KESEHATAN	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0339 - Puskesmas Longkib	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2527 - Puskesmas Jontor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2528 - Puskesmas Bakal Buah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2698 - Puskesmas Batu - Batu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				DAYA MANUSIA KESEHATAN		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam						
	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Menguatnya Budaya dan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat Islam				
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Meningkatkan keamanan dan	Meningkatnya kenyamanan				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	kenyamanan masyarakat	masyarakat (Trantibunlinmas dan Polhukam)				
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
Mewujudkan Terciptanya Ekonomi Kerakyatan						
	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah yang signifikan				
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.3.25.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.3.25.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Sumber Daya Lokal				
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.31.3.30.2.17.12.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.3.30.2.17.12.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Mewujudkan Iklim Investasi yang ramah Investor				
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.3.30.2.17.12.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						nilai tambah di dalam negeri.
	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Intervensi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Memperluas Variasi Lapangan Pekerjaan				
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0335 - Puskesmas Simpang Kiri	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0337 - Puskesmas Runding	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0338 - Puskesmas Sultan Daulat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0339 - Puskesmas Longkib	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2527 - Puskesmas Jontor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2528 - Puskesmas Bakal Buah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.2698 - Puskesmas Batu - Batu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						penyanggah disabilitas.
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.31.3.30.2.17.12.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih						
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang reformatif	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan PRIMA				
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			MASYARAKAT DAN DESA			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Mewujudkan Terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Merata						
	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur Pelayanan Dasar secara Merata Berbasis Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana serta Berkelanjutan	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas				
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			UMUM DAN PENATAAN RUANG			untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur	Terwujudnya Pemeliharaan Lingkungan Hidup				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Pelayanan Dasar secara Merata Berbasis Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana serta Berkelanjutan	dan ketahanan daerah terhadap bencana				
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.1.04.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.3.25.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian,	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			BIDANG PERTANIAN	PRASARANA PERTANIAN	Perkebunan dan Perikanan	dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

LAMPIRAN 2

SANDINGAN KEGIATAN PRIORITAS UTAMA DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	RPJMN TAHUN 2025 - 2029	RPJMD TAHUN 2025 - 2029
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
(01)	(02)	(03)
1.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
4.	Konservasi Sumber Daya Air	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
5.	Konservasi Sumber Daya Air	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
6.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
7.	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
8.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
9.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
10.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
11.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
12.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
13.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
14.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
15.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
16.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
17.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
18.		

NO	RPJMN TAHUN 2025 - 2029	RPJMD TAHUN 2025 - 2029
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
(01)	(02)	(03)
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
19.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
20.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
21.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
22.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
23.	Pengembangan Pangan Hewani	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
24.	Pengembangan Pangan Hewani	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
25.	Pengembangan Pangan Hewani	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
26.	Pengembangan Pangan Hewani	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
27.	Pengembangan Pangan Hewani	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
28.	Pengembangan Pangan Hewani	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
29.	Pengembangan Pangan Hewani	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
30.	Pengembangan Pangan Hewani	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
31.	Pengembangan Pangan Hewani	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
32.	Pengembangan Pangan Hewani	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
33.	Pengembangan Pangan Hewani	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
34.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
35.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
36.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
37.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
38.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

NO	RPJMN TAHUN 2025 - 2029	RPJMD TAHUN 2025 - 2029
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
(01)	(02)	(03)
39.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
40.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
41.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
42.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
43.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
44.	Penuntasan TBC	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 3

**SANDINGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025-2045 DENGAN RPJMD KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029**

NO	Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah RPJP			Target Daerah RPJMD 2025-2029		
			Baseline 2023	2025	2030	Baseline 2024	2025	2030
1	2		3	4	5	6	7	8
1	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	69,58	69,92	70,52	69,8	70,01	71,00
	2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	117	0,00	0,00	254	0,00	0,00
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,60	25,00	18,00	27,5	27,00	17,00
	3	Penanganan Tuberkulosis:						
		a)Angka Kesembuhan Tuberkulosis (Persen)	26	35,00	45,00	90,00	90,00	90,00
		b)Tingkat Prevalensi Kasus Tuberkulosis (Persen)	3,15	3,00	2,50			
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Hasil Pembelajaran:						
		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SD:						
		i) Literasi Membaca	37,28	48,82	61,32	46,32	48,82	61,32
		ii) Numerasi	27,89	48,28	62,78	45,38	48,28	62,78
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SMP:						
		i) Literasi Membaca	39,15	62,34	67,84	61,24	62,34	67,84
		ii) Numerasi	25,24	57,58	65,08	56,08	57,58	65,08
		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,32	8,56	9,21	8,43	8,75	9,35
		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,06	15,46	16,21	15,31	15,32	16,07
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	4,95	10,00	15,00			
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,19	62,00	68,00			
2	6	Tingkat Kemiskinan (%)	16,41	16,08	14,58	16,38	13,88	12,50
	7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	23,82	34,22	44,62	40,51	41,00	43,50
	8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,04	0,23	0,42			
3	9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,54	19,38	19,47	19,37	19,38	19,47
	10	Pengembangan Pariwisata						
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,95	0,93	1,02	0,92	0,93	1,02
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	4	500,00	2500,00			

NO	Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah RPJP			Target Daerah RPJMD 2025-2029		
			Baseline 2023	2025	2030	Baseline 2024	2025	2030
1	2		3	4	5	6	7	8
	11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama						
	12	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,84	13,12	14,40			
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah(%)	1,67	2,14	2,61			
		c) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah(%)	1,67	2,14	2,61			
		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	4,02	4,71			
		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	2,48	3,74			
		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,50	3,08			
	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,69	4,70	2,58	5,12	4,87	2,75
	14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,02	69,10	71,60	36,72	36,90	37,90
	15	Tingkat Penguasaan IPTEK:						
		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	0,03	0,22	0,41			
		b) Peringkat Inovasi Daerah	67	65	63			
4	16	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		0,00				
5	17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	6,02	6,34			
6	18	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	5,80	5,43			
	19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	48,41	47,77	48,02	47,7	47,77	48,02
	20	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)						
7	21	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
		a) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) (Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama						
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	69,30	71,00	79,00	70,03	71,00	79,00
		c1) Persentase Desa Mandiri	19,51	25,61	37,80	28,05	29,27	42,68
		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,72	0,76	0,89	0,74	0,76	0,89
8	22	Indeks Reformasi Hukum	58,20	77,59	78,84	77,34	77,59	78,84
	23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,11	2,60	3,25	2,48	2,60	3,25
	24	Indeks Pelayanan Publik	3,52 (B)	3,72	4,02	3,82	3,85	4,10
	25	Indeks Anti Korupsi						
		a) Indeks Integritas Nasional	60,94	73,00	76,00	65,56	73,00	76,00
		b) Indeks Persepsi Korupsi						

NO	Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah RPJP			Target Daerah RPJMD 2025-2029		
			Baseline 2023	2025	2030	Baseline 2024	2025	2030
1	2		3	4	5	6	7	8
9	26	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34,78	47,82	60,86			
		Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17 (2020)	64,65	68,13			
	27							
	28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,2542	0,26	0,28	0,254	0,259	0,284
	29	Tingkat Inflasi (%)	1,42	3,00	3,00	3,29	3,00	3,00
	30	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
		a) Aset Perbankan/PDB (5)	18,9	26,96	35,02			
		b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	0,43	0,52	0,61			
		c) Aset Asuransi/PDB (%)	1.251,30 b)	2373,00	3495,00			
10		d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	25,66	33,22			
	31	Inklusi Keuangan (%)	3.30	3.36	3.49			
	32	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	84,00	89,00	83,90	84,00	89,00
	33	Persentase dayah yang mandiri (Persen)	3,00 - 5,00	22,22	30,00	16,67	16,67	100,00
	34	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	74,91	76,12			
11	35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,583	0,495	0,345	0,525	0,495	0,345
12	36	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,59	0,60	0,61			
		37	Kualitas Lingkungan Hidup					
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,54	74,50	75,75	74,28	74,50	75,75
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	72,46	62,00	73,00	61,57	62,00	73,00
		c) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	-	0,00	10,00	12,866	15,00	20,00
		d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	17,07	18,29	24,39	17,07	18,29	24,39
13	38	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
		a) Ketahanan Energi						
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	144,00	145,00	155,00	144,00	145,00	155,00
		c) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	0,00	0,00	0,00	8,02	8,00	6,75
		c) Ketahanan Air						
		-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,0112	0,0100	0,0200			
		-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,52	18,52	43,80	57,25	58,00	67,00
14	39	Indeks Risiko Bencana (IRB)	92,88	87,37	84,87	87,87	87,73	84,87
	40	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
		a. Kumulatif	18,54	23,27	28,00			
		b. Tahunan	29,56	38,72	47,88			

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029

DESK Penyusunan Ranwal RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
21, 24, 24 Maret 2025



Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
9 April 2025



FGD RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
19-23 Mei 2025



DESK Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
24-26 Juni 2025



MUSRENBANG RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
15 Juli 2025



Evaluasi Rancangan Qanun RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
14 Oktober 2025



DESK Penyempurnaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
21 Oktober 2025



DESK Penyempurnaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2025-2029
30 Oktober 2025





